Pemerintah Daerah
Kabupaten Gunungkidul

# RENCANA STRATEGIS

## PERANGKAT DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2025 – 2029

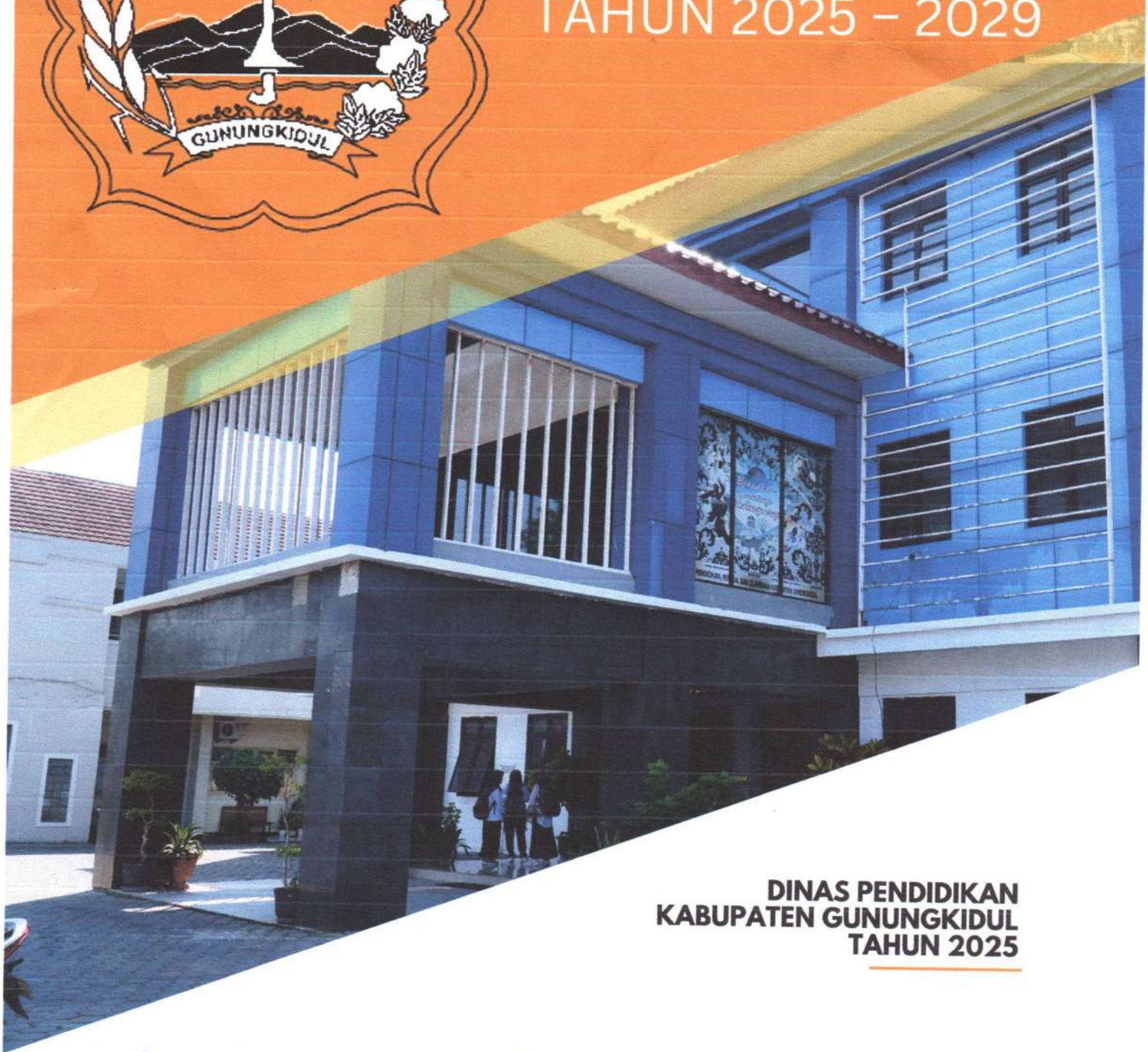

**DINAS PENDIDIKAN**
**KABUPATEN GUNUNGKIDUL**
**TAHUN 2025**

pendidikan.gunungkidulkab.go.id  pendidikan@gunungkidulkab.go.id  0274-391191

# RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
# KABUPATEN GUNUNGKIDUL
# TAHUN 2025 – 2029

## DINAS PENDIDIKAN
## KABUPATEN GUNUNGKIDUL
## TAHUN 2025

BUPATI GUNUNGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 34 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin kesinambungan pembangunan daerah guna meningkatkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, baik aspek pembangunan, pemerintahan, pelayanan publik, untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, diperlukan perencanaan pembangunan yang berkeadilan dan demokratis yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan;

b. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pembangunan daerah yang efektif, efisien, dan tepat sasaran, perlu disusun rencana strategis perangkat daerah;

c. bahwa untuk memberikan pedoman dalam perencanaan strategis perangkat daerah ditetapkan Peraturan Bupati setelah rencana pembangunan jangka menengah daerah ditetapkan sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Gunungkidul tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 309, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7060);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

## BAB I
## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
2. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
10. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.

Pasal 2

(1) Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dengan berpedoman pada RPJMD.
(2) Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.
(3) Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional.

Pasal 3

Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang telah ditetapkan menjadi pedoman kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

BAB II
SISTEMATIKA

Pasal 4

(1) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika:
BAB I PENDAHULUAN
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB V PENUTUP
(2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

(1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah.
(2) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan perencanaan.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022 Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 Nomor 21) tetap digunakan sebagai Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah tahun 2025.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka:
a. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 56 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 56);
b. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 40) sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 Nomor 21),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 12 September 2025
BUPATI GUNUNGKIDUL,

ENDAH SUBEKTI KUNTARININGSIH

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 12 September 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

SRI SUHARTANTA

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2025 NOMOR 35.

LAMPIRAN XIII
PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 94 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

**RENCANA STRATEGIS**
**DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL**
**TAHUN 2025 – 2029**

# BAB I
# PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Pendidikan merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan bagi seseorang dikemudian hari, baik untuk dirinya sendiri, masyarakat, maupun bangsa. Pendidikan bagi kehidupan umat manusia merupakan kebutuhan yang mutlak yang harus dipenuhi sepanjang hayat. Pendidikan sangat diperlukan bagi manusia agar hidup berkembang sejalan dengan aspirasi (cita-cita) untuk maju, sejahtera dan bahagia menurut konsep pandangan hidup mereka. Secara khusus fungsi dan tujuan pendidikan dirumuskan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003 pasal 1 dan 3. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Kihajar Dewantara menekankan pentingnya pendidikan yang berpusat pada anak, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, dan membangun karakter yang kuat. Filosofi ini akan menjadi pondasi dalam merumuskan dan menjalankan strategi pendidikan di Kabupaten Gunungkidul.

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah,

Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul, Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026, maka setiap Dinas/Instansi diwajibkan menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD).

Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029 merupakan dokumen penting untuk memandu arah pembangunan pendidikan di wilayah Kabupaten Gunungkidul. Dokumen ini didasari pada visi dan misi Kabupaten Gunungkidul, serta kebutuhan dan tantangan dunia pendidikan di era globalisasi dan revolusi industri 4.0. Rencana ini juga mempertimbangkan kondisi internal dan eksternal Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kesejahteraan masyarakat.

Peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Gunungkidul menjadi prioritas utama, dengan fokus pada aspek mutu, aksesibilitas, dan relevansi. Rencana Strategis ini bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas, memiliki karakter yang kuat. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan upaya yang komprehensif dan terintegrasi, melibatkan berbagai pihak, baik dari internal Dinas Pendidikan maupun dari stakeholders eksternal.

Tahun 2025 merupakan tahun pertama dalam periode Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 sekaligus menjadi tahun awal periode Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029. Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun ke depan, sebagai penjabaran dari RPJMD Pemerintah Kabupaten Gunungkidul kedalam strategi, kebijakan umum, program prioritas dan arah kebijakan keuangan Dinas Pendidikan.

Sebagai dokumen perencanaan lima tahunan, Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul adalah bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gunungkidul tahun 2025-2029 sebagaimana telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 tahun 2025, yang berkedudukan sebagai dokumen perencanaan induk, dengan periode waktu 5 (lima) tahunan.

Untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Tahun 2025 - 2029 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan periode 5 (lima) tahun, Dinas Pendidikan harus menyelenggarakan forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Jangka Menengah secara partisipatif, dengan melibatkan seluruh unsur pemangku kepentingan pendidikan (stakeholders).

Hal tersebut dalam rangka upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan sumberdaya manusia, melalui jalur sekolah maupun luar sekolah. Berbagai upaya perencanaan pembangunan Sub Sektor Pendidikan dilaksanakan dengan harapan dapat mewujudkan masyarakat yang berpendidikan, sumber daya manusia (SDM) yang

berkualitas, sehingga mampu berkompetisi dalam tatanan kehidupan bangsa yang maju.

Mengingat demikian pentingnya pembangunan Sektor Pendidikan, maka Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul harus menyusun Rencana Strategis yang bersumber pada RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 – 2029 ini secara komprehensif. Untuk itu perlu adanya singkronisasi dan harmonisasai antara Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul ini dengan Renstra Pemerintah DIY dan Renstra Kementerian Pendidikan. Adapun langkah singkronisasi dan harmonisasai dimaksud, secara lebih detil akan ditelaah dan dibahas dalam bab II pada bagian Telaah Renstra K/L dan Renstra Propinsi.

Rencana Strategis Pembangunan Sektor Pendidikan merupakan suatu proses mulai dari input, proses, dan hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun mendatang, dengan memperhitungkan potensi kekuatan dan kelemahan, peluang dan ancaman yang ada.

## 1.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum yang menjadi landasan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 472):
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
5. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
7. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di D.I.Yogyakarta;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
11. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2022 tentang Standar nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
21. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem Pendidikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah;

22. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
23. Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 195 Tahun 2023 tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan Indeks Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
24. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
25. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2027;
26. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023-2043;
27. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2024 tentang RPJP DIY Tahun 2025-2045;
28. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan;
29. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 13);
30. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan;
31. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Kalurahan;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2030;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 Nomor 6);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan lembaran daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 Nomor 116);

38. Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2025 tentang Pedoman penyempurnaan rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
39. Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor 26 Tahun 2025 tentang Pedoman Desk Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan Pra RKA Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026.

## 1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Pendidikan adalah untuk menjabarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Program Bupati/Wakil Bupati yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Gunungkidul tahun 2025-2029.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Pendidikan sesuai Misi ke-1 Mewujudkan sumber daya manusia yang unggul dan sejahtera (Transformasi sosial). Untuk mendukung misi tersebut Dinas Pendidikan mentargetkan sasaran dan indikator kinerja perangkat daerah pada program pendidikan berikut:

1. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Pendidikan sesuai kewenangan;
2. Memberikan kesempatan Pendidikan bagi semua Penduduk usia sekolah.
3. Memperkuat dasar pendidikan di Kabupaten Gunungkidul. Melalui strategi yang tepat, diharapkan dapat membangun fondasi pendidikan yang kokoh untuk masa depan.
4. Peningkatan kualitas pendidikan di semua tingkatan. Tujuannya adalah untuk menghasilkan lulusan yang kompeten, berakhlak mulia, dan siap menghadapi tantangan zaman.
5. Menciptakan ekosistem pendidikan yang kondusif, inklusif, dan berkelanjutan. Ekosistem ini akan mendorong proses belajar mengajar yang efektif dan bermakna.

## 1.4. Sistematika Penulisan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Renstra Dinas Pendidikan merupakan penjabaran Visi, Misi dan Program Pendidikan kedalam strategi Pembangunan Pendidikan,Kebijakan Umum, Program Prioritas Pendidikan dan Arah Kebijakan Keuangan dengan mengacu pada RPJM Daerah yang mekanisme penyusunannya melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah dengan melibatkan semua pemangku kepentingan (stakeholders).

Secara rinci Renstra Dinas Pendidikan disusun dengan proses dan mekanisme sebagai berikut :

1. Renstra disusun dengan melibatkan semua unsur terkait di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul (Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kabid dan Kasi Paud, Kabid dan Kasi SD, Kabid dan Kasi SMP, Kabid dan Kasi Pembinaan Ketenagaan, Staf, Kepala TK, Kepala SKB, Kepala SD, Kepala SMP, dan Dewan Pendidikan) dalam bentuk rapat koordinasi.
2. Workshop dimulai dengan pembekalan wawasan dan wacana tentang sistem nilai dan budaya masyarakat, arah kebijakan pemerintah daerah, dan aspirasi masyarakat.
3. Dikombinasikan dengan pembentukan tim *(team building)* untuk menciptakan kebersamaan diantara unsur yang terlibat sebagai prasyarat bagi terciptanya kerjasama yang sinergis.

4. Pemberian input teknis yang berkaitan dengan penyusunan Renstra, wawasan mutu dan kewirausahaan, strategi perencanaan dan program diklat, dan analisis kebutuhan.
5. Penyusunan Renstra dilakukan dengan melibatkan partisipasi aktif seluruh peserta rapat koordinasi melalui kerja kelompok dan presentasi hasil kerja kelompok untuk mendapatkan kesepakatan.
6. Sistematika penulisannya adalah:

BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PENDIDIKAN
2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
2.1.1. Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja
2.1.2. Sumber Daya
2.1.3. Kinerja Pelayanan
2.1.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan
2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
2.2.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
2.2.2. Penentuan Isu-isu Strategis
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025 – 2029
3.2. Strategi Dinas Pendidikan dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pendidikan Tahun 2025-2029
3.3. Arah kebijakan Dinas Pendidikan dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pendidikan Tahun 2025-2029
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG PENDIDIKAN
4.1 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
4.2 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah
BAB V PENUTUP

# BAB II
# GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PENDIDIKAN

## 2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

### 2.1.1. Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 43 tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah, maka Kedudukan Dinas Pendidikan adalah sebagai berikut :

1. Dinas berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
2. Dinas Pendidikan dipimpin oleh Kepala Dinas Pendidikan.

Dinas Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang pendidikan.

Untuk menyelenggarakan tugas, Dinas Pendidikan mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan umum di bidang Pendidikan;
b. perumusan kebijakan teknis di bidang Pendidikan;
c. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang pendidikan;
d. pengelolaan prasarana dan sarana pendidikan;
e. pembinaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;
f. pembinaan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini,pendidikan dasar, pendidikan nonformal;
g. penyusunan dan pengembangan kurikulum;
h. pembinaan administrasi sekolah;
i. peningkatan manajemen mutu pendidikan;
j. pengoordinasian reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan Dinas;
k. penyelenggaraan sistem pengendalian intern di bidang Pendidikan;
l. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang Pendidikan;
m. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang pendidikan; dan
n. Pengelolaan UPT.

Untuk melaksanakan tugas Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul dibantu oleh pejabat eselon III dan Eselon IV, dengan susunan organisasi sebagai berikut :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, terdiri dari :
   a. Subbagian Perencanaan;
   b. Subbagian Keuangan;
   c. Subbagian Umum;
3. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal, terdiri dari:
   a. Seksi Kurikulum dan Penilaian Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;

b. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
c. Kelompok Substansi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;

4. Bidang Sekolah Dasar, terdiri dari:
   a. Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Dasar;
   b. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Dasar;
   c. Kelompok Substansi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar;
5. Bidang Sekolah Menengah Pertama, terdiri dari:
   a. Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Menengah Pertama;
   b. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama;
   c. Kelompok Substansi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Menengah Pertama;
6. Bidang Pembinaan Ketenagaan, terdiri dari:
   a. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar;
   b. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama;
   c. Kelompok Substansi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
7. Unit Pelaksana Teknis;
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dari Struktur organisasi tersebut diatas sesuai dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 43 tahun 2023 telah diuraikan tugas Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul.

Adapun uraian tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Sekretariat

   Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kegiatan, perencanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan, pengelolaan keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, perpustakaan, administrasi umum, dan hubungan masyarakat serta memberikan pelayanan administratif dan fungsional. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas.

   Sedangkan fungsi dari Sekretariat adalah :

   a. penyusunan rencana kegiatan Sekretariat;
   b. pengkoordinasian perumusan kebijakan umum dan kebijakan teknis di bidang Pendidikan;
   c. pengkoordinasian penyusunan rencana umum, Rencana Strategis, rencana kerja, rencana kinerja, rencana kegiatan, dan anggaran dinas;
   d. pengkoordinasian pelaksanaan tugas Unit Organisasi di lingkungan dinas;
   e. penyusunan rencana kerja sama;
   f. penyusunan perjanjian kinerja dinas;
   g. penyusunan petunjuk pelaksanaan program dan kegiatan;
   h. pelaksanaan analisis dan penyajian data di bidang Pendidikan;
   i. penerapan dan pengembangan sistem informasi di bidang Pendidikan;
   j. pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kinerja serta dampak pelaksanaan program dan kegiatan;
   k. penyusunan laporan kinerja dinas;

l. pengkoordinasian reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan Dinas
m. pengkoordinasian pelaksanaan pengendalian intern dinas;
n. penyusunan laporan kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan dinas;
o. penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan tahunan dinas;
p. penyiapan bahan dan penatausahaan bidang Pendidikan;
q. pengelolaan keuangan, kepegawaian, surat-menyurat, kearsipan, administrasi umum, perpustakaan, kerumahtanggaan, sarana dan prasarana serta hubungan masyarakat;
r. pelayanan administratif dan fungsional;
s. pengkoordinasian reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan Sekretariat;
t. penyelenggaraan sistem pengendalian intern Sekretariat;
u. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang kesekretariatan; dan
v. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sekretariat.

Sekretariat terdiri dari: 1) Subbagian Perencanaan, 2) Subbagian Keuangan, dan 3) Subbagian Umum.
Subbagian-subbagian tersebut dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Subbagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, pelaksanaan, pemantauan , evaluasi dan pelaporan. Dan mempunyai fungsi yaitu:
a. penyusunan rencana kegiatan Subbagian Perencanaan;
b. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja bidang perencanaan;
c. penyusunan rancangan kebijakan umum dinas;
d. pelaksanaan analisis dan penyajian data;
e. pengelolaan sistem informasi, pelayanan data, dan informasi pembangunan di bidang Pendidikan;
f. penyusunan rencana umum, rencana strategis, rencana kerja dan kinerja tahunan, rencana kegiatan, dan anggaran dinas;
g. penyusunan petunjuk pelaksanaan program dan kegiatan dinas;
h. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dampak pelaksanaan program dan kegiatan dinas;
i. penyiapan bahan pengendalian kegiatan dinas;
j. penyusunan laporan kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan dinas;
k. penyusunan laporan kinerja dinas;
l. pelaksanaan fasilitasi akreditasi dan kegiatan kesiswaan pendidikan menengah dan pendidikan khusus;
m. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan subbagian perencanaan;
n. penyelenggaraan sistem pengendalian intern Subbagian Perencanaan;
o. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang perencanaan; dan

p. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Subbagian Perencanaan.

Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pengadministrasian keuangan. Dan mempunyai fungsi yaitu:

a. penyusunan rencana kegiatan Subbagian Keuangan;
b. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja Subbagian Keuangan;
c. pengelolaan administrasi keuangan, verifikasi, dan perbendaharaan dinas;
d. penyusunan laporan keuangan;
e. pengelolaan administrasi pendapatan;
f. penyiapan bahan perhitungan anggaran dinas;
g. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan subbagian keuangan;
h. penyelenggaraan sistem pengendalian intern Subbagian Keuangan;
i. penyusunan dan menerapkan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang administrasi keuangan;
j. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Subbagian Keuangan.

Subbagian Umum mempunyai tugas melaksanakan mengelola kepegawaian, kerumahtanggaan, kepustakaan, kearsipan, kehumasan, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan serta pengelolaan barang milik daerah. Dan mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana kegiatan Subbagian Umum;
b. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja Subbagian Umum;
c. pelaksanaan koordinasi dan pengelolaan peraturan perundang-undangan;
d. pengelolaan surat-menyurat dan kearsipan;
e. pelaksanaan pengendalian internal dinas;
f. penyusunan rincian tugas dinas;
g. pengelolaan urusan rumah tangga;
h. pengelolaan barang milik daerah;
i. pengelolaan perpustakaan dinas;
j. pelaksanaan hubungan masyarakat;
k. penyusunan rencana kerja sama;
l. pelaksanaan koordinasi, monitoring, dan evaluasi pelayanan publik dinas;
m. pelaksanaan urusan ketatalaksanaan;
n. pengelolaan perjalanan dinas;
o. pelaksanaan analisis rencana kebutuhan, kualifikasi, dan kompetensi pegawai;
p. pelaksanaan pelayanan administrasi kepegawaian;
q. pelaksanaan fasilitasi usulan kenaikan pangkat dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan serta pendataan pendidikan menengah dan pendidikan khusus;
r. pelaksanaan pengembangan pegawai;
s. penyelenggaraan analisis jabatan dan analisis beban kerja;
t. penyiapan bahan pembinaan dan kesejahteraan pegawai;
u. pelaksanaan pengkajian kompetensi dan kualifikasi jabatan;

v. penyiapaan bahan evaluasi kinerja pegawai;
w. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan subbagian umum;
x. penyelenggaraan sistem pengendalian intern Subbagian Umum;
y. penyusunan dan penetapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang administrasi umum; dan
z. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Subbagian Umum.

2. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan NonFormal

Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal.

Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana kegiatan Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan NonFormal;
b. perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan dan pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan NonFormal;
c. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan NonFormal;
d. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan NonFormal;
e. pengoordinasian reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
f. penyelenggaraan sistem pengendalian intern di bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan NonFormal;
g. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal; dan
h. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal.

Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan NonFormal terdiri dari:

1. Seksi Kurikulum dan Penilaian Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan NonFormal,
2. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan NonFormal,
3. Kelompok Substansi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan NonFormal.

Seksi-seksi tersebut dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan NonFormal.

Seksi Kurikulum dan Penilaian Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan NonFormal mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan, dan pelaksanaan kebijakan teknis, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi

dibidang pembinaan dan pengembangan kurikulum dan penilaian pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal. Dan mempunyai fungsi yaitu:

a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Kurikulum dan Penilaian Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan NonFormal;
b. perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan dan pengembangan kurikulum dan penilaian Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan NonFormal;
c. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja Seksi Kurikulum dan Penilaian Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan NonFormal;
d. penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kurikulum, dan penilaian Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan NonFormal;
e. penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal dan penilaian pendidikan nonformal;
f. penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan NonFormal;
g. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kurikulum dan penilaian Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan NonFormal;
h. pelaporan dibidang kurikulum dan penilaian Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan NonFormal;
i. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
j. penyelenggaraan sistem pengendalian intern Seksi Kurikulum dan Penilaian Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan NonFormal;
k. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pembinaan dan pengembangan kurikulum dan penilaian Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan NonFormal;
l. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi Kurikulum dan Penilaian Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan NonFormal.

Seksi Kelembagaan dan Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan NonFormal mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan, dan pelaksanaan kebijakan teknis, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi dibidang penyusunan bahan pembinaan kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal. Dan mempunyai fungsi yaitu:

a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan NonFormal;
b. perumusan kebijakan teknis di bidang Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan NonFormal;
c. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan NonFormal;

d. penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan NonFormal;
e. penyusunan bahan pembinaan Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan NonFormal;
f. penyusunan perencanaan dan pelaksanaan pengadaan pendistribusian, pendayagunaan, pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan anak usaia dini dan pendidikan nonformal;
g. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan NonFormal;
h. penyusunan pelaporan dibidang Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan NonFormal;
i. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
j. penyelenggaraan sistem pengendalian intern Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan NonFormal.
k. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan NonFormal; dan
l. pelaksanaan momitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan NonFormal.

Kelompok Substansi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan NonFormal mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan, dan pelaksanaan kebijakan teknis standar, prosedur dan criteria serta pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan minat, bakat prestasi, dan pembangunan karakter peserta disik pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal. Dan mempunyai fungsi yaitu:
a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan NonFormal;
b. perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan dan pengembangan Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan NonFormal;
c. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan NonFormal;
d. penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan Pembangunan Karakter peserta didik Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan NonFormal;
e. penyusunan bahan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan NonFormal;
f. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter

peserta didik Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan NonFormal;

g. penyusunan pelaporan dibidang pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan NonFormal;
h. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
i. penyelenggaraan sistem pengendalian intern Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan NonFormal.
j. penyusunan dan menerapkan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pengembangan Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan NonFormal; dan
k. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan NonFormal.

3. Bidang Sekolah Dasar

Bidang Sekolah Dasar mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan pendidikan sekolah dasar.
Bidang Sekolah Dasar dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
Sedangkan fungsi dari Bidang Sekolah Dasar adalah :

a. penyusunan rencana kegiatan Bidang Sekolah Dasar;
b. perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan dan pengembangan pendidikan sekolah dasar;
c. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang Pendidikan Sekolah Dasar;
d. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan pendidikan sekolah dasar;
e. pengoordinasian reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan Bidang Pendidikan Sekolah Dasar;
f. penyelenggaraan sistem pengendalian intern di bidang pendidikan sekolah dasar;
g. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pendidikan sekolah dasar; dan
h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Bidang Sekolah Dasar.

Bidang Sekolah Dasar terdiri dari: 1)Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Dasar; 2) Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Dasar;3) Kelompok Substansi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar. Seksi-seksi tersebut dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Sekolah Dasar.

Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Dasar, mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan, dan pelaksanaan kebijakan teknis, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan penilaian pendidikan sekolah dasar. Dan mempunyai fungsi yaitu:

a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Dasar;
b. perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan dan pengembangan kurikulum dan penilaian pendidikan Sekolah Dasar;
c. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Dasar;
d. penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kurikulum, dan penilaian sekolah dasar;
e. penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal dan penilaian pendidikan sekolah dasar;
f. penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian pendidikan sekolah dasar;
g. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kurikulum dan Penilaian Pendidikan Sekolah Dasar;
h. pelaporan di bidang Kurikulum dan Penilaian Pendidikan Sekolah Dasar;
i. pelaksanan reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Dasar
j. penyelenggaraan sistem pengendalian intern Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Dasar;
k. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pembinaan dan pengembangan Kurikulum dan Penilaian Pendidikan Sekolah Dasar; dan
l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Dasar.

Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Dasar mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan, dan pelaksanaan kebijakan teknis, standar prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi di bidang kelembagaan dan sarana prasarana sekolah dasar. Dan mempunyai fungsi yaitu:
a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Dasar;
b. perumusan kebijakan teknis di bidangKelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Sekolah Dasar;
c. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Dasar;
d. penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Dasar;
e. penyusunan bahan pembinaan Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Dasar;
f. penyusunan perencanaan dan pelaksanaan pengadaan, pendistribusian, pendayagunaan, pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan sekolah dasar;
g. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Sekolah Dasar;
h. penyusunan pelaporan di bidang Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Sekolah Dasar;
i. pelaksanan reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Dasar
j. penyelenggaraan sistem pengendalian intern Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Dasar;

k. penyusunan dan menerapkan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Sekolah Dasar; dan
l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Dasar.

Kelompok Substansi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan, dan pelaksanaan kebijakan teknis, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik pendidikan sekolah dasar. Dan mempunyai funsi yaitu:

a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar;
b. perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan dan pengembangan Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Pendidikan Sekolah Dasar;
c. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar;
d. penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan di bidang minat, bakat, prestasi, dan Pembangunan Karakter peserta didik Pendidikan Sekolah Dasar;
e. penyusunan bahan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik Pendidikan Sekolah Dasar;
f. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik Pendidikan Sekolah Dasar;
g. penyusunan pelaporan dibidang pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik Pendidikan Sekolah Dasar;
h. pelaksanan reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan seksi peserta didik dan pembangunan karakter Sekolah Dasar
i. penyelenggaraan sistem pengendalian intern Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar.
j. penyusunan dan menerapkan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pembinaan dan pengembanganPeserta Didik dan Pembangunan Karakter Pendidikan Sekolah Dasar; dan
k. pelaksanaan momitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar.

4. Bidang Sekolah Menengah Pertama

Bidang Sekolah Menengah Pertama mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan pendidikan Sekolah Menengah Pertama, dan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Sekolah Menengah Pertama mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana kegiatan Bidang Sekolah Menengah Pertama;
b. perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
c. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama;

d. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan pendidikanSekolah Menengah Pertama;
e. pengoordinasian reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan seksi peserta didik dan pembangunan karakter Sekolah Menengah Pertama
f. penyelenggaraan system pengendalian intern di bidang pendidikanSekolah Menengah Pertama;
g. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pendidikan Sekolah Menengah Pertama; dan
h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Bidang Sekolah Menengah Pertama.

Bidang Sekolah Menengah Pertama terdiri dari: 1)Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Menengah Pertama; 2) Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama; 3) Kelompok Substansi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Menengah Pertama. Seksi-seksi tersebut dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Sekolah Menengah Pertama.

Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Menengah Pertama, mempunyai tugas:
a. menyusun rencana kegiatan Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Menengah Pertama;
b. merumuskan kebijakan teknis di bidang pembinaan dan pengembangan kurikulum dan penilaian pendidikanSekolah Menengah Pertama;
c. menyusun rencana kinerja dan perjanjian kinerja Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Menengah Pertama;
d. penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kurikulum, dan penilaian pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
e. penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal dan penilaian pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
f. penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
g. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kurikulum dan Penilaian Pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
h. pelaporan di bidang Kurikulum dan Penilaian Pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
i. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan seksi kurikulum dan penilaian Sekolah Menengah Pertama
j. menyelenggarakan sistem pengendalian intern Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Menengah Pertama;
k. menyusun dan menerapkan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pembinaan dan pengembangan Kurikulum dan Penilaian Pendidikan Sekolah Menengah Pertama; dan
l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Menengah Pertama.

Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan, dan pelaksanaan kebijakan teknis, stadar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi di bidang kelembagaan dan sarana prasarana sekolah menengah pertama. Dan mempunyai fungsi yaitu:

a. penyusun rencana kegiatan Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama;
b. perumusan kebijakan teknis di bidangKelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
c. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama;
d. penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama;
e. penyusunan bahan pembinaan Kelembagaan dan Sarana Prasarana pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
f. penyusunan bahan perencanaan dan pelaksanaan pengadaan pendistribusian, pendayagunaan, pemerliharaan sarana dan prasarana pendidikan sekolah menengah pertama;
g. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
h. penyusunan pelaporan di bidang Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
i. penyelenggaraan sistem pengendalian intern Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama;
j. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Sekolah Menengah Pertama; dan
k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama.

Kelompok Substansi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Menengah Pertama mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan, dan pelaksanaan kebijakan teknis, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi dibidang pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik pendidikan sekolah menengah pertama. Dan mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Menengah Pertama;
b. perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan dan pengembangan Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
c. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Menengah Pertama;
d. penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan di bidang minat, bakat, prestasi, dan Pembangunan Karakter peserta didik Pendidikan Sekolah Menengah Pertama;

e. penyusunan bahan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik Pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
f. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik Pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
g. penyusunan pelaporan dibidang pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik Pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
h. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan seksi kurikulum dan penilaian Sekolah Menengah Pertama
i. penyelenggaraan sistem pengendalian intern Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Menengah Pertama.
j. penyusunan dan menerapkan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pembinaan dan pengembanganPeserta Didik dan Pembangunan Karakter Pendidikan Sekolah Menengah Pertama; dan
k. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Menengah Pertama.

5. Bidang Pembinaan Ketenagaan

Bidang Pembinaan Ketenagaan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan pendidikan nonformal dan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Untuk menyelenggarakan tugas, Bidang Pembinaan Ketenagaan mempunyai fungsi;

a. penyusunan rencana kegiatan Bidang Pembinaan Ketenagaan;
b. perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal;
c. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal;
d. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan pendidikan pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal;
e. pengoordinasian reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan seksi kurikulum dan penilaian Sekolah Menengah Pertama
f. penyelenggaraan sistem pengendalian intern di bidang pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal;
g. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini,

sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal; dan

h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Bidang Pembinaan Ketenagaan.

Bidang Pembinaan Ketenagaanterdiri dari: 1) Kelompok Substansi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal; 2) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar; 3) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama. Seksi-seksi tersebut dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan.

Kelompok Substansi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal, mempunyai tugas:

a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
b. merumuskan kebijakan teknis di bidang pembinaan dan pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
c. menyusun rencana kinerja dan perjanjian kinerja Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
d. penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
e. penyusunan bahan rencana kebutuhan, rekomendasi pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
f. penyusunan bahan pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
g. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
h. pelaporan di bidang pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
i. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan seksi kurikulum dan penilaian Sekolah Menengah Pertama
j. menyelenggarakan sistem pengendalian intern Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
k. menyusun dan menerapkan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pembinaan dan pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal; dan
l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal.

Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar mempunyai tugas:

a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar;
b. merumuskan kebijakan teknis di bidang pembinaan dan pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar;
c. menyusun rencana kinerja dan perjanjian kinerja Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar;
d. penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar;
e. penyusunan bahan rencana kebutuhan, rekomendasi pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar;
f. penyusunan bahan pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar;
g. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar;
h. pelaporan di bidang pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar;
i. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan seksi kurikulum dan penilaian Sekolah Menengah Pertama
j. menyelenggarakan sistem pengendalian intern Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar;
k. menyusun dan menerapkan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pembinaan dan pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar; dan
l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar.

Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama mempunyai tugas:

a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama;
b. merumuskan kebijakan teknis di bidang pembinaan dan pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama;
c. menyusun rencana kinerja dan perjanjian kinerja Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama;
d. penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama;
e. penyusunan bahan rencana kebutuhan, rekomendasi pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama;
f. penyusunan bahan pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama;
g. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama;
h. pelaporan di bidang pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama;
i. menyelenggarakan sistem pengendalian intern Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama;

j. menyusun dan menerapkan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pembinaan dan pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama; dan
k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama.

6. Unit Pelaksana Teknis

Unit Pelaksana Teknis dibentuk untuk melaksanakan sebagaian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

7. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsinya Dinas Pendidikan, sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilan tertentu. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas. Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari uraian tugas Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul sesuai Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 43 tahun 2023 diatas dapat digambarkan seperti berikut :

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN**
**KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

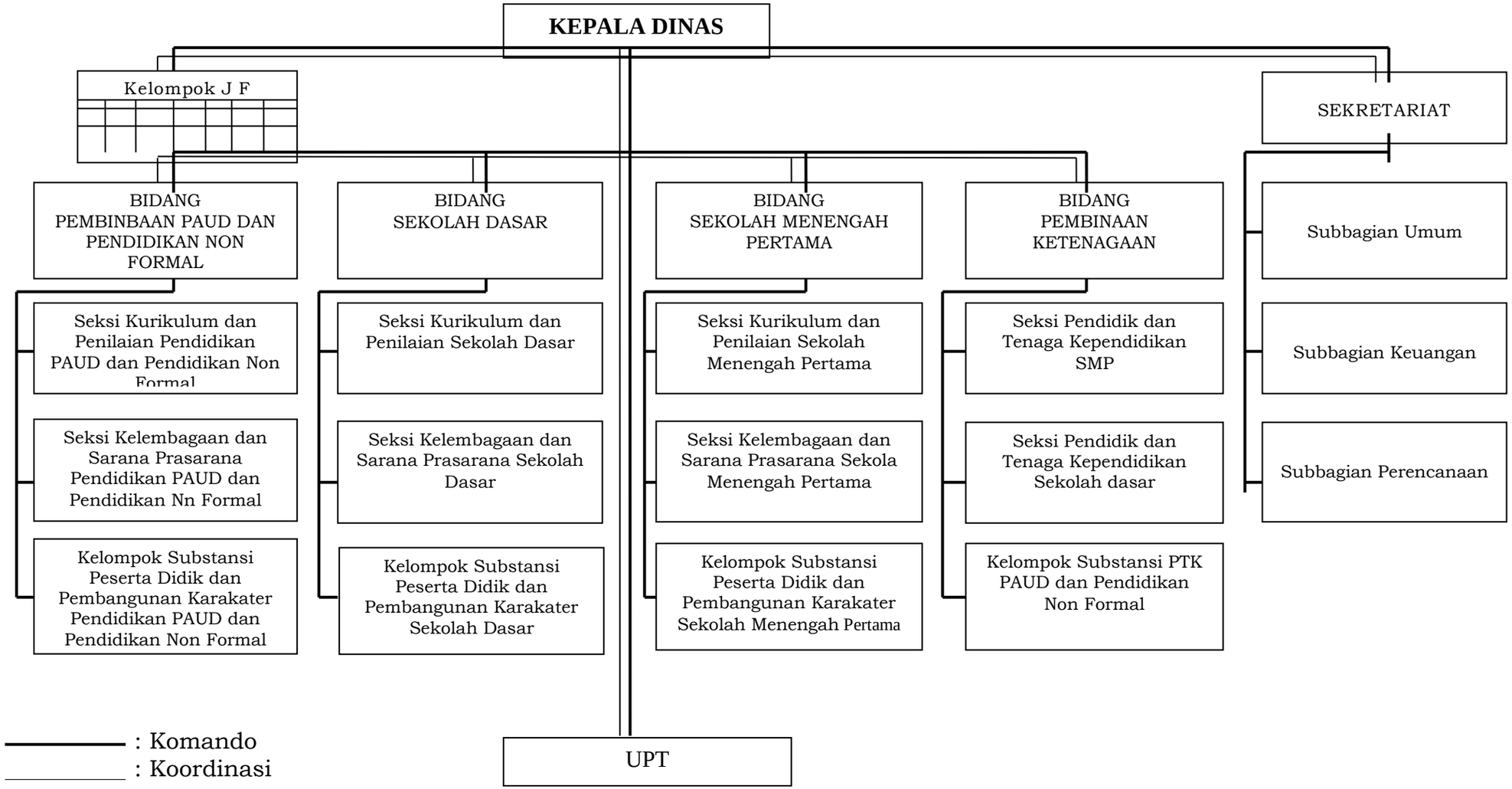

### 2.1.2. Sumber Daya

1. Jumlah Pegawai menurut kualifikasi jabatan, jenis kelamin dan kompetensi

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi tersebut, didukung sumberdaya manusia yang memadai dengan jumlah pegawai sebanyak 195 orang dan Guru 5.189 orang pada akhir Tahun 2024. Adapun jabatan di lingkungan Dinas Pendidikan sebanyak 24 jabatan, terdiri dari eselon II.b = 0 jabatan, eselon III.A = 1 jabatan, eselon III.B = 4 Jabatan, dan eselon IV.A = 18. Sedangkan jumlah Pegawai Negeri Sipil non eselon sebanyak 264 orang, Pejabat Fungsional 88 orang dan Guru 4.925.

**Gambar 2.1**

Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan

| NO | JABATAN | FORMASI | | | | | | | | PEGAWAI YANG ADA | | | | | | | | | | JENIS KELAMIN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Jml | Kualifikasi | | | | | | | Jml | Kualifikasi | | | | | | | | | Laki-Laki | Perempuan |
| | | | S2/S1 | S1/D4 | D3/S1 | D2 | SMA | SMP | SD | | S3 | S2 | S1 | D4 | D3 | D2 | SMA | SMP | SD | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | 5 | | 6 | | | | | | | | 7 | |
| A | Jabatan Pimpinan Tinggi | 1 | 1 | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | 1 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B | Jabatan Administrasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. Administrator | 5 | | 5 | | | | | | 4 | | 1 | 2 | 1 | | | | | | 2 | 2 |
| | 2. Pengawas | 13 | | 9 | 4 | | | | | 10 | | 3 | 6 | | 1 | | | | | 6 | 4 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3. Pelaksana | 233 | | 59 | 93 | | 80 | 1 | | 92 | | | 17 | | 1 | 6 | 54 | 12 | 2 | 81 | 11 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C. | Jabatan Fungsional | 181 | | 181 | | | | | | 88 | | 64 | 24 | | | | | | | 45 | 43 |
| D. | Guru | 7570 | | 7570 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. Guru PNS | | | | | | | | | 3611 | 1 | 396 | 3134 | | 9 | 43 | 28 | | | 1365 | 2246 |
| | 2. Guru PPPK | | | | | | | | | 1314 | | 21 | 1292 | | | | 1 | | | 387 | 927 |
| | 3. Guru Non ASN | | | | | | | | | 264 | | 3 | 222 | | 1 | 21 | 17 | | | 100 | 164 |
| | Jumlah | **8003** | **1** | **7824** | **97** | **0** | **80** | **1** | **0** | **5384** | **1** | **489** | **4697** | **1** | **12** | **70** | **100** | **12** | **2** | **1986** | **3398** |

Sumber : Data Kepegawaian Dinas Pendidikan bulan Desember 2024

Berdasarkan data pada tabel 2.1, tingkat pendidikan SDM Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul relatif tinggi dan didominasi oleh perempuan, dengan sebaran jenjang pendidikan S1 sebanyak 4.697 orang (87,24%), disusul oleh jenjang pendidikan S2 sebanyak 489 orang (9,08%), SLTA 100 orang (1,85%), D2 70 orang (1,3%), D3 dan SMP masing-masing 12 orang (0,22%), SD sebanyak 2 orang (0,03%) terakhir S3 dan D4 masing-masing 1 orang (0,01%).

Berdasarkan jenis kelamin, jumlah pegawai laki-laki 1.986 orang lebih sedikit dibanding perempuan, dari jumlah 3.398 pegawai perempuan. Keberadaan pegawai dengan jenis kelamin perempuan, bahkan 7 orang diantaranya menduduki jabatan structural dan salah satunya menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi, menunjukkan penerapan sistem merit dan kesetaraan gender dalam manajemen SDM aparatur.

Masih terdapat kekurangan pegawai sebanyak 2.619 orang, terdiri dari 1 orang pejabat administrator, 3 orang pejabat pengawas, 141 orang pejabat pelaksana administratif, 2.381 orang guru, 93 orang pengawas dan penilik. Hal ini tentu berpengaruh pada optimalisasi tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul sebagai perangkat daerah pengendali bidang pendidikan. Disamping itu juga akan berdampak kurang optimalnya pelayanan pendidikan bagi sekolah yang terdapat kekurangan tenaga pendidik.

Sedangkan komposisi pegawai Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga berdasarkan Golongan Ruang adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.2**
**Komposisi Pegawai**

| No. | Golongan/Ruang | Bezetting 31 - 12 – 2024 |
|---|---|---|
| 1 | I/a – I/d | 31 |
| 2 | II/a – II/d | 491 |
| 3 | III/a – III/d | 2.392 |
| 4 | IV/a – IV/e | 2.200 |
| | **Jumlah** | **5.114** |

Sumber : Subbagian Umum dan Bidang Tendik Dinas Pendidikan Tahun 2024

**Gambar 2.3**

**Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pangkat dan Golongan**

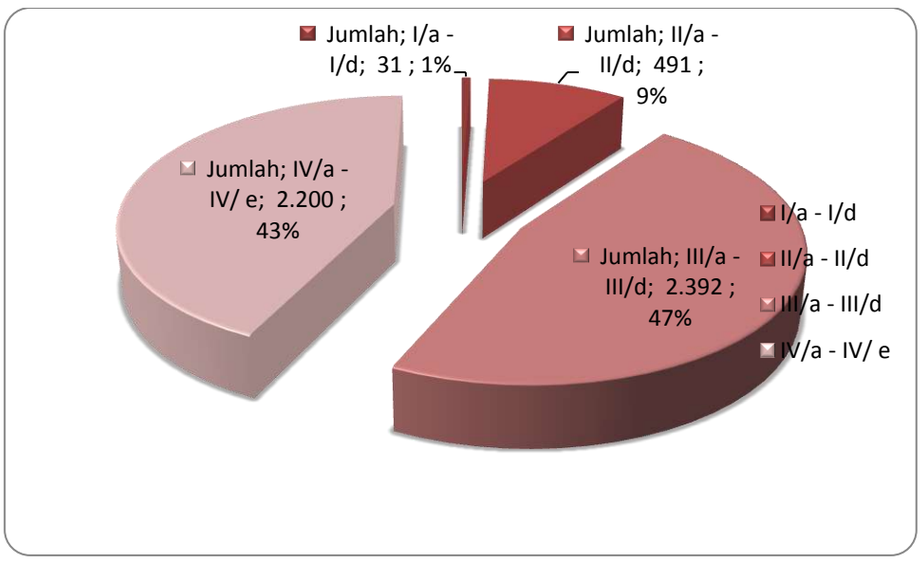


Sumber : Subbagian Umum dan Bidang Tendik Dinas Pendidikan Tahun 2024

2. Data Pegawai yang telah mengikuti Diklat Perjenjangan

Data Personil Dinas Pendidikan yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Penjenjangan (DIKLATPIM) sebagaimana tabel 2.4.

Tabel 2.4.
Data Personil yang telah mengikuti Diklat Perjenjangan

| No | Diklat | Jumlah | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 3.1 | Diklatpim II | 0 | |
| 3.2 | Diklatpim III | 0 | |
| 3.3 | Diklatpim IV | 2 | |

3. Aset

Dalam mendukung tugas dan fungsi Dinas Pendidikan,Pemuda, dan Olahraga memiliki aset berupa tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya lebih lengkapnya sebagaimana tersebut dalam tabel 2.5.

Tabel 2.5.
Daftar dan Nilai Aset Dinas Pendidikan

| No | Klasifikasi | Jumlah Barang | Nilai Aset (Rp)* |
|---|---|---|---|
| I | Aset Tetap | | |
| 1 | Tanah | 64 lokasi | 15.184.288.974,00 |
| 2 | Peralatan dan Mesin | 198.363 unit | 307.910.952.988,93 |
| 3 | Gedung dan Bangunan | 3.746 unit | 534.068.965.008,29 |
| 4 | Jalan, jaringan dan irigasi | 2.250 unit | 30.643.655.313,57 |
| II | Aset tetap lainnya | 215.992 unit | 196.708.636.675,63 |
| ***Jumlah*** | | | 1.084.516.498.960,40 |

Dari tabel 2.5. dapat dijelaskan bahwa aset beserta nilai dalam mendukung tugas dan fungsi Dinas Pendidikan memiliki aset senilai Rp. 1.04.516.498.960,40 meliputi Aset tanah senilai Rp. 15.184.288.974,00 aset Peralatan dan Mesin senilai Rp. 307.910.952.988,93, aset gedung dan bangunan senilai Rp. 534.068.965.008,29, aset jalan, jaringan dan irigasi Rp. 30.643.655.313,57, Aset tetap lainnya senilai Rp. 196.708.626.675,63. Aset tersebut tersebar di Dinas Pendidikan, Korwil se Kabupaten dan di setiap satuan pendidikan.

Sekolah Negeri dibawah kewenangan Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul belum semuanya dibangun di atas tanah milik Pemda. Banyak yang menggunakan tanah kas desa. Kendaraan dinas terdiri dari kendaraan roda 4 sebanyak 5 (lima) unit dengan kondisi bisa digunakan (3) unit dan (2) kondisi rusak. kendaraan roda dua ada 93 unit dengan kondisi baik. Kebutuhan ruangan kantor secara umum sudah tersedia meliputi ruang kerja, ruang rapat, ruang pengelola keuangan, ruang arsip, gudang, ruang tunggu (unit layanan terpadu), ruang laktasi, dan toilet. Ruang kelas pada sekolah negeri semua jenjang di bawah kewenangan Dinas Pendidikan perlu mendapatkan perhatian. Terdapat 270 sekolah dengan kondisi ruang kelas baik, 227 sekolah dengan kondisi rusak ringan, 260 sekolah dengan kondisi rusak sedang dan 95 sekolah dengan kondisi rusak berat.

Fasilitas penunjang juga disediakan untuk dapat memberikan layanan tempat, keamanan, serta kenyamanan kepada masyarakat, dengan akses yang mudah dan perlakuan yang sama, tidak diskriminatif, dan ada perlakuan khusus bagi kelompok berkebutuhan khusus sebagaimana yang diatur dalam SE Menteri PANRB nomor 66 Tahun 2020 tentang Penyediaan Sarana dan Prasarana Bagi Kelompok Rentan dalam Penyelenggaraan Publik.

a. Ruang laktasi berukuran 20 $m^2$, yang bersih, nyaman dan aman serta dilengkapi dengan 4 buah kursi, 4 buah meja dan 1 unit AC.
b. Bangunan ramah disabilitas.
   Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul telah dilengkapi fasilitas yang ramah disabilitas dengan:
   - pintu masuk yang mudah diakses, dilengkapi dengan ramp dan pegangan rambat.
   - toilet terpisah untuk laki-laki, perempuan dan 1 toilet disabilitas yang dilengkapi pegangan rambat pada jalan menuju toilet.
   - Ruang tunggu dengan tempat duduk prioritas bagi pengguna layanan kelompok rentan.
c. Halaman luas yang dapat digunakan sebagai arena bermain anak maupun untuk parkir khusus yang mudah diakses.
d. Kawasan tanpa rokok dengan menyediakan area merokok di luar ruang pelayanan.
e. Sarana dan prasarana konsultasi dan pengaduan.
f. Penyediaan fasilitas sanitasi sebagai upaya menjaga kebersihan dan kesehatan.

### 2.1.3. Kinerja Pelayanan

1. Kondisi Pendidikan

   Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul telah melaksanakan pengukuran kinerja atas kinerja yang diperjanjikan Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul dengan Bupati Gunungkidul tahun 2024. Pengukuran mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan. Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.6 Skala Nilai Peringkat Kinerja

| No. | Interval Nilai Realisasi Kinerja | Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja | Kode |
|---|---|---|---|
| 1. | 91 ≤ 100 | Sangat Baik | Hijau Tua |
| 2. | 76 ≤ 90 | Tinggi | Hijau Muda |
| 3. | 66 ≤ 75 | Sedang | Kuning Tua |
| 4. | 51 ≤ 65 | Rendah | Kuning Muda |
| 5. | ≤ 50 | Sangat Rendah | Merah |

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Tabel 2.7 Capaian Kinerja Tahun 2024

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR /META INDIKATOR | SATUAN | BASELINE 2021 | CAPAIAN 2023 | TAHUN 2024 | | | | TARGET AKHIR RPJMD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TARGET | REALISASI | PERSENTASE | KRITERIA / KODE | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Aksesibilitas dan kualitas pendidikan meningkat | Rata-rata lama sekolah | Tahun | 7.21 | 7.32 | 7.6 | 7.35 | 97.99 | Sangat Baik | 7.86 |
| | | Harapan lama sekolah | Tahun | 12.97 | 13.39 | 13.00 | 13.40 | 103.08 | Sangat Baik | 13.02 |
| 2 | Akuntabilitas kinerja PD Meningkat | Indikator: Nilai AKIP PD Tahun N-1 | Skor | 77.11 | 83.45 | 83.52 | 83,51 | 104,29 | Sangat Baik | 80.13 |

Adapun analisis capaian kinerja per sasaran stategis diuraikan sebagai berikut:

### 1.1 Sasaran 1: Aksesibilitas dan kualitas pendidikan meningkat

Kinerja sasaran Aksesibilitas dan kualitas pendidikan meningkat diukur dengan indikator rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Penjelasan hubungan sasaran. indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:

Tabel 2.8 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

| No | Sasaran | Indikator | Meta Indikator |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Aksesibilitas dan kualitas pendidikan meningkat | Rata-rata Lama Sekolah | RLS diperoleh dari Rilis Badan Pusat Statistik (BPS) dengan formulasi: $RLS = \frac{1}{n} \times \sum_{i=1}^{n} x_i$ Keterangan: RLS=Rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas N = jumlah penduduk usia 25 tahun ke atas $X_i$ = Lama sekolah penduduk ke-I yang berusia 25 tahun |
| | | Harapan | |

| No | Sasaran | Indikator | Meta Indikator |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | Lama Sekolah | Harapan Lama Sekolah diperoleh dari rilis Badan Pusat Statistik (BPS) dengan formulasi:<br>$EYS'_a = FKx\sum_{i=a}^{n}\frac{E'_i}{P'_i}$<br>Keterangan :<br>$EYS'_a$ = Harapan Lama Sekolah pada umur a di tahun t<br>$FKx$ = Faktor Koreksi<br>$E'_i$ = Jumlah penduduk usia i yang bersekolah pada tahun t<br>i = Usia (a, a+1, ...., n) ;<br>$P'_i$ = Jumlah penduduk usia i pada tahun t |

Capaian pada sasaran ini digambarkan pada tabel 2.5 berikut:

Tabel 2.9 Capaian Sasaran
Aksesibilitas dan kualitas pendidikan meningkat

| Sasaran | Indikator Kinerja | TAHUN 2024 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Target | Realisasi | Capaian (%) | Kategori |
| Aksesibilitas dan kualitas pendidikan meningkat | Rata-rata lama sekolah | 7,6 | 7.35 | 96.71 | Sangat Tinggi |
| | Harapan Lama Sekolah | 13,00 | 13.40 | 103.07 | Sangat Tinggi |

Dari data tersebut diatas terlihat bahwa capaian kinerja sebesar 96,71% untuk rata-rata lama sekolah dan 103.07% untuk harapan lama sekolah termasuk dalam kategori sangat tinggi. Untuk rata-rata lama sekolah dapat tercapai 7,35 tahun dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 7,6 tahun dan harapan lama sekolah tercapai 13,40 tahun dari target yang ditetapkan sebesar 13 tahun.

Realisasi kinerja secara keseluruhan pada tahun 2024 mengalami peningkatan jika dibandingkan pada tahun 2023. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya yaitu tahun 2022 dan tahun 2023 dibandingkan dengan target akhir Renstra di tahun 2026 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.10 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022-2024
serta perbandingan dengan target akhir Renstra di tahun 2026

| Sasaran | Indikator Kinerja | Realisasi Kinerja | | | Target Akhir Renstra | Capaian s/d 2024 terhadap 2026 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | | |
| Aksesibilitas dan kualitas pendidikan meningkat | Rata-rata lama sekolah | 7.31 | 7.32 | 7.35 | 7.86 | 93.51 |
| | Harapan Lama Sekolah | 12.99 | 13.39 | 13.40 | 13.02 | 102.92 |

*Sumber : BPS Kabupaten Gunungkidul*

## Tabel 2.11
## Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pendidikan
## Kabupaten Gunungkidul

| No | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | Target NSPK | Target IKK | Target Indikator Lainnya | Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke | | | | | Realisasi Capaian Tahun ke | | | | | Rasio Capaian pada Tahun ke | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | **Indikator PD** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **Rata-rata lama sekolah** | | | | 7,34 | 7,47 | 7,60 | 7,73 | 7,86 | 7,31 | 7,32 | 7,35 | | | 99,59 | 97,99 | 96,71 | | |
| **2** | **Harapan lama sekolah** | | | | 12,98 | 12,99 | 13,00 | 13,01 | 13,02 | 13,33 | 13,39 | 13,40 | | | 102,70 | 103,08 | 103,08 | | |
| **3** | **Nilai AKIP PD** | | | | 80,01 | 80,04 | 80,07 | 80,10 | 80,13 | 82,10 | 83,45 | 83,51 | | | 102,61 | 104,26 | 104,30 | | |
| | **Indikator Program dan Kegiatan** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.** | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a. | Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi di PAUD; | | | | 90,95 | 92,63 | 94,21 | 95,26 | 95,79 | 86,85 | 91,18 | 89,98 | | | 95,49 | 98,44 | 95,51 | | |
| b. | Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi di sekolah dasar; | | | | 93,84 | 94,16 | 94,49 | 94,81 | 94,97 | 92,39 | 94,70 | 94,84 | | | 98,46 | 100,58 | 100,37 | | |
| c. | Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi di sekolah menengah pertama; | | | | 99,61 | 99,63 | 99,64 | 99,66 | 99,68 | 99,05 | 97,72 | 99,14 | | | 99,44 | 98,09 | 99,50 | | |
| d. | Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi di pendidikan kesetaraan | | | | 41,65 | 56,69 | 71,73 | 81,75 | 88,77 | 61,89 | 30,72 | 26,25 | | | 148,60 | 54,19 | 36,59 | | |
| e. | Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD; | | | | 56,4 | 56,9 | 57,4 | 57,9 | 58,4 | 155,00 | 158,72 | 147,26 | | | 274,82 | 278,94 | 256,55 | | |
| f. | Angka Partisipasi Kasar (APK) SD; | | | | 91,73 | 91,96 | 92,19 | 92,42 | 92,65 | 89,87 | 90,46 | 90,91 | | | 97,97 | 98,37 | 98,61 | | |
| g. | Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP | | | | 99,2 | 99,23 | 99,27 | 99,3 | 99,33 | 99,30 | 96,06 | 94,88 | | | 100,10 | 96,81 | 95,58 | | |
| | **Indikator Kegiatan** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.1** | **Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a. | Jumlah Sekolah Dasar yang terakreditasi A | | | | 304 | 309 | 314 | 321 | 328 | 285 | 285 | 277 | | | 93,75 | 92,23 | 88,22 | | |
| b. | Persentase SD yang terakreditasi A | | | | 64,96 | 66,03 | 67,09 | 68,59 | 70,09 | 61,16 | 61,16 | 59,70 | | | 94,15 | 92,62 | 88,98 | | |
| **1.2** | **Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a. | Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang terakreditasi A | | | | 100 | 102 | 104 | 106 | 108 | 72 | 72 | 73 | | | 72,00 | 70,59 | 70,19 | | |
| b. | Persentase SMP yang terakreditasi A | | | | 88,5 | 90,27 | 92,04 | 93,81 | 95,58 | 65,45 | 65,45 | 68,22 | | | 73,96 | 72,51 | 74,12 | | |
| **1.3** | **Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a. | Jumlah Pendidikan Anak Usia Dini yang terakreditasi | | | | 712 | 737 | 762 | 787 | 812 | 994 | 1073 | 1082 | | | 139,61 | 145,59 | 141,99 | | |
| b. | Persentase PAUD yang terakreditasi | | | | 59,78 | 61,88 | 63,98 | 66,08 | 68,18 | 83,18 | 90,63 | 91,46 | | | 139,14 | 146,45 | 142,95 | | |
| **1.4** | **Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a. | Jumlah Satuan Pendidikan Non Formal yang terakreditasi | | | | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 18 | 19 | 19 | | | 900,00 | 633,33 | 633,33 | | |
| b. | Persentase Satuan Pendidikan Non Formal yang terakreditasi | | | | 21,82 | 28,61 | 41,17 | 53,72 | 66,27 | 85,71 | 76,00 | 73,08 | | | 392,82 | 265,64 | 177,50 | | |
| **2.** | **PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a. | Persentase sekolah yg telah menerapkan kurikulum muatan lokal | | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| | **Kegiatan** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2.1** | **Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a. | Jumlah sekolah jenjang SD dan SMP yang telah menerapkan muatan lokal wajib dan pilihan | | | | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 576 | 576 | 571 | | | 99,65 | 99,65 | 98,79 | | |
| b. | Persentase sekolah yang menetapkan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar | | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| **2.2** | **Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a. | Jumlah sekolah yang menetapkan kurikulum muatan lokal pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal | | | | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1209 | 1209 | | | 100,00 | 99,42 | 99,42 | | |
| b. | Persentase sekolah yang menetapkan kurikulum muatan lokal pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal | | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | 100 | 99,42 | 99,42 | | |
| **3.** | **PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a. | Persentase satuan pendidikan yang tercukupi kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan | | | | 49,22 | 50,11 | 51 | 51,89 | 52,78 | 22,47 | 26,04 | 30,91 | | | 45,65 | 51,97 | 60,61 | | |
| | **Kegiatan** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **3.1** | **Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a. | Jumlah Guru PAUD (Formal) yang memiliki ijazah D-IV atau S1 dan bersertifikat pendidik | | | | 655 | 673 | 691 | 709 | 727 | 650 | 1104 | 680 | | | 99,24 | 164,04 | 98,41 | | |
| b. | Persentase Guru PAUD (Formal) yang memiliki ijazah D-IV atau S1 dan bersertifikat pendidik; | | | | 73,07 | 75,03 | 76,98 | 78,94 | 80,89 | 69,22 | 73,85 | 75,56 | | | 94,73 | 98,42 | 98,15 | | |
| c. | Jumlah Kepala PAUD (Formal) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, yang bersertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah | | | | 156 | 214 | 272 | 330 | 388 | 54 | 53 | 21 | | | 34,62 | 24,77 | 7,72 | | |
| d. | Persentase Kepala PAUD (Formal) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, yang bersertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah; | | | | 27,37 | 37,54 | 47,72 | 57,89 | 68,07 | 9,47 | 9,33 | 3,74 | | | 34,61 | 24,86 | 7,83 | | |
| e. | Jumlah Guru SD yang memiliki ijazah D-IV atau S1 dan bersertifikat pendidik | | | | 2161 | 2251 | 2341 | 2431 | 2521 | 2032 | 2091 | 2520 | | | 94,03 | 92,89 | 107,65 | | |
| f. | Persentase Guru SD yang memiliki ijazah D-IV atau S1 dan bersertifikat pendidik; | | | | 61,37 | 63,93 | 66,49 | 69,04 | 71,6 | 57,09 | 62,03 | 71,84 | | | 93,03 | 97,03 | 108,04 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| g. | Jumlah Kepala SD yang memiliki ijazah D-IV atau S1, yang bersertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah | | | | 400 | 405 | 410 | 415 | 420 | 407 | 410 | 384 | | | 101,75 | 101,23 | 93,66 | | |
| h | Persentase Kepala SD yang memiliki ijazah D-IV atau S1, yang bersertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah; | | | | 85,47 | 86,54 | 87,61 | 88,68 | 89,74 | 91,05 | 91,52 | 88,07 | | | 106,53 | 105,75 | 100,53 | | |
| i | Jumlah Guru SMP yang memiliki ijazah D-IV atau S1 dan bersertifikat pendidik | | | | 1102 | 1162 | 1222 | 1282 | 1342 | 996 | 986 | 980 | | | 90,38 | 84,85 | 80,20 | | |
| j | Persentase Guru SMP yang memiliki ijazah D-IV atau S1 dan bersertifikat pendidik; | | | | 71,79 | 75,7 | 79,61 | 83,52 | 87,43 | 66,31 | 69,19 | 69,21 | | | 92,37 | 91,40 | 86,94 | | |
| k | Jumlah Kepala SMP yang memiliki ijazah D-IV atau S1, yang bersertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah | | | | 91 | 96 | 100 | 104 | 108 | 92 | 62 | 52 | | | 101,10 | 64,58 | 52,00 | | |
| l | Persentase Kepala SMP yang memiliki ijazah D-IV atau S1, yang bersertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah; | | | | 80,53 | 84,96 | 88,5 | 92,04 | 95,58 | 87,62 | 62,00 | 54,17 | | | 108,80 | 72,98 | 61,21 | | |
| **4.** | **PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a. | Persentase sekolah/lembaga yang telah memiliki perizinan | | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 100 | | | 100,00 | 50,00 | 100,00 | | |
| | **Kegiatan** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **4.1** | **Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a. | Jumlah permohonan penerbitan izin pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat yang terlayani | | | | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | | | 100,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| b. | Persentase permohonan penerbitan izin pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat terlayani | | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | | | 100,00 | 0,00 | 100,00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | **Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a. | Jumlah permohonan penerbitan izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat terlayani | | | | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | | | 0,00 | 33,33 | 0,00 | | |
| b. | Persentase permohonan penerbitan izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat terlayani | | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 50 | 0 | | | 0,00 | 50,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **5.** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a. | Persentase lembaga PAUD yang menerapkan pengasuhan peserta didik berbasis budaya | | | | 12,59 | 16,79 | 20,99 | 25,19 | 29,39 | 12,59 | 0 | 100 | | | 100,00 | 0,00 | 476,42 | | |
| b. | Persentase Sekolah Dasar (SD) yang menerapkan muatan lokal berbasis budaya | | | | 13,12 | 18,49 | 23,87 | 29,25 | 34,62 | 51,50 | 0 | 100 | | | 392,55 | 0,00 | 418,94 | | |
| c. | Persentase Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang menerapkan muatan lokal berbasis budaya | | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | | | 100,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| | **Kegiatan** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **5.1** | **Pendidikan Berbasis Budaya** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a. | Jumlah PAUD, SD dan SMP yang melaksanakan pendidikan Berbasis Budaya | | | | 324 | 399 | 474 | 549 | 624 | 350 | 0 | 1754 | | | 108,02 | 0,00 | 370,04 | | |
| b. | Persentase Pendidikan Berbasis Budaya yang terpenuhi | | | | 41,9 | 45,1 | 48,29 | 51,48 | 54,67 | 51,5 | 0 | 100 | | | 122,91 | 0,00 | 207,08 | | |
| **6** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a. | Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik | | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Kegiatan** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **6.1** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a. | Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah disusun tepat waktu | | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| b. | Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah disusun tepat waktu | | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| **6.2** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a. | Jumlah dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang selesai disusun tepat waktu | | | | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| b. | Persentase dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang selesai disusun tepat waktu | | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| **6.3** | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a. | Jumlah dokumen administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat daerah yang selesai disusun tepat waktu | | | | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| b. | Persentase dokumen administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat daerah yang selesai disusun tepat waktu | | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| **6.4** | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a. | Jumlah PNS yang terlayani dalam pengelolaan Administrasi Kepegawaian | | | | 5977 | 5977 | 5977 | 5977 | 5977 | 5.977 | ##### | 5.977 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| b. | Persentase PNS yang terlayani dalam pengelolaan Administrasi Kepegawaian | | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| **6.5** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a. | Jumlah Administrasi Umum terlayani | | | | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| b. | Persentase Administrasi Umum terlayani | | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| **6.6** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a. | Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan terlaksana | | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| b. | Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan terlaksana | | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| **6.7** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a. | Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terfasilitasi | | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| b. | Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terfasilitasi | | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| **6.8** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a. | Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terfaslitasi pemeliharaanya | | | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| b. | Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terfaslitasi pemeliharaanya | | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| **6.9** | **Penataan Organisasi** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a. | Jumlah dokumen pelayanan publik dan tata laksana yang tersusun | | | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | | | 100,00 | | | | |
| b. | Nilai Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah | | | | 82,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83,34 | 0 | 0 | | | 101,60 | | | | |

Dari evaluasi data tersebut diatas terlihat bahwa realisasi kinerja meningkat. Pencapaian target sasaran Aksesibilitas dan kualitas pendidikan meningkat didukung oleh program sebagai berikut:

1) Program Pengelolaan Pendidikan dengan indikator Persentase APK PAUD. APK SD. APK SMP. Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi di PAUD. Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi di sekolah dasar; Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi di sekolah menengah pertama; dan Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi di pendidikan kesetaraan yang dapat tercapai;
2) Program Pengembangan Kurikulum dengan indikator Persentase sekolah yang telah menerapkan kurikulum muatan lokal dapat tercapai.
3) Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan dengan indikator Persentase satuan pendidikan yang tercukupi kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan dapat dilaksanakan.
4) Program Pengendalian Perizinan Pendidikan dengan indikator Persentase sekolah/lembaga yang telah memiliki perizinan dapat terlayani.
5) Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan dengan indikator diterapkannya pendidikan berbasis pada satuan pendidikan.

**Perbandingan Capaian Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah dengan Realisasi Level Nasional, Provinsi, dan Kabupaten Kota di DIY**

Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik, capaian Rata-rata Lama Sekolah untuk level nasional pada tahun 2024 adalah 8,85 tahun dan Harapan Lama Sekolah adalah 13,21 tahun. Dengan demikian, capaian rata-rata lama sekolah di Kabupaten Gunungkidul yang sebesar 7,35 masih lebih rendah dari capaian nasional sebesar 8,85 tahun. Untuk level nasional bisa diartikan bahwa rata-rata lama tahun bersekolah yang dijalani oleh penduduk Indonesia berusia 25 tahun ke atas adalah 8,85 setara jenjang kelas 8 atau putus sekolah saat semester 2 kelas 9 SMP. Sedangkan capaian rata-rata lama sekolah penduduk Gunungkidul pada jenjang kelas 7 SMP atau putus sekolah kelas 8 SMP.

Untuk capaian Harapan Lama Sekolah, capaian Gunungkidul lebih tinggi dari capaian nasional yang Harapan Lama Sekolahnya 13,21 tahun dan Gunungkidul adalah 13,40 tahun. Dengan demikian, anak-anak penduduk Gunungkidul yang pada tahun 2024 berusia 7 tahun memiliki harapan dapat menikmati pendidikan selama 13,40 tahun atau hampir setara dengan lamanya masa pendidikan hingga setingkat Diploma II.

Adapun perbandingan Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Gunungkidul dibandingkan dengan capaian Provinsi dan Kabupaten Kota Lain di DIY tersaji dalam gambar berikut:

Gambar 2.1 Rata-rata Lama Sekolah di Daerah Istimewa Yogyakarta

| Kabupaten/kota | Rata-rata Lama Sekolah (Tahun) | | |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| Kulon Progo | 9,17 | 9,18 | 9,20 |
| Bantul | 9,59 | 9,79 | 9,81 |
| Gunungkidul | 7,31 | 7,32 | 7,35 |
| Sleman | 10,94 | 11,01 | 11,33 |
| Kota Yogyakarta | 11,89 | 12,11 | 12,12 |
| Prov. D.I. Yogyakarta | 9,75 | 9,83 | 9,92 |

Gambar 2.2 Angka Harapan Lama Sekolah di Daerah Istimewa Yogyakarta

| Kabupaten/kota | Angka Harapan Lama Sekolah (Tahun) | | |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| Kulon Progo | 14,38 | 14,48 | 14,49 |
| Bantul | 15,48 | 15,61 | 15,63 |
| Gunungkidul | 13,33 | 13,39 | 13,40 |
| Sleman | 16,76 | 16,77 | 16,79 |
| Kota Yogyakarta | 17,61 | 17,62 | 17,66 |
| Prov. D.I. Yogyakarta | 15,65 | 15,66 | 15,70 |

*Sumber : BPS Provinsi D.I. Yogyakarta*

Dalam gambar 2.1 dan 2.2 diatas secara jelas memperlihatkan bahwa RLS dan angka HLS Kabupaten Gunungkidul menempati posisi terendah dibandingkan dengan kabupaten/kota di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Penjelasan hubungan sasaran, indikator, dan meta indikator adalah sebagai berikut:

Tabel 2.12 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

| NO | SASARAN | PROGRAM | INDIKATOR | META INDIKATOR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aksesibilitas dan kualitas pendidikan meningkat | Program Pengelolaan Pendidikan | Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi di PAUD | Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD dibagi jumlah anak usia 5- 6 tahun pada kabupaten yang bersangkutan dikalikan 100 persen |
| | | | Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | Jumlah siswa PAUD dibagi jumlah penduduk usia 5-6 tahun dikalikan 100 persen |
| | | | Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/SDLB/ Sederajat | Jumlah Siswa SD/MI/SDLB/ sederajat dibagi jumlah penduduk usia 7-12 tahun dikalikan 100 persen |
| | | | Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/SMPLB/ Sederajat | Jumlah siswa SMP/MTs/Sederajat dibagi jumlah penduduk usia 13-15 tahun dikalikan 100 |

| NO | SASARAN | PROGRAM | INDIKATOR | META INDIKATOR |
|---|---|---|---|---|
| | | | | persen |
| | | | Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar | Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di SD dibagi jumlah Penduduk usia 7-12 tahun dikalikan 100 persen |
| | | | Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama | Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di SMP dibagi jumlah Penduduk usia 13-15 tahun dikalikan 100 persen |
| | | | Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan | Jumlah anak usia 7 - 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar dipendidikan kesetaraan dibagi jumlah Penduduk usia 7-18 tahun yang tidak sekolah dikalikan 100 persen |
| | | Program Pengembangan Kurikulum | Persentase sekolah yg telah menerapkan kurikulum muatan lokal | Jumlah sekolah jenjang PAUD. SD dan SMP yang telah menerapkan muatan lokal wajib dan pilihan dibagi jumlah sekolah keseluruhan jenjang pendidikan tertentu dikalikan 100 persen |
| | | Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan | Persentase satuan pendidikan yang tercukupi kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan | Jumlah sekolah jenjang pendidikan tertentu yang telah terpenuhi PTK nya dibagi jumlah sekolah keseluruhan jenjang pendidikan tertentu dikalikan 100 persen |
| | | Program Pengendalian Perizinan Pendidikan | Persentase sekolah/lembaga yang telah memiliki perizinan | Jumlah permohonan penerbitan izin pendirian sekolah swasta yang terlayani dibagi jumlah pengajuan permohonan penerbitan izin pendirian sekolah swasta dikalikan 100 persen |

Capaian kinerja program tersaji dalam tabel 2.13 Capaian Kinerja Program pada Sasaran Aksesibilitas dan kualitas pendidikan meningkat sebagai berikut :

Tabel 2.13
Capaian Kinerja Program pada
Sasaran Aksesibilitas dan kualitas pendidikan meningkat

| Sasaran | Indikator Kinerja | Capaian Kinerja Tahun 2024 (%) | Program | Indikator Kinerja Program | Target (%) | Realisasi (%) | Capaian (%) Kategori |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aksesibilitas dan kualitas pendidikan meningkat | 1. Rata-rata Lama Sekolah<br>2. Harapan Lama Sekolah | 1. 96.71<br>2. 103.07 | Program Pengelolaan Pendidikan | Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi di PAUD | 94,21 | 89,98 | Sangat Tinggi |
| | | | | Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | 57.4 | 147,26 | Sangat Tinggi |
| | | | | Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/SDLB/ Sederajat | 92.19 | 90,91 | Sangat Tinggi |
| | | | | Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/SMPLB/ Sederajat | 99.27 | 94,88 | Sangat Tinggi |
| | | | | Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar | 94.49 | 94.84 | Sangat Tinggi |
| | | | | Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah | 99.64 | 99.14 | Sangat Tinggi |

| Sasaran | Indikator Kinerja | Capaian Kinerja Tahun 2024 (%) | Program | Indikator Kinerja Program | Target (%) | Realisasi (%) | Capaian (%) Kategori |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | pertama | | | |
| | | | | Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan | 71,73 | 26,25 | Rendah |
| | | | Program Pengembangan Kurikulum | Persentase sekolah yg telah menerapkan kurikulum muatan lokal | 100 | 100 | Sangat Tinggi |
| | | | Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan | Persentase satuan pendidikan yang tercukupi kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan | 51 | 30,91 | Sangat rendah |
| | | | Program Pengendalian Perizinan Pendidikan | Persentase sekolah/ lembaga yang telah memiliki perizinan | 100 | 100 | Tinggi |
| | | | Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan | Persentase lembaga PAUD yang menerapkan pengasuhan peserta didik berbasis budaya | 20,99 | 100 | Tinggi |
| | | | | Persentase Sekolah Dasar (SD) yang menerapkan | 23,87 | 100 | Tinggi |

| Sasaran | Indikator Kinerja | Capaian Kinerja Tahun 2024 (%) | Program | Indikator Kinerja Program | Target (%) | Realisasi (%) | Capaian (%) Kategori |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | muatan lokal berbasis budaya | | | |
| | | | | Persentase Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang menerapkan muatan lokal berbasis budaya | 100 | 100 | Tinggi |
| Rata-rata Capaian Indikator Program | | | | | 68.40 | 88.68 | Tinggi |

Capaian kinerja program pada Sasaran Aksesibilitas dan kualitas pendidikan meningkat rata-rata 99.56%. sehingga masuk dalam kategori sangat tinggi.

Keberhasilan capaian Indikator program pada Sasaran Aksesibilitas dan kualitas pendidikan meningkat tersebut didukung dari:

1. **Hasil Capaian Program Pengelolaan Pendidikan**
   a. Penyelenggaraan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar. Sekolah Menengah Pertama. PAUD dan Pendidikan Kesetaraan dapat dilaksanakan dengan baik;
   Angka Partisipasi Kasar PAUD sangat tinggi. dari target 57,4% yang direncanakan dapat terealisasi 147,26% dengan capaian 256,55%

Gambar 2.3 Partisipasi anak usia 5-6 Tahun di PAUD TK ABA Teguhan Playen dan TK Masyithoh Ngalang 1

2. **Hasil Capaian Program** Pengembangan Kurikulum
   a. Program pengembangan kurikulum dapat dilaksanakan dengan baik dan mencapai target 100%. hal ini karena penerapan kurikulum muatan lokal dapat diterapkan oleh seluruh satuan Pendidikan pada semua jenjang.

Gambar 2.4 Pengembangan Kurikulum

**Faktor Penghambat Keberhasilan Sasaran**

1. Kondisi sosial budaya masyarakat yang berpengaruh terhadap rendahnya tingkat pendidikan dengan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) yang masih berada pada angka 7,35 tahun dan menjadi nilai terendah dibandingkan dengan Kabupaten/kota di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Perbedaan pemahaman tentang pemenuhan Standar Pelayanan Minimal bidang Pendidikan oleh seluruh pemangku kepentingan.
3. Belum terpenuhinya kualitas maupun kuantitas guru ASN pada sekolah negeri.

Solusi/strategi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Optimalisasi peran pemangku kepentingan pendidikan di semua jenjang untuk terus mendorong warga masyarakat yang berusia diatas 25 tahun agar meneruskan pendidikannya melalui program Pendidikan kesetaraan.
2. Melakukan koordinasi dan sinergitas dengan semua pemangku kepentingan agar pemenuhan SPM bidang Pendidikan dapat mencapai kategori tuntas utama.
3. Berkoordinasi dengan BKPPD dan BKN untuk pengajuan formasi guru ASN. penataan ulang guru ASN yang diperbantukan pada sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat.
4. Mendorong pendidik untuk meningkatkan kualitas melalui komunitas belajar pendidik

   Adapun faktor pendukung dari keberhasilan ini adalah :

1. Fungsi koordinasi antar pemangku kepentingan dapat berjalan dengan baik;
2. Selalu berpedoman terhadap ketentuan yang berlaku.

## 1.2. Sasaran 2: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Kinerja sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah diukur dengan indikator Nilai AKIP PD. Penjelasan hubungan sasaran. indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:

Tabel 2.14 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

| Sasaran | Indikator | Meta Indikator |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| Akuntabilitas kinerja PD Meningkat | Nilai AKIP PD | *Nilai AKIP PD yang digunakan untuk capaian pada tahun n adalah nilai AKIP PD tahun n-1*<br>Predikat AA (Nilai >90-100)<br>Predikat A (Nilai >80-90)<br>Predikat BB (Nilai >70-80)<br>Predikat B (Nilai >60-70)<br>Predikat CC (Nilai >50-60) |

| | | |
|---|---|---|
| | | Predikat C (Nilai >30-50)<br>Predikat D (Nilai >0-30) |

Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023, berdasarkan surat dari Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 700.1.2.7/EV-LKJiP/033 tanggal 28 Maret 2024, adalah 83,51 masuk kategori A (Memuaskan)

Tabel 2.15 Capaian Sasaran
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

| Sasaran. | Indikator Kinerja | TAHUN 2024 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Target | Realisasi | Capaian (%) | Kategori |
| Akuntabilitas kinerja PD Meningkat | Nilai AKIP PD | 80.07 | 83,51 | 104,29 | **Sangat baik** |
| | | | | | |

Dari data tersebut diatas terlihat dari target yang ditetapkan sebesar 80,07 terealisasi 83,51 sehingga capaian kinerja sebesar 104.29%. Dalam LHE AKIP Dinas Pendidikan tahun 2023 terdapat rekomendasi yang harus ditindaklanjuti oleh Dinas Pendidikan.

Saran dan rekomendasi sesuai hasil evaluasi telah ditindaklanjuti untuk perbaikan implementasi SAKIP di Dinas Pendidikan. Tindak lanjut atas catatan saran/ rekomendasi Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023 Dinas Pendidikan adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.16 Tindak lanjut atas laporan hasil evaluasi AKIP Tahun 2023**

| No | Komponen | Rekomendasi | Tindak Lanjut |
|---|---|---|---|
| 1 | Perencanaan Kinerja | - | - |
| 2 | Pengukuran Kinerja | 1. Melakukan reviu SOP Pengumpulan Data Kinerja sebagai dasar mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan | Telah ditindaklanjuti dengan melaksanakan reviu SOP Pengumpulan Data Kinerja |
| | | 2. Melakukan koordinasi dan sosialisasi berkala atas hasil pengukuran kinerja agar semua pegawai memahami dan peduli | Telah dilaksanakan koordinasi dan sosialisasi hasil evaluasi SAKIP dan evalausi berkala triwulanan |

| No | Komponen | Rekomendasi | Tindak Lanjut |
|---|---|---|---|
| | | atas hasil pengukuran kinerja | |
| 3 | Pelaporan Kinerja | Menginformasikan perbandingan realisasi kinerja di level nasional/ provinsi/daerah sekitarnya | Realisasi kinerja RLS dan HLS pada level nasional/provinsi/kabupaten kota telah disajikan dalam pembahasan sasaran 1 di Bab III LKJIP ini |
| 4 | Evaluasi Akuntabilitas | Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal agar dimanfaatkan secara optimal untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja | Telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi |

Tabel 2.17 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022-2024 serta Perbandingan dengan Target Akhir Renstra di tahun 2026

| Sasaran. | Indikator Kinerja | Realisasi Kinerja | | | Target Akhir Renstra (2026) | Capaian s/d 2023 terhadap 2026 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | | |
| Akuntabilitas kinerja PD Meningkat | Nilai AKIP PD | 81,76 | 83.45 | 83,51 | 80.13 | 104.65 |

Dari evaluasi data tersebut di atas terlihat bahwa realisasi kinerja terus meningkat. Dibanding hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja tahun 2022 yaitu 83.45 (A), pada tahun 2023 naik menjadi 83,51 (A). Program yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah ini adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten terlaksana dengan baik. Penjelasan hubungan sasaran. indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:

Tabel 2.18 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

| NO | SASARAN | PROGRAM | INDIKATOR | META INDIKATOR |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Akuntabilitas kinerja PD meningkat | Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/ kota | Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik | $\frac{\text{Jumlah urusan penunjang terlaksana}}{\text{Target}} \times 100\%$ |

Tabel 2.19 Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

| Sasaran | Indikator Kinerja | Capaian Kinerja Tahun 2024 (%) | Program | Indikator Kinerja Program | Target (%) | Realisasi (%) | Capaian (%) Kategori |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akuntabilitas kinerja PD Meningkat | Nilai AKIP PD | 104,29 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota | Presentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota terfasilitasi | 100 | 100 | 100 |

Keberhasilan capaian Indikator program pada Sasaran Akuntabilitas Kinerja PD Meningkat yang didukung dari:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang di dukung kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
   a. Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
   b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
   c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
   d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
   e. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
   f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Permasalahan dan Solusi Pencapaian Sasaran Strategis Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD

Permasalahan

1. Terbatasnya anggaran pemenuhan sarana dan prasarana penunjang baik pengadaan baru maupun pemeliharaan.
2. Terbatasnya SDM baik secara kualitas dan kuantitas.

Solusi

Berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait guna mengatasi permasalahan yang ada serta mendayagunakan sarana yang ada semaksimal mungkin.

**2. Pencapaian SPM Bidang Pendidikan**

Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul selain mengampu sasaran strategis juga mengampu SPM urusan pemerintahan bidang pendidikan meliputi pendidikan anak usia dini. pendidikan dasar dan pendidikan kesetaraan sesuai dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Permendikbud Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan. Pada tahun 2024 indeks pencapaian SPM di angka 71,83%. Capaian SPM bidang Pendidikan ini mengalami penurunan dibanding

capaian tahun 2023 sebesar 74.25 %. Hal ini disebabkan karena capaian pada pendidikan kesetaraan mengalami penurunan sebesar 4,01%. Namun demikian Rapor Pendidikan mengalami kenaikan yang cukup signifikan dibanding tahun 2023.

Adapun secara rinci dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.20

Capaian SPM bidang Pendidikan Tahun 2024

| No | Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM | SATUAN | Indikator Pencapaian / Output | | | Total Pencapaian |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM | | | | | | 71,83% |
| 1 . | Pendidikan Anak Usia Dini | | | | | 82,14% |
| | PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%) | | Jumlah Total Yang Harus Dilayani | Jumlah Total Yang Terlayani | Yang Belum Terlayani | 71,98% |
| | A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI : | Orang | 18671 | 16800 | 1871 | 89,98% |
| | PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%) | | | | | 10,15% |
| | B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM | | Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi | Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi | Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi | 50,77% |
| | 1 . Angka partisipasi sekolah | % | 92,63 | 92,27 | 0,36 | 99,61% |
| | 2 . Angka partisipasi murni | % | 100 | 62,77 | 37,23 | 62,77% |
| | 3 . Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B | % | 81,72 | 86,23 | 4,51 | 100,00% |
| | 4 . Proporsi guru PAUD dengan kualifikasi Sarjana (S1)/Diploma empat (DIV) | % | 95,29 | 93,75 | 1,54 | 98,38% |
| | 5 . Rasio pengawas sekolah untuk | % | 100 | 0,82 | 99,18 | 0,82% |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PAUD | | | | | |
| | 6 . Kecukupan formasi guru ASN | % | 100 | 11,47 | 88,53 | 11,47% |
| | 7 . Indeks distribusi guru | % | 100 | 0,46 | 99,54 | 0,46% |
| | 8 . Proporsi PTK bersertifikat | % | 100 | 81,21 | 18,79 | 81,21% |
| | 9 . Proporsi PTK penggerak* | % | 100 | 2,16 | 97,84 | 2,16% |
| | | | | | | |
| 2 . | Pendidikan Dasar | | | | | 93,17% |
| | PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%) | | Jumlah Total Yang Harus Dilayani | Jumlah Total Yang Terlayani | Yang Belum Terlayani | 77,10% |
| | A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI : | Orang | 89372 | 86132 | 3240 | 96,37% |
| | PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%) | | | | | 16,07% |
| | B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM | | Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi | Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi | Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi | 80,35% |
| | SD | | | | | 80,09% |
| | 1 . Angka partisipasi kasar | % | 91,96 | 90,91 | 1,05 | 98,86% |
| | 2 . Angka partisipasi sekolah | % | 94,16 | 94,84 | 0,68 | 100,00% |
| | 3 . Kemampuan literasi | Nilai | 63,68 | 80,98 | 17,3 | 100,00% |
| | 4 . Kemampuan numerasi | Nilai | 45,62 | 70,84 | 25,22 | 100,00% |
| | 5 . Perbedaan skor literasi | Nilai | 0 | 0 | 0 | 100,00% |
| | 6 . Perbedaan skor numerasi | Nilai | 0 | 0 | 0 | 100,00% |
| | 7 . Indeks iklim keamanan | Nilai | 77,26 | 73,95 | 3,31 | 95,72% |
| | 8 . Indeks iklim kebhinekaan | Nilai | 76,29 | 75,26 | 1,03 | 98,65% |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 9 . Indeks iklim inklusivitas | Nilai | 61,93 | 56,25 | 5,68 | 90,83% |
| | 10 . Kecukupan formasi guru ASN | % | 100 | 11,47 | 88,53 | 11,47% |
| | 11 . Indeks distribusi guru | % | 100 | 0,45 | 99,55 | 0,45% |
| | 12 . Proporsi PTK bersertifikat | % | 100 | 45,25 | 54,75 | 45,25% |
| | 13 . Proporsi PTK penggerak* | % | 0,01 | 0 | 0,01 | 100,00% |
| | SMP | | | | | 80,60% |
| | 1 . Angka partisipasi kasar | % | 99,23 | 94,88 | 4,35 | 95,62% |
| | 2 . Angka partisipasi sekolah | % | 99,63 | 99,14 | 0,49 | 99,51% |
| | 3 . Kemampuan literasi | Nilai | 77,66 | 84,98 | 7,32 | 100,00% |
| | 4 . Kemampuan numerasi | Nilai | 73,42 | 79,98 | 6,56 | 100,00% |
| | 5 . Perbedaan skor literasi | Nilai | 0 | 0 | 0 | 100,00% |
| | 6 . Perbedaan skor numerasi | Nilai | 0 | 0 | 0 | 100,00% |
| | 7 . Indeks iklim keamanan | Nilai | 75,97 | 71,51 | 4,46 | 94,13% |
| | 8 . Indeks iklim kebhinekaan | Nilai | 72,43 | 74,23 | 1,8 | 100,00% |
| | 9 . Indeks iklim inklusivitas | Nilai | 61,47 | 55,89 | 5,58 | 90,92% |
| | 10 . Kecukupan formasi guru ASN | % | 100 | 12,75 | 87,25 | 12,75% |
| | 11 . Indeks distribusi guru | % | 100 | 0,36 | 99,64 | 0,36% |
| | 12 . Proporsi PTK bersertifikat | % | 100 | 54,56 | 45,44 | 54,56% |
| | 13 . Proporsi PTK penggerak* | % | 0 | 0 | 0 | 100,00% |
| | | | | | | |
| 3 . | Pendidikan | | | | | 40,17% |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Kesetaraan | | | | | |
| | PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%) | | Jumlah Total Yang Harus Dilayani | Jumlah Total Yang Terlayani | Yang Belum Terlayani | 21,00% |
| | A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI : | Orang | 2564 | 673 | 1891 | 26,25% |
| | PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%) | | | | | 19,17% |
| | B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM | | Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi | Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi | Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi | 95,87% |
| | 1 . Angka partisipasi kasar | % | 0 | 0 | 0 | 100,00% |
| | 2 . Angka partisipasi sekolah | % | 56,69 | 26,25 | 30,44 | 46,30% |
| | 3 . Kemampuan literasi | Nilai | 0 | 0 | 0 | 100,00% |
| | 4 . Kemampuan numerasi | Nilai | 0 | 0 | 0 | 100,00% |
| | 5 . Perbedaan skor literasi | Nilai | 0 | 0 | 0 | 100,00% |
| | 6 . Perbedaan skor numerasi | Nilai | 0 | 0 | 0 | 100,00% |
| | 7 . Indeks iklim keamanan | Nilai | 0 | 0 | 0 | 100,00% |
| | 8 . Indeks iklim kebhinekaan | Nilai | 0 | 0 | 0 | 100,00% |
| | 9 . Indeks iklim inklusivitas | Nilai | 0 | 0 | 0 | 100,00% |
| | 10 . Kecukupan formasi guru ASN | % | 0 | 0 | 0 | 100,00% |
| | 11 . Indeks distribusi guru | % | 0 | 0 | 0 | 100,00% |
| | 12 . Proporsi PTK bersertifikat | % | 0 | 0 | 0 | 100,00% |
| | 13 . Proporsi PTK penggerak* | % | 0 | 0 | 0 | 100,00% |

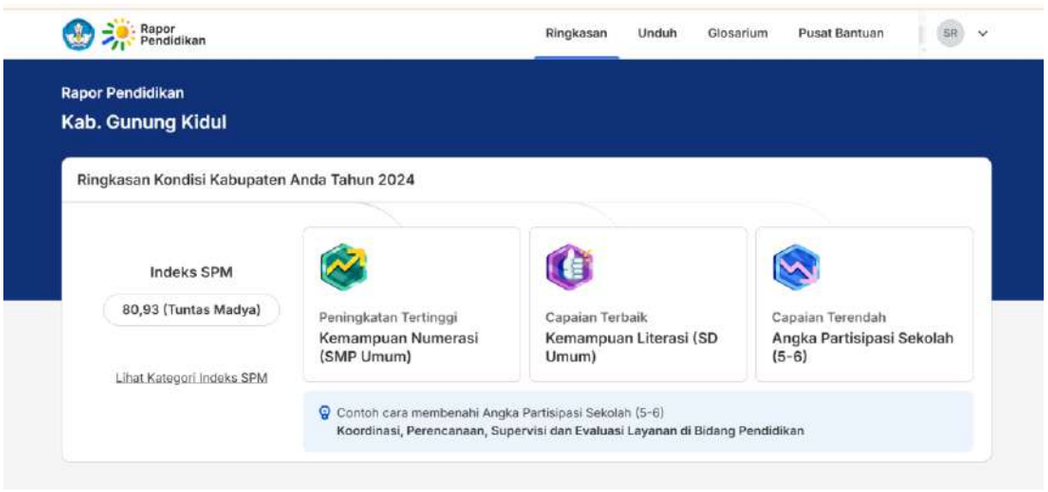


Gambar III.5 Rapor Pendidikan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024

3. **Pencapaian Target RPJMD Tahun 2021-2026**

Capaian sasaran perangkat daerah dalam kinerja ini termasuk kategori Sangat Tinggi.

4. **Pencapaian kinerja terkait Pengarus Utamaan Gender (PUG)**

Dalam rangka mewujudkan komitmen pembangunan berkeadilan dan kesetaraan gender sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengarus Utamaan Gender dalam Pembangunan Daerah, Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan meliputi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan kesetaraan telah melaksanakan kegiatan yang responsif gender, yaitu penyelenggaraan pendidikan yang menyasar kepada kelompok rentan: perempuan dan anak.

Tabel 2.21 Jumlah Siswa SD dan SMP berdasar Jenis Kelamin

| No | Tingkat Pendidikan | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SD | 23.353 | 21.484 | 44.837 |
| 2 | SMP | 12.419 | 11.419 | 23.838 |
| Jumlah total | | 35.772 | 32.903 | 68.675 |

Sumber : Data siswa dibawah kewenangan Dinas Pendidikan Kab. Gunungkidul

Untuk kelompok rentan fakir miskin pada tahun 2024 telah direalisasikan biaya personal peserta didik sebagaimana berikut:

- Peserta Didik SD sebanyak 378 siswa sebesar Rp189.000.000
- Peserta Didik SMP sebanyak 276 siswa sebesar Rp138.000.000
- Peserta Didik PAUD sebanyak 144 siswa sebesar Rp21.600.000
- Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan sebanyak 50 orang sebesar Rp25.000.000

5. **Efisiensi Anggaran**

Anggaran dan realisasi belanja untuk yang dialokasikan untuk membiayai program dan kegiatan dalam pencapaian sasaran pembangunan disajikan dalam tabel 2.22 berikut:

**Tabel 2.22**
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pendidikan**
**Kabupaten Gunungkidul**

| Uraian | Indikator Kinerja | Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke | | | | | Realisasi Capaian Tahun ke | | | | | Rasio Capaian pada Tahun ke | | | | | Rata-rata Pertumbuhan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Anggaran | Realisasi |
| (1) | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik** | **574.247.733.105** | **576.452.313.000** | **577.590.663.000** | **578.214.390.000** | **578.532.590.000** | **533.554.268.222** | **523.373.711.324** | **609.026.717.016** | - | - | 92,91 | 90,79 | 105,44 | 0,00 | 0,00 | | |
| ***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*** | ***Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah disusun tepat waktu*** | ***577.981.000*** | ***1.010.550.000*** | ***1.376.750.000*** | ***1.547.950.000*** | ***2.006.150.000*** | ***228.200.000*** | ***227.932.600*** | ***181.312.000*** | - | - | 39,48 | 22,56 | 13,17 | 0,00 | 0,00 | | |
| | ***Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah disusun tepat waktu*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | -Jumlah dokumen hasil pelaksanaan forum PD yang terkompilasi | 240.554.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.892.500 | | | | | 20,74 | | | | | | |
| | - Jumlah Dokumen penyusunan Rancangan awal Renja, Rancangan renja, Rancangan akhir renja, renja penetapan PD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | - Jumlah dokumen Renja PD yang terselesaikan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | - Jumlah dokumen Renja perubahan PD yang terselesaikan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | - Jumlah dokumen draf renstra PD 2026-2031 yang terselesaikan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | - Jumlah dokumen renstra PD 2026-2031 yang terselesaikan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 0 | 425.000.000 | 525.000.000 | 600.000.000 | 700.000.000 | | 75.142.400 | 50.527.500 | | | | 17,68 | 9,62 | 0 | | | |
| Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA yang terselesaikan | 25.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.525.000 | | | | | 25,59 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Jumlah Dokumen RKA yang terselesaikan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | - Jumlah dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 0 | 58.200.000 | 86.000.000 | 103.800.000 | 191.600.000 | | 18.678.800 | 3.422.400 | | | | 32,09 | 3,98 | 0 | | | |
| Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | - Jumlah dokumen RKA Perubahan yang terselesaikan | 25.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.750.000 | | | | | 10,78 | | | | | | |
| | - Jumlah dokumen RKA Perubahan yang terselesaikan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | - Jumlah dokumen RKA Perubahan yang terselesaikan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 0 | 58.200.000 | 86.000.000 | 103.800.000 | 191.600.000 | | 15.798.700 | 3.224.400 | | | | 27,15 | 3,75 | 0 | | | |
| Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | - Jumlah Dokumen DPA yang terselesaikan | 30.416.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.450.000 | | | | | 34,36 | | | | | | |
| | - Jumlah Dokumen DPA yang terselesaikan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | - Jumlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang terselesaikan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | - Jumlah dokumen perpanjian kinerja yang terselesaikan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah dokumen ROPK yang terselesaikan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah dokumen ROPK yang terselesaikan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | - Jumlah dokumen ROPK yang terselesaikan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 0 | 58.200.000 | 86.000.000 | 103.800.000 | 191.600.000 | | 11.331.000 | 5.693.300 | | | | 19,47 | 6,62 | 0 | | | |
| Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | - Jumlah Dokumen Perubahan DPA yang terselesaikan | 40.416.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.500.000 | | | | | 21,03 | | | | | | |
| | - Jumlah Dokumen Perubahan DPA yang terselesaikan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | - Jumlah Dokumen Perubahan DPA yang terselesaikan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | - Jumlah dokumen perpanjian kinerja perubahan yang terselesaikan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | - Jumlah dokumen perubahan ROPK yang terselesaikan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | - Jumlah dokumen perubahan ROPK yang terselesaikan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | - Jumlah dokumen perubahan ROPK yang terselesaikan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 0 | 58.200.000 | 86.000.000 | 103.800.000 | 191.600.000 | | 11.331.000 | 4.393.000 | | | | 19,47 | 5,11 | | | | |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | - Jumlah dokumen LKJIP yang terselesaikan | 25.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.400.000 | | | | | 25,60 | | | | | | |
| | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 0 | 252.000.000 | 324.000.000 | 329.000.000 | 334.000.000 | | 27.590.000 | 65.856.400 | | | | 10,95 | 20,33 | 0 | | | |
| Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - Jumlah dokumen evaluasi RKPD yang terselesaikan | 190.595.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.682.500 | | | | | 75,39 | | | | | | |
| | - Jumlah dokumen laporan hasil evaluasi renja (evaluasi hasil RKPD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | - Jumlah dokumen monev capaian SPM bidang pendidikan yang terselesaikan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah dokumen hasil Monitoring, evaluasi, dan publikasi terkait Implementasi Pendidikan Anti korupsi di tingkat Satuan Pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 0 | 100.750.000 | 183.750.000 | 203.750.000 | 205.750.000 | | 68.060.700 | 48.195.000 | | | | 67,55 | 26,23 | 0 | | | |
| ***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*** | ***Jumlah dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang selesai disusun tepat waktu*** | ***567.762.346.105*** | ***568.280.279.000*** | ***568.334.069.000*** | ***568.378.469.000*** | ***568.378.469.000*** | ***529.445.018.742*** | ***519.768.148.785*** | ***605.715.425.548*** | - | - | | | | | | | |
| | ***Persentase dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang selesai disusun tepat waktu*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah GTT database yang terfasilitasi gajinya | 567.456.016.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 529.156.188.742 | | | | | 93,25 | | | | | | |
| | Jumlah PTT database yang terfasilitasi gajinya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah GTT database yang terfasilitasi gajinya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah PTT database yang terfasilitasi gajinya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah GTT database yang terfasilitasi gajinya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah GTT database yang terfasilitasi gajinya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah GTT database yang terfasilitasi gajinya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah GTT database yang terfasilitasi gajinya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah GTT database yang terfasilitasi gajinya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Jumlah PTT database yang terfasilitasi gajinya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah GTT database yang terfasilitasi gajinya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah PTT database yang terfasilitasi gajinya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah GTT database yang terfasilitasi gajinya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah GTT database yang terfasilitasi gajinya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah GTT database yang terfasilitasi gajinya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah PTT database yang terfasilitasi gajinya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah GTT database yang terfasilitasi gajinya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah PTT database yang terfasilitasi gajinya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah GTT database yang terfasilitasi gajinya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | - Jumlah bulan terfasilitasi Gaji dan Tunjangan ASN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | - Jumlah PTT UPT TK & SD/Korwil (1 orang x 13 bulan) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | - Jumlah PTT database SD ( 21 orang x 13 bulan) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | - Jumlah PTT database TK ( 2 orang x 13 bulan) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | - Jumlah GTT database TK ( 4 orang x 13 bulan) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | - Jumlah GTT database SD ( 6 orang x 13 bulan) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | - Jumlah Insentif GTT/PTT Kategori II (49 orang x 13 bulan) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | - Jumlah GTT database sebagai guru pengganti ( GTT SD 776 orang + SMP 58 orang x 13 bulan) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | - Jumlah Insentif GTT/PTT/GTY/PTY (686 orang x 12 bulan) APBD Kabupaten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | - Jumlah THR PTT Korwil Kecamatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | - Jumlah THR PTT SD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | - Jumlah THR PTT TK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | - Jumlah THR GTT TK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | - Jumlah THR GTT SD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | - Jumlah THR Insentif GTT/PTT Kategori II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah THR data base sebagai GP (guru pengganti) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 0 | 567.968.359.000 | 568.010.359.000 | 568.010.359.000 | 568.010.359.000 | | 519.654.933.190 | 605.578.866.838 | | | | 91,49 | 106,61 | | | | | |
| Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | - Jumlah dokumen Administrasi pelaksanaan tugas ASN yang terselesaikan | 4.050.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.050.000 | | | | | 100,00 | | | | | | | |
| | - Jumlah dokumen personal file kepegawaian ASN Dinas yang terkelola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 0 | 5.810.000 | 5.810.000 | 10.810.000 | 10.810.000 | | 983.000 | 957.500 | | | | 16,92 | 16,48 | | | | |
| Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | - Jumlah dokumen Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD yang terverifikasi | 7.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.000.000 | | | | | 100,00 | | | | | | |
| | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 0 | 10.810.000 | 10.810.000 | 10.810.000 | 10.810.000 | | 2.269.500 | 1.638.300 | | | | 20,99 | 15,16 | | | | |
| Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | - Jumlah dokumen pelaksanaan akuntansi yang terfasilitasi | 25.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000.000 | | | | | 100,00 | | | | | | |
| | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | 0 | 25.000.000 | 25.000.000 | 25.000.000 | 25.000.000 | | 9.804.500 | 5.240.900 | | | | 39,22 | 20,96 | | | | |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah dokumen laporan keuangan akir tahun yang terselesaikan | 35.080.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.080.000 | | | | | 100,00 | | | | | | |
| | -Jumlah dokumen laporan Keuangan Akhir Tahun dan CALK yang terselesaikan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 0 | 35.100.000 | 35.100.000 | 69.500.000 | 69.500.000 | | 19.948.560 | 19.963.900 | | | | 56,83 | 56,88 | 0 | | | |
| Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | - Jumlah dokumen bahan tanggapan pemeriksaan yang terselesaikan | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000.000 | | | | | 100,00 | | | | | | |
| | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | | 1.180.000 | 300.000 | | | | 23,60 | 6,00 | 0 | | | |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | -Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran yang terselesaikan | 200.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.700.000 | | | | | 91,26 | | | | | | |
| | -Jumlah dokumen laporan Keuangan Bulanan/SPJ yang terselesaikan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | Peningkatan Kualitas SDM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 0 | 230.200.000 | 241.990.000 | 241.990.000 | 241.990.000 | | 79.030.035 | 108.458.110 | | | | 34,33 | 44,82 | 0 | | | |
| Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | - Jumlah dokumen pelaporan prognosis realisasi anggaran yang terselesaikan | 30.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000.000 | | | | | 100,00 | | | | | | |
| | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*** | ***Jumlah dokumen administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat daerah yang selesai disusun tepat waktu*** | ***817.445.000*** | ***821.085.000*** | ***861.085.000*** | ***911.085.000*** | ***961.085.000*** | ***731.385.000*** | ***746.364.500*** | ***688.269.350*** | - | - | | | | | | | |
| | ***Persentase dokumen administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat daerah yang selesai disusun tepat waktu*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD yang tersusun dengan baik | 2.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500.000 | | | | | 100,00 | | | | | | |
| | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | 0 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | | 1.485.000 | | | | | 59,40 | 0,00 | | | | |
| Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Dokumen pinjam pakai Barang Milik Daerah SKPD | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000.000 | | | | | 100,00 | | | | | | |
| | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | | | | | | | | | | | | |
| Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah peserta rakor dan penilaian Barang Milik Daerah SKPD | 41.585.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.585.000 | | | | | 85,57 | | | | | | |
| | Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | 0 | 41.585.000 | 41.585.000 | 41.585.000 | 41.585.000 | | 13.016.000 | 3.899.900 | | | | 31,30 | 9,38 | | | | |
| Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | -Jumlah peserta mengikuti workshop Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | 20.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000.000 | | | | | 50,00 | | | | | | |
| | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | 0 | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | | 10.544.000 | | | | | 52,72 | | | | | |
| Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah dokumen Laporan Barang Milik Daerah yang terselesaikan | 706.375.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 648.860.000 | | | | | 91,86 | | | | | | |
| | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 0 | 710.000.000 | 750.000.000 | 800.000.000 | 850.000.000 | | 707.172.500 | 677.770.000 | | | | 99,60 | 90,37 | | | | |
| Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | - Jumlah dokumen BHP yang disusun | 31.985.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.440.000 | | | | | 60,78 | | | | | | |
| | - Jumlah dokumen aset yang disusun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 0 | 32.000.000 | 32.000.000 | 32.000.000 | 32.000.000 | | 9.395.000 | 6.599.450 | | | | 29,36 | 20,62 | | | | |
| Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD | "-Jumlah Dokumen Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD" | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000.000 | | | | | 100,00 | | | | | | |
| | Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD | 0 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | | 4.752.000 | | | | | 47,52 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*** | ***Jumlah PNS yang terlayani dalam pengelolaan Administrasi Kepegawaian*** | ***331.310.000*** | ***331.310.000*** | ***361.310.000*** | ***361.310.000*** | ***346.310.000*** | ***199.420.000*** | ***38.483.000*** | ***238.931.992*** | - | - | | | | | | | |
| | ***Persentase PNS yang terlayani dalam pengelolaan Administrasi Kepegawaian*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | Jumlah Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai yang terfasilitasi | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000.000 | | | | | 100,00 | | | | | | |
| | Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | | 15.750.000 | | | | | 315,00 | | | | | |
| Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 20.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.500.000 | | | | | 47,50 | | | | | | |
| | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 0 | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | | 9.455.000 | 87.045.592 | | | | 47,28 | 435,23 | | | | |
| Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | Jumlah peserta workshop Sistem Informasi Kepegawaian yang terfasilitasi | 90.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | | | | | 0,00 | | | | | | |
| | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian | 0 | 90.000.000 | 90.000.000 | 90.000.000 | 90.000.000 | | | | | | | | | | | | |
| Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Jumlah sekolah sasaran Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000.000 | | | | | 100,00 | | | | | | |
| | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | | 3.455.000 | 440.000 | | | | 69,10 | 8,80 | | | | |
| Pemindahan Tugas ASN | - Jumlah kepala sekolah, guru, pengawas sekolah, penilik, pamong belajar dan pejabat fungsional lainnya yang mengikuti pelantikan dan pengambilan sumpah/janji | 15.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.400.000 | | | | | 76,00 | | | | | | |
| | Jumlah ASN yang dipindah tugaskan | 0 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | | | | | | | | | | | | |
| Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah peserta Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 75.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.790.000 | | | | | 70,39 | | | | | | |
| | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 0 | 75.000.000 | 75.000.000 | 75.000.000 | 75.000.000 | | | | | | | | | | | | |
| Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | - Jumlah Sosialisasi, Implementasi, dan Evaluasi Pelaksanaan Wawasan Kebangsaan | 106.310.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.390.000 | | | | | 95,37 | | | | | | |
| | - Jumlah Sosialisasi Geopark bagi guru dan pelajar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah peserta yang dinyatakan lulus dalam pembinaan Komite Sekolah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah peserta yang dinyatakan lulus dalam pembinaan dewan pendidika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 0 | 106.310.000 | 106.310.000 | 106.310.000 | 106.310.000 | | | 151.446.400 | | | | 0,00 | 142,46 | | | | |
| Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah dokumen raperbub tentang PPDB | 15.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.340.000 | | | | | 95,60 | | | | | | |
| | Jumlah dokumen raperbub tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah dokumen raperbub tentang Rencana Aksi Daerah (RAD) PAUD HI (Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 0 | 15.000.000 | 45.000.000 | 45.000.000 | 30.000.000 | | 9.823.000 | | | | | 65,49 | 0,00 | | | | |
| ***Administrasi Umum Perangkat Daerah*** | ***Jumlah Administrasi Umum terlayani*** | ***2.890.174.000*** | ***3.971.287.000*** | ***4.301.888.000*** | ***4.660.015.000*** | ***4.485.015.000*** | ***1.545.456.576*** | ***1.370.527.210*** | ***687.537.524*** | - | - | | | | | | | |
| | ***Persentase Administrasi Umum terlayani*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | - Jumlah komponen kelistrikan yang tersedia | 53.240.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.240.000 | | | | | 100,00 | | | | | | |
| | - Jumlah komponen kelistrikan yang tersedia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | - Jumlah komponen kelistrikan yang tersedia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | - Jumlah komponen kelistrikan yang tersedia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | - Jumlah komponen kelistrikan yang tersedia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | - Jumlah komponen kelistrikan yang tersedia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | - Jumlah komponen kelistrikan yang tersedia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | - Jumlah komponen kelistrikan yang tersedia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | - Jumlah komponen kelistrikan yang tersedia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | - Jumlah komponen kelistrikan yang tersedia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | - Jumlah komponen kelistrikan yang tersedia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | - Jumlah komponen kelistrikan yang tersedia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | - Jumlah komponen kelistrikan yang tersedia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | - Jumlah komponen kelistrikan yang tersedia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | - Jumlah komponen kelistrikan yang tersedia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | - Jumlah komponen kelistrikan yang tersedia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | - Jumlah komponen kelistrikan yang tersedia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - Jumlah komponen kelistrikan yang tersedia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | - Jumlah komponen kelistrikan yang tersedia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | - Jumlah komponen kelistrikan yang tersedia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 0 | 54.240.000 | 54.240.000 | 54.240.000 | 54.240.000 | | 19.762.075 | 9.678.400 | | | | 36,43 | 17,84 | | | | |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | - Jumlah dan jenis alat tulis kantor semua kegiatan | 744.047.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 483.719.000 | | | | | 65,01 | | | | | | |
| | - Jumlah dan jenis alat tulis kantor semua kegiatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | - Jumlah dan jenis alat tulis kantor semua kegiatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | - Jumlah dan jenis alat tulis kantor semua kegiatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | - Jumlah dan jenis alat tulis kantor semua kegiatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | - Jumlah dan jenis alat tulis kantor semua kegiatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | - Jumlah dan jenis alat tulis kantor semua kegiatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | - Jumlah dan jenis alat tulis kantor semua kegiatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | - Jumlah dan jenis alat tulis kantor semua kegiatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | - Jumlah dan jenis alat tulis kantor semua kegiatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | - Jumlah dan jenis alat tulis kantor semua kegiatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | - Jumlah dan jenis alat tulis kantor semua kegiatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | - Jumlah dan jenis alat tulis kantor semua kegiatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | - Jumlah dan jenis alat tulis kantor semua kegiatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | - Jumlah dan jenis alat tulis kantor semua kegiatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | - Jumlah dan jenis alat tulis kantor semua kegiatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | - Jumlah dan jenis alat tulis kantor semua kegiatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | - Jumlah dan jenis alat tulis kantor semua kegiatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | - Jumlah dan jenis alat tulis kantor semua kegiatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | - Jumlah dan jenis alat tulis kantor semua kegiatan (Sekretariat dan Bidang) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah komputer yang dibeli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - Jumlah laptop yang dibeli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | - Jumlah komputer / PC yang dibeli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | - Jumlah LCD projector yang dibeli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah layar proyektor beserta tripodnya 84' yang dibeli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | - Jumlah drone kamera untuk peliputan kegiatan olahraga dan kegiatan lapangan yang dibeli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | - Jumlah sound system lengkap (amplifier, speaker, microphone) untuk ruang rapat sasana among karsa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | - Jumlah dan jenis server dan peralatan serta perlengkapan server yang terbeli (UPS, AVR/Automatic Voltage Regulator dll) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 0 | 1.618.773.000 | 1.618.773.000 | 1.618.773.000 | 1.518.773.000 | | 560.994.100 | 191.370.710 | | | | 34,66 | 11,82 | | | | | |
| Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah bahan dan peralatan kebersihan yang terbeli | 207.498.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.180.500 | | | | | 99,37 | | | | | | | |
| | Jumlah bahan dan peralatan kebersihan yang terbeli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah bahan dan peralatan kebersihan yang terbeli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah bahan dan peralatan kebersihan yang terbeli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah bahan dan peralatan kebersihan yang terbeli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah bahan dan peralatan kebersihan yang terbeli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah bahan dan peralatan kebersihan yang terbeli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah bahan dan peralatan kebersihan yang terbeli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah bahan dan peralatan kebersihan yang terbeli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah bahan dan peralatan kebersihan yang terbeli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah bahan dan peralatan kebersihan yang terbeli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah bahan dan peralatan kebersihan yang terbeli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah bahan dan peralatan kebersihan yang terbeli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah bahan dan peralatan kebersihan yang terbeli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah bahan dan peralatan kebersihan yang terbeli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah bahan dan peralatan kebersihan yang terbeli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Jumlah bahan dan peralatan kebersihan yang terbeli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah bahan dan peralatan kebersihan yang terbeli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah bahan dan peralatan kebersihan yang terbeli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah bahan dan peralatan kebersihan yang terbeli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 0 | 209.053.000 | 209.053.000 | 209.053.000 | 209.053.000 | | 155.869.055 | 150.094.342 | | | | 74,56 | 71,80 | | | | |
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor | - Jumlah barang habis pakai yang tersedia | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.988.100 | | | | | 99,76 | | | | | | |
| | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 0 | 50.000.000 | 50.000.000 | 50.000.000 | 50.000.000 | | 1.806.300 | | | | | 3,61 | 0,00 | | | | |
| Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah barang cetakan | 81.900.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.427.000 | | | | | 99,42 | | | | | | |
| | Jumlah lembar fotocopy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah barang cetakan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah lembar fotocopy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah barang cetakan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah lembar fotocopy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah barang cetakan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah lembar fotocopy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah barang cetakan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah lembar fotocopy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah barang cetakan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah lembar fotocopy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah barang cetakan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah lembar fotocopy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah barang cetakan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah lembar fotocopy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah barang cetakan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah lembar fotocopy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah barang cetakan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah lembar fotocopy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah barang cetakan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah lembar fotocopy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah barang cetakan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah lembar fotocopy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah barang cetakan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah lembar fotocopy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah barang cetakan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah lembar fotocopy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah barang cetakan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah lembar fotocopy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah barang cetakan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah lembar fotocopy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah barang cetakan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah lembar fotocopy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah barang cetakan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah lembar fotocopy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah barang cetakan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah lembar fotocopy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah barang cetakan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah lembar fotocopy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah barang cetakan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah lembar fotocopy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah barang cetakan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah lembar fotocopy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah barang cetakan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah lembar fotocopy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah barang cetakan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah lembar fotocopy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah barang cetakan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah lembar fotocopy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah barang cetakan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah lembar fotocopy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah barang cetakan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah lembar fotocopy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah barang cetakan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | - Jumlah barang cetakan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | - Jumlah lembar fotocopy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | - Jumlah jilidan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 0 | 96.650.000 | 96.650.000 | 96.650.000 | 96.650.000 | | 69.155.540 | 16.063.500 | | | | 71,55 | 16,62 | | | | |
| Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah tagihan surat kabar yang terbayar (2 surat kabar X 12 Bulan) | 3.816.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.240.000 | | | | | 84,91 | | | | | | |
| | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 0 | 3.816.000 | 3.816.000 | 3.816.000 | 3.816.000 | | 5.220.000 | | | | | 136,79 | 0,00 | | | | |
| Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 0 | 51.000.000 | 51.000.000 | 51.000.000 | 51.000.000 | | | 600.000 | | | ### | | | | | | |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah makanan dan minuman tersedia untuk rapat | 451.268.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.536.976 | | | | | 64,16 | | | | | | |
| | Jumlah minuman dan snack untuk rapat dan tamu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah makanan dan minuman tersedia untuk rapat dan tamu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah minuman dan snack untuk rapat dan tamu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah makanan dan minuman tersedia untuk rapat dan tamu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah minuman dan snack untuk rapat dan tamu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah makanan dan minuman tersedia untuk rapat dan tamu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah minuman dan snack untuk rapat dan tamu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah makanan dan minuman tersedia untuk rapat dan tamu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah minuman dan snack untuk rapat dan tamu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah makanan dan minuman tersedia untuk rapat dan tamu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah minuman dan snack untuk rapat dan tamu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah manan dan minuman tersedia untuk rapat dan tanu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah minuman dan snack untuk rapat dan tamu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah minuman dan snack tersedia untuk rapat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah minuman dan snack untuk rapat dan tamu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah minuman dan snack yang tersedia untuk rapat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah minuman dan snack untuk rapat dan tamu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah makanan dan minuman tersedia untuk rapat dan tamu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah minuman dan snack untuk rapat dan tamu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Jumlah makanan dan minuman tersedia untuk rapat dan tamu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah minuman dan snack tersedia untuk rapat dan tamu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah makanan dan minuman tersedia untuk rapat dan tamu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah minuman dan snack untuk rapat dan tamu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah makanan dan minuman tersedia untuk rapat dan tamu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah minuman dan snack tersedia untuk rapat dan tamu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah makanan dan minuman tersedia untuk rapat dan tamu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah makanan dan minuman yang tersedia untuk rapat dan tamu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah minuman dan snack untuk rapat dan tamu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah minuman dan snack tersedia untuk rapat dan tamu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah makanan dan minuman tersedia untuk rapat dan tamu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | jumlah makanan dan minuman tersedia untuk rapat dan tamu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah minuman dan snack untuk rapat dan tamu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah minuman dan snack tersedia untuk rapat dan tamu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah makanan dan minuman tersedia untuk rapat dan tamu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah minuman dan snack tersedia untuk rapat dan tamu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | - Jumlah minuman dan snack tersedia untuk rapat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | - Jumlah makanan dan minuman tersedia untuk rapat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | - Jumlah makanan dan minuman tersedia untuk tamu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi dalam Daerah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi dalam Daerah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi dalam Daerah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi dalam Daerah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi dalam Daerah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi dalam Daerah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Jumlah Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi dalam Daerah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi dalam Daerah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi dalam Daerah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi dalam Daerah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi dalam Daerah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi dalam Daerah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi dalam Daerah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi dalam Daerah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi dalam Daerah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi dalam Daerah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi dalam Daerah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi luar Daerah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | - Jumlah peserta rapat koordinasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 0 | 700.520.000 | 700.520.000 | 700.520.000 | 700.520.000 | | 85.512.640 | 86.002.722 | | | | 12,21 | 12,28 | | | | | |
| Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah sistem pemerintahan berbasis elektronik yang tersedia | 1.343.405.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423.125.000 | | | | | 31,50 | | | | | | | |
| | Jumlah Dokumen profil perangkat daerah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 0 | 1.187.235.000 | 1.517.836.000 | 1.875.963.000 | 1.800.963.000 | | 472.207.500 | 233.727.850 | | | | 39,77 | 15,40 | | | | | |
| ***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*** | ***Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan terlaksana*** | ***103.292.000*** | ***130.092.000*** | ***208.390.000*** | ***208.390.000*** | ***208.390.000*** | ***101.569.500*** | ***49.750.000*** | - | - | - | | | | | | | | |
| | ***Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan terlaksana*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pengadaan Mebel | - Jumlah meja kerja 1,5 biro yang dibeli | 70.092.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.369.500 | | | | | 97,54 | | | | | | | |
| | - Jumlah dan jenis kursi kerja (kursi putar/eksekutif) dibeli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - Jumlah dan jenis rak yang dibeli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | - Jumlah pengadaan meja rapat (RR sasana among karsa, sasana pramudya, handayani) yang dibeli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | - Jumlah pengadaan kursi rapat (kursi sidang RR sasana among karsa, sasana pramudya, handayani) yang dibeli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | - Jumlah almari kaca yang dibeli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | - Jumlah filling kabinet yang dibeli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | - Jumlah kursi tunggu 4 set ruang unit layanan terpadu yang dibeli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | - Jumlah alat permainan anak ruang unit layanan terpadu yang dibeli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | - Jumlah lemari arsip dorong (mobile file) yang dibeli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 0 | 70.092.000 | 148.390.000 | 148.390.000 | 148.390.000 | | 40.750.000 | | | | | 58,14 | 0,00 | | | | | |
| Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | - Jumlah AC yang terbeli | 15.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000.000 | | | | | 100,00 | | | | | | | |
| | - Jumlah kipas angin yang terbeli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | - Jumlah CCTV yang terbeli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 0 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | | 9.000.000 | | | | | 30,00 | 0,00 | | | | | |
| Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | - Jumlah korden yang terbeli | 18.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.200.000 | | | | | 100,00 | | | | | | | |
| | - Jumlah tralis yang terbeli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 0 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | | | | | | | | | | | | | |
| ***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*** | ***Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terfasilitasi*** | ***905.110.000*** | ***1.042.410.000*** | ***1.261.871.000*** | ***1.261.871.000*** | ***1.261.871.000*** | ***682.560.204*** | ***688.481.531*** | ***741.126.052*** | - | - | | | | | | | | |
| | ***Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terfasilitasi*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Jasa yang diterima atas pemanfaatan listrik (1 rekening X 12 Bulan) | 668.460.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478.642.204 | | | | | 71,60 | | | | | | | |
| | Jumlah tagihan air yang dibayar (1 rekening X 12 Bulan) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah jasa yang diterima atas pemanfaatan listrik (1 rekening X 12 Bulan) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Jumlah jasa tagihan air yang dibayar ( 1 rekening x 12 bulan) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah jasa yang diterima atas pemanfaatan listrik ( 1 rekening x 12 bulan ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah jasa yang diterima atas pemanfaatan listrik ( 1 rekening x 12 bulan) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah jasa tagihan air yang dibayar ( 1 rekening x 12 bulan ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah jasa yang diterima atas pemanfaatan listrik ( 1 rekening x 12 bulan) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah jasa tagihan air yang dibayar ( 1 rekening x 12 bulan) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah jas yang diterima atas pemanfaatan listrik ( 1 rekening x 12 bulan) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah jasa tagihan air yang dibayar ( 1 rekening x 12 bulan) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah jasa tagihan air yang dibayar ( 1 rekening x 12 bulan ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah jasa diterima atas pemanfaatan listrik (1 rekening x 12 bulan) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah jasa yang diterima atas pemanfaatan listrik ( 1 rekening x 12 bulan) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah jasa tagihan air yang dibayar ( 1 rekening x 12 bulan) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah jasa yang diterima atas pemanfaatan listrik ( 1 rekening x 12 bulan) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah jasa tagihan air yang dibayar ( 1 rekening x 12 bulan ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah jas yang diterima atas pemanfaatan listrik (1 rekening x 12 bulan) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah jasa tagihan air yang dibayar (1 rekening x 12 bulan) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah jasa atas pemanfaatan listrik ( 1 rekening x 12 bulan ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah tagihan air yang dibayarkan ( 1 rekening x 12 bulan ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah jasayang diterima atas pemanfaatan listrik (1 rekeningx12bulan) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah jasa tagihan air yang dibayar ( 1 rekening x 12 bulan) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Jasa yang diterima atas pemanfaatan listrik ( 1 rekening x12bulan ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Jasa tagian air yang dibayar ( 1 rekening x 12 bulan ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah jasa tagihan air yang terbayarkan (1 rekening x 12 bulan) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Jumlah Jasa yang diterima atas pemanfaatan listrik (1 rekening x 12 bulan) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Jasa yang diterima atas pemanfaatan listrik ( 1 rekening x 12 bulan ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Jasa tagihan air yang dibayar ( 1 rekening x 12 bulan) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Jasa yang diterima atas pemanfaatan listrik ( 1 rekening x 12 bulan ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah jasa tagihan air yang dibayarkan ( 1 rekening x 12 bulan ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah jasa yang diterima atas pemanfaatan listrik ( 1 rekening x 12 bulan ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah jasa tagihan air yang dibayar ( 1 rekening x 12 bulan) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Jasa yang diterima atas pemanfaatan listrik (1 rekening X 12 Bulan) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Jasa yang diterima atas pemanfaatan listrik (1 rekening X 12 Bulan) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah tagihan air yang dibayar (1 rekening X 12 Bulan) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Jasa tagihan telephone yang dibayar (1 rekening X 12 Bulan) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | - Jumlah sarana jasa telephon/kawat/faximile yang terbayar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | - Jumlah sarana jasa air yang terbayar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | - Jumlah sarana jasa listrik yang terbayar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 0 | 698.710.000 | 698.710.000 | 698.710.000 | 698.710.000 | | 416.381.531 | 414.966.052 | | | | 59,59 | 59,39 | | | | |
| Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah personal komputer yang terfasilitasi pemeliharaannya | 206.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198.468.000 | | | | | 96,34 | | | | | | |
| | Jumlah personal laptop yang terfasilitasi pemeliharaannya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah personal printer yang terfasilitasi pemeliharaannya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah jaringan internet yang terfasilitasi pemeliharaannya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah personal komputer yang terfasilitasi pemeliharaannya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah personal laptop yang terfasilitasi pemeliharaannya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah personal printer yang terfasilitasi pemeliharaannya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah jaringan internet yang terfasilitasi pemeliharaannya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Jumlah personal komputer yang terfasilitasi pemeliharaannya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah personal laptop yang terfasilitasi pemeliharaannya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah personal printer yang terfasilitasi pemeliharaannya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah jaringan internet yang terfasilitasi pemeliharaannya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah personal laptop yang terfasilitasi pemeliharaannya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah personal printer yang terfasilitasi pemeliharaannya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah jaringan internet yang terfasilitasi pemeliharaannya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah personal printer yang terfasilitasi pemeliharaannya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah personal laptop yang terfasilitasi pemeliharaannya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah personal komputer yang terfasilitasi pemeliharaannya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah jaringan internet yang terfasilitasi pemeliharaannya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah personal laptop yang terfasilitasi pemeliharaannya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah personal printer yang terfasilitasi pemeliharaannya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah jaringan internet yang terfasilitasi pemeliharaannya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah personal komputer yang terfasilitasi pemeliharaannya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah personal laptop yang terfasilitasi pemeliharaannya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah personal printer yang terfasilitasi pemeliharaannya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah personal LCD yang terfasilitasi pemeliharaannya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah personal printer yang terfasilitasi pemeliharaannya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah jaringan internet yang terfasilitasi pemeliharaannya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah personal komputer yang terfasilitasi pemeliharaannya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah personal laptop yang terfasilitasi pemeliharaannya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah jaringan internet yang terfasilitasi pemeliharaannya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah personal komputer yang terfasilitasi pemeliharaanya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah jaringan internet yang terfasilitasi pemeliharaanya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah personal printer yang terfasilitasi pemeliharaanya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Jumlah personal laptop yang terfasilitasi pemeliharaanya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah personal komputer yang terfasilitasi pemeliharaannya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah personal laptop yang terfasilitasipemeliharaannya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah personal printer yang terfasilitasipemeliharaannya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah personal printer yang terfasilitasi pemeliharaannya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah personal laptop yang terfasilitasi pemeliharaannya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah personal wireles yang terfasilitasi pemeliharaannya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah jaringan internet yang terfasilitasi pemeliharaannya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah personal Laptop yang terfasilitasi pemeliharaanya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah personal printer yang terfasilitasi pemeliharaanya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah jaringan internetyang terfasilitasi pemeliharaannya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah personal labtop yang terfasilitasi pemeliharaannya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah personal komputer yang terfasilitasi pemeliharaannya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah jaringan internet yang terfasilitasi pemeliharaannya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah pemeliharaan peralatan kantor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah peralatan kantor yang dipelihara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah jaringan internet yang terfasilitasi pemeliharaannya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah personal komputer yang terfasilitasi pemeliharaannya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah jaringan internet yang terfasilitasi pemeliharaannya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | - Jumlah pengadaan jaringan internet k untuk mendukung KBM K-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | - Jumlah Jasa lisensi perangkat server (fortigate dll) dan jasa perangkat lunak yang dibayar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | - Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 0 | 306.000.000 | 525.461.000 | 525.461.000 | 525.461.000 | | 268.000.000 | 268.000.000 | | | | 87,58 | 51,00 | | | | | |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Sewa tanah yang terfasilitasi | 30.650.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.450.000 | | | | | 17,78 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Jumlah sewa tanah yang dibayarkan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah sewa tanah yang dibayar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah sewa tanah yang terbayarkan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | - Jumlah sewa tanah Stadion Handayani dan Gedung Kesenian yang terbayarkan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 0 | 37.700.000 | 37.700.000 | 37.700.000 | 37.700.000 | | 4.100.000 | 58.160.000 | | | | 10,88 | 154,27 | | | | |
| ***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*** | ***Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terfaslitasi pemeliharaanya*** | ***777.700.000*** | ***865.300.000*** | ***885.300.000*** | ***885.300.000*** | ***885.300.000*** | ***588.883.200*** | ***484.023.698*** | ***774.114.550*** | - | - | | | | | | | |
| | ***Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terfaslitasi pemeliharaanya*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah mobil dinas yang terpelihara dan terbayarkan pajaknya | 295.900.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.312.200 | | | | | 58,23 | | | | | | |
| | jumlah motor roda 3 yang terpelihara dan terbayarkan pajaknya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | - Jumlah dan jenis kendaraan dinas (roda empat) yang dipelihara dan terbayarkan pajaknya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | - Jumlah dan jenis kendaraan dinas (roda dua) yang dipelihara dan terbayarkan pajaknya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 0 | 295.900.000 | 295.900.000 | 295.900.000 | 295.900.000 | | 150.910.100 | 190.340.800 | | | | 51,00 | 64,33 | | | | |
| Pemeliharaan Mebel | - Jumlah dan jenis mebelair yang dipelihara | 16.800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.800.000 | | | | | 100,00 | | | | | | |
| | - Jumlah dan jenis mebelair yang dipelihara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Mebel yang Dipelihara | 0 | 55.000.000 | 75.000.000 | 75.000.000 | 75.000.000 | | 5.000.000 | | | | | 9,09 | 0,00 | | | | |
| Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah komputer yang dipelihara | 67.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.300.000 | | | | | 98,96 | | | | | | |
| | Jumlah Mesin ketik yang dipelihara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah printer yang dipelihara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah sound system yang terpelihara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | jumlah peralatan studio musik yang terpelihara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah kamera yang terpelihara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - Jumlah komputer yang terfasilitasi pemeliharaannya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | - Jumlah printer yang terfasilitasi pemeliharaannya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | - Jumlah sound sistem yang terfasilitasi pemeliharaannya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | - Jumlah kunci pintu digital yang terfasilitasi pemeliharaannya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | - Jumlah genset yang terfasilitasi pemeliharaannya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 0 | 88.900.000 | 88.900.000 | 88.900.000 | 88.900.000 | | 229.499.598 | 571.773.750 | | | | 258,15 | 643,17 | | | | | |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah pemeliharaan gedung kantor | 274.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.988.000 | | | | | 99,45 | | | | | | | |
| | Jumlah pemeliharaan gedung kantor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah pemeliharaan gedung kantor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah pemeliharaan gedung kantor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah pemeliharaan gedung kantor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah pemeliharaan gedung kantor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah pemeliharaan gedung kantor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah pemeliharaan gedung kantor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah pemeliharaan gedung kantor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah pemeliharaan gedung kantor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah pemeliharaan gedung kantor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah pemeliharaan gedung kantor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah pemeliharaan gedung kantor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah pemeliharaan gedung kantor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah pemeliharaan gedung kantor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah pemeliharaan gedung kantor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah pemeliharaan gedung kantor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah pengecatan gedung kantor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | - Jumlah dan jenis bangunan gedung kantor ( atap, pintu dan jendela, lantai, kamar kecil, pengecatan) yang dipelihara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | -Jumlah pengecatan gedung kantor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - Jumlah sanitasi air bersih, tampungan air terfokus beserta saringan air bersih yg terpelihara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 0 | 302.000.000 | 302.000.000 | 302.000.000 | 302.000.000 | | 98.614.000 | | | | | 32,65 | 0,00 | | | | | |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah AC yang dipelihara | 123.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.483.000 | | | | | 48,97 | | | | | | | |
| | Jumlah jaringan internet yang dipelihara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | - Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor (AC) yang dipelihara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | - Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor (CCTV) yang dipelihara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | - Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor (jaringan internet, jaringan telf, dll) yang dipelihara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 0 | 123.500.000 | 123.500.000 | 123.500.000 | 123.500.000 | | | 12.000.000 | | | | | 9,72 | | | | | |
| ***Penataan Organisasi*** | ***Jumlah dokumen pelayanan publik dan tata laksana yang tersusun*** | ***82.375.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***31.775.000*** | - | - | - | - | | | | | | | | |
| | ***Nilai Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana | - Jumlah dokumen Pengukuran IKM | 82.375.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.775.000 | | | | | 38,57 | | | | | | | |
| | - Jumlah dokumen SOP yang direvisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | - Jumlah dokumen RTP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | - Jumlah dokumen SPIP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | - Jumlah Forum Konsultasi Publik yang terlaksana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | - Jumlah petunjuk/banner/pengumuman yang dicetak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | - Jumlah workshop/sosialisasi pelayanan publik yang terlaksana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | - Jumlah workshop peningkatan kapasitas SDM (capacity building) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | - Jumlah buletin pendidikan, pemuda dan olahraga yang diterbitkan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| **PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN** | **Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi di PAUD;** | **153.604.396.000** | **181.290.681.000** | **185.372.437.000** | **200.025.592.000** | **219.197.266.000** | **169.526.620.104** | **126.762.607.763** | **119.136.629.942** | - | - | 110,37 | 69,92 | 64,27 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | **Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi di sekolah dasar;** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi di sekolah menengah pertama;** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | | | | | | | | | | | | |
| | **Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi di pendidikan kesetaraan** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | | | | | | | | | | | | |
| | **Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD;** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | | | | | | | | | | | | |
| | **Angka Partisipasi Kasar (APK) SD;** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | | | | | | | | | | | | |
| | **Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | | | | | | | | | | | | |
| ***Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar*** | ***Jumlah Sekolah Dasar yang terakreditasi A*** | ***72.417.209.878*** | ***77.994.246.000*** | ***83.473.455.000*** | ***90.912.253.000*** | ***99.973.927.000*** | ***78.506.050.523*** | ***53.108.367.873*** | ***48.241.715.586*** | - | - | 108,41 | 68,09 | 57,79 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | ***Persentase SD yang terakreditasi A*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) | - Jumlah Unit sekolah baru yang di bangun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun | 0 | 0 | 150.000.000 | 150.000.000 | 150.000.000 | | | | | | | | | | | | | |
| Penambahan Ruang Kelas Baru | Jumlah ruang kelas baru (RKB) yang dibangun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Pembangunan ruang laboraturium komputer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah ruang pusat sumber pendidikan inklusif yang dibangun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah | 0 | 0 | 150.000.000 | 300.000.000 | 300.000.000 | | | | | | | | | | | | | |
| Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | Jumlah Pembangunan ruang guru yang selesai | 648.264.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.157.200 | | | | | 28,10 | | | | | | | |
| | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang dibangun | 0 | 648.264.000 | 648.264.000 | 648.264.000 | 648.264.000 | | | 186.948.000 | | | | | 28,84 | | | | | |
| Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah | Jumlah ruang unit kesehatan sekolah yang dibangun | 79.033.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 0,00 | | | | | | | |
| | Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang dibangun | 0 | 79.033.000 | 79.033.000 | 79.033.000 | 79.033.000 | | 75.194.000 | | | | | 95,14 | | | | | | |
| Pembangunan Perpustakaan Sekolah | Jumlah ruang perpustakaan sekolah yang dibangun | 618.849.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 491.820.500 | | | | | 79,47 | | | | | | | |
| | Jumlah Perpustakaan Sekolah yang telah Dibangun | 0 | 618.849.000 | 618.849.000 | 618.849.000 | 618.849.000 | | | 177.622.000 | | | | | 28,70 | | | | | |
| Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Jumlah toilet (jamban) beserta sanitasinya yang dibangun | 1.261.317.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.957.150 | | | | | 17,28 | | | | | | | |
| | - Jumlah Pagar sekolah yang selesai dibangun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun | 0 | 1.261.317.000 | 1.261.317.000 | 1.261.317.000 | 1.261.317.000 | | 302.406.800 | 99.451.000 | | | | 23,98 | 7,88 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah | - Jumlah rumah dinas kepala sekolah/guru/penjaga sekolah yang dibangun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun | 0 | 0 | 150.000.000 | 300.000.000 | 150.000.000 | | | | | | | | | | | | |
| Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas | Jumlah ruang kelas dengan tingkat kerusakan sedang atau berat yang direhab | 9.915.449.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.636.410.700 | | | | | 66,93 | | | | | | |
| | Jumlah ruang kelas dengan tingkat kerusakan sedang atau berat yang direhab (SD N Gatak dan SD Mendang) dari PIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah ruang kelas dengan tingkat kerusakan sedang atau berat yang direhab dari RESES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat | 0 | 9.915.449.000 | 9.915.449.000 | 9.915.449.000 | 9.915.449.000 | | 2.039.257.490 | | | | | 20,57 | 0,00 | | | | |
| Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | Jumlah ruang guru dengan tingkat kerusakan sedang atau berat yang direhab | 259.306.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah ruang kepala sekolah dengan tingkat kerusakan sedang atau berat yang direhab | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang direhab | 0 | 259.306.000 | 259.306.000 | 259.306.000 | 259.306.000 | | 215.065.000 | 119.649.000 | | | | 82,94 | 46,14 | | | | |
| Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah | -Jumlah ruang unit kesehatan sekolah yang di rehab | 94.840.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang direhab | 0 | 94.840.000 | 94.840.000 | 94.840.000 | 94.840.000 | | 39.238.100 | 76.281.000 | | | | 41,37 | 80,43 | | | | |
| Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah | Jumlah ruang perpustakaan dengan tingkat kerusakan sedang/berat, yang direhab | 371.310.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.748.600 | | | | | 23,36 | | | | | | |
| | Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah direhab | 0 | 371.310.000 | 371.310.000 | 371.310.000 | 371.310.000 | | | 104.994.000 | | | | | 28,28 | | | | |
| Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Rehabilitasi jamban siswa/guru dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta sanitasinya | 126.678.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.792.900 | | | | | 22,73 | | | | | | |
| | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas sekolah yang telah direhabilitasi sedang/berat | 0 | 126.678.000 | 126.678.000 | 126.678.000 | 126.678.000 | | 376.017.100 | | | | | 296,83 | 0,00 | | | | |
| Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah | Jumlah rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah yang selesai direhab | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat | 0 | 50.000.000 | 75.000.000 | 100.000.000 | 125.000.000 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pengadaan Mebel Sekolah | - Jumlah pengadaan mebelair ruang kelas dari dana DAU dalam rangka pemenuhan SNP | 269.295.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428.315.700 | | | | | 159,05 | | | | | | |
| | Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia | 0 | 269.295.000 | 269.295.000 | 269.295.000 | 269.295.000 | | 123.030.000 | 289.419.000 | | | | 45,69 | 107,47 | | | | |
| Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah | -Jumlah alat rumah tangga sekolah yang di adakan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia | 0 | 5.000.000 | 10.000.000 | 205.000.000 | 205.000.000 | | | | | | | | | | | | |
| Pengadaan Perlengkapan Siswa | Jumlah Siswa Miskin yang mendapat perlengkapan dasar jenjang SD berupa set perlengkapan belajar yang terdiri dari buku tulis dan alat tulis (SD Negeri) | 100.900.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.538.400 | | | | | 264,16 | | | | | | |
| | Jumlah Siswa Miskin yang mendapat perlengkapan dasar jenjang SD berupa set perlengkapan belajar yang terdiri dari buku tulis dan alat tulis (SD Negeri) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Siswa Miskin yang mendapat perlengkapan dasar jenjang SD berupa set perlengkapan belajar yang terdiri dari buku tulis dan alat tulis (SD swasta) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Siswa Miskin yang mendapat perlengkapan dasar jenjang SD berupa set perlengkapan belajar yang terdiri dari buku tulis dan alat tulis (SD Negeri) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Siswa Miskin yang mendapat perlengkapan dasar jenjang SD berupa set perlengkapan belajar yang terdiri dari buku tulis dan alat tulis (SD swasta) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Siswa Miskin yang mendapat perlengkapan dasar jenjang SD berupa set perlengkapan belajar yang terdiri dari buku tulis dan alat tulis (SD Negeri) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Siswa Miskin yang mendapat perlengkapan dasar jenjang SD berupa set perlengkapan belajar yang terdiri dari buku tulis dan alat tulis (SD swasta) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Siswa Miskin yang mendapat perlengkapan dasar jenjang SD berupa set perlengkapan belajar yang terdiri dari buku tulis dan alat tulis (SD Negeri) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Siswa Miskin yang mendapat perlengkapan dasar jenjang SD berupa set perlengkapan belajar yang terdiri dari buku tulis dan alat tulis (SD swasta) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Jumlah Siswa Miskin yang mendapat perlengkapan dasar jenjang SD berupa set perlengkapan belajar yang terdiri dari buku tulis dan alat tulis (SD swasta) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Siswa Miskin yang mendapat perlengkapan dasar jenjang SD berupa set perlengkapan belajar yang terdiri dari buku tulis dan alat tulis (SD Negeri) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Siswa Miskin yang mendapat perlengkapan dasar jenjang SD berupa set perlengkapan belajar yang terdiri dari buku tulis dan alat tulis (SD swasta) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Siswa Miskin yang mendapat perlengkapan dasar jenjang SD berupa set perlengkapan belajar yang terdiri dari buku tulis dan alat tulis (SD Negeri) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Siswa Miskin yang mendapat perlengkapan dasar jenjang SD berupa set perlengkapan belajar yang terdiri dari buku tulis dan alat tulis (SD swasta) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Siswa Miskin yang mendapat perlengkapan dasar jenjang SD berupa set perlengkapan belajar yang terdiri dari buku tulis dan alat tulis (SD Negeri) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Siswa Miskin yang mendapat perlengkapan dasar jenjang SD berupa set perlengkapan belajar yang terdiri dari buku tulis dan alat tulis (SD swasta) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Siswa Miskin yang mendapat perlengkapan dasar jenjang SD berupa set perlengkapan belajar yang terdiri dari buku tulis dan alat tulis (SD Negeri) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Siswa Miskin yang mendapat perlengkapan dasar jenjang SD berupa set perlengkapan belajar yang terdiri dari buku tulis dan alat tulis (SD swasta) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Siswa Miskin yang mendapat perlengkapan dasar jenjang SD berupa set perlengkapan belajar yang terdiri dari buku tulis dan alat tulis (SD Negeri) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Siswa Miskin yang mendapat perlengkapan dasar jenjang SD berupa set perlengkapan belajar yang terdiri dari buku tulis dan alat tulis (SD swasta) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Jumlah Siswa Miskin yang mendapat perlengkapan dasar jenjang SD berupa set perlengkapan belajar yang terdiri dari buku tulis dan alat tulis (SD Negeri) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Siswa Miskin yang mendapat perlengkapan dasar jenjang SD berupa set perlengkapan belajar yang terdiri dari buku tulis dan alat tulis (SD swasta) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Siswa Miskin yang mendapat perlengkapan dasar jenjang SD berupa set perlengkapan belajar yang terdiri dari buku tulis dan alat tulis (SD Negeri) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Siswa Miskin yang mendapat perlengkapan dasar jenjang SD berupa set perlengkapan belajar yang terdiri dari buku tulis dan alat tulis (SD Negeri) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Siswa Miskin yang mendapat perlengkapan dasar jenjang SD berupa set perlengkapan belajar yang terdiri dari buku tulis dan alat tulis (SD swasta) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Siswa Miskin yang mendapat perlengkapan dasar jenjang SD berupa set perlengkapan belajar yang terdiri dari buku tulis dan alat tulis (SD Negeri) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Siswa Miskin yang mendapat perlengkapan dasar jenjang SD berupa set perlengkapan belajar yang terdiri dari buku tulis dan alat tulis (SD swasta) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Siswa Miskin yang mendapat perlengkapan dasar jenjang SD berupa set perlengkapan belajar yang terdiri dari buku tulis dan alat tulis (SD Negeri) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Siswa Miskin yang mendapat perlengkapan dasar jenjang SD berupa set perlengkapan belajar yang terdiri dari buku tulis dan alat tulis (SD swasta) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - Jumlah perlengkapan (Sepatu,Tas,Seragam, Dasi, Ikat pinggang dll setahun sekali) siswa retrieval Anak Tidak Sekolah miskin usia sekolah kembali sekolah SD 505 orang yang tersedia dalam rangka pemenuhan SPM dan peningkatan IPM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia | 0 | 4.432.900.000 | 5.432.900.000 | 5.432.900.000 | 5.432.900.000 | | 314.458.200 | | | | | 7,09 | | | | | | |
| Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruangan | - Jumlah bangunan gedung dan ruangan yang terpelihara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan | 0 | 25.000.000 | 45.000.000 | 50.000.000 | 50.000.000 | | | | | | | | | | | | | |
| Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | - Jumlah sarana, prasarana dan utilitas sekolah yang terpelihara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan | 0 | 25.000.000 | 45.000.000 | 50.000.000 | 50.000.000 | | | | | | | | | | | | | |
| Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah | -Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang di pelihara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan | 0 | 10.000.000 | 25.000.000 | 50.000.000 | 50.000.000 | | | | | | | | | | | | | |
| Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar | Jumlah siswa SD yang memperoleh beasiswa bakat prestasi (@500.000) | 402.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402.500.000 | | | | | 100,00 | | | | | | | |
| | Jumlah siswa retrieval ATS penerima Beasiswa miskin (Gunungkidulcerdas) 505 orang @500.000 yang tersedia dalam rangka peningkatan IPM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik | 0 | 402.500.000 | 402.500.000 | 966.000.000 | 966.000.000 | | 589.000.000 | 189.000.000 | | | | 146,34 | 46,96 | | | | | |
| Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa | Jumlah Pengadaan jaringan lsitrik serta internet dalam rangka pelaksanaan MERDEKA BELAJAR (Sekolah Penggerak dan AKM) | 13.007.120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.021.167.300 | | | | | 169,30 | | | | | | | |
| | Jumlah Pengadaan server serta internet dalam rangka pelaksanaan MERDEKA BELAJAR (Sekolah Penggerak dan AKM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Komputer/PC dalam rangka pelaksanaan MERDEKA BELAJAR (Sekolah Penggerak dan AKM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah pengadaan buku koleksi perpustakaan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah pengadaan Alat kesenian tradisional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah pengadaan peralatan Seni Budaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Jumlah Sarana Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan (PJOK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | - Jumlah pengadaan Alat Kesenian Tradisional dari dana DAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah pengadaan peralatan teknologi informasi dan komunikasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah pengadaan media pendidikan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | - Jumlah belanja modal alat drumband dari dana DAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia | 0 | 13.007.120.000 | 13.007.120.000 | 14.812.418.000 | 21.194.092.000 | | 429.550.000 | 286.518.000 | | | | 3,30 | 2,20 | | | | | |
| Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik | Jumlah Biaya Operasional penyelenggaraan Asesmen Sekolah, ASPD dan AN di sekolah Jenjang SD Negeri | 448.375.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 662.466.500 | | | | | 147,75 | | | | | | | |
| | Jumlah Biaya Operasional penyelenggaraan Asesmen Sekolah, ASPD dan AN di sekolah Jenjang SD Negeri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Biaya Operasional penyelenggaraan Asesmen Sekolah, ASPD dan AN di sekolah Jenjang SD Swasta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Biaya Operasional penyelenggaraan Asesmen Sekolah, ASPD dan AN di sekolah Jenjang SD Negeri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Biaya Operasional penyelenggaraan Asesmen Sekolah, ASPD dan AN di sekolah Jenjang SD Swasta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Biaya Operasional penyelenggaraan Asesmen Sekolah, ASPD dan AN di sekolah Jenjang SD Negeri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Biaya Operasional penyelenggaraan Asesmen Sekolah, ASPD dan AN di sekolah Jenjang SD Swasta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Biaya Operasional penyelenggaraan Asesmen Sekolah, ASPD dan AN di sekolah Jenjang SD Negeri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Biaya Operasional penyelenggaraan Asesmen Sekolah, ASPD dan AN di sekolah Jenjang SD Swasta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Biaya Operasional penyelenggaraan Asesmen Sekolah, ASPD dan AN di sekolah Jenjang SD Negeri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Jumlah Biaya Operasional penyelenggaraan Asesmen Sekolah, ASPD dan AN di sekolah Jenjang SD Swasta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Biaya Operasional penyelenggaraan Asesmen Sekolah, ASPD dan AN di sekolah Jenjang SD Negeri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Biaya Operasional penyelenggaraan Asesmen Sekolah, ASPD dan AN di sekolah Jenjang SD Swasta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Biaya Operasional penyelenggaraan Asesmen Sekolah, ASPD dan AN di sekolah Jenjang SD Negeri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Biaya Operasional penyelenggaraan Asesmen Sekolah, ASPD dan AN di sekolah Jenjang SD Swasta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Biaya Operasional penyelenggaraan Asesmen Sekolah, ASPD dan AN di sekolah Jenjang SD Negeri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Biaya Operasional penyelenggaraan Asesmen Sekolah, ASPD dan AN di sekolah Jenjang SD Swasta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Biaya Operasional penyelenggaraan Asesmen Sekolah, ASPD dan AN di sekolah Jenjang SD Negeri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Biaya Operasional penyelenggaraan Asesmen Sekolah, ASPD dan AN di sekolah Jenjang SD Negeri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Biaya Operasional penyelenggaraan Asesmen Sekolah, ASPD dan AN di sekolah Jenjang SD Swasta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Biaya Operasional penyelenggaraan Asesmen Sekolah, ASPD dan AN di sekolah Jenjang SD Negeri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Biaya Operasional penyelenggaraan Asesmen Sekolah, ASPD dan AN di sekolah Jenjang SD Swasta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Biaya Operasional penyelenggaraan Asesmen Sekolah, ASPD dan AN di sekolah Jenjang SD Negeri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Biaya Operasional penyelenggaraan Asesmen Sekolah, ASPD dan AN di sekolah Jenjang SD Negeri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Biaya Operasional penyelenggaraan Asesmen Sekolah, ASPD dan AN di sekolah Jenjang SD Swasta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Jumlah Biaya Operasional penyelenggaraan Asesmen Sekolah, ASPD dan AN di sekolah Jenjang SD Negeri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Biaya Operasional penyelenggaraan Asesmen Sekolah, ASPD dan AN di sekolah Jenjang SD Swasta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Biaya Operasional penyelenggaraan Asesmen Sekolah, ASPD dan AN di sekolah Jenjang SD Negeri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Biaya Operasional penyelenggaraan Asesmen Sekolah, ASPD dan AN di sekolah Jenjang SD Swasta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Biaya Operasional penyelenggaraan Asesmen Sekolah, ASPD dan AN di sekolah Jenjang SD Negeri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Biaya Operasional penyelenggaraan Asesmen Sekolah, ASPD dan AN di sekolah Jenjang SD Swasta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | "- Jumlah sekolah peserta try out uji kompetensi SD menggunakan aplikasi CBT" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | "- Jumlah sekolah peserta uji kompetensi sekolah SD menggunakan aplikasi CBT" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | - Jumlah peserta yang mengikuti bimtek pembuatan soal try out uji kompetensi dan Uji kompetensi Sekolah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | - Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan penyusunan dan editor soal try out uji kompetensi dan Uji kompetensi Sekolah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | "- Jumlah buku induk yang tercetak" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | - Jumlah rapot kelas I yang tercetak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | "- Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan penyusunan kurikulum SD" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | "- Jumlah kalender pendidikan yang tercetak" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | "- Jumlah sekolah yang melaksanakan PPDB Online" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | - Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan pembuatan soal dan pengembang soal Uji kompetensi Sekolah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | - Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan penyusunan dan editor soal pengendali mutu SD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | - Jumlah biaya operasional pendidikan Sekolah yang diselenggaran oleh pemerintah ( 43.453 Siswa x 25.000) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | - jumlah blangko ijazah SD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - jumlah SKHU SD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | -Jumlah sisawa MI yang mengikuti pelaksanaan ASPD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah sekolah yang mengikuti ujian/asesmen sekolah dasar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah peserta yang mengikuti ujian/asesmen akhit tahun kelas VI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | - Jumlah peserta workshop MERDEKA BELAJAR (sekolah Penggerak, AKM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Kepala sekolah/guru yang mengikuti sosialisasi dan peningkatan kompetensi terkait Implementasi Pendidikan Antikorupsi di tingkat Satuan Pendidikan Sekolah Dasar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian | 0 | 1.061.041.000 | 4.900.000.000 | 7.550.000.000 | 9.650.000.000 | | 485.354.700 | | | | | 45,74 | 0,00 | | | | |
| Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar | - Jumlah sekolah yang mengikuti workshop akreditasi SD | 46.561.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.225.600 | | | | | 97,13 | | | | | | |
| | Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi | 0 | 50.000.000 | 55.000.000 | 60.000.000 | 65.000.000 | | | | | | | | | | | | |
| Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | - Jumlah siswa yang mengikuti Kuis KiHAJAR kabupaten, propinsi dan nasional jenjang SD | 283.125.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.935.000 | | | | | 52,96 | | | | | | |
| | - Jumlah siswa yang mengikuti FLSSN Tingkat kabupaten, propinsi dan nasional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Peserta Yang Mengikuti Sosialisasi PIP SD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | - Jumlah siswa yang mengikuti lomba pengembangan, minat, bakat istimewa Tingkat Kabupaten, propinsi dan nasional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Siswa Yang Mengikuti Jambore Karakter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | - Jumlah siswa yang mengikuti KSN Tingkat Kabupaten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | - Jumlah yang Pelatihan Pembekalan Pembina FLSSN SD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | - Jumlah siswa SD yang mengikuti pembinaan karakter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | - Jumlah Pembina KSN SD yang mengikuti pembinaan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | 0 | 328.305.000 | 328.305.000 | 1.328.305.000 | 1.528.305.000 | | 222.880.240 | 247.199.750 | | | | 67,89 | 75,30 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar | Jumlah Pramu Bakti Sekolah Dasar (SD) Negeri sejumlah 300 orang yang terfasilitasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Guru Agama Islam Sekolah Dasar (SD) Negeri sejumlah 300 orang yang terfasilitasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Guru Penjaskes Sekolah Dasar (SD) Negeri sejumlah 300 orang yang terfasilitasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Guru Kelas Sekolah Dasar (SD) Negeri sejumlah 1800 orang yang terfasilitasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar | 0 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | | | 2.752.000 | | | | | 18,35 | | | | | |
| Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar | - Jumlah Guru dan pengawas jenjang SD yang terfasilitasi sertifikasinya | 230.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.996.000 | | | | | 46,95 | | | | | | | |
| | - Jumlah peserta yang dinyatakan lulus dalam workshop penilaian jabatan fungsional guru dan angka kreditnya menggunakan aplikasi simpeg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | - Jumlah tenaga fungsional yang mengikuti penilaian PAK dengan aplikasi simpeg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | "- Jumlah peserta yang mengikuti dalam diklat guru pembelajar pasca uji kompetensi guru menggunakan aplikasi UKG" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | "- Jumlah Guru yang mengikuti diklat Kompetensi pendidik kelas atas dengan aplikasi UKG" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | "-Jumlah peserta mengikuti pendidikan PPG jenjang SD" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | "- Jumlah peserta yang mengikuti dalam kegiatan Pelatihan Peningkatan kapasitas guru konsultatif inklusi tk kec" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | "- Jumlah peserta yang mengikuti dalam pelatihan petugas perpustakaan" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | "- Jumlah Peserta yang dinyatakan lulus dalam pelatihan PAKEM" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | "- Jumlah Peserta yang mengikuti dalam pelatihan PAKEM" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | "- Jumlah peserta yang mengikuti dalam pelatihan pengembangan guru IPA" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | "- Jumlah peserta yang mengikuti dalam pelatihan SPPI" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | "- Jumlah peserta yang mengikuti dalam pelatihan pengembangan bahasa indonesia " | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | "- Jumlah peserta yang mengikuti rakor kinerja guru dan kepala sekolah" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | - Jumlah peserta yang mengikuti workshop peningkatan kompetensi pengawas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | -Jumlah peserta mengikuti diklat PTK guru SD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah peserta mengikuti diklat PTS SD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | - Jumlah peserta yang mengikuti seleksi guru, kepala sekolah dan Pengawas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah peserta yang mengikuti dalam kegiatan Pelatihan guru pengembang matematika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah guru yang mengikuti bimtek guru menulis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | -Jumlah peserta yang mengikuti Seleksi FIG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah peserta yang mengikuti dalam pelatihan SPPI; | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah peserta yang mengikuti dalam diklat guru pembelajar pasca uji kompetensi guru PKB melalui PKP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | -Jumlah peserta yang mengikuti kinerja kepala sekolah; | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Kepala Sekolah yang mengikuti Bimtek PKKS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah peserta yang mengikuti Diklat CPAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | 0 | 674.109.000 | 774.109.000 | 974.109.000 | 1.474.109.000 | | 249.031.228 | 144.801.000 | | | | 36,94 | 18,71 | | | | |
| Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | "- Jumlah sekolah yang menyelenggarakan Evaluasi Diri Sekolah menuju 8 SNP menggunakan aplikasi EDS | 253.138.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.061.900 | | | | | 92,07 | | | | | | | |
| | - Jumlah peserta yang mengikuti diklat Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | -Jumlah peserta yang mengikuti lomba gugus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | -Jumlah sekolah yang mengikuti lomba budaya mutu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | - Pembinaan Ketenagaan dan Kelembagaan SD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | - Jumlah sekolah yang mengikuti diklat sekolah penggerak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah | 0 | 263.030.000 | 263.030.000 | 923.030.000 | 923.030.000 | | 139.551.300 | 48.237.500 | | | | 53,06 | 18,34 | | | | |
| Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | - Jumlah sekolah yang mendapatkan dana Bantuan Operasinal Sekolah (BOS PUSAT) Jenjang SD | 43.876.149.878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.426.207.073 | | | | | 105,81 | | | | | | |
| | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS | 0 | 43.876.150.000 | 43.876.150.000 | 43.876.150.000 | 43.876.150.000 | | 47.393.276.215 | 46.158.631.636 | | | | 108,02 | 105,20 | | | | |
| Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | - Jumlah tim managemen BOS Tingkat Kecamatan | 125.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.750.000 | | | | | 95,00 | | | | | | |
| | - Jumlah peserta workhsop Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar - Jumlah peserta workhsop Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | 0 | 124.750.000 | 125.000.000 | 125.000.000 | 125.000.000 | | 115.057.500 | 110.211.700 | | | | 92,23 | 88,17 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama*** | ***Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang terakreditasi A*** | ***51.807.951.122*** | ***69.904.148.000*** | ***69.681.381.000*** | ***70.696.148.000*** | ***76.396.148.000*** | ***66.694.781.611*** | ***47.719.334.513*** | ***45.884.779.542*** | - | - | 128,73 | 68,26 | 65,85 | 0,00 | 0,00 | | |
| | ***Persentase SMP yang terakreditasi A*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) | - Jumlah Unit Sekolah Baru (USB) yang selesai dibangun | 1.512.616.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.334.074.800 | | | | | 88,20 | | | | | | |
| | - Jumlah Pembangunan Halaman, Pagar DLL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun | 0 | 150.000.000 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| Penambahan Ruang Kelas Baru | -Jumlah Ruang Kelas Baru sekolah negeri dan swasta yang selesai dibangun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | ### | | | | | | |
| | -Jumlah Ruang pusat sumber pendidikan inlusi sekolah negeri dan swasta yang selesai dibangun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah | 0 | 150.000.000 | 300.000.000 | 300.000.000 | 300.000.000 | | 290.757.818 | | | | | 193,84 | | | | | |
| Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | - Jumlah ruang guru, kepala sekolah dan TU yang selesai dibangun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun | 0 | 150.000.000 | 150.000.000 | 150.000.000 | 150.000.000 | | 365.536.000 | | | | | 243,69 | | | | | |
| Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah | - Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang selesai dibangun | 466.694.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.144.100 | | | | | 24,46 | | | | | | |
| | Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun | 0 | 466.694.000 | 466.694.000 | 466.694.000 | 466.694.000 | | 568.682.000 | 359.181.000 | | | | 121,85 | 76,96 | | | | |
| Pembangunan Perpustakaan Sekolah | -Jumlah Ruang Perpustakaan sekolah negeri dan swasta yang dibangun | 2.431.400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun | 0 | 2.431.400.000 | 2.432.400.000 | 2.432.400.000 | 2.432.400.000 | | 369.370.000 | | | | | 15,19 | 0,00 | | | | |
| Pembangunan Laboratorium | - Jumlah Laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) sekolah Negeri dan swasta yang dibangun | 3.829.448.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.875.545.300 | | | | | 48,98 | | | | | | |
| | - Jumlah ruang Lab. Komputer sekolah negeri dan swasta yang dibangun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun | 0 | 3.829.448.000 | 3.830.448.000 | 3.830.448.000 | 3.830.448.000 | | 1.133.605.000 | 842.150.000 | | | | 29,60 | 21,99 | | | | |
| Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula | -Jumlah Ruang AULA sekolah Negeri yang selesai dibangun dari dana DAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun | 0 | 150.000.000 | 150.000.000 | 150.000.000 | 150.000.000 | | | | | | | | | | | | |
| Pembangunan Asrama Sekolah | - Jumlah asrama sekolah yang selesai dibangun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun | 0 | 50.000.000 | 50.000.000 | 50.000.000 | 50.000.000 | | | | | | | | | | | | |
| Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah | - Jumlah rumah dinas kepala sekolah yang selesai dibangun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | - Jumlah rumah dinas guru yang selesai dibangun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | - Jumlah rumah dinas penjaga sekolah yang selesai dibangun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun | 0 | 50.000.000 | 50.000.000 | 50.000.000 | 50.000.000 | | | | | | | | | | | | |
| Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | - Jumlah Pembangunan jamban siswa/guru beserta sanitasinya sekolah negeri swasta yang dibangun | 1.029.966.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.852.600 | | | | | 13,38 | | | | | | |
| | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun | 0 | 1.029.966.000 | 1.029.966.000 | 1.029.966.000 | 1.029.966.000 | | 985.664.700 | 81.321.000 | | | | 95,70 | 7,90 | | | | |
| Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah | - Jumlah rehabilitasi gedung sekolah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | ### | | | | | | |
| | Jumlah Gedung Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat | 0 | 25.000.000 | 85.233.000 | 25.000.000 | 25.000.000 | | | | | | | | | | | | |
| Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | -Jumlah Ruang kelas sekolah swasta yang selesai direhab | 1.575.504.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.093.481.000 | | | | | 958,01 | | | | | | |
| | -Jumlah Ruang kelas sekolah negeri yang direhab | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 0 | 1.575.504.000 | 1.575.504.000 | 1.575.504.000 | 1.575.504.000 | | 6.381.777.558 | 6.288.326.154 | | | | 405,06 | 399,13 | | | | |
| Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah | - Jumlah Rehabilitasi ruang guru sekolah sekolah negeri | 3.212.631.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.203.593.100 | | | | | 68,59 | | | | | | |
| | - Jumlah Rehabilitasi ruang kepala sekolah sekolah negeri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - Jumlah Rehabilitasi ruang guru sekolah sekolah swasta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | - Jumlah Rehabilitasi ruang kepala sekolah sekolah swasta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | '- Jumlah Rehabilitasi ruang TU sekolah negeri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | - Jumlah Rehabilitasi ruang TU sekolah swasta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Ruang Guru Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 0 | 3.212.631.000 | 3.212.631.000 | 3.212.631.000 | 3.212.631.000 | | 230.639.000 | | | | | 7,18 | 0,00 | | | | |
| Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah | - Jumlah ruang unit kesehatan sekolah yang selesai direhab | 791.939.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 635.763.800 | | | | | 80,28 | | | | | | |
| | Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 0 | 791.939.000 | 791.939.000 | 791.939.000 | 791.939.000 | | 26.192.000 | 322.867.000 | | | | 3,31 | 40,77 | | | | |
| Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah | Jumlah perpustakaan sekolah swasta yang direhab | 2.917.690.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.758.866.400 | | | | | 94,56 | | | | | | |
| | Jumlah perpustakaan sekolah negeri yang direhab | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 0 | 2.917.690.000 | 2.917.690.000 | 2.917.690.000 | 2.917.690.000 | | 906.356.000 | 998.512.000 | | | | 31,06 | 34,22 | | | | |
| Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium | "- Jumlah ruang laboratorium ilmu pengetahuan Alam (IPA) sekolah swasta yang direhab " | 1.969.362.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.590.028.200 | | | | | 233,07 | | | | | | |
| | "- Jumlah ruang laboratorium komputer sekolah negeri yang direhab" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | "- Jumlah ruang laboratorium ilmu pengetahuan alam (IPA) sekolah negeri yang direhab " | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | "- Jumlah ruang laboratorium Bahasa sekolah negeri yang direhab " | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 0 | 1.969.362.000 | 1.969.362.000 | 1.969.362.000 | 1.969.362.000 | | 2.264.062.000 | 2.690.137.000 | | | | 114,96 | 136,60 | | | | |
| Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula | - Jumlah ruang serba guna/aula yang selesai direhab | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat | 0 | 150.000.000 | 0 | 150.000.000 | 150.000.000 | | | | | | | | | | | | |
| Rehabilitasi Sedang/Berat Asrama | - Jumlah asrama sekolah yang selesai direhab | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Asrama yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 0 | 75.000.000 | 0 | 75.000.000 | 75.000.000 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah | - Jumlah rumah dinas kepala sekolah/guru/penjaga sekolah yang selesai di rehab | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 0 | 150.000.000 | 0 | 150.000.000 | 150.000.000 | | | | | | | | | | | | |
| Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | - Jumlah Jamban Siswa/Guru sekolah Negeri yang direhab | 992.464.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.196.758.450 | | | | | 322,10 | | | | | | |
| | - Jumlah Jamban Siswa/Guru sekolah Swasta yang direhab | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | -Jumlah lapangan upacara sekolah negeri/swasta yang direhab dari dana DAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | -Jumlah pagar sekolah negeri/swasta yang direhab dari dana DAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 0 | 992.464.000 | 992.464.000 | 992.464.000 | 992.464.000 | | 1.282.614.150 | 897.620.765 | | | | 129,24 | 90,44 | | | | |
| Pengadaan Mebel Sekolah | -Jumlah Mebeler sekolah Negeri dan Swasta yang diadakan | 2.058.263.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.019.013.100 | | | | | 98,09 | | | | | | |
| | Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia | 0 | 2.058.263.000 | 2.058.263.000 | 2.058.263.000 | 2.058.263.000 | | 2.077.028.168 | 2.656.565.000 | | | | 100,91 | 129,07 | | | | |
| Pengadaan Perlengkapan Siswa | Jumlah Siswa Miskin yang mendapat perlengkapan dasar jenjang SMP berupa set perlengkapan belajar yang terdiri dari buku tulis dan alat tulis | 69.100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417.696.222 | | | | | 604,48 | | | | | | |
| | Jumlah Siswa Miskin yang mendapat perlengkapan dasar jenjang SMP berupa set perlengkapan belajar yang terdiri dari buku tulis dan alat tulis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Siswa Miskin yang mendapat perlengkapan dasar jenjang SMP berupa set perlengkapan belajar yang terdiri dari buku tulis dan alat tulis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Siswa Miskin yang mendapat perlengkapan dasar jenjang SMP berupa set perlengkapan belajar yang terdiri dari buku tulis dan alat tulis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Siswa Miskin yang mendapat perlengkapan dasar jenjang SMP berupa set perlengkapan belajar yang terdiri dari buku tulis dan alat tulis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Siswa Miskin yang mendapat perlengkapan dasar jenjang SMP berupa set perlengkapan belajar yang terdiri dari buku tulis dan alat tulis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Jumlah Siswa Miskin yang mendapat perlengkapan dasar jenjang SMP berupa set perlengkapan belajar yang terdiri dari buku tulis dan alat tulis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Siswa Miskin yang mendapat perlengkapan dasar jenjang SMP berupa set perlengkapan belajar yang terdiri dari buku tulis dan alat tulis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Siswa Miskin yang mendapat perlengkapan dasar jenjang SMP berupa set perlengkapan belajar yang terdiri dari buku tulis dan alat tulis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Siswa Miskin yang mendapat perlengkapan dasar jenjang SMP berupa set perlengkapan belajar yang terdiri dari buku tulis dan alat tulis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Siswa Miskin yang mendapat perlengkapan dasar jenjang SMP berupa set perlengkapan belajar yang terdiri dari buku tulis dan alat tulis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Siswa Miskin yang mendapat perlengkapan dasar jenjang SMP berupa set perlengkapan belajar yang terdiri dari buku tulis dan alat tulis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Siswa Miskin yang mendapat perlengkapan dasar jenjang SMP berupa set perlengkapan belajar yang terdiri dari buku tulis dan alat tulis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Siswa Miskin yang mendapat perlengkapan dasar jenjang SMP berupa set perlengkapan belajar yang terdiri dari buku tulis dan alat tulis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Siswa Miskin yang mendapat perlengkapan dasar jenjang SMP berupa set perlengkapan belajar yang terdiri dari buku tulis dan alat tulis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Siswa Miskin yang mendapat perlengkapan dasar jenjang SMP berupa set perlengkapan belajar yang terdiri dari buku tulis dan alat tulis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Siswa Miskin yang mendapat perlengkapan dasar jenjang SMP berupa set perlengkapan belajar yang terdiri dari buku tulis dan alat tulis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Jumlah Siswa Miskin yang mendapat perlengkapan dasar jenjang SMP berupa set perlengkapan belajar yang terdiri dari buku tulis dan alat tulis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Siswa Miskin yang mendapat perlengkapan dasar jenjang SMP berupa set perlengkapan belajar yang terdiri dari buku tulis dan alat tulis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Siswa Miskin yang mendapat perlengkapan dasar jenjang SMP berupa set perlengkapan belajar yang terdiri dari buku tulis dan alat tulis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Siswa Miskin yang mendapat perlengkapan dasar jenjang SMP berupa set perlengkapan belajar yang terdiri dari buku tulis dan alat tulis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Siswa Miskin yang mendapat perlengkapan dasar jenjang SMP berupa set perlengkapan belajar yang terdiri dari buku tulis dan alat tulis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Siswa Miskin yang mendapat perlengkapan dasar jenjang SMP berupa set perlengkapan belajar yang terdiri dari buku tulis dan alat tulis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Siswa Miskin yang mendapat perlengkapan dasar jenjang SMP berupa set perlengkapan belajar yang terdiri dari buku tulis dan alat tulis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Siswa Miskin yang mendapat perlengkapan dasar jenjang SMP berupa set perlengkapan belajar yang terdiri dari buku tulis dan alat tulis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Siswa Miskin yang mendapat perlengkapan dasar jenjang SMP berupa set perlengkapan belajar yang terdiri dari buku tulis dan alat tulis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Siswa Miskin yang mendapat perlengkapan dasar jenjang SMP berupa set perlengkapan belajar yang terdiri dari buku tulis dan alat tulis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Siswa Miskin yang mendapat perlengkapan dasar jenjang SMP berupa set perlengkapan belajar yang terdiri dari buku tulis dan alat tulis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Jumlah Siswa Miskin yang mendapat perlengkapan dasar jenjang SMP berupa set perlengkapan belajar yang terdiri dari buku tulis dan alat tulis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Siswa Miskin yang mendapat perlengkapan dasar jenjang SMP berupa set perlengkapan belajar yang terdiri dari buku tulis dan alat tulis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Siswa Miskin yang mendapat perlengkapan dasar jenjang SMP berupa set perlengkapan belajar yang terdiri dari buku tulis dan alat tulis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Siswa Miskin yang mendapat perlengkapan dasar jenjang SMP berupa set perlengkapan belajar yang terdiri dari buku tulis dan alat tulis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Siswa Miskin yang mendapat perlengkapan dasar jenjang SMP berupa set perlengkapan belajar yang terdiri dari buku tulis dan alat tulis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Siswa Miskin yang mendapat perlengkapan dasar jenjang SMP berupa set perlengkapan belajar yang terdiri dari buku tulis dan alat tulis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Siswa Miskin yang mendapat perlengkapan dasar jenjang SMP berupa set perlengkapan belajar yang terdiri dari buku tulis dan alat tulis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Siswa Miskin yang mendapat perlengkapan dasar jenjang SMP berupa set perlengkapan belajar yang terdiri dari buku tulis dan alat tulis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Siswa Miskin yang mendapat perlengkapan dasar jenjang SMP berupa set perlengkapan belajar yang terdiri dari buku tulis dan alat tulis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Siswa Miskin yang mendapat perlengkapan dasar jenjang SMP berupa set perlengkapan belajar yang terdiri dari buku tulis dan alat tulis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Siswa Miskin yang mendapat perlengkapan dasar jenjang SMP berupa set perlengkapan belajar yang terdiri dari buku tulis dan alat tulis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Jumlah Siswa Miskin yang mendapat perlengkapan dasar jenjang SMP berupa set perlengkapan belajar yang terdiri dari buku tulis dan alat tulis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Siswa Miskin yang mendapat perlengkapan dasar jenjang SMP berupa set perlengkapan belajar yang terdiri dari buku tulis dan alat tulis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Siswa Miskin yang mendapat perlengkapan dasar jenjang SMP berupa set perlengkapan belajar yang terdiri dari buku tulis dan alat tulis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Siswa Miskin yang mendapat perlengkapan dasar jenjang SMP berupa set perlengkapan belajar yang terdiri dari buku tulis dan alat tulis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Siswa Miskin yang mendapat perlengkapan dasar jenjang SMP berupa set perlengkapan belajar yang terdiri dari buku tulis dan alat tulis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Siswa Miskin yang mendapat perlengkapan dasar jenjang SMP berupa set perlengkapan belajar yang terdiri dari buku tulis dan alat tulis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Siswa Miskin yang mendapat perlengkapan dasar jenjang SMP berupa set perlengkapan belajar yang terdiri dari buku tulis dan alat tulis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Siswa Miskin yang mendapat perlengkapan dasar jenjang SMP berupa set perlengkapan belajar yang terdiri dari buku tulis dan alat tulis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Siswa Miskin yang mendapat perlengkapan dasar jenjang SMP berupa set perlengkapan belajar yang terdiri dari buku tulis dan alat tulis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Siswa Miskin yang mendapat perlengkapan dasar jenjang SMP berupa set perlengkapan belajar yang terdiri dari buku tulis dan alat tulis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Siswa Miskin yang mendapat perlengkapan dasar jenjang SMP berupa set perlengkapan belajar yang terdiri dari buku tulis dan alat tulis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Jumlah Siswa Miskin yang mendapat perlengkapan dasar jenjang SMP berupa set perlengkapan belajar yang terdiri dari buku tulis dan alat tulis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Siswa Miskin yang mendapat perlengkapan dasar jenjang SMP berupa set perlengkapan belajar yang terdiri dari buku tulis dan alat tulis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Siswa Miskin yang mendapat perlengkapan dasar jenjang SMP berupa set perlengkapan belajar yang terdiri dari buku tulis dan alat tulis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Siswa Miskin yang mendapat perlengkapan dasar jenjang SMP berupa set perlengkapan belajar yang terdiri dari buku tulis dan alat tulis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Siswa Miskin yang mendapat perlengkapan dasar jenjang SMP berupa set perlengkapan belajar yang terdiri dari buku tulis dan alat tulis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Siswa Miskin yang mendapat perlengkapan dasar jenjang SMP berupa set perlengkapan belajar yang terdiri dari buku tulis dan alat tulis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Siswa Miskin yang mendapat perlengkapan dasar jenjang SMP berupa set perlengkapan belajar yang terdiri dari buku tulis dan alat tulis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | - Jumlah bantuan perlengkapan (Sepatu,Tas,Seragam, Dasi, Ikat pinggang dll setahun sekali) Siswa Retrieval Anak Tidak Sekolah miskin usia sekolah SMP 461 orang yang kembali sekolah dalam rangka pemenuhan SPM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Perlengkapan Siswa yang Tersedia | 0 | 5.011.500.000 | 5.011.500.000 | 5.011.500.000 | 5.011.500.000 | | 177.973.425 | | | | | 3,55 | 0,00 | | | | | |
| Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama | Jumlah siswa penerima Beasiswa bakat dan prestasi SMP (@ Rp. 500.000) | 355.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375.750.000 | | | | | 105,70 | | | | | | | |
| | Jumlah penerima Beasiswa miskin (Gunungkidulcerdas) siswa Retrieval Anak Tidak Sekolah kembali sekolah SMP miskin 461 orang @ 500.000 yang tersedia dalam rangka peningkatan IPM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik | 0 | 1.369.800.000 | 1.459.800.000 | 1.459.800.000 | 1.459.800.000 | | 460.799.720 | 140.999.700 | | | | 33,64 | 9,66 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa | -Jumlah pengadaan komputer client untuk sekolah swasta dari dana DAU untuk mendukung MERDEKA BELAJAR (sekolah Penggerak dan AKM) | 1.852.724.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.880.115.900 | | | | | 101,48 | | | | | | | |
| | -Jumlah pengadaan server untuk sekolah swasta dari dana DAU untuk mendukung MERDEKA BELAJAR (Sekolah Penggerak dan AKM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | "-Jumlah jaringan komputer sekolah swasta yang diadakan dari dana DAU" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | "-Jumlah jaringan komputer sekolah negeri yang diadakan dari dana DAU" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | "-Jumlah peralatan laboratorium ilmu pengetahuan alam (IPA) Fisika sekolah swasta " | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | "-Jumlah peralatan laboratorium ilmu pengetahuan alam (IPA) Biologi sekolah swasta " | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | "- Jumlah pengadaan peralatan laboratorium komputer sekolah swasta " | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | "-Jumlah media pendidikan yang diadakan sekolah swasta " | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | -Jumlah komputer server sekolah negeri yang diadakan dari dana DAU untuk mendukung pelaksanaan MERDEKA BELAJAR (sekolah Penggerak dan AKM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | -Jumlah komputer client sekolah negeri yang diadakan dari dana DAU untuk mendukung pelaksanaan MERDEKA BELAJAR (Sekolah Penggerak dan AKM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | -Jumlah pengadaan gamelan sekolah negeri dan swasta dari dana DAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | "-Jumlah Peralatan laboratorium ilmu pengetahuan alam (IPA) Fisika sekolah Negeri " | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | "- Jumlah peralatan laboratorium ilmu pengetahuan alam (IPA) Biologi sekolah negeri yang diadakan" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | "-Jumlah pengadaan peralatan laboratorium komputer sekolah negeri " | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | "-Jumlah sarana seni budaya yang diadakan sekolah negeri dan swasta " | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | "-Jumlah media pendidikan yang diadakan sekolah negeri" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | -Jumlah Peralatan Drumb Band sekolah Negeri/Swasta yang diadakan dari dana DAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | -Jumlah Alat Musik sekolah Negeri/Swasta yang diadakan dari dana DAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia | 0 | 3.562.840.000 | 3.562.840.000 | 3.562.840.000 | 8.562.840.000 | | 185.278.135 | 821.262.000 | | | | 5,20 | 23,05 | | | | |
| Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik | Jumlah Biaya Operasional penyelenggaraan Asesmen Sekolah, ASPD, dan Asesmen Nasional di sekolah jenjang SMP Negeri | 497.830.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 656.245.888 | | | | | 131,82 | | | | | | |
| | Jumlah Biaya Operasional penyelenggaraan Asesmen Sekolah, ASPD, dan Asesmen Nasional di sekolah jenjang SMP Negeri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Biaya Operasional penyelenggaraan Asesmen Sekolah, ASPD, dan Asesmen Nasional di sekolah jenjang SMP Negeri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Biaya Operasional penyelenggaraan Asesmen Sekolah, ASPD, dan Asesmen Nasional di sekolah jenjang SMP Negeri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Biaya Operasional penyelenggaraan Asesmen Sekolah, ASPD, dan Asesmen Nasional di sekolah jenjang SMP Negeri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Biaya Operasional penyelenggaraan Asesmen Sekolah, ASPD, dan Asesmen Nasional di sekolah jenjang SMP Negeri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Biaya Operasional penyelenggaraan Asesmen Sekolah, ASPD, dan Asesmen Nasional di sekolah jenjang SMP Negeri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Biaya Operasional penyelenggaraan Asesmen Sekolah, ASPD, dan Asesmen Nasional di sekolah jenjang SMP Negeri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Biaya Operasional penyelenggaraan Asesmen Sekolah, ASPD, dan Asesmen Nasional di sekolah jenjang SMP Negeri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Biaya Operasional penyelenggaraan Asesmen Sekolah, ASPD, dan Asesmen Nasional di sekolah jenjang SMP Negeri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Biaya Operasional penyelenggaraan Asesmen Sekolah, ASPD, dan Asesmen Nasional di sekolah jenjang SMP Negeri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Biaya Operasional penyelenggaraan Asesmen Sekolah, ASPD, dan Asesmen Nasional di sekolah jenjang SMP Negeri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Biaya Operasional penyelenggaraan Asesmen Sekolah, ASPD, dan Asesmen Nasional di sekolah jenjang SMP Negeri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Jumlah Biaya Operasional penyelenggaraan Asesmen Sekolah, ASPD, dan Asesmen Nasional di sekolah jenjang SMP Negeri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Biaya Operasional penyelenggaraan Asesmen Sekolah, ASPD, dan Asesmen Nasional di sekolah jenjang SMP Negeri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Biaya Operasional penyelenggaraan Asesmen Sekolah, ASPD, dan Asesmen Nasional di sekolah jenjang SMP Negeri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Biaya Operasional penyelenggaraan Asesmen Sekolah, ASPD, dan Asesmen Nasional di sekolah jenjang SMP Negeri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Biaya Operasional penyelenggaraan Asesmen Sekolah, ASPD, dan Asesmen Nasional di sekolah jenjang SMP Negeri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Biaya Operasional penyelenggaraan Asesmen Sekolah, ASPD, dan Asesmen Nasional di sekolah jenjang SMP Negeri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Biaya Operasional penyelenggaraan Asesmen Sekolah, ASPD, dan Asesmen Nasional di sekolah jenjang SMP Negeri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Biaya Operasional penyelenggaraan Asesmen Sekolah, ASPD, dan Asesmen Nasional di sekolah jenjang SMP Negeri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Biaya Operasional penyelenggaraan Asesmen Sekolah, ASPD, dan Asesmen Nasional di sekolah jenjang SMP Negeri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Biaya Operasional penyelenggaraan Asesmen Sekolah, ASPD, dan Asesmen Nasional di sekolah jenjang SMP Negeri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Biaya Operasional penyelenggaraan Asesmen Sekolah, ASPD, dan Asesmen Nasional di sekolah jenjang SMP Negeri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Biaya Operasional penyelenggaraan Asesmen Sekolah, ASPD, dan Asesmen Nasional di sekolah jenjang SMP Negeri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Jumlah Biaya Operasional penyelenggaraan Asesmen Sekolah, ASPD, dan Asesmen Nasional di sekolah jenjang SMP Negeri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Biaya Operasional penyelenggaraan Asesmen Sekolah, ASPD, dan Asesmen Nasional di sekolah jenjang SMP Negeri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Biaya Operasional penyelenggaraan Asesmen Sekolah, ASPD, dan Asesmen Nasional di sekolah jenjang SMP Negeri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Biaya Operasional penyelenggaraan Asesmen Sekolah, ASPD, dan Asesmen Nasional di sekolah jenjang SMP Negeri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Biaya Operasional penyelenggaraan Asesmen Sekolah, ASPD, dan Asesmen Nasional di sekolah jenjang SMP Negeri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Biaya Operasional penyelenggaraan Asesmen Sekolah, ASPD, dan Asesmen Nasional di sekolah jenjang SMP Negeri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Biaya Operasional penyelenggaraan Asesmen Sekolah, ASPD, dan Asesmen Nasional di sekolah jenjang SMP Negeri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Biaya Operasional penyelenggaraan Asesmen Sekolah, ASPD, dan Asesmen Nasional di sekolah jenjang SMP Negeri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Biaya Operasional penyelenggaraan Asesmen Sekolah, ASPD, dan Asesmen Nasional di sekolah jenjang SMP Negeri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Biaya Operasional penyelenggaraan Asesmen Sekolah, ASPD, dan Asesmen Nasional di sekolah jenjang SMP Negeri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Biaya Operasional penyelenggaraan Asesmen Sekolah, ASPD, dan Asesmen Nasional di sekolah jenjang SMP Negeri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Biaya Operasional penyelenggaraan Asesmen Sekolah, ASPD, dan Asesmen Nasional di sekolah jenjang SMP Negeri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Biaya Operasional penyelenggaraan Asesmen Sekolah, ASPD, dan Asesmen Nasional di sekolah jenjang SMP Negeri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Jumlah Biaya Operasional penyelenggaraan Asesmen Sekolah, ASPD, dan Asesmen Nasional di sekolah jenjang SMP Negeri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Biaya Operasional penyelenggaraan Asesmen Sekolah, ASPD, dan Asesmen Nasional di sekolah jenjang SMP Negeri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Biaya Operasional penyelenggaraan Asesmen Sekolah, ASPD, dan Asesmen Nasional di sekolah jenjang SMP Negeri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Biaya Operasional penyelenggaraan Asesmen Sekolah, ASPD, dan Asesmen Nasional di sekolah jenjang SMP Negeri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Biaya Operasional penyelenggaraan Asesmen Sekolah, ASPD, dan Asesmen Nasional di sekolah jenjang SMP Negeri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Biaya Operasional penyelenggaraan Asesmen Sekolah, ASPD, dan Asesmen Nasional di sekolah jenjang SMP Negeri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Biaya Operasional penyelenggaraan Asesmen Sekolah, ASPD, dan Asesmen Nasional di sekolah jenjang SMP Negeri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Biaya Operasional penyelenggaraan Asesmen Sekolah, ASPD, dan Asesmen Nasional di sekolah jenjang SMP Negeri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Biaya Operasional penyelenggaraan Asesmen Sekolah, ASPD, dan Asesmen Nasional di sekolah jenjang SMP Negeri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Biaya Operasional penyelenggaraan Asesmen Sekolah, ASPD, dan Asesmen Nasional di sekolah jenjang SMP Negeri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Biaya Operasional penyelenggaraan Asesmen Sekolah, ASPD, dan Asesmen Nasional di sekolah jenjang SMP Negeri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Biaya Operasional penyelenggaraan Asesmen Sekolah, ASPD, dan Asesmen Nasional di sekolah jenjang SMP Negeri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Biaya Operasional penyelenggaraan Asesmen Sekolah, ASPD, dan Asesmen Nasional di sekolah jenjang SMP Negeri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Jumlah Biaya Operasional penyelenggaraan Asesmen Sekolah, ASPD, dan Asesmen Nasional di sekolah jenjang SMP Negeri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Biaya Operasional penyelenggaraan Asesmen Sekolah, ASPD, dan Asesmen Nasional di sekolah jenjang SMP Negeri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| | - Jumlah Biaya Operasional penyelenggaraan Asesmen Sekolah, ASPD, dan Asesmen Nasional di sekolah jenjang SMP Swasta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| | - Jumlah guru & tenaga kependidikan yang mengikuti lomba Aplikasi Mobile tingkat kecamatan, kabupaten, propinsi dan nasional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| | "- Jumlah peserta yang mengikuti workshop pembelajaran gasing (matematika dan fisika)" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| | "-Jumlah peserta yang mengikuti workshop penyusunan kurikulum" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| | "- Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi GNPWB" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| | - Jumlah peserta yang mengikuti TOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| | - Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi evaluasi akhir peserta didik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| | - Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi tes pengendali mutu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| | "- Jumlah peserta yang mengikuti Penilaian harian, tengah semester, akhir semester sekolah menegah pertama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| | - Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan bimtek batik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| | - Jumlah peserta yang mengikuti bimtek TOT Pembelajaran dan penilaian berbasis IT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah peserta yang mengikuti bimtek penyusunan kisi-kisi mengacu Penilaian InstrumennTerstandar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah peserta yang mengikuti bimtek penyusunan soal mengacu Penilaian Instrumen Terstandar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah peserta yang mengikuti bimtek analisis telaah soal mengacu Penilaian Instrumen Terstandar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| | "- Jumlah peserta yang mengikuti workshop PPDB jenjang SMP" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| | "- Jumlah cetak kalender pendidikan" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| | - Jumlah cetak pedoman PPDB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - Jumlah cetak sampul raport sekolah negeri dan swasta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | - Jumlah cetak buku induk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlahvpeserta yang mengikuti Workshop CBT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Peserta yang mengikuti Bedah Asesment | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Peserta yang mengikuti Workshop Pengelolaan Penilaian Online | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Peserta yang mengikuti Workshop Pengelolaan Lingkungan Belajar yang kondusif | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah peserta yang mengikuti Workshop Pendampingan Strategi Pemenuhan SNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Peserta yang mengikuti Workshop Pembuatan Aplikasi Mobile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | - Jumlah peserta workshop MERDEKA BELAJAR (sekolah Penggerak, AKM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Kepala sekolah/guru yang mengikuti sosialisasi dan peningkatan kompetensi terkait Implementasi Pendidikan Antikorupsi di tingkat Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian | 0 | 9.512.655.000 | 9.512.655.000 | 9.712.655.000 | 9.812.655.000 | | 375.181.077 | 320.765.792 | | | | 3,94 | 3,37 | | | | | |
| Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | -Jumlah jenis barang dan jasa pemenuhan 7 Standar Nasional Pendidikan jenjang SMP | 12.360.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.359.800 | | | | | 100,00 | | | | | | | |
| | "- Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi akreditasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | "- Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan tindak lanjut akreditasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Pertama yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi | 0 | 45.200.000 | 45.200.000 | 45.200.000 | 45.200.000 | | 1.668.087 | | | | | 3,69 | | | | | | |
| Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | -Jumlah peserta yang mengikuti Gala Siswa | 211.900.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.335.000 | | | | | 69,53 | | | | | | | |
| | -Jumlah peserta GSI tingkat Kabupaten, propinsi dan nasional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | -Jumlah peserta lomba video edukasi guru dan siswa tingkat kabupaten, propinsi dan nasional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | - Jumlah siswa peserta kompetisi Sains Nasional tingkat kabupaten, propinsi, kabupaten dan nasional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | - Jumlah peserta yang mengikuti lomba FLSSN tingkat kabupaten, propinsi dan nasional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan kuis KiHAJAR tingkat kabupaten, propinsi dan nasional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | - Jumlah peserta yang mengikuti workshop gender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | - Jumlah peserta yang mengikuti diklat OSIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | - Jumlah peserta yang mengikuti Gladi kawruh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | - Jumlah peserta yang mengikuti Jambore Pendidikan Karakter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | - Jumlah peserta yang mengikuti OPSI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | jumlas peserta yang mengikuti kegiatan KKO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | 0 | 1.031.383.000 | 1.031.383.000 | 1.531.383.000 | 2.131.383.000 | | 182.753.038 | 157.294.214 | | | | 17,72 | 15,25 | | | | | |
| Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | "- Jumlah ASN Pramu Bakti Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri mendasar anjab yang telah ditetapkan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | ### | | | | | | | |
| | "- Jumlah ASN Pengadministrasi Umum Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri mendasar anjab yang telah ditetapkan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | "- Jumlah ASN Pengadministrasi Keuangan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri mendasar anjab yang telah ditetapkan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | "- Jumlah ASN Petugas Keamanan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri mendasar anjab yang telah ditetapkan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | "- Jumlah ASN Pendidik Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri mendasar anjab yang telah ditetapkan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | 0 | 200.000.000 | 200.000.000 | 200.000.000 | 200.000.000 | | | 1.032.000 | | | | | 0,52 | | | | | |
| Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | - Jumlah Guru dan pengawas jenjang SMP yang terfasilitasi sertifikasinya | 200.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.370.000 | | | | | 45,19 | | | | | | | |
| | - Jumlah peserta yang dinyatakan lulus dalam workshop penilaian jabatan fungsional guru dan angka kreditnya menggunakan aplikasi simpeg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | - Jumlah tenaga fungsional yang mengikuti penilaian PAK dengan menggunakan aplikasi simpeg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | -Jumlah peserta kegiatan diklat peningkatan Kompetensi pendidik Guru jenjang SMP dengan aplikasi UKG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| | "- Jumlah peserta mengikuti pendidikan PPG jenjang SMP" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| | - Jumlah guru yang mengikuti seleksi Olimpiade Guru tingkat kabupaten, propinsi dan nasional jenjang SMP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| | "-Jumlah peserta yang mengikuti diklat penguatan pengawas jenjang SMP " | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| | "-Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan bimtek guru 4 Mapel UN" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| | "- Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan pelatihan PK/PLK sekolah penyelenggaran inklusi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| | "- Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan Bimtek petugas perpustakaan" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| | "- Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan Pelatihan kinerja guru/Kepala Sekolah " | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| | "-Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi kinerja kepala sekolah" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| | "-Jumlah peserta yang mengikuti workshop MGMP" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| | "- Jumlah peserta yang mengikuti seleksi guru, kepala sekolah dan pengawas berprestasi tingkat kabupaten, propinsi dan nasional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| | "- Jumlah peserta yang mengikuti seleksi forum ilmiah guru tingkat kabupaten, propinsi dan nasional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| | "- Jumlah peserta yang mengikuti pendampingan juara hasil seleksi guru, kepala sekolah dan pengawas berprestasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| | "- Jumlah peserta yang mengikuti diklat guru pengembangan keprofesian berkelanjutan" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| | "- Jumlah peserta yang mengikuti pengembangan profesi guru" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| | "- Jumlah peserta yang mengikuti workshop peningkatan kompetensi pengawas " | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| | "- Jumlah guru yang mengikuti seleksi Olimpiade guru nasional jenjang SMP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| | "- Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan WOMS; | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| | "- Jumlah peserta yang dinyatakan mengikuti kegiatan Pelatihan Lesson Study; | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | "- Jumlah peserta yang dinyatakan mengikuti kegiatan Publikasi Ilmiah dan Karya Ilmiah bagi Guru SMP; | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | "- Jumlah peserta yang dinyatakan mengikuti kegiatan Publikasi Ilmiah dan Karya Ilmiah bagi Kepala Sekolah; | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | "- Jumlah peserta mengikuti pendidikan PPG PAI jenjang SMP" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | 0 | 693.094.000 | 693.094.000 | 693.094.000 | 693.094.000 | | 176.526.630 | 226.698.720 | | | | 25,47 | 32,71 | | | | | |
| Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | "- Jumlah peserta yang mengikuti bimtek Evaluasi Diri Sekolah dalam rangka pemenuhan 8 (Delapan) Standar Nasional Pendidikan". | 24.887.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.887.000 | | | | | 100,00 | | | | | | | |
| | "- Jumlah peserta yang mengikuti review Evaluasi Diri Sekolah dalam rangka pemenuhan 8 (Delapan) Standar Nasional Pendidikan". | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | - Jumlah sekolah yang mengikuti diklat sekolah pengerak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan | 0 | 306.642.000 | 306.642.000 | 306.642.000 | 306.642.000 | | 72.983.800 | 112.502.030 | | | | 23,80 | 36,69 | | | | | |
| Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama | - Jumlah sekolah yang mendapatkan dana Bantuan Operasinal Sekolah (BOS PUSAT) jenjang SMP | 25.670.673.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.003.100.951 | | | | | 112,98 | | | | | | | |
| | Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS | 0 | 25.670.673.000 | 25.670.673.000 | 25.670.673.000 | 25.670.673.000 | | 29.110.211.582 | 28.896.090.857 | | | | 112,98 | 112,98 | | | | | |
| Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama | Jumlah peserta Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama | 125.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.800.000 | | | | | 102,24 | | | | | | | |
| | Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama | 0 | 125.000.000 | 125.000.000 | 125.000.000 | 125.000.000 | | 93.674.625 | 71.454.310 | | | | 74,94 | 57,16 | | | | | |
| ***Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)*** | ***Jumlah Pendidikan Anak Usia Dini yang terakreditasi*** | ***22.326.095.000*** | ***23.610.936.000*** | ***23.605.936.000*** | ***26.523.036.000*** | ***30.383.036.000*** | ***20.936.928.420*** | ***22.583.995.112*** | ***21.637.840.775*** | - | - | 93,78 | 95,65 | 91,66 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | ***Persentase PAUD yang terakreditasi*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD | - Jumlah ruang kelas baru (RKB) yang selesai dibangun | 768.992.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | - Jumlah ruang guru dan kepala sekolah yang terbangun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | - Jumlah Ruang Kelas Baru Lembaga swasta yang selesai dibangun dari dana DAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - Jumlah Ruang Kelas Baru TK Negeri yang terbangun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Dibangun | 0 | 768.992.000 | 768.992.000 | 768.992.000 | 768.992.000 | | 171.187.000 | | | | | 22,26 | 0,00 | | | | |
| Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD | - Jumlah pembangunan toilet (jamban) siswa beserta sanitasinya paud yang selesai dibangun | 1.459.778.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 636.195.050 | | | | | 43,58 | | | | | | |
| | - Jumlah area bermain beserta APE luar ruang lembaga PAUD yang selesai dibangun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | - Jumlah area bermain beserta APE luar ruang Lembaga PAUD yang selesai dibangun dari dana DAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | - Jumlah Toilet (Jamban) Lembaga PAUD yang selesai dibangun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | - Jumlah Pembangunan Pagar Lembaga PAUD yang terbangun dari dana DAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun | 0 | 1.459.778.000 | 1.459.778.000 | 1.459.778.000 | 1.459.778.000 | | 1.296.999.720 | 521.552.000 | | | | 88,85 | 35,73 | | | | |
| Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD | - Jumlah rehabilitasi ruang kelas PAUD formal dan NON FORMAL dari DAU | 1.010.047.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 644.744.950 | | | | | 63,83 | | | | | | |
| | - Jumlah rehabilitasi ruang guru dengan tingkat kerusakan sedang atau berat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | - Jumlah bangunan penunjang yang selesai di rehab | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 0 | 1.010.047.000 | 1.010.047.000 | 1.010.047.000 | 1.010.047.000 | | 988.690.100 | 1.998.805.475 | | | | 97,89 | 197,89 | | | | |
| Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD | - Jumlah toilet (jamban) TK Negeri dan Swasta yang selesai direhabilitasi | 139.066.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 0 | 139.066.000 | 139.066.000 | 139.066.000 | 139.066.000 | | 160.569.000 | 460.221.100 | | | | 115,46 | 330,94 | | | | |
| Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD | - Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang terpelihara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | - Jumlah Gedung yang terpelihara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Dilaksanakan Pemeliharaan | 0 | 10.000.000 | 0 | 15.000.000 | 0 | | | | | | | 0,00 | | | | | |
| Pengadaan Mebel PAUD | - Jumlah pengadaan mebelair Lembaga swasta yeng terbeli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | - Jumlah pengadaan mebelair TK Negeri yang terbeli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia | 0 | 497.712.000 | 497.712.000 | 497.712.000 | 497.712.000 | | 385.176.600 | 85.485.000 | | | | 77,39 | 17,18 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pengadaan Alat Rumah Tangga PAUD | - Jumlah alat rumah tangga sekolah yang tersedia | 497.712.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Alat Rumah Tangga PAUD yang Tersedia | 0 | 0 | 0 | 91.000.000 | 91.000.000 | | | | | | | | | | | | | |
| Pengadaan Perlengkapan PAUD | - Jumlah pengadaan jaringan internet dan listrik untuk mendukung KBM K-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia | 0 | 35.000.000 | 35.000.000 | 1.540.000.000 | 5.040.000.000 | | 48.288.400 | | | | | 137,97 | 0,00 | | | | | |
| Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD | Jumlah peserta didik miskin jenjang PAUD yang memperoleh buku gambar dan alat mewarnai (TK Negeri) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah peserta didik miskin jenjang PAUD yang memperoleh buku gambar dan alat mewarnai (TK Swasta) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah peserta didik miskin jenjang PAUD yang memperoleh buku gambar dan alat mewarnai (TK Negeri) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah peserta didik miskin jenjang PAUD yang memperoleh buku gambar dan alat mewarnai (TK Swasta) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah peserta didik miskin jenjang PAUD yang memperoleh buku gambar dan alat mewarnai (TK Negeri) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah peserta didik miskin jenjang PAUD yang memperoleh buku gambar dan alat mewarnai (TK Swasta) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah peserta didik miskin jenjang PAUD yang memperoleh buku gambar dan alat mewarnai (TK Negeri) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah peserta didik miskin jenjang PAUD yang memperoleh buku gambar dan alat mewarnai (TK Swasta) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah peserta didik miskin jenjang PAUD yang memperoleh buku gambar dan alat mewarnai (TK Negeri) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah peserta didik miskin jenjang PAUD yang memperoleh buku gambar dan alat mewarnai (TK Swasta) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah peserta didik miskin jenjang PAUD yang memperoleh buku gambar dan alat mewarnai (TK Negeri) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah peserta didik miskin jenjang PAUD yang memperoleh buku gambar dan alat mewarnai (TK Swasta) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah peserta didik miskin jenjang PAUD yang memperoleh buku gambar dan alat mewarnai(TK Negeri) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah peserta didik miskin jenjang PAUD yang memperoleh buku gambar dan alat mewarnai(TK Swasta) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Jumlah peserta didik miskin jenjang PAUD yang memperoleh buku gambar dan alat mewarnai (TK Negeri) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah peserta didik miskin jenjang PAUD yang memperoleh buku gambar dan alat mewarnai (TK Swasta) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah peserta didik miskin jenjang PAUD yang memperoleh buku gambar dan alat mewarnai (TK Negeri) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah peserta didik miskin jenjang PAUD yang memperoleh buku gambar dan alat mewarnai (TK Swasta) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah peserta didik miskin jenjang PAUD yang memperoleh buku gambar dan alat mewarnai (TK Negeri) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah peserta didik miskin jenjang PAUD yang memperoleh buku gambar dan alat mewarnai (TK Swasta) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah peserta didik miskin jenjang PAUD yang memperoleh buku gambar dan alat mewarnai (TK Negeri) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah peserta didik miskin jenjang PAUD yang memperoleh buku gambar dan alat mewarnai (TK Swasta) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah peserta didik miskin jenjang PAUD yang memperoleh buku gambar dan alat mewarnai (TK Negeri) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah peserta didik miskin jenjang PAUD yang memperoleh buku gambar dan alat mewarnai (TK Swasta) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah peserta didik miskin jenjang PAUD yang memperoleh buku gambar dan alat mewarnai (TK Negeri) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah peserta didik miskin jenjang PAUD yang memperoleh buku gambar dan alat mewarnai (TK Swasta) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah peserta didik miskin jenjang PAUD yang memperoleh buku gambar dan alat mewarnai (TK Negeri) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah peserta didik miskin jenjang PAUD yang memperoleh buku gambar dan alat mewarnai (TK Swasta) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah peserta didik miskin jenjang PAUD yang memperoleh buku gambar dan alat mewarnai (TK Negeri) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Jumlah peserta didik miskin jenjang PAUD yang memperoleh buku gambar dan alat mewarnai (TK Swasta) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah peserta didik miskin jenjang PAUD yang memperoleh buku gambar dan alat mewarnai (TK Negeri) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah peserta didik miskin jenjang PAUD yang memperoleh buku gambar dan alat mewarnai (TK Swasta) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah peserta didik miskin jenjang PAUD yang memperoleh buku gambar dan alat mewarnai (TK Negeri) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah peserta didik miskin jenjang PAUD yang memperoleh buku gambar dan alat mewarnai (TK Swasta) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah peserta didik miskin jenjang PAUD yang memperoleh buku gambar dan alat mewarnai (TK Negeri) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah peserta didik miskin jenjang PAUD yang memperoleh buku gambar dan alat mewarnai (TK Swasta) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah peserta didik miskin jenjang PAUD yang memperoleh buku gambar dan alat mewarnai (TK Negeri) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah peserta didik miskin jenjang PAUD yang memperoleh buku gambar dan alat mewarnai (TK Swasta) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Perlengkapan Peserta Didik PAUD yang Tersedia | 0 | 0 | 0 | 16.100.000 | 16.100.000 | | | | | | | | | | | | | |
| Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD | - Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan gebyar paud kecamatan, kabupaten dan propinsi | 50.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.145.500 | | | | | 60,29 | | | | | | | |
| | - Jumlah peserta yang mengikuti gebyar paud kabupaten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | - Jumlah peserta kegiatan porseni siswa TK tingkat kabupaten, propinsi dan nasional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik | 0 | 204.250.000 | 204.250.000 | 204.250.000 | 204.250.000 | | 14.326.500 | 21.600.000 | | | | 7,01 | 10,58 | | | | | |
| Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD | - Jumlah pengadaan APE Lembaga paud yeng terbeli dari dana DAU | 692.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 954.262.920 | | | | | 137,90 | | | | | | | |
| | - Jumlah pengadaan alat permainan Edukatif (APE) PAUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | - Jumlah pengadaan LCD Proyektor untuk mendukung KBM K-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | - Jumlah pengadaan Laptop untuk mendukung KBM K-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | '- Jumlah komputer TK yang dibeli dari dana DAU untuk mendukung Sekolah Penggerak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | - Jumlah pengadaan Drum Band Lembaga PAUD yang terbeli dari dana DAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | - Jumlah pengadaan Seragam Drum Band Lembaga PAUD yang terbeli dari dana DAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah buku koleksi PAUD yang diadakan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia | 0 | 692.000.000 | 692.000.000 | 692.000.000 | 692.000.000 | | 187.590.000 | 530.505.000 | | | | 27,11 | 76,66 | | | | | |
| Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD | Jumlah bahan praktek proses belajar bagi peserta didik PAUD untuk suport sekolah penggerak | 900.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 899.800.000 | | | | | 99,98 | | | | | | | |
| | Jumlah bahan praktek proses belajar bagi peserta didik PAUD untuk suport sekolah penggerak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah bahan praktek proses belajar bagi peserta didik PAUD untuk suport sekolah penggerak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah bahan praktek proses belajar bagi peserta didik PAUD untuk suport sekolah penggerak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah bahan praktek proses belajar bagi peserta didik PAUD untuk suport sekolah penggerak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah bahan praktek proses belajar bagi peserta didik PAUD untuk suport sekolah penggerak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah bahan praktek proses belajar bagi peserta didik PAUD untuk suport sekolah penggerak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah bahan praktek proses belajar bagi peserta didik PAUD untuk suport sekolah penggerak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah bahan praktek proses belajar bagi peserta didik PAUD untuk suport sekolah penggerak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah bahan praktek proses belajar bagi peserta didik PAUD untuk suport sekolah penggerak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah bahan praktek proses belajar bagi peserta didik PAUD untuk suport sekolah penggerak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah bahan praktek proses belajar bagi peserta didik PAUD untuk suport sekolah penggerak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah bahan praktek proses belajar bagi peserta didik PAUD untuk suport sekolah penggerak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah bahan praktek proses belajar bagi peserta didik PAUD untuk suport sekolah penggerak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah bahan praktek proses belajar bagi peserta didik PAUD untuk suport sekolah penggerak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Jumlah bahan praktek proses belajar bagi peserta didik PAUD untuk suport sekolah penggerak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah bahan praktek proses belajar bagi peserta didik PAUD untuk suport sekolah penggerak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah bahan praktek proses belajar bagi peserta didik PAUD untuk suport sekolah penggerak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah bahan praktek proses belajar bagi peserta didik PAUD untuk suport sekolah penggerak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah bahan praktek proses belajar bagi peserta didik PAUD untuk suport sekolah penggerak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah bahan praktek proses belajar bagi peserta didik PAUD untuk suport sekolah penggerak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah bahan praktek proses belajar bagi peserta didik PAUD untuk suport sekolah penggerak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah bahan praktek proses belajar bagi peserta didik PAUD untuk suport sekolah penggerak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah bahan praktek proses belajar bagi peserta didik PAUD untuk suport sekolah penggerak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah bahan praktek proses belajar bagi peserta didik PAUD untuk suport sekolah penggerak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah bahan praktek proses belajar bagi peserta didik PAUD untuk suport sekolah penggerak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah bahan praktek proses belajar bagi peserta didik PAUD untuk suport sekolah penggerak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah bahan praktek proses belajar bagi peserta didik PAUD untuk suport sekolah penggerak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah bahan praktek proses belajar bagi peserta didik PAUD untuk suport sekolah penggerak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah bahan praktek proses belajar bagi peserta didik PAUD untuk suport sekolah penggerak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah bahan praktek proses belajar bagi peserta didik PAUD untuk suport sekolah penggerak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah bahan praktek proses belajar bagi peserta didik PAUD untuk suport sekolah penggerak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah bahan praktek proses belajar bagi peserta didik PAUD untuk suport sekolah penggerak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Jumlah bahan praktek proses belajar bagi peserta didik PAUD untuk suport sekolah penggerak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah bahan praktek proses belajar bagi peserta didik PAUD untuk suport sekolah penggerak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | - Jumlah peserta penilaian portofolio lomba bunda paud tingkat kabupaten, propinsi dan nasional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | - Jumlah peserta dalam workshop pendidik PAUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | - Jumlah peserta dalam workshop kurikulum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | - Workshop Pembuatan penilaian harian, tengah semester dan akhir semester | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | -Workshop Media Pembelajaran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | -Workshop PPDB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | - Jumlah peserta yang mengikuti workshop himpaudi, forum paud, IGTKI, GOPTKI kabupaten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | - Jumlah pendidik PAUD Eks Bank Dunia yang mendapatkan stimulan dari Kabupaten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | - Jumlah peserta kegiatan porsenitas IGTK tingkat kabupaten, propinsi dan nasional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | - Jumlah peserta kegiatan porsenitas TK tingkat kabupaten, propinsi dan nasional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | - Jumlah peserta kegiatan porsenitas Himpaudi tingkat kabupaten, propinsi dan nasional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | - Jumlah peserta kegiatan porsenitas KB,SPS dan TPA tingkat kabupaten, propinsi dan nasional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | - Jumlah THR Stimulan Pendidik PAUD Eks Bank Dunia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | - Cetak Raport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | - Cetak Kalender Pendidikan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | - Cetak Pedoman PPDB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | - Jumlah peserta workshop MERDEKA BELAJAR (sekolah Penggerak, AKM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar | 0 | 900.000.000 | 900.000.000 | 1.900.000.000 | 1.900.000.000 | | 1.493.780.500 | 1.255.708.100 | | | | 165,98 | 139,52 | | | | | |
| Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD | Jumlah Lembaga PAUD yang melaksanakan akreditasi | 2.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Lembaga PKBM yang melaksanakan akreditasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Lembaga LKP yang melaksanakan akreditasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah PAUD yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi | 0 | 39.000.000 | 39.000.000 | 129.000.000 | 129.000.000 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD | Jumlah Pramu Bakti Taman Kanak-Kanak Negeri 18 Orang mendasar anjab yang telah ditetapkan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD | 0 | 10.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | | | 2.764.000 | | | | | 18,43 | | | | | |
| Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD | Jumlah Guru dan pengawas jenjang TK yang terfasilitasi sertifikasinya | 220.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.175.000 | | | | | 58,26 | | | | | | | |
| | Jumlah peserta yang dinyatakan lulus dalam workshop penilaian jabatan fungsional guru dan angka kreditnya menggunakan aplikasi simpeg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah tenaga fungsional yang mengikuti penilaian PAK menggunakan aplikasi simpeg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah peserta yang mengikuti diklat tingkat lanjut jenjang PAUD" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah peserta mengikuti dalam diklat pengembangan keprofesian berkelanjutan" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah peserta yang mengikuti dalam workshop penyusunan pembelajaran jenjang PAUD " | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah peserta yang mengikuti dalam workshop peningkatan kompetensi bercerita dan mendongeng jenjang PAUD" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah peserta yang mengikuti dalam workshop seni musik" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah peserta yang mengikuti dalam workshop peningkatan mutu mengambar jenjang PAUD" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah peserta yang mengikuti dalam pelaksanaan apresiasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah peserta yang mengikuti diklat mahir jenjang PAUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah peserta yang mengikuti Pendidikan Profesi Guru jenjang PAUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah peserta yang mengikuti diklat peningkatan kompetensi penilik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah peserta yang mengikuti diklat peningkatan kompetensi pamong belajar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah peserta yang dinyatakan mengikuti kegiatan Publikasi Ilmiah dan Karya Ilmiah bagi Guru SMP; | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah peserta yang mengikuti Pendidikan Profesi Guru Pendidikan Agama Islam jenjang PAUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | 0 | 898.221.000 | 898.221.000 | 1.098.221.000 | 1.198.221.000 | | 228.626.192 | 44.035.500 | | | | 25,45 | 4,90 | | | | |
| Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD | Jumlah lembaga yang melaksanakan Evaluasi Diri Sekolah menuju 8 (Delapan) Standar Nasional Pendidikan) | 150.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah peserta workshop Pengelola PAUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah peserta workshop PAUD unggulan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah peserta workshop parenting tingkat desa (114 desa x 2 kegiatan) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah peserta workshop parenting tingkat kecamatan (18 kecamatan x 2 kegiatan) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah peserta workshop parenting tingkat kabupaten (114 desa + 18 kec) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah peserta lomba gugus tingkat kecamatan PAUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah peserta lomba gugus tingkat kabupaten PAUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah peserta lomba gugus tingkat propinsi PAUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah peserta lomba gugus tingkat nasional PAUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Sekolah yang mengikuti diklat sekolah penggerak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen | 0 | 474.870.000 | 474.870.000 | 474.870.000 | 474.870.000 | | 25.384.100 | 67.170.100 | | | | 5,35 | 14,14 | | | | |
| Pengelolaan Dana BOP PAUD | Jumlah satuan pendidikan penerima BOP/DAK Non Fisik PAUD | 16.386.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.593.605.000 | | | | | 107,37 | | | | | | | |
| | Jumlah peserta yang mengikuri workshop pengelolaan dana BOP/DAK Non Fisik PAUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah peserta yang mengikuti workshop penyusunan RAPBS dana BOP/DAK Non Fisik PAUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah peserta yang mengikuti workshop penyusunan laporan dana BOP/DAK Non Fisik PAUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP | 0 | 16.386.000.000 | 16.386.000.000 | 16.386.000.000 | 16.386.000.000 | | 17.552.490.000 | 16.593.133.000 | | | | 107,12 | 101,26 | | | | |
| Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD | -Jumlah peserta yang mengikuri workshop pengelolaan dana BOP/DAK Non Fisik PAUD | 50.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000.000 | | | | | 100,00 | | | | | | | |
| | - Jumlah peserta yang mengikuti workshop penyusunan RAPBS dana BOP/DAK Non Fisik PAUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD | 0 | 86.000.000 | 86.000.000 | 86.000.000 | 361.000.000 | | 30.887.000 | 56.861.500 | | | | 35,92 | 66,12 | | | | |
| ***Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan*** | ***Jumlah Satuan Pendidikan Non Formal yang terakreditasi*** | ***7.053.140.000*** | ***9.781.351.000*** | ***8.611.665.000*** | ***11.894.155.000*** | ***12.444.155.000*** | ***3.388.859.550*** | ***3.350.910.265*** | ***3.372.294.039*** | - | - | 48,05 | 34,26 | 39,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | ***Persentase Satuan Pendidikan Non Formal yang terakreditasi*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan | Jumlah Taman Bacaan Masyarakat (Lapak Buku) yang dibangun | 2.531.769.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah ruang penunjang (ruang kepala) di lantai 2 yang dibangun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah ruang penunjang (Aula) 2 lantai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | - Jenis dan luasan yang dibangun Cafe Buku (lantai bawah ) dan Ruang TBM (lantai bawah) Sanggar Kegiatan Belajar LANJUTAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | - Jenis dan luasan yang dibangun Ruang Kelas Baru (Sanggar Kegiatan Belajar LANJUTAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | - Jenis dan luasan yang dibangun Ruang Praktik (Ruang musik/vokal, Ruang Tata Boga, Ruang Pamong, gudang Umum, Ruang UNBK, Pustaka, Tata Busana, Ruang Kecantikan, Lab Bahasa Sanggar Kegiatan Belajar LANJUTAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | - Jenis dan luasan yang dibangun Halaman, tempat parkir, minim amphiteather, student plaza Sanggar Kegiatan Belajar LANJUTAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Non Formal/Kesetaraan yang Telah Dibangun | 0 | 2.531.769.000 | 2.531.769.000 | 2.531.769.000 | 2.531.769.000 | | | | | | | | | | | | |
| Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan | Jumlah pagar dan lantai/halaman yang dibangun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 469.298.900 | | | | | ### | | | | | | |
| | Jumlah gasebo skb yang dibangun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | - Jumlah, jenis dan luasan sarana, prasarana dan utilitas sekolah yang selesai dibangun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Telah Dibangun | 0 | 25.000.000 | 0 | 75.000.000 | 100.000.000 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | - Jenis dan luasan yang direhab Pendopo dan back stage Sanggar Kegiatan Belajar LANJUTAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | - Jumlah, jenis dan luasan sarana, prasarana dan utilitas sekolah yang selesai direhab | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Direhabilitasi Sedang/Berat | 0 | 50.000.000 | 0 | 100.000.000 | 125.000.000 | | | | | | | | | | | | |
| Pengadaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | - Jumlah mebelair pendidikan nonformal/kesetaraan yang terfasilitasi | 902.720.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.617.000 | | | | | 5,50 | | | | | | |
| | Jumlah Mebel Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Tersedia | 0 | 902.720.000 | 902.720.000 | 902.720.000 | 902.720.000 | | | | | | | | | | | | |
| Pengadaan Alat Rumah Tangga Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | - Jumlah dan jenis alat rumah tangga pendidikan nonformal/kesetaraan yang diadakan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Alat Rumah Tangga Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Tersedia | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | | | | | | | | | | | | |
| Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | - Jumlah buku tulis dan Alat Tulis (Ballpoint, Penggaris, Pensil, Penghapus, Rautan, Tipe X, Cat Air) siswa/warga belajar yang tersedia dalam rangka pemenuhan SPM dan peningkatan IPM (@ Rp. 250.000) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Perlengkapan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Tersedia | 0 | 800.000.000 | 800.000.000 | 800.000.000 | 800.000.000 | | 23.859.000 | 19.490.000 | | | | 2,98 | 2,44 | | | | |
| Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan | -Jumlah peserta/Warga masyarakat yang mengikuti kursus -kursus" | 430.151.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.650.500 | | | | | 57,11 | | | | | | |
| | Jumlah Peserta Didik Non Formal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik | 0 | 430.151.000 | 330.151.000 | 830.151.000 | 930.151.000 | | 187.500.000 | 25.000.000 | | | | 43,59 | 7,57 | | | | |
| Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan | - Jumlah dan jenis alat praktik dan peraga siswa SKB dalam rangka mendukung MERDEKA BELAJAR (Sekolah Penggerak, AKM) | 200.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 701.463.750 | | | | | 350,73 | | | | | | |
| | jumlah dan jenis alat praktik pkh di SKB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | jumlah dan jenis alat tuk paud yang tersedia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | jumlah dan jenis alat tuk kursus boga yang tersedia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | jumlah dan jenis alat tuk kursus komputer yang tersedia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - Jumlah komputer PKBM untuk mendukung kegiatan mendukung MERDEKA BELAJAR (Sekolah Penggerak, AKM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | - Jumlah pengadaan peralatan praktik peserta kursus dan pelatihan (LKP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Non Formal/ Kesetaraan yang Tersedia | 0 | 200.000.000 | 200.000.000 | 200.000.000 | 200.000.000 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan | Jumlah warga belajar (non bop paket C) yang mengikuti paket C | 850.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 748.046.000 | | | | | 88,01 | | | | | | | |
| | Jumlah peserta yang mengikuti Pendidikan Kecakapan Hidup (PKH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan non formal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah peserta yang mengikuti kursus Boga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah peserta yang mengikuti kursus coding | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah peserta yang mengikuti kursus Bahasa Inggris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah peserta yang mengikuti kursus Bim Bel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah peserta yang mengikuti kursus Menulis Kreatif | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah peserta yang mengikuti kursus tata Kecantikan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah peserta yang mengikuti kursus Video Editing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah peserta yang mengikuti kursus TEKNISI HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah peserta yang mengikuti kursus FOTOGRAFI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah peserta yang mengikuti kursus SENI BUDAYA JAWA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah peserta yang mengikuti kursus SENI VOKAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah peserta yang mengikuti kursus BARISTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah peserta yang mengikuti kursus INSTRUMEN MUSIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah peserta yang mengikuti kursus Tata Busana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah peserta yang mengikuti kursus Hidroponik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah peserta yang mengiukuti UK PAUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah peserta yang mengiukuti UK TATA BOGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah peserta yang mengiukuti UK KURSUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | KOMPUTER | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | JUMLAH program skb yang tersosialisasikan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | jumlah dusun yang terbina / mendapatkan pelatihan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah cafe baca yang terselenggara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | "- Jumlah penduduk yang mengikuti pendidikan kesetaraan paket A Setara SD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | "- Jumlah penduduk yang mengikuti pendidikan kesetaraan paket B setara SMP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | "- Jumlah penduduk yang mengikuti pendidikan kesetaraan paket C setara SM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | "- Jumlah penduduk yang mengikuti pendidikan Keaksaraan di masyarakat untuk peningkatan IPM" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | "- Jumlah warga belajar pendidikan Ketrampilan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | - Jumlah peserta PPDB nonformal/kesetaraan PKBM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | "- Jumlah warga belajar pendidikan Kursus LKP di masyarakat" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | - Jumlah peserta workshop MERDEKA BELAJAR (Sekolah Penggerak, AKM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar | 0 | 2.389.986.000 | 1.390.000.000 | 3.997.490.000 | 4.397.490.000 | | 1.514.693.265 | 1.724.159.989 | | | | 63,38 | 124,04 | | | | |
| Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | - Jumlah peserta akreditasi pendidikan nonformal/kesetaraan yang selesai dilaksanakan | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.250.000 | | | | | 25,00 | | | | | | |
| | - Jumlah peserta akreditasi pendidikan nonformal/kesetaraan yang selesai dilaksanakan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi | 0 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | | 990.000 | | | | | 6,60 | 0,00 | | | | |
| Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | - Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan nonformal/kesetaraan yang terfasilitasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | "- Jumlah Pamong Belajar ASN 8 Orang mendasar anjab yang telah ditetapkan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | "- Jumlah Tenaga Pendidikan ASN 2 Orang mendasar anjab yang telah ditetapkan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan | 0 | 10.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | | | 1.032.000 | | | | | 6,88 | | | | |
| Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | - Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan nonformal/kesetaraan yang terfasilitasi pengembangan kompetensinya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | 0 | 121.525.000 | 121.525.000 | 121.525.000 | 121.525.000 | | | 6.186.800 | | | | | 5,09 | | | | |
| Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan | - Jumlah peserta workshop Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang terbina | 15.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.685.000 | | | | | 77,90 | | | | | | |
| | Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen | 0 | 185.000.000 | 185.300.000 | 185.300.000 | 185.300.000 | | | 10.928.250 | | | | | 5,90 | | | | |
| Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan | Jumlah warga belajar yang mendapatkan DAK Non Fisik Paket (BOP Kesetaraan) | 2.033.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.078.600.000 | | | | | 53,05 | | | | | | |
| | -Jumlah peserta didik penerima biaya operasional pendidikan (BOP/DAK NON FISIK) pendidikan nonformal/Kesetaraan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | "Jumlah peserta workshop Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | -Jumlah peserta didik penerima biaya operasional pendidikan (BOP/DAK NON FISIK) pendidikan nonformal/Kesetaraan Paket A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | -Jumlah peserta didik penerima biaya operasional pendidikan (BOP/DAK NON FISIK) pendidikan nonformal/Kesetaraan Paket B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | -Jumlah peserta didik penerima biaya operasional pendidikan (BOP/DAK NON FISIK) pendidikan nonformal/Kesetaraan Paket C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP | 0 | 2.033.200.000 | 2.033.200.000 | 2.033.200.000 | 2.033.200.000 | | 1.621.780.000 | 1.579.170.000 | | | | 79,76 | 77,67 | | | | |
| Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan | - Jumlah peserta workshop Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan | 85.300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.248.400 | | | | | 97,59 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan | 0 | 86.000.000 | 86.000.000 | 86.000.000 | 86.000.000 | | 2.088.000 | 6.327.000 | | | | 2,43 | 7,36 | | | | |
| **PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM** | **Persentase sekolah yg telah menerapkan kurikulum muatan lokal** | **60.000.000** | **246.375.000** | **256.375.000** | **260.375.000** | **266.375.000** | **45.000.000** | **47.819.000** | **29.093.500** | - | - | 75,00 | 19,41 | 11,35 | 0,00 | 0,00 | | |
| ***Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar*** | ***Jumlah sekolah jenjang SD dan SMP yang telah menerapkan muatan lokal wajib dan pilihan*** | ***30.000.000*** | ***159.100.000*** | ***164.100.000*** | ***166.100.000*** | ***169.100.000*** | ***30.000.000*** | ***31.561.000*** | - | - | - | 100,00 | 19,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | ***Persentase sekolah yang menetapkan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar | - jumlah peserta workshop penyusunan kompetensi dasar muatan lokal pendidikan SD yang terfasilitasi | 15.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000.000 | | | | | 100,00 | | | | | | |
| | -Jumlah peserta workshop mulok batik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | - Jumlah dokumen KD muatan lokal pendidikan dasar yang tersusun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | "Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun" | 0 | 74.550.000 | 74.550.000 | 74.550.000 | 74.550.000 | | 15.780.500 | | | | | 21,17 | 0,00 | | | | |
| Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar | - Jumlah peserta workshop penyusunan silabus muatan lokal pendidikan SD yang terfasilitasi | 15.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000.000 | | | | | 100,00 | | | | | | |
| | - Jumlah peserta workshop penyusunan silabus muatan lokal pendidikan SMP yang terfasilitasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | - Jumlah dokumen Silabus muatan lokal pendidikan dasar yang tersusun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | "Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun" | 0 | 74.550.000 | 74.550.000 | 74.550.000 | 74.550.000 | | 15.780.500 | | | | | 21,17 | 0,00 | | | | |
| Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar | - Jumlah dan jenis buku teks pelajaran muatan lokal pendidikan SD yang diadakan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | ### | | | | | | |
| | - Jumlah dan jenis buku teks pelajaran muatan lokal pendidikan SMP yang diadakan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Pengadaan buku koleksi perpustakaan (Buku Referensi, Buku Pengayaan, Buku Panduan Pendidik) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | "Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia" | 0 | 10.000.000 | 15.000.000 | 17.000.000 | 20.000.000 | | | | | | | | | | | | |
| ***Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal*** | ***Jumlah sekolah yang menetapkan kurikulum muatan lokal pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal*** | ***30.000.000*** | ***87.275.000*** | ***92.275.000*** | ***94.275.000*** | ***97.275.000*** | ***15.000.000*** | ***16.258.000*** | ***29.093.500*** | - | - | 50,00 | 18,63 | 31,53 | 0,00 | 0,00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ***Persentase sekolah yang menetapkan kurikulum muatan lokal pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal | - jumlah peserta workshop penyusunan kompetensi dasar muatan lokal pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang terfasilitasi | 15.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000.000 | | | | | 100,00 | | | | | | |
| | - Jumlah dokumen KD muatan lokal pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal yang tersusun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | "Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal yang Tersusun" | 0 | 40.000.000 | 40.000.000 | 40.000.000 | 40.000.000 | | | 29.093.500 | | | | | 72,73 | | | | | |
| Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal | - Jumlah peserta workshop penyusunan silabus muatan lokal pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang terfasilitasi | 15.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | - Jumlah dokumen silabus muatan lokal pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal yang tersusun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | "Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal yang Tersusun" | 0 | 37.275.000 | 37.275.000 | 37.275.000 | 37.275.000 | | 16.258.000 | | | | | 43,62 | | | | | | |
| Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal | - Jumlah dan jenis buku teks pelajaran muatan lokal pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang diadakan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | "Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal yang Tersedia" | 0 | 10.000.000 | 15.000.000 | 17.000.000 | 20.000.000 | | | | | | | | | | | | | |
| **PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN** | **Persentase satuan pendidikan yang tercukupi kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan** | **200.000.000** | **225.000.000** | **235.000.000** | **245.000.000** | **245.000.000** | **71.839.000** | **5.814.305.300** | **4.640.418.800** | **-** | **-** | 35,92 | ### | ### | 0,00 | 0,00 | | | |
| ***Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan*** | ***Jumlah Guru PAUD (Formal) yang memiliki ijazah D-IV atau S1 dan bersertifikat pendidik*** | ***200.000.000*** | ***225.000.000*** | ***235.000.000*** | ***245.000.000*** | ***245.000.000*** | ***71.839.000*** | ***5.814.305.300*** | ***4.640.418.800*** | - | - | 35,92 | ### | ### | 0,00 | 0,00 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ***Persentase Guru PAUD (Formal) yang memiliki ijazah D-IV atau S1 dan bersertifikat pendidik;*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ***Jumlah Kepala PAUD (Formal) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, yang bersertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | | | | | | | | | | | | | |
| | ***Persentase Kepala PAUD (Formal) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, yang bersertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah;*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ***Jumlah Guru SD yang memiliki ijazah D-IV atau S1 dan bersertifikat pendidik*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | | | | | | | | | | | | | |
| | ***Persentase Guru SD yang memiliki ijazah D-IV atau S1 dan bersertifikat pendidik;*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ***Jumlah Kepala SD yang memiliki ijazah D-IV atau S1, yang bersertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | | | | | | | | | | | | | |
| | ***Persentase Kepala SD yang memiliki ijazah D-IV atau S1, yang bersertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah;*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ***Jumlah Guru SMP yang memiliki ijazah D-IV atau S1 dan bersertifikat pendidik*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | | | | | | | | | | | | | |
| | ***Persentase Guru SMP yang memiliki ijazah D-IV atau S1 dan bersertifikat pendidik;*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ***Jumlah Kepala SMP yang memiliki ijazah D-IV atau S1, yang bersertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | | | | | | | | | | | | | |
| | ***Persentase Kepala SMP yang memiliki ijazah D-IV atau S1, yang bersertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah;*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | - Jumlah dokumen hasil perhitungan dan pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang terfasilitasi (Kebutuhan 18 Tenaga Kependidikan) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - Jumlah dokumen perhitungan dan pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan SD yang terfasilitasi (kebutuhan sejumlah 262 Pramubakti dan 600 Guru) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | - Jumlah dokumen hasil perhitungan dan pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan SMP yang terfasilitasi (kebutuhan sejumlah Pramu Bakti 26 orang, Pengadministrasi Umum 13 orang, Pengadministrasi Keuangan 7 orang, Petugas Keamanan 25 oran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan | 0 | 25.000.000 | 35.000.000 | 45.000.000 | 45.000.000 | | | 611.000 | | | | | 1,75 | | | | | |
| Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | "- Jumlah peserta yang mengikuti seleksi dan diklat calon pengawas TK" | 200.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.839.000 | | | | | 35,92 | | | | | | | |
| | - Jumlah guru yang mengikuti dalam seleksi akademik calon kepala sekolah jenjang TK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | - Jumlah guru yang mengikuti dalam diklat calon kepala sekolah jenjang TK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | "- Jumlah peserta yang mengikuti seleksi dan diklat calon pengawas SD" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | - Jumlah guru yang mengikuti dalam seleksi akademik calon kepala sekolah jenjang SD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | - Jumlah guru yang mengikuti dalam diklat calon kepala sekolah jenjang SD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | "- Jumlah peserta mengikuti seleksi calon pengawas SMP" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | "-Jumlah peserta yang mengikuti diklat calon pengawas jenjang SMP" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | - Jumlah guru yang mengikuti dalam seleksi akademik calon kepala sekolah jenjang SMP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | - Jumlah guru yang mengikuti dalam diklat calon kepala sekolah jenjang SMP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan | 0 | 200.000.000 | 200.000.000 | 200.000.000 | 200.000.000 | | 5.814.305.300 | 4.639.807.800 | | | | ### | ### | | | | |
| **PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN** | **Persentase sekolah/lembaga yang telah memiliki perizinan** | **15.000.000** | **515.100.000** | **589.600.000** | **589.600.000** | **589.600.000** | **12.020.000** | **10.180.200** | **3.702.000** | **-** | **-** | 80,13 | 1,98 | 0,63 | 0,00 | 0,00 | | |
| ***Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat*** | ***Jumlah permohonan penerbitan izin pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat yang terlayani*** | ***5.000.000*** | ***20.000.000*** | ***25.000.000*** | ***25.000.000*** | ***25.000.000*** | ***3.700.000*** | ***7.428.000*** | ***3.702.000*** | - | - | 74,00 | 37,14 | 14,81 | 0,00 | 0,00 | | |
| | ***Persentase permohonan penerbitan izin pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat terlayani*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | - Jumlah peserta rakor penilaian kelayakan Usul Perizinan Pendidikan SD yang Diselenggarakan oleh Masyarakat yang terfasilitasi | 2.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.650.000 | | | | | 66,00 | | | | | | |
| | - Jumlah peserta rakor penilaian kelayakan Usul Perizinan Pendidikan SMP yang Diselenggarakan oleh Masyarakat yang terfasilitas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | "Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat" | 0 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | | | | | | | | | | | | |
| Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | - Jumlah peserta rakor Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan SD yang Diselenggarakan oleh Masyarakat yang terfasilitasi | 2.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.050.000 | | | | | 82,00 | | | | | | |
| | - Jumlah laporan hasil pengendalian dan pengawasan Perizinan Pendidikan SD yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | - Jumlah peserta rakor Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan SMP yang Diselenggarakan oleh Masyarakat yang terfasilitasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | - Jumlah laporan hasil pengendalian dan pengawasan Perizinan Pendidikan SMP yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | 0 | 10.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | | 7.428.000 | 3.702.000 | | | | 74,28 | 24,68 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat*** | ***Jumlah permohonan penerbitan izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat terlayani*** | ***10.000.000*** | ***495.100.000*** | ***564.600.000*** | ***564.600.000*** | ***564.600.000*** | ***8.320.000*** | ***2.752.200*** | - | - | - | 83,20 | 0,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | ***Persentase permohonan penerbitan izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat terlayani*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | - Jumlah peserta rakor penilaian kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat yang terfasilitasi | 2.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500.000 | | | | | 100,00 | | | | | | |
| | Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | 0 | 50.000.000 | 75.000.000 | 75.000.000 | 75.000.000 | | 1.485.000 | | | | | 2,97 | | | | | |
| Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | - Jumlah peserta rakor Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat yang terfasilitasi | 2.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.900.000 | | | | | 76,00 | | | | | | |
| | - Jumlah laporan hasil pengendalian dan pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | "Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat" | 0 | 50.000.000 | 75.000.000 | 75.000.000 | 75.000.000 | | 1.267.200 | | | | | 2,53 | | | | | |
| Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | - Jumlah peserta workshop Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat yang terfasilitasi | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.920.000 | | | | | 78,40 | | | | | | |
| | "Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat" | 0 | 395.100.000 | 414.600.000 | 414.600.000 | 414.600.000 | | | | | | | | | | | | |
| **PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN** | **Persentase lembaga PAUD yang menerapkan pengasuhan peserta didik berbasis budaya** | **500.000.000** | **500.000.000** | **500.000.000** | **500.000.000** | **500.000.000** | **497.373.940** | - | **183.916.275** | - | - | 99,47 | 0,00 | 36,78 | 0,00 | 0,00 | | |
| | **Persentase Sekolah Dasar (SD) yang menerapkan muatan lokal berbasis budaya** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | | | | | | | | | | | |
| | **Persentase Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang menerapkan muatan lokal berbasis budaya** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Pendidikan Berbasis Budaya*** | ***Jumlah PAUD, SD dan SMP yang melaksanakan pendidikan Berbasis Budaya*** | ***500.000.000*** | ***500.000.000*** | ***500.000.000*** | ***500.000.000*** | ***500.000.000*** | ***497.373.940*** | - | ***183.916.275*** | - | - | 99,47 | 0,00 | 36,78 | 0,00 | 0,00 | | |
| | ***Presentase Pendidikan Berbasis Budaya yang terpenuhi*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pembinaan Muatan Lokal | Jumlah Siswa SD yang dilatih membatik | 500.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497.373.940 | | | | | 99,47 | | | | | | |
| | Jumlah Guru SD yang dilatih membatik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Guru SMP yang dilatih membatik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Siswa SMP yang dilatih membatik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Pendidik PAUD Formal dan Non Formal yang dilatih Gamelan dalam pengasuhan peserta didik berbasis budaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Muatan Lokal | 0 | 500.000.000 | 500.000.000 | 500.000.000 | 500.000.000 | | | 183.916.275 | | | | | 36,78 | | | | |
| | | **728.627.129.105** | **759.229.469.000** | **764.544.075.000** | **779.834.957.000** | **799.330.831.000** | **703.707.121.266** | **656.008.623.587** | **733.020.477.533** | **-** | **-** | | | | | | | |

Sedangkan anggaran dan realisasi belanja tahun 2024 yang dialokasikan dalam pencapaian sasaran pembangunan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.23 Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024

| No | Sasaran Strategis/Pendukung | Kinerja | | | Anggaran | | | Efiisiensi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Target | Realisasi | Capaian (%) | Pagu (Rp) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | |
| 1. | Aksesibilitas dan kualitas pendidikan meningkat | | | | 137.898.482.401 | 132.845.772.023 | 96,34 | 3,66 |
| | Rata-rata Lama Sekolah | 7.6 | 7.35 | 96.71 | | | | |
| | Harapan Lama Sekolah | 13 | 13.40 | 103.07 | | | | |
| 2. | Akuntabilitas kinerja PD Meningkat | 80.04 | 83,51 | 104,29 | 621.562.498.979 | 609.026.717.016 | 97,98 | 2,02 |
| | Jumlah Belanja Total | | | | 759.460.981.380 | 741.949.794.039 | 97,69 | 2,31 |
| | Jumlah Belanja Program Utama | | | | 137.898.482.401 | 132.845.772.023 | 96,34 | 3,66 |
| | Jumlah Belanja Program Penunjang | | | | 621.562.498.979 | 609.026.717.016 | 97,98 | 2,02 |

*Sumber Data : Subbagian Perencanaan Dinas Pendidikan. 2024*

Berdasarkan tabel 2.23 di atas capaian kinerja sasaran Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul belum mencapai/mencapai/melampaui target kinerja tahun 2024 dengan realisasi anggaran capaian dari total belanja operasional program/kegiatan yang terkait langsung pencapaian sasaran sebesar Rp 759.460.981.380 terealisasi Rp 741.949.794.039 atau 96,69% sehingga dapat dikatakan terdapat efisiensi Rp 17.511.187.341 atau 2,31% yang bersumber dari:

- Sisa pengadaan barang dan jasa
- Sisa kontrak
- Sisa anggaran belanja rutin air, telepon dan Listrik
- Sisa gaji pegawai karena pensiun dan mutasi ke OPD lain

### 2.1.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Pengembangan pelayanan pendidikan yang efektif dan inovatif menjadi kunci untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Gunungkidul, guna melahirkan generasi yang siap menghadapi tantangan masa depan. Pengembangan SDM yang unggul di Kabupaten Gunungkidul menjadi prioritas utama untuk mendukung kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Akses terhadap pendidikan di Kabupaten Gunungkidul telah meningkat, namun masih terdapat kesenjangan di beberapa wilayah. Kualitas pendidikan di Kabupaten Gunungkidul terus mengalami peningkatan, namun masih perlu ditingkatkan dalam hal kemampuan guru, sarana prasarana, dan relevansi kurikulum. Efisiensi pengelolaan pendidikan di Kabupaten Gunungkidul menunjukkan perkembangan yang positif, tetapi masih perlu ditingkatkan untuk memaksimalkan penggunaan anggaran dan sumber daya. Penggunaan teknologi dalam pembelajaran masih belum merata di semua sekolah, sehingga akses terhadap pendidikan berkualitas yang berbasis teknologi belum optimal.

a. Tantangan
   1. Era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang menuntut kualitas sumberdaya manusia yang kreatif dan kompetitif;
   2. Masih adanya budaya masyakarat yang belum sadar akan pentingnya pendidikan;
   3. Masih adanya kasus pernikahan dini;
   4. Masih adanya mobilitas penduduk yang relatif tinggi;

5. Perubahan teknologi yang cepat dan disruptif menuntut sistem pendidikan yang lebih fleksibel dan adaptif terhadap kebutuhan masa depan;
6. Kesenjangan digital yang masih ada antara daerah perkotaan dan pedesaan di Kabupaten Gunungkidul menjadi tantangan dalam mendorong akses dan pemanfaatan teknologi pendidikan;
7. Kurikulum pendidikan di Kabupaten Gunungkidul perlu diperbarui untuk mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan di era Revolusi Industri 4.0, seperti keterampilan berpikir kritis, kreativitas, dan kolaborasi;
8. Aksesibilitas penyelenggaraan pendidikan masih belum merata;
9. Peningkatan kualifikasi akademik belum berkontribusi terhadap peningkatan kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan;
10. Angka kemiskinan yang masih relatif tinggi;
11. Masih rendahnya budaya baca masyarakat;
12. Belum semua kebijakan sinergis antara pemerintah pusat dan daerah.

b. Peluang (*opportunities)*
1. Kondisi sosial, politik, ekonomi dan keamananyang kondusif;
2. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
9. Pemberlakuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Pemberlakuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
11. Pemberlakuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;

12. Pemberlakuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
13. Pemberlakuan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
14. Berkembangnya sektor pariwisata yang prospektif terhadap pertumbuhan ekonomi;
15. Terbukanya akses di wilayah selatan dengan dibangunnya jalur jalan lintas selatan (JJLS);
16. Ditetapkannya Kabupaten Gunungkidul sebagai kawasan Gunungsewu Global Geopark Network oleh UNESCO.

## 2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

### 2.2.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Beberapa permasalahan yang masih dihadapi Dinas Pendidikan adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.24**
**Pemetaan Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan**

| No | Masalah Pokok | Masalah | Akar Masalah |
|---|---|---|---|
| 1 | Angka Partisipasi Sekolah (APS) | 1.1. Angka Partisipasi Sekolah PAUD (5-6 Tahun) = 92,27 Belum 100% | a. Masih ada anak usia 5-6 tahun yang tidak bersekolah |
| | | | b. Daya Tampung / Sarana Prasarana yang disediakan belum memadai |
| | | | c. Masih ada anak yang ingin mengikuti PAUD tetapi berasal dari keluarga miskin |
| | | | d. Gizi peserta didik perlu ditingkatkan |
| | | 1.2. Angka Partisipasi Sekolah Dikdas (7-15 Tahun) = 98,68 belum 100% | a. Masih ada anak usia sekolah yang tidak bersekolah |
| | | | b. Jumlah ruang kelas dan/atau sekolah belum mencukupi |
| | | | c. Anak usia tertentu tidak bersekolah karena terkendala biaya |
| | | | d. Gizi peserta didik perlu ditingkatkan |
| | | 1.3. Angka Partisipasi Sekolah Kesetaraan (7-18 Tahun) = 9,88 Belum 100% | a. Masih ada anak usia sekolah (7-18) yang tidak bersekolah |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | b. Daya tampung yang disediakan belum memadai |
| | | | c. Anak usia 7-18 tidak bersekolah karena terkendala biaya |
| | | | d. Kualitas proses pembelajaran di sekolah masih rendah |
| | | | e. Belum terpenuhinya perlengkapan pembelajaran |
| | | | f. Belum optimal terciptanya suasana kondusif disekolah untuk melakukan pembelajaran |
| | | | g. Gizi Peserta Didik perlu ditingkatkan |
| 2 | Kompetensi Literasi dan Numerasi | 2.1. Kompetensi literasi SD 80,98, SMP 84,98 belum 100% | a. . Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan belum terpenuhi |
| | | 2.2. Kompetensi numerasi SD 70,84, SMP 79,98 Belum 100% | b. Distribusi pendidik dan tenaga kependidikan belum merata |
| | | | c. Kualitas pendidik dan tenaga kependidikan masih perlu ditingkatkan |
| | | | d. Kualitas proses pembelajaran di sekolah masih perlu ditingkatkan |
| | | | e. Belum terpenuhinya perlengkapan pembelajaran |
| | | | d. Gizi Peserta Didik perlu ditingkatkan |
| 3 | Layanan Pendidikan Anak Usia Dini | 3.1. Jumlah Satuan PAUD minimal akreditasi B = 86.24 belum 100% | a. Pemahaman tentang kualitas layanan PAUD di Satuan PAUD perlu ditingkatkan |
| | | | b. Kondisi kualitas lingkungan belajar satuan PAUD belum memadai |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | c. Kualitas sumber daya manusia yang ada di satuan PAUD perlu ditingkatkan |
| | | | d. Gizi Peserta Didik perlu ditingkatkan |
| | | 3.2. Jumlah guru PAUD S1/D-IV= 93,76 belum 100% | a. Dukungan kebijakan untuk penguatan karir guru perlu ditingkatkan |
| 4 | Kualitas Lingkungan Belajar | 4.1. Kualitas lingkungan belajar (Iklim Keamanan, Iklim Kebinekaan, Iklim Inklusivitas) belum kondusif | a. Tingkat keamanan Satuan pendidikan belum optimal dari perundungan, kekerasan seksual, dan hukuman fisik |
| | | | b. Satuan pendidikan belum optimal dalam mempromosikan toleransi antar peserta didik dan warga sekolah |
| | | | c. Satuan pendidikan belum optimal dalam mengakomodasi kebutuhan peserta didik yang beragam |

**Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih adalah : "**Membangun Masyarakat Adil Makmur, Lestari dan Berkeadaban**"

Sedangkan Misi nya adalah :

1. Meningkatkan **pembangunan manusia** yang produktif, berkualitas dan berkepribadian untuk siap kerja dan siap merintis usaha sendiri serta perluasan **akses kesehatan** untuk rakyat.
2. Mewujudkan keadilan sosial melalui kebijakan yang **memperkuat kapasitas ekonomi rakyat**, termasuk kapasitas produksi pangan oleh petani dan nelayan, serta mendukung kegiatan ekonomi skala kecil menengah yang inklusif dan kreatif.
3. Membangun **Kemandirian Ekonomi Daerah** berbasis potensi sumber daya lokal.
4. Setia pada Amanat Penderitaan Rakyat , Pancasila, UUD 1945, menjunjung tinggi **hukum** demi menjamin hak-hak rakyat, serta menjalankan tata **pemerintahan daerah yang bersih** bebas dari korupsi dan berkeadaban.
5. Memajukan **kebudayaan** setempat dalam semangat kebhinekaan dan toleransi serta menjaga **kelestarian lingkungan** hidup warisan leluhur bangsa.

Berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan yang terkait dengan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih mendukung pada misi ke 1, yaitu Meningkatkan **pembangunan manusia** yang produktif, berkualitas dan berkepribadian untuk siap kerja dan siap merintis usaha sendiri serta perluasan **akses kesehatan** untuk rakyat;

dan misi ke 4, yaitu Setia pada Amanat Penderitaan Rakyat , Pancasila, UUD 1945, menjunjung tinggi **hukum** demi menjamin hak-hak rakyat, serta menjalankan tata **pemerintahan daerah yang bersih** bebas dari korupsi dan berkeadaban. Namun ada beberapa faktor penghambat dan pendorong yang masing – masing sebagai berikut :

a. Faktor – faktor penghambat :
   1. Masih rendahnya kualitas pembelajaran di lembaga PAUD yang dikelola oleh kelompok masyarakat atau pihak swasta;
   2. Belum optimalnya aksesibilitas PAUD berkualitas;
   3. Belum optimalnya APM SD / MI;
   4. Belum optimalnya APM SMP / MTs;
   5. Belum optimalnya penanganan Anak Tidak Sekolah;
   6. Belum optimalnya peningkatan kualitas pembelajaran di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
   7. Kuantitas dan Kualitas Guru SD dan SMP belum optimal;
   8. Standar Pelayanan Minimal Pendidikan belum terpenuhi;
   9. Capaian Standar Nasional Pendidikan sebagai keberlanjutan dari Standar Pelayanan Minimal belum merata dan optimal;
   10. Belum optimalnya kualitas pembelajaran dan disiplin penuntasan target pembelajaran;
   11. Belum optimalnya pola pembelajaran jarak jauh;

b. Faktor – faktor pendorong :
   1. Animo masyarakat/warga belajar terhadap pendidikan masih tinggi;
   2. Komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan;
   3. Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan yang memenuhi standar kompetensi semakin meningkat;
   4. Lestarinya budaya dan kearifan lokal yang mendukung pendidikan karakter;
   5. Kesadaran dan kemauan masyarakat terhadap pengembangan diri dalam meningkatan ketaqwaan dan kemandirian cukup tinggi;
   6. Adanya regulasi sekolah harus memenuhi standar nasional pendidikan;
   7. Program pendidikan muatan lokal berbasis budaya lokal banyak diminati warga masyarakat;
   8. Dukungan pemerintah pusat terhadap penuntasan wajib belajar 9 tahun tinggi;
   9. Komitmen satuan pendidikan, komite sekolah dan masyarakat dalam meningkatkan mutu pendidikan;
   10. Motivasi masyarakat untuk berprestasi di bidang pendidikan meningkat.

**Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi**

2.7.1 Telaahan Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan di daerah merupakan satu kesatuan integral dengan perencanaan pembangunan nasional. Dengan demikian tema dan prioritas pembangunan daerah mengacu pada tema dan prioritas pembangunan nasional.

Tema Pembangunan Nasional adalah ”kedaulatan pangan dan energi, serta penguatan ekonomi yang produktif dan inklusif sebagai fondasi mewujudkan visi Indonesia Emas 2045” dengan 8 Prioritas

Nasional (PN) sesuai 8 agenda pembangunan di dalam RPJMN Tahun 2025-2029, yaitu:

PN 1 : Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia

PN 2 : Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, ekonomi Hijau, dan ekonomi Biru

PN 3 : Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi

PN 4 : Memperkuat Pembangunan SUmber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas

PN 5 : Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri

PN 6 : Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskian

PN 7 : Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan

PN 8 : Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur

Arah Kebijakan dan strategi Pembangunan RPJM 2025-2029 bidang Pendidikan pada PN 4 - Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas yaitu:

1. Percepatan Wajib Belajar 13 Tahun (1 Tahun Pra Sekolah dan 12 Tahun Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah)
   a. Perluasan layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
   b. Revitalisasi sarana dan prasarana sekolah dan madrasah yang berkualitas
   c. Penyaluran bantuan pendidikan yang tepat sasaran
   d. Pencegahan dan penangan Anak Tidak Sekolah (ATS)
2. Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran
   a. Pengembangan inovasi pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi digital dan penerapan pedagogi modern (PTCK)
   b. Penciptaan ekosistem satuan pendidikan yang mendukung proses pembelajaran berkualitas, termasuk peningkatan kecakapan literasi kelas awal, serta penguatan karakter dan *wellbeing* peserta didik dan pendidik
   c. Pemantapan sistem asesmen komprehensif
   d. Pengembangan anak usia dini holistic-integratif
   e. Peningkatan kualitas Pendidikan agama dan Pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa

f. Penerapan kuirkulum yang kontektual berpusat pada peserta didik serta focus pada karakter dan kompetensi esensial
g. Pembangunan dan penyelenggaraan sekolah unggul
h. Revitalisasi Pendidikan non formal

3. Pemenuhan Layanan Pendidikan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang Berkualitas
   a. Peningkatan kualitas Pendidikan pesantren dan Pendidikan keagamaan
   b. Rekognisi lulusan Pendidikan pesantren dan Pendidikan keagamaan
   c. Penguatan penjaminan mutu Pendidikan pesantren dan Pendidikan keagamaan
4. Penguatan Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berkualitas
   a. Reformasi Pendidikan keguruan melalui penguatan LPTK dan revitalisasi Pendidikan Profesi Guru (PPG)
   b. Restrukturisasi kewenangan pengelolaan guru meliputi formasi, rekrutmen, pengangkatan dan penempatan, mobilitas, pembinaan karier professional (e.g. pelatihan, in-service training), perlindungan hukum, dan kesejahteraan berbasis kinerja
5. Penguatan Sistem Tata Kelola Pendidikan
   a. Penguatan manajemen kepemimpinan lembaga pendidikan
   b. Peningkatan kapasitas pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan Pendidikan khususnya terkait pemanfaatan anggaran Pendidikan
   c. Penguatan sistem penjaminan mutu
6. Penguatan Pendidikan Tinggi dan Pengembangan bidang STEAM
   a. Peningkatan relevansi dan perluasan akses pendidikan tinggi
   b. Pengembangan STEAM
   c. Penguatan otonomi perguruan tinggi sebagai rumah Masyarakat ilmiah
   d. Peningkatan kualitas dan pengelolaan dosesn serta tenaga kependidikan
7. Penguatan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Tenaga Kerja
   a. Penguatan Pendidikan menengah vokasi
   b. Penguatan Pendidikan tinggi vokasi
   c. Penguatan pelatihan vokasi
   d. Penguatan produktivitas tenaga kerja melalui penciptaan iklim ketenagakerjaan yang kondusif
8. Peningkatan Kontribusi Iptek dan Inovasi dalam Pembangunan Nasional
   a. Penguatan kapasitas iptek dan inovasi
   b. Peningkatan fungsi intermediasi dan layanan pemanfaatan iptek dan inovasi
   c. Optimalisasi pemanfaatan iptek dan inovasi secara massif di berbagai bidang
   d. Penguatan perguruan tinggi sebagai pusat keunggulan iptek dan inovasi berbasis kewilayahan dan berdaya saing
9. Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN)
   a. Pengembangan manajemen talenta nasional (MTN) seni budaya
   b. Pengembangan manajemen talenta nasional (MTN) riset inovasi
   c. Pengembangan manajemen talenta nasional (MTN) olahraga
   d. Penguatan tata Kelola manajemen talenta nasional (MTN)
10. Penguatan Budaya Literasi untuk Kreativitas dan Inovasi
   a. Peningkatan kualitas layanan perpustakaan
   b. Peningkatan budaya kegemaran membaca

2.7.2. Telaahan Renstra Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY

Sesuai Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah tahun 2022-2027, mempunyai visi "Terwujudnya **PANCAMULIA** Masyarakat Jogja melalui Reformasi Kalurahan, Pemberdayaan Kawasan Selatan, serta Pengembangan Budaya Inovasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi". Sedangkan misinya adalah "Memberdayakan Kawasan Selatan dengan mengoptimalkan dukungan infrastruktur, peningkatan kapasitas SDM, dan perlindungan/pengelolaan sumber daya setempat". Adapun tujuan yang ingin dicapai adalah "Terwujudnya kualitas hidup-kehidupan-penghidupan masyarakat".

Adapun Sasaran yang ingin dicapai adalah "Kualitas SDM Yogyakarta yang dapat diandalkan".

Berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul yang terkait Rencana Strategis Dinas Pendidikan Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2022-2027 adalah mendukung pada visi dan misi secara keseluruhan bidang Pendidikan.

**Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.**

Tujuan penataan ruang Kabupaten Gunungkidul sebagai mana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 tahun 2011 Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul tahun 2010 – 2030 adalah mewujudkan wilayah kabupaten sebagai pusat pengembangan usaha yang bertumpu pada pertanian, perikanan, kehutanan, dan sumberdaya lokal untuk mendukung destinasi wisata menuju masyarakat yang berdaya saing, maju, mandiri, dan sejahtera". Berdasarkan RTRW tersebut di atas, rencana struktur ruang Kabupaten Gunungkidul meliputi rencana sistem pusat kegiatan dan rencana sistem jaringan prasarana, hal ini dapat terlihat dari rencana : (a) sistem perkotaan; (b) Sistem Jaringan Prasarana Wilayah; (c) Sistem Jaringan Transportasi Darat; (d) Sistem Jaringan Prasarana Transportasi Laut; (e) Sistem jaringan energi; (f) Sistem jaringan telekomunikasi dan Informatika; dan (g) Sistem jaringan sumber daya air; dan (h) Sistem Jaringan Prasarana Lainnya.

KLHS Kabupaten Gunungkidul jika dilihat dari perspektif pendidikan, berimplikasi terhadap semakin tingginya kebutuhan masyarakat terhadap ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan di setiap titik yang memungkinkan terjadinya pertambahan penduduk yang lebih tinggi yang berasal dari arus urbanisasi dan migrasi, hal ini merupakan konsekuensi dari sebuah wilayah yang dimungkinkan lebih memberikan jaminan kepada masyarakat untuk keberlangsungan kehidupan yang lebih layak. Selain itu, upaya peningkatan layanan pendidikan di wilayah-wilayah pedesaan dan perkotaan harus mendapat perhatian lebih serius melalui peningkatan sarana dan prasarana pendidikan serta berbagai alternatif pelayanan pendidikan yang sesuai dengan kondisi dan karakteristik wilayah masing-masing.

**2.2.2.Penentuan Isu-isu Strategis**

Kembali kami review faktor-faktor dari pelayanan Dinas Pendidkan Kabupaten Gunungkidul, yang mempengaruhi permasalahan pelayanan ditinjau dari :

2.2.2.1. Gambaran pelayanan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah

Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul, maka Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan adalah sebagai berikut :

1. Dinas Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang pendidikan.
2. Dinas Pendidikan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2.2.2.2. Sasaran Jangka Menengah pada Renstra Kementerian Pendidikan;

Berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan yang terkait RPJM 2025-2029 bidang Pendidikan pada PN 4 - Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas yaitu:

1. Percepatan Wajib Belajar 13 Tahun (1 Tahun Pra Sekolah dan 12 Tahun Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah).
2. Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran.
3. Penguatan Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berkualitas.
4. Penguatan Sistem Tata Kelola Pendidikan.
5. Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN)
6. Penguatan Budaya Literasi untuk Kreativitas dan Inovasi.

2.2.2.3. Sasaran Jangka Menengah pada Renstra Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta

Berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan yang terkait Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah tahun 2022-2027, mempunyai visi “Terwujudnya **PANCAMULIA** Masyarakat Jogja melalui Reformasi Kalurahan, Pemberdayaan Kawasan Selatan, serta Pengembangan Budaya Inovasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi”. Sedangkan misinya adalah “Memberdayakan Kawasan Selatan dengan mengoptimalkan dukungan infrastruktur, peningkatan kapasitas SDM, dan perlindungan/pengelolaan sumber daya setempat”. Adapun tujuan yang ingin dicapai adalah “Terwujudnya kualitas hidup-kehidupan-penghidupan masyarakat”.

Adapun Sasaran yang ingin dicapai adalah “Kualitas SDM Yogyakarta yang dapat diandalkan”.

Berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul yang terkait Rencana Strategis Dinas Pendidikan Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2022-2027 adalah mendukung pada visi dan misi secara keseluruhan bidang Pendidikan.

2.2.2.4. Implikasi Rencana Tata Ruang Wilayah

Mewujudkan wilayah kabupaten sebagai pusat pengembangan usaha yang bertumpu pada pertanian, perikanan, kehutanan, dan sumberdaya lokal untuk mendukung destinasi wisata menuju masyarakat yang berdaya saing, maju, mandiri, dan sejahtera.

2.2.2.5. Implikasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis

KLHS Kabupaten Gunungkidul jika dilihat dari perspektif pendidikan, berimplikasi terhadap semakin tingginya kebutuhan masyarakat terhadap ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan di setiap titik yang memungkinkan terjadinya pertambahan penduduk yang lebih tinggi yang berasal dari arus urbanisasi dan migrasi, hal ini merupakan konsekuensi dari sebuah wilayah yang dimungkinkan lebih memberikan jaminan kepada masyarakat untuk keberlangsungan

kehidupan yang lebih layak. Selain itu, upaya peningkatan layanan pendidikan di wilayah-wilayah pedesaan dan perkotaan harus mendapat perhatian lebih serius melalui peningkatan sarana dan prasarana pendidikan serta berbagai alternatif pelayanan pendidikan yang sesuai dengan kondisi dan karakteristik wilayah masing-masing.

Dari review faktor-faktor pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah yang ditinjau dari gambaran pelayanan umum Perangkat Daerah, Sasaran jangka Menengah pada renstra K/L, Sasaran jangka Menengah dan Renstra Perangkat Daerah Propinsi, dan Implikasi RTRW bagi pelayanan daerah serta implikasi KLHS bagi perangkat daerah, dapat ditentukan isu-isu strategis Bidang Pendidikan.

**Tabel 2.25**
**Teknik Menyimpulkan Isu Strategis PD**

| Potensi Daerah yang menjadi kewenangan PD | Permasalahan PD | Isu KLHS yang Relevan dengan PD | Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD | | | Isu Strategis PD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Global | Nasional | Regional | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| Belum optimalnya kualitas dan daya saing sumber daya manusia | Angka Partisipasi Sekolah (APS) | Kualitas sumber daya manusia yang berkualitas, cerdas, sehat dan mandiri masih terbatas | SDG 4 : Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ke-4 menekankan pendidikan berkualitas dan inklusif bagi semua orang di seluruh dunia pada tahun 2030. Education For All: Inisiatif global yang dipimpin UNESCO untuk memastikan bahwa kebutuhan pendidikan semua anak, remaja dan orang dewasa terpenuhi. Lifelong Learning: Konsep | Di tingkat nasional, Indonesia menghadapi tantangan untuk mencapai target Wajib Belajar 12 Tahun. Data Kemendikbud menunjukkan bahwa Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk tingkat SMA masih di bawah 85%, dengan disparitas yang signifikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Pendidikan kesetaraan menjadi strategi kunci untuk | Sebagai daerah dengan karakteristik khas, Gunungkidul menghadapi tantangan regional yang berbeda dari wilayah lainnya di Yogyakarta. Kondisi alam yang didominasi karst menyebabkan keterbatasan air dan kesuburan tanah, mendorong penduduk untuk mencari penghidupan di luar daerah. Mobilitas penduduk yang tinggi untuk bekerja di kota | **Masih rendahnya kesadaran dan minat masyarakat untuk mengikuti program Pendidikan Kesetaraan** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | pendidikan sepanjang hayat sebagai kunci pembangunan manusia dalam konteks globalisasi dan perubahan teknologi. | mengatasi kesenjangan ini, namun implementasi di daerah seperti Gunungkidul masih menghadapi tantangan sistemik dalam hal kesadaran, pendanaan, dan kapasitas kelembagaan. | menyulitkan konsistensi kehadiran dalam program pendidikan kesetaraan yang membutuhkan waktu tertentu dalam pelaksanaannya. | **Kualitas Layanan pendidikan belum merata** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Kompetensi Literasi dan Numerasi | | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang diukur oleh UNDP menempatkan kualitas pendidikan sebagai salah satu indikator utama, dimana daerah dengan pendidikan berkualitas rendah cenderung memiliki IPM yang lebih rendah pula. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) nomor 4 secara khusus menyoroti pentingnya pendidikan berkualitas yang inklusif dan merata. Gap kualitas pendidikan di negara berkembang masih signifikan. PISA | Kebijakan Merdeka Belajar yang digagas oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjadi isu nasional yang memiliki dampak langsung terhadap Gunungkidul. Program ini bertujuan memberikan otonomi lebih besar kepada satuan pendidikan, namun implementasinya di daerah dengan keterbatasan sumber daya seperti Gunungkidul masih menghadapi berbagai kendala. Standar Nasional Pendidikan | Dalam konteks regional Daerah Istimewa Yogyakarta, Gunungkidul secara konsisten menempati posisi terendah dalam berbagai indikator pendidikan. Dibandingkan dengan Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta yang memiliki fasilitas pendidikan memadai, Gunungkidul tertinggal dalam aspek akses, kualitas, dan pemerataan pendidikan. Pemetaan kesenjangan pendidikan di DIY menunjukkan korelasi kuat antara kondisi geografis dan kualitas | **Kualitas pendidikan belum merata** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | dan TIMSS menjadi tolok ukur kualitas pendidikan global | yang ditetapkan secara nasional menjadi tantangan tersendiri bagi Gunungkidul untuk memenuhinya, terutama dalam aspek standar sarana prasarana dan standar pendidik. Kesenjangan kualitas pendidikan antar wilayah di Indonesia semakin memperjelas posisi Gunungkidul yang membutuhkan perhatian khusus dalam kebijakan pemerataan pendidikan nasional. | pendidikan. Faktor geografis berupa wilayah perbukitan karst dan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang didominasi oleh sektor pertanian subsisten dan buruh menjadi pendorong utama kesenjangan pendidikan di Gunungkidul dibandingkan kabupaten/kota lain di DIY. | |
| | | | | | | **Kuantitas, kualitas, dan distribusi guru masih terbatas** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Kualitas Lingkungan Belajar | | Pemanasan global telah meningkat sejak era pra-industri, mengakibatkan perubahan pola cuaca yang ekstrem dan tidak dapat diprediksi. Cuaca ekstrem menyebabkan gangguan pada kegiatan belajar-mengajar, kerusakan infrastruktur sekolah, dan menambah kesenjangan pendidikan. Sebagai bagian dari komunitas global, Gunungkidul tidak terlepas dari dampak perubahan iklim yang semakin nyata. Cuaca ekstrem seperti kekeringan berkepanjangan dan hujan deras telah | Indonesia menghadapi tantangan serius terkait deforestasi yang mencapai 450.000 hektar per tahun. Laju kehilangan hutan ini berdampak langsung pada perubahan ekosistem dan ketersediaan air, termasuk di kawasan Gunungkidul yang memiliki karakteristik karst. Sektor pendidikan nasional juga dihadapkan pada kebutuhan dekarbonisasi, mengingat kontribusinya terhadap emisi karbon nasional. Indonesia berkomitmen untuk menurunkan | Daerah Istimewa Yogyakarta, termasuk Kabupaten Gunungkidul, memiliki profil lingkungan yang unik dengan 75% wilayahnya berpotensi mengalami bencana alam seperti gempa bumi, tanah longsor, dan kekeringan. Karakteristik kawasan karst yang dominan di Gunungkidul menciptakan tantangan spesifik dalam pengelolaan air dan konservasi lingkungan. Strategi mitigasi bencana melalui pendidikan menjadi krusial dalam membangun ketahanan | **Pendidikan karakter, pendidikan agama, dan pendidikan kewarganegaraan belum optimal.** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | mengganggu proses pendidikan di berbagai wilayah. Pengembangan kurikulum pendidikan lingkungan yang komprehensif menjadi prioritas global untuk mempersiapkan generasi muda menghadapi tantangan perubahan iklim. | emisi karbon sebesar 29% pada tahun 2030 melalui berbagai inisiatif, termasuk di sektor pendidikan. Komitmen ini diterjemahkan dalam kebijakan integrasi kurikulum pendidikan lingkungan di seluruh jenjang pendidikan. Program literasi lingkungan untuk generasi muda menjadi salah satu strategi nasional dalam membangun kesadaran dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim. | masyarakat terhadap risiko lingkungan yang ada. | |

# BAB III
# TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DINAS PENDIDIKAN

## 3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029 Dinas Pendidikan

Sesuai visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yaitu dengan **visi** "Menciptakan masyarakat yang adil, makmur, lestari, dan berkeadaban" dan dengan **misi** pertama "Meningkatkan Pembangunan Manusia yang produktif, berkualitas dan berkepribadian untuk siap kerja dan siap merintis usaha sendiri serta perluasan akses kesehatan untuk rakyat", serta dengan program Strategis **Program "Bocah Pinter":** Meningkatkan derajat pendidikaan warga melalui penyelenggaraan pendidikan berkualitas dan merata melalui penguatan pendidikan budi pekerti, bantuan biaya pendidikan, perbaikan sekolah, dan peningkatan kesejahteraan guru, maka **tujuan** jangka menengah Dinas Pendidikan adalah "Meningkatnya Derajad Pendidikan Penduduk", dan dengan **Sasaran** jangka menengah Dinas Pendidikan adalah "Aksesibilitas dan kualitas pendidikan meningkat". Strategi holistik meliputi pemerataan pendidikan di seluruh wilayah, penguatan pendidikan budi pekerti, dan jaminan akses pendidikan untuk semua lapisan masyarakat tanpa diskriminasi

**TABEL 3.1**

**TEKNIK MERUMUSKAN TUJUAN DAN SASARAN**

**RENSTRA PD**

**PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR | BASELINE 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* |
| **1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan** | | | | | | | | | | | |
| Terwujudnya Derajat Taraf Pendidikan Masyarakat Secara Inklusif dan Merata Meningkat | Meningkatnya Derajad Pendidikan Penduduk | | Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun) | 7.35 | 7.37 | 7.39 | 7.41 | 7.43 | 7.45 | 7.47 | |
| | | | Harapan Lama Sekolah (Tahun) | 13.40 | 13.42 | 13.44 | 13.46 | 13.48 | 13.50 | 13.52 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aksesibilitas dan kualitas pendidikan meningkat | Indeks SPM Bidang Pendidikan (Indeks) | 80.93 | 86.03 | 87.01 | 88.02 | 89.01 | 90.03 | 91.06 | |

Selanjutnya Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah ditunjukkan pada tabel 3.2.

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pendidikan
Tahun 2025-2029

| No | Tujuan | Sasaran | Indikator Tujua | Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada tahun ke- | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1 | Meningkatnya Derajad Pendidikan Penduduk | | Rata-rata Lama Sekolah (RLS) | 7,39 | 7,41 | 7,43 | 7,45 | 7,47 |
| | | | Harapan Lama Sekolah (HLS) | 13,44 | 13,46 | 13,48 | 13,5 | 13,52 |
| | | Aksesibilitas dan kualitas pendidikan meningkat | Indeks SPM Bidang Pendidikan | 87,01 | 88,02 | 89,01 | 90,03 | 91,06 |

Tujuan dan sasaran Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul sesuai tugas dan fungsi diatas menjadi panduan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Program dan Kegiatan jangka menengah dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

3.1.1. Hubungan Tujuan dan Sasaran Dinas Pendidikan dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD

Tujuan Perangkat Daerah adalah Meningkatnya Derajad Pendidikan Penduduk dengan indikator kinerja tujuan PD adalah Rata-rata lama sekolah dan Harapan lama sekolah. Sasaran Perangkat Daerah adalah Aksesibilitas dan kualitas pendidikan meningkat dengan Indikator kinerja sasaran PD adalah Indeks SPM Bidang Pendidikan. Tujuan dan Sasaran PD mendukung tujuan dan sasaran RPJMD.

Tabel 3.3
Tujuan dan Indikator Kinerja Utama
Dinas Pendidikan

| NO | Tujuan | INDIKATOR Tujuan | Target Kinerja Tujuan pada Tahun Ke- | | | | | Unit kerja penanggung jawab | Keterangan/Rumusan/ Formula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meningkatnya Derajad Pendidikan Penduduk | 1. Rata-rata Lama Sekolah<br>2. Harapan Lama Sekolah | 7,39<br>13,44 | 7,41<br>13,46 | 7,43<br>13,48 | 7,45<br>13,50 | 7,47<br>13,52 | Dinas Pendidikan | RLS = Lama sekolah penduduk i<br>Keterangan:<br>RLS=Rata-rata lama sekolah<br>N = jumlah penduduk<br>( i=1,2,3,….,n)<br>Penghitungan RLS untuk usia 25 tahun ke atas<br>HLS = FK X<br>Keterangan :<br>: Harapan Lama Sekolah pada umur a di tahun t<br>: Jumlah Penduduk usia I yang bersekolah pada tahun t<br>: Jumlah Penduduk usia I pada tahun t<br>FK : Faktor koreksi pesantren<br><br>FK =<br>Jumlah santri sekolah dan mukim = rasio santri mukim x jumlah santri sekolah<br>Rasio santri mukim |

Tabel 3.4
Sasaran dan Indikator Kinerja Utama
Dinas Pendidikan

| No. | Sasaran | Indikator Sasaran | Target Kinerja Sasaran pada tahun ke- | | | | | Unit Kerja Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| (1) | (2) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (14) |
| 1 | Aksesibilitas dan kualitas pendidikan meningkat | Indeks SPM Bidang Pendidikan | 87,01 | 88,02 | 89,01 | 90,03 | 91,06 | Dinas Pendidikan |

## 3.2. Strategi Dinas Pendidikan dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pendidikan Tahun 2025-2029

Penentuan Strategi dirumuskan berdasarkan hasil analisa gambaran pelayanan perangkat daerah. Perumusan strategi dalam Renstra Perangkat Daerah dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut.

1. Alternatif Strategi
2. Analisis SWOT

Adapun alternatif strategi yang ada dapat dilihat pada tabel 3.5 berikut ini.

| No. | Sasaran | Indikator | Strategi |
|---|---|---|---|
| 1. | Meningkatnya capaian SPM menuju SNP | Prosentase akumulasi capaian rata-rata SPM Dikdas | 1. Meningkatkan kualitas hasil akrediatasi PAUD dan SPM Dikdas.<br>2. Meningktkan prosentase lulusan Dikdas. |
| 2. | Meningktakan angka melek aksara | Prosentase melek aksara penduduk umur 15-56 tahun | Meningkatkan jumlah/prosentase warga melek aksara melalui pendidikan non formal |
| 3. | Meningkatnya cakupan anak putus sekolah terlayani pendidikan kesetaraan | Prosentase anak putus sekolah yang terlayani pendidikan kesetaraan | Menurunnya angka putus sekolah dengan memberikan pendidikan kesetaraan |

Sedangkan analisis SWOT dari penentuan alternatif pilihan tersebuat adalah sebagai berikut.

1. Kekuatan (Strength)
   a. Animo masyarakat/warga belajar terhadap pendidikan masih tinggi
   b. Komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan
   c. Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan yang memenuhi standar kompetensi semakin meningkat
   d. Lestarinya budaya dan kearifan lokal yang mendukung pendidikan karakter
   e. Kesadaran dan kemauan masyarakat terhadap pengembangan diri dalam meningkatan ketaqwaan dan kewirausahaan cukup tinggi
   f. Adanya regulasi sekolah harus memenuhi standar nasional pendidikan
   g. Program pendidikan muatan lokal berbasis budaya lokal banyak diminati warga masyarakat
   h. Dukungan pemerintah pusat terhadap penuntasan wajib belajar 9 tahun tinggi
   i. Komitmen satuan pendidikan, komite sekolah dan masyarakat dalam meningkatkan mutu pendidikan
   j. Dukungan Dunia Usaha / Dunia Industri dan Masyarakat terhadap pendidikan meningkat

2. Peluang (Weakness)
   a. Harapan lama sekolah penduduk masih rendah
   b. Masih adanya anak putus sekolah

c. Akses dan Kualitas layanan pendidikan belum optimal
d. Standar pelayanan minimal pendidikan belum terpenuhi
e. Capaian standar nasional pendidikan sebagai keberlanjutan dari standar pelayanan minimal belum merata dan optimal
f. Jumlah dan distribusi guru dan tenaga kependidikan belum merata
g. Pendidikan berbasis keunggulan dan kearifan lokal yang berwawasan global serta teknologi informasi belum dikembangkan dengan baik
h. Atmosfir yang kondusif dan infrastruktur pendidikan yang berkualitas belum tercipta bagi proses pendidikan, penelitian, pengembangan wawasan keilmuan
i. Pendidikan karakter yang mengintegrasikan nilai-nilai keagamaan dan landasan moralitas serta kepribadian mulia belum optimal untuk memberikan landasan pada keberlanjutan pendidikan dan berorientasi pembentukan karakter
j. Penuntasan wajib belajar 9 (sembilan) tahun belum berjalan sesuai harapan
k. Daya saing pendidikan masih perlu di tingkatkan

3. Peluang (Opportunity)
a. Kondisi sosial, politik, ekonomi dan keamanan yang kondusif
b. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
c. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
d. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
e. Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Standar Nasional Pendidikan
f. Berkembangnya sektor pariwisata yang prospektif terhadap pertumbuhan ekonomi
g. Terbukanya akses di wilayah selatan dengan dibangunnya jalur jalan lintas selatan (JJLS)
h. Ditetapkannya Kabupaten Gunungkidul sebagai kawasan Gunungsewu Global Geopark Network oleh UNESCO

4. Tantangan (Threat)
a. Era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang menuntut kualitas sumberdaya manusia yang kreatif dan kompetitif
b. Masih adanya budaya masyakarat yang belum sadar akan pentingnya pendidikan
c. Meningkatnya kasus pernikahan dini
d. Mobilitas penduduk yang relatif tinggi
e. Perkembangan Tehnologi Informasi dan komunikasi yang semakin pesat
f. Aksesibilitas penyelenggaraan pendidikan masih belum merata
g. Peningkatan kualifikasi akademik belum berkontribusi terhadap peningkatan kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan
h. Angka kemiskinan yang masih relatif tinggi
i. Rendahnya budaya baca masyarakat
j. Belum sinerginya sebagian kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah.

Untuk selanjutnya, hasil penentuan strategi yang dipilih dengan mempertimbangkan analisis SWOT, dapat dilihat pada table 3.6.

Tabel 3.6
Penentuan Alternatif Strategi
Pencapaian Indikator Sasaran Dinas Pendidikan

| FAKTOR EKSTERNAL / FAKTOR INTERNAL | Peluang : | Tantangan : |
|---|---|---|
| | 1 Kondisi sosial, politik, ekonomi dan keamanan yang kondusif | 1 Era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang menuntut kualitas sumberdaya manusia yang kreatif dan kompetitif |
| | 2 Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2 Masih adanya budaya masyakarat yang belum sadar akan pentingnya pendidikan |
| | 3 Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah | 3 Meningkatnya kasus pernikahan dini |
| | 4 Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta | 4 Mobilitas penduduk yang relatif tinggi |
| | 5 Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan | 5 Perkembangan Tehnologi Informasi dan komunikasi yang semakin pesat |
| | 6 Berkembangnya sektor pariwisata yang prospektif terhadap pertumbuhan ekonomi | 6 Aksesibilitas penyelenggaraan pendidikan masih belum merata |
| | 7 Terbukanya akses di wilayah selatan dengan dibangunnya jalur jalan lintas selatan (JJLS) | 7 Peningkatan kualifikasi akademik belum berkontribusi terhadap peningkatan kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan |
| | 8 Ditetapkannya Kabupaten Gunungkidul sebagai kawasan Gunungsewu Global Geopark Network oleh UNESCO | 8 Angka kemiskinan yang masih relatif tinggi |
| | | 9 Rendahnya budaya baca masyarakat |
| | | 10 Belum sinerginya kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah |
| Kekuatan : | Alternatif Strategi : | Alternatif Strategi : |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.2.2.6. Animo masyarakat/warga belajar terhadap pendidikan masih tinggi<br>2.2.2.7. Komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan<br>2.2.2.8. Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan yang memenuhi standar kompetensi semakin meningkat<br>2.2.2.9. Lestarinya budaya dan kearifan lokal yang mendukung pendidikan karakter<br>2.2.2.10. Kesadaran dan kemauan masyarakat terhadap pengembangan diri dalam meningkatan ketaqwaan dan kewirausahaan cukup tinggi<br>2.2.2.11. Adanya regulasi sekolah harus memenuhi standar nasional pendidikan<br>2.2.2.12. Program pendidikan muatan lokal berbasis budaya lokal banyak diminati warga masyarakat<br>2.2.2.13. Dukungan | 1. a.<br>b.<br>2. a.<br>b.<br>c.<br>3. a.<br>b.<br>4. a. | Kondisi sosial politik, ekonomi dan keamanan yang kondusif masih dapat memberikan motivasi pengelola pendidikan meningkatkan kinerja dalam upaya peningkatan mutu pendidikan<br>Iklim yang kondusif untuk mendukung kinerja dapat dijaga apabila pengambil kebijakan dapat memberikan pemahaman terhadap keterbatasan yang belum dapat menjalankan system *reward* dan *punishment*<br>Kualitas SDM Gunungkidul masih dapat ditingkatkan karena adanya motivasi warga belajar yang tinggi<br>Peningkatan kualitas dapat dilakukan melalui kerjasama stakeholders<br>Peningkatan kualitas SDM harus dibarengi dengan peningkatan fasilitas belajar yang memadai<br>Pengembangan dan mutu sekolah dapat ditingkatkan karena adanya persepsi yang sejajar tentang visi dan misi RPJMD<br>Pengembangan dan peningkatan mutu sekolah dilakukan dengan kerjasama instansi lain<br>Teknologi informasi dan komputer dapat dimanfaatkan untuk mendukung peningkatan satuan pendidikan yang | 1 a.<br>b.<br>2 a.<br>b.<br>c.<br>3 a.<br>b.<br>4 a. | Pencapaian kabupaten gunungkidul yang bermutu harus didukung oleh motivasi yang tinggi dari pengelola satuan pendidikan,<br>Iklim yang kondusif untuk mendukung kinerja dapat dijaga apabila pengambil kebijakan dapat memberikan pemahaman terhadap keterbatasan yang belum dapat menjalankan system *reward* dan *punishment*<br>Motivasi warga belajar yang tinggi akan meningkatkan kompetensi lulusan sekolah dan kesetaraan guna menciptakan lulusan yang kompetitif dalam memasuki dunia kerja dan menciptakan lapangan kerja secara mandiri<br>Peningkatan kualitas dapat dilakukan melalui kerjasama stakeholders<br>Peningkatan kualitas SDM harus dibarengi dengan peningkatan fasilitas belajar yang memadai<br>Pengembangan dan mutu sekolah harus disinergikan dengan Visi dan Misi RPJMD dan didukung oleh persepsi yang sejajar tentang visi dan misi RPJMD<br>Pengembangan dan peningkatan mutu sekolah dilakukan dengan kerjasama instansi lain<br>Teknologi informasi dan komputer dapat dimanfaatkan untuk mendukung peningkatan satuan pendidikan yang |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| pemerintah pusat terhadap penuntasan wajib belajar 9 tahun tinggi | | bermutu | | bermutu |
| | | b. Pengembangan TIK harus dilakukan sejalan dengan pengembangan SDM, sarana prasarana dan anggaran | | b. Pengembangan TIK harus dilakukan sejalan dengan pengembangan SDM, sarana prasarana dan anggaran |
| 2.2.2.14. Komitmen satuan pendidikan, komite sekolah dan masyarakat dalam meningkatkan mutu pendidikan | | c. Pemanfaatan TIK akan mendukung upaya pemerintah daerah yang efektif dan efisien karena mudah dan murah untuk diakses | | c. Pemanfaatan TIK akan mendukung upaya pemerintah daerah yang efektif dan efisien karena mudah dan murah untuk diakses |
| 2.2.2.15. Dukungan Dunia Usaha / Dunia Industri dan Masyarakat terhadap pendidikan meningkat | 5. a. | Hubungan yang optimal baik horizontal maupun vertikal di tingkat kabupaten mendukung kinerja satuan pendidikan dan Dinas Pendidikan. | 5 a. | Hubungan yang optimal baik horizontal maupun vertikal di tingkat kabupaten mendukung kinerja satuan pendidikan dan Dinas Pendidikan. |
| | b. | Hubungan yang optimal dapat dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dan komunikasi | b. | Hubungan yang optimal dapat dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dan komunikasi guna menangkal pengaruh negatif budaya dari luar |
| | 6. a. | Kebijakan pemerintah daerah meningkatkan anggaran dalam rangka menuju pendidikan dasar gratis yang bermutu | 6 a. | Kebijakan pemerintah daerah meningkatkan anggaran dalam rangka menuju pendidikan dasar gratis yang bermutu di seluruh kabupaten gunungkidul |
| | b. | Kebijakan pendidikan gratis dalam kerangka gratis operasional, siswa miskin dan investasi | b. | Kebijakan pendidikan gratis dalam kerangka gratis operasional, siswa miskin dan investasi secara merata untuk menghindarkan terjadinya urbanisasi |
| | c. | Pengembangan mutu dapat didukung dari dana block grant | c. | Pengembangan mutu dapat didukung dari dana block grant denganmengesampingkan kota dan pinggiran |
| | d. | Biaya personal merupakan tanggung jawab orangtua siswa dan masyarakat | d. | Biaya personal merupakan tanggung jawab orangtua siswa dan masyarakat |
| | 7. a. | .Penuntasan wajib belajar 9 tahun dapat dipercepat dengan adanya sekolah penyelenggara pendidikan inklusi di sekolah reguler | 7 a. | Penuntasan wajib belajar 9 tahun dapat dipercepat dengan adanya sekolah penyelenggara pendidikan inklusi di sekolah reguler |

| | | |
|---|---|---|
| | b. Penyelenggaraan pendidikan inklusi di sekolah reguler dapat dilakukan dengan melibatkan secara aktif dewan pendidikan dan komite sekolah | b. Penyelenggaraan pendidikan inklusi di sekolah reguler dapat dilakukan dengan melibatkan secara aktif dewan pendidikan dan komite sekolah |
| Kelemahan : | Alternatif Strategi : | Alternatif Strategi : |
| 1 Harapan lama sekolah penduduk masih rendah<br>2 Masih adanya anak putus sekolah<br>3 Akses dan Kualitas layanan pendidikan belum optimal<br>4 Standar pelayanan minimal pendidikan belum terpenuhi<br>5 Capaian standar nasional pendidikan sebagai keberlanjutan dari standar pelayanan minimal belum merata dan optimal<br>6 Jumlah dan distribusi guru dan tenaga kependidikan belum merata<br>7 Pendidikan berbasis keunggulan dan kearifan | 1. a. Kondisi sosial politik, ekonomi dan keamanan yang kondusif masih dapat memberikan motivasi pengelola pendidikan meningkatkan kinerja<br>b. Iklim yang kondusif untuk mendukung kinerja dapat dijaga apabila pengambil kebijakan dapat memberikan pemahaman terhadap aturan yang belum dapat menjalankan system *reward* dan *punishment*<br>2. a. Kualitas SDM Gunungkidul masih dapat ditingkatkan dengan adanya kerjasama antar stakeholders<br>b. Peningkatan kualitas dapat dilakukan dengan mengoptimalkan pemanfaatan TIK<br>c. Peningkatan kualitas SDM harus dibarengi dengan peningkatan fasilitas belajar terutama sarana dan prasarana yang memadai<br>3 a. Pengembangan dan mutu pendidikan, kepemudaan, dan keolahragaan dapat ditingkatkan dengan sinkronisasi program<br>b. Pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan, kepemudaan, dan keolahragaan dilakukan dengan kerjasama instansi lain | 1. a. Kondisi sosial politik, ekonomi dan keamanan yang kondusif masih dapat memberikan motivasi pengelola pendidikan meningkatkan kinerja<br>b. Iklim yang kondusif untuk mendukung kinerja dapat dijaga apabila pengambil kebijakan dapat memberikan pemahaman terhadap aturan yang belum dapat menjalankan system *reward* dan *punishment*<br>2 a. Kualitas SDM Gunungkidul masih dapat ditingkatkan dengan adanya kerjasama antar stakeholders<br>b. Peningkatan kualitas dapat dilakukan dengan mengoptimalkan pemanfaatan TIK<br>c. Peningkatan kualitas SDM harus dibarengi dengan peningkatan fasilitas belajar terutama sarana dan prasarana yang memadai<br>3 a. Pengembangan dan mutu sekolah dapat ditingkatkan karena adanyasinkronisasi program<br>b. Pengembangan dan peningkatan mutu sekolah dilakukan dengan kerjasama instansi lain |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | lokal yang berwawasan global serta teknologi informasi belum dikembangkan dengan baik | 4 | a. | Terobosan peningkatan mutu dan layanan pendidikan dapat didorong dengan memanfatkan teknologi informasi dan komputer | 4 | a. | Terobosan peningkatan mutu dan layanan pendidikan dapat didorong dengan memanfatkan teknologi informasi dan komputer |
| | | | b. | Pengembangan TIK harus dilakukan sejalan dengan pengembangan SDM, sarana prasarana dan anggaran | | b. | Pengembangan TIK harus dilakukan sejalan dengan pengembangan SDM, sarana prasarana dan anggaran |
| 8 | Atmosfir yang kondusif dan infrastruktur pendidikan yang berkualitas belum tercipta bagi proses pendidikan, penelitian, pengembangan wawasan keilmuan | | c. | Pemanfaatan TIK akanmendukung upaya pemerintah daerah yang efektif dan efisien karena mudah dan murah untuk diakses | | c. | Pemanfaatan TIK akanmendukung upaya pemerintah daerah yang efektif dan efisien karena mudah dan murah untuk diakses |
| | | 5 | a. | Hubungan yang optimal baik horizontal maupun vertikal di tingkat kabupaten mendukung kinerja satuan pendidikan dan Dinas Pendidikan. | 5 | a. | Hubungan yang optimal baik horizontal maupun vertikal di tingkat kabupaten mendukung kinerja satuan pendidikan dan Dinas Pendidikan |
| 9 | Pendidikan karakter yang mengintegrasikan nilai-nilai keagamaan dan landasan moralitas serta kepribadian mulia belum optimal untuk memberikan landasan pada keberlanjutan pendidikan dan berorientasi pembentukan karakter | | b. | Hubungan yang optimal dapat dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dan komunikasi guna pencermatan pemanfaatan anggaran yang mengikat | | b. | Hubungan yang optimal dapat dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dan komunikasi guna pencermatan pemanfaatan anggaran yang mengikat |
| | | 6 | a. | Kebijakan pemerintah daerah meningkatkan anggaran dalam rangka menuju pendidikan dasar gratis yang bermutu harus didasarkan pada regulasi | 6 | a. | Kebijakan pemerintah daerah meningkatkan anggaran dalam rangka menuju pendidikan dasar gratis yang bermutu harus didasarkan pada regulasi |
| 10 | Penuntasan wajib belajar 9 (sembilan) tahun belum berjalan sesuai harapan | | b. | Regulasi Penuntasan wajib belajar 9 tahun yang dipercepat dengan adanya sekolah penyelenggara pendidikan inklusi di sekolah reguler harus diterbitkan | | b. | Regulasi Penuntasan wajib belajar 9 tahun yang dipercepat dengan adanya sekolah penyelenggara pendidikan inklusi di sekolah reguler harus diterbitkan |
| 11 | Daya saing pendidikan masih perlu di tingkatkan | | c. | Pelibatan penyelenggaraan pendidikan inklusi di sekolah reguler dengan dewan pendidikan dan komite sekolah harus didasarkan pada aturan yang diberlakukan | | c. | Pengoptimalan penyelenggaraan pendidikan inklusi di sekolah reguler dengan dewan pendidikan dan komite sekolah harus didasarkan pada aturan yang diberlakukan |

| | | |
|---|---|---|
| | d. Pengelolaan SDA yang mengutamakan pemuda yang produktif sebagai prioritas guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat harus disiapkan dasar hukumnya | d. Pengelolaan SDA yang mengutamakan pemuda yang produktif sebagai prioritas guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat harus disiapkan dasar hukumnya |

Sedangkan Strategi Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul disajikan dalam tabel 3.7

Tabel 3.7
Penentuan Strategi

| No | Sasaran | Indikator Kinerja Sasaran | Strategi |
|---|---|---|---|
| 1 | Aksesibilitas dan kualitas pendidikan meningkat | Indeks SPM Bidang Pendidikan | Pemerataan pendidikan di seluruh wilayah, penguatan pendidikan budi pekerti, dan jaminan akses pendidikan untuk semua lapisan masyarakat tanpa diskriminasi |

**Tabel 3.8**
**Pentahapan Renstra Dinas Pendidikan**

| Tahap 1 | Tahap 2 | Tahap 3 | Tahap 4 | Tahap 5 |
|---|---|---|---|---|
| (2026) | (2027) | (2028) | (2029) | (2030) |
| Peningkatan akses pendidikan | Peningkatan Kualitas Tenaga Pendidik | Pendidikan Inklusif | Inovasi Pendidikan | Integrasi Tata kelola pendidikan berbasis teknologi |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Transformasi pendidikan Gunungkidul dengan fokus pada Revitalisasi infrastruktur dan aksesibilitas pendidikan. Renovasi gedung sekolah, pembangunan ruang KBM baru, perbaikan sanitasi dan fasilitas air bersih, penyediaan bus sekolah rute pedesaan, gunungkidul cerdas berupa beasiswa bagi siswa dari keluarga prasejahtera dan siswa prestasi, bantuan seragam dan perlengkapan sekolah serta perluasan jaringan internet akan menghubungkan institusi pendidikan di 18 korwil, mencakup puluhan sekolah menengah dan dasar di wilayah yang sebelumnya terisolasi secara digital. | Program pelatihan kompetensi pedagogik bagi guru dengan metode pembelajaran aktif, kreatif dan inovatif, workshop literasi digital dan integrasi teknologi dalam pembelajaran untuk guru, fasilitasi sertifikasi profesi bagi guru yang belum tersertifikasi akan diintensifkan untuk memastikan standar kompetensi yang seragam di seluruh kabupaten. Program pelatihan dirancang dengan pendekatan berbasis kebutuhan spesifik dan potensi lokal, didukung oleh implementasi metode pembelajaran digital untuk memperluas jangkauan dampak. | Penguatan pendidikan inklusif untuk memastikan bahwa setiap anak, termasuk anak dengan kebutuhan khusus, memperoleh hak pendidikan yang sama. Pendekatan holistik akan diterapkan, mulai dari Penerapan kebijakan zona bebas putus sekolah dengan sistem deteksi dini dan intervensi cepat. Melibatkan peran desa dalam memastikan tidak ada anak usia sekolah yang tidak mendapatkan layanan pendidikan dengan program Gerakan Berani Sekolah Gunungkidul (Geni Seko Gunung), Identifikasi komprehensif siswa berkebutuhan khusus di seluruh Gunungkidul melalui survei terstruktur dan pelibatan masyarakat, Pembangunan dan | Perbaikan implementasi kurikulum yang memadukan keunggulan global dengan kearifan lokal. Pengembangan potensi generasi muda dilakukan secara holistik, mencakup aspek akademik, keterampilan praktis, dan pengembangan karakter. | Modernisasi tata kelola pendidikan melalui integrasi teknologi. Program ini meliputi pengembangan basis data pendidikan terintegrasi yang menghubungkan seluruh sekolah dengan Dinas Pendidikan, Implementasi aplikasi manajemen sekolah berbasis cloud untuk administrasi, pembelajaran, dan komunikasi, Penerapan sistem analitik data untuk pemantauan capaian siswa, kinerja guru, dan efektivitas program dan Transformasi proses kerja administrasi pendidikan menjadi paperless dan berbasis teknologi. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | renovasi sekolah inklusif dengan aksesibilitas universal., enyediaan media pembelajaran adaptif, ruang sumber, dan peralatan pendukung bagi siswa dengan berbagai kebutuhan khusus, dan Pelatihan bagi guru pendamping khusus dan guru reguler tentang metode pembelajaran inklusif. Kolaborasi dengan perguruan tinggi dan lembaga spesialis untuk pengembangan program pendampingan berkelanjutan. | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pembangunan fasilitas pendidikan untuk mengurangi kesenjangan akses. Diversifikasi program beasiswa dirancang untuk menjangkau berbagai segmen masyarakat, dari siswa berprestasi dan atau siswa miskin hingga warga yang mengikuti pendidikan nonformal. Infrastruktur dan aksesibiltas pendidikan yang memadai akan menjadi fondasi bagi tahapan pembangunan berikutnya, memastikan keberlangsungan program pendidikan yang berkualitas dan merata sebagai upaya dalam peningkatan partisipasi pendidikan dasar dan menengah | Restrukturisasi kewenangan pengelolaan guru, khususnya pada penetapan formasi, rekrutmen, pengangkatan, penempatan, mobilitas, pembinaan karier professional, Pertukaran pengalaman antarsekolah dan antarwilayah menjadi strategi efektif untuk memperkaya perspektif dan metode pembelajaran. Dengan meningkatnya kualitas tenaga pengajar, diharapkan terjadi akselerasi dalam peningkatan kualitas lulusan. | Program pendidikan inklusif dikembangkan untuk memastikan setiap anak, termasuk yang berkebutuhan khusus, mendapatkan pelayanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhannya yang mendukung Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah), serta efektivitas pemanfaatan anggaran wajib pendidikan (20% APBN). | Implementasi kurikulum berbasis kearifan lokal akan memperkuat identitas kultural sekaligus mempersiapkan siswa menghadapi tantangan global. Pembentukan pusat inovasi pendidikan akan menjadi katalisator bagi terciptanya ekosistem pembelajaran yang dinamis dan responsif terhadap perubahan zaman. | Digitalisasi administrasi sekolah akan meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan pendidikan, serta memudahkan evaluasi capaian program secara komprehensif. |

### 3.3. Arah Kebijakan Dinas Pendidikan dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pendidikan Tahun 2025-2029

Perumusan Kebijakan yang akan diambil oleh Dinas Pendidikan dalam rangka mewujudkan tujuannya adalah sesuai tabel berikut.

Tabel 3.9
**Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Dinas Pendidikan**

| NO | OPERASIONAL NSPK | ARAH KEBIJAKAN RPJMD | ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD | KET. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Meningkatkan akses dan layanan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau | Meningkatkan keterjangkauan pendidikan bagi peserta didik | Percepatan Wajib Belajar 13 Tahun (1 Tahun Pendidikan Prasekolah dan 12 Tahun Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah) | |
| | | Meningkatkan pembelajaran berbasis muatan lokal untuk membentuk karakter yang berakar pada nilai budaya | Peningkatan Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran | |
| | | Meningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan | Penguatan Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berkualitas | |
| | | Meningkatkan Tata Kelola dan Akuntabilitas | Penguatan Sistem Tata Kelola Pendidikan | |

Selanjutnya strategi dan arah kebijakan disajikan dalam tabel 3.10

Tabel 3.10
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Visi** | **Membangun Masyarakat Adil Makmur, Lestari dan Berkeadaban** | | |
| **Misi I** | **Meningkatkan pembangunan manusia yang produktif, berkualitas dan berkepribadian untuk siap kerja dan siap merintis usaha sendiri serta perluasan akses kesehatan untuk rakyat.** | | |
| **Tujuan** | **Sasaran** | **Strategi** | **Arah Kebijakan** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Meningkatnya Derajad Pendidikan Penduduk | Aksesibilitas dan kualitas pendidikan meningkat | Pemerataan pendidikan di seluruh wilayah, penguatan pendidikan budi pekerti, dan jaminan akses pendidikan untuk semua lapisan masyarakat tanpa diskriminasi | Percepatan Wajib Belajar 13 Tahun (1 Tahun Pendidikan Prasekolah dan 12 Tahun Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah) |
| | | | Peningkatan Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran |
| | | | Penguatan Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berkualitas |
| | | | Penguatan Sistem Tata Kelola Pendidikan |

# BAB IV
# PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG PENDIDIKAN

## 4.1. Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Rencana Program Kependidikan

1. Perluasan dan Penguatan kualitas layanan PAUD 1 tahun pendidikan prasekolah;
2. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas;
3. Penyaluran bantuan pendidikan yang tepat sasaran;
4. Pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah;
5. Revitalisasi pendidikan nonformal;
6. Akselerasi penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan berkualitas dalam perencanaan pelaksanaan wajib belajar 13 tahun;
7. Pengembangan inovasi pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi digital dan penerapan pedagogi modern;
8. Pemantapan sistem asesmen komprehensif;
9. Penciptaan ekosistem lingkungan belajar yang mendukung penguatan karakter dan *well being* peserta didik dan pendidik;
10. Penerapan kurikulum yang berfokus pada kompetensi fondasi kontekstual dan berpusat pada kebutuhan peserta didik;
11. Pengembangan anak usia dini holistik-integratif (PAUD-HI);
12. Peningkatan kualitas pendidikan agama dan pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa;
13. Restrukturisasi pengelolaan guru untuk memastikan kemudahan mobilitas guru antar wilayah untuk memenuhi kebutuhan guru dan penggantian guru pensiun;
14. Revitalisasi Pendidikan Profesi Guru (PPG);
15. Penguatan ekosistem pendampingan bagi pengembangan profesional berkelanjutan;
16. Penguatan manajemen kepemimpinan lembaga pendidikan;
17. Penguatan kapasitas sekolah untuk meningkatkan kualitas pendidikan;
18. Penyediaan sistem informasi data pendidikan;
19. Penguatan kualitas dan efisiensi pembiayaan pendidikan.

Berikut ini disampaikan teknik merumuskan Program, Kegiatan, Subkegiatan Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029 dalam tabel 4.1. dan Program Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029 dalam tabel 4.2 serta Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029 dalam tabel 4.3.

**TABEL 4.1**

**TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN**

**RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD**

**PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* |
| **1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan** | | | | | | | |
| - Terwujudnya Derajat Taraf Pendidikan Masyarakat Secara Inklusif dan Merata Meningkat | Meningkatnya Derajad Pendidikan Penduduk | | | | Rata-Rata Lama Sekolah | | |
| | | | | | Harapan Lama Sekolah | | |
| | | Aksesibilitas dan kualitas pendidikan meningkat | | | Indeks SPM Bidang Pendidikan | | |
| | | | Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah | | Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah | 1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 1.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan | 1.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah | 1.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 1.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 1.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | |
| | | | | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | |
| | | | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | |
| | | | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah | 1.01.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah | |
| | | | | | Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 1.01.01.2.01.0010 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan | 1.01.01.2.01.0013 - Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan | |
| | | | | Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | 1.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 1.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | 1.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 1.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | |

| | | |
|---|---|---|
| Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 1.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | |
| Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 1.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | |
| Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 1.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | |
| Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 1.01.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | |
| Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 1.01.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan<br><br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | |
| Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | 1.01.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | |
| Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | |
| Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | 1.01.01.2.02.0006 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 1.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | |
| | | | | Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | 1.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | 1.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 1.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 1.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | 1.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | 1.01.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | |
| | | | | | Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | 1.01.01.2.03.0003 - Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | |
| | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | 1.01.01.2.03.0004 - Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Daerah pada SKPD | |
| | | | | | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 1.01.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | |
| | | | | | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 1.01.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | |
| | | | | Dokumen Administrasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | 1.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 1.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 1.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 1.01.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | 1.01.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 1.01.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | |
| | | | | Dokumen Administrasi Umum | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 1.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan | 1.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | |

| | | |
|---|---|---|
| Berbasis Elektronik pada SKPD | | |
| Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 1.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | |
| Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | |
| Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | |
| Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | |
| Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | |
| Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 1.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | |
| Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi<br><br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | |
| Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | |
| Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 1.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | |
| Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 1.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | |
| | | | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 1.01.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu | |
| | | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 1.01.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | |
| | | | | Dokumen Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 1.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |
| | | | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 1.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |
| | | | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 1.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |
| | | | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 1.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel | |
| | | | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 1.01.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 1.01.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | |
| | | | | Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 1.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
| | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 1.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
| | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
| | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 1.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | |
| | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1.01.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | |
| | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 1.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | |
| | | | | Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
| | | | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 1.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |

| | | |
|---|---|---|
| Jumlah Mebel yang Dipelihara | 1.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
| Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 1.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
| Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
| Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 1.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | |
| Jumlah Mebel yang Dipelihara | 1.01.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel | |
| Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 1.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | |
| Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | |
| Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah jenjang SMP | | Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13 - 15 SMP | 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | |
| | | | Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah jenjang PAUD | | Angka Partisipasi Sekolah (APS) 5 - 6 PAUD | 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | |
| | | | Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah jenjang Kesetaraan | | Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 18 Kesetaraan | 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | |
| | | | Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah jenjang SD | | Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 12 SD | 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | |
| | | | Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah jenjang PAUD | | Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B | 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | |
| | | | Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah jenjang SMP | | Skor Kemampuan Literasi SMP | 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | |
| | | | Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah jenjang PAUD | | Proporsi Guru PAUD Formal dengan Kualifikasi S1/D IV | 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | |
| | | | Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah jenjang SMP | | Skor Kemampuan Numerasi SMP | 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Iklim Keamanan SMP | 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | |
| | | | | | Iklim Kebinekaan SMP | 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | |
| | | | | | Iklim Inklusivitas SMP | 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | |
| | | | | Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah jenjang SD | Skor Kemampuan Literasi SD | 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | |
| | | | | | Skor Kemampuan Numerasi SD | 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | |
| | | | | | Iklim Keamanan SD | 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | |
| | | | | | Iklim Kebinekaan SD | 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | |
| | | | | | Iklim Inklusivitas SD | 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | |
| | | | | Terpenuhinya kebutuhan pendidikan penduduk usia Sekolah Dasar | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia | 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | |
| | | | | | Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik | 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | |
| | | | | | Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | |
| | | | | | Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang | 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | |

| | | |
|---|---|---|
| Pendidikan yang dilaksanakan | | |
| Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi | 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | |
| Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan | 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | |
| Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | |
| Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia | 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | |
| Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan | 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | |
| Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia | 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | |
| Jumlah Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi | 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | |
| Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | |
| Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar | 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | |
| Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia | 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | |
| Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia | 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | |
| Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun | 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | |

| | | |
|---|---|---|
| Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | |
| Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan | 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | |
| Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik | 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | |
| Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan | 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | |
| Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun | 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | |
| Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | |
| Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah | 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | |
| Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | |
| Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun | 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | |
| Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Dibangun | 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | |
| Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | |
| Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun | 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | |
| Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas | 1.01.02.2.01 - Pengelolaan | |

| | | |
|---|---|---|
| Sekolah yang Telah Dibangun | Pendidikan Sekolah Dasar | |
| Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | |
| Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar | 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | |
| Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun | 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | |
| Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah | 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | |
| Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS | 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | |
| Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | |
| Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | |
| Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun | 1.01.02.2.01.0001 - Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) | |
| Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun | 1.01.02.2.01.0003 - Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | |
| Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun | 1.01.02.2.01.0005 - Pembangunan Perpustakaan Sekolah | |
| Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun | 1.01.02.2.01.0006 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | |

| | | |
|---|---|---|
| Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun | 1.01.02.2.01.0007 - Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah | |
| Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 1.01.02.2.01.0009 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | |
| Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 1.01.02.2.01.0010 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah | |
| Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 1.01.02.2.01.0011 - Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah | |
| Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia | 1.01.02.2.01.0014 - Pengadaan Mebel Sekolah | |
| Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia | 1.01.02.2.01.0016 - Pengadaan Perlengkapan Sekolah | |
| Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | 1.01.02.2.01.0025 - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | |
| Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar | 1.01.02.2.01.0026 - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar | |
| Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | 1.01.02.2.01.0027 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar | |

| | | |
|---|---|---|
| Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah | 1.01.02.2.01.0028 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | |
| Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS | 1.01.02.2.01.0029 - Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | |
| Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | 1.01.02.2.01.0030 - Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | |
| Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun | 1.01.02.2.01.0031 - Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar | |
| Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 1.01.02.2.01.0032 - Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar | |
| Jumlah Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi | 1.01.02.2.01.0034 - Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Dasar | |
| Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan | 1.01.02.2.01.0035 - Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan | |
| Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan | 1.01.02.2.01.0036 - Pengembangan konten digital untuk pendidikan | |
| Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan | 1.01.02.2.01.0037 - Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan | |

| | | |
|---|---|---|
| Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | 1.01.02.2.01.0038 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | |
| Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan | 1.01.02.2.01.0039 - Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan | |
| Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi | 1.01.02.2.01.0041 - Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | |
| Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia | 1.01.02.2.01.0042 - Penyediaan infrastruktur TIK | |
| Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | 1.01.02.2.01.0043 - Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | |
| Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik | 1.01.02.2.01.0045 - Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik | |
| Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia | 1.01.02.2.01.0046 - Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik | |
| Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah | 1.01.02.2.01.0047 - Pembangunan Ruang Kelas Baru | |
| Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 1.01.02.2.01.0048 - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan | 1.01.02.2.01.0049 - Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan | |
| | | | | | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar | 1.01.02.2.01.0050 - Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik | |
| | | | | | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 1.01.02.2.01.0051 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | |
| | | | | | Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Dibangun | 1.01.02.2.01.0053 - Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus | |
| | | | | | Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik | 1.01.02.2.01.0054 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar | |
| | | | | | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia | 1.01.02.2.01.0055 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik | |
| | | | Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah jenjang SMP | Terpenuhinya kebutuhan pendidikan penduduk usia sekolah menengah pertama | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia | 1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | |
| | | | | | Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik | 1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | 1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | |

| | | |
|---|---|---|
| Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | 1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | |
| Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan | 1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | |
| Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi | 1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | |
| Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan | 1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | |
| Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | |
| Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia | 1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | |
| Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan | 1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | |
| Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia | 1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | |
| Jumlah Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi | 1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | |

| | | |
|---|---|---|
| Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | 1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | |
| Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | 1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | |
| Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia | 1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | |
| Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun | 1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | |
| Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | |
| Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan | 1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | |
| Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik | 1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | |
| Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar | 1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | |
| Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan | 1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | |
| Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun | 1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah | |

| | | |
|---|---|---|
| | Pertama | |
| Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | |
| Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah | 1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | |
| Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | |
| Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun | 1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | |
| Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Dibangun | 1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | |
| Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat | 1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | |
| Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun | 1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | |
| Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | |
| Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun | 1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | |
| Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | |

| | | |
|---|---|---|
| Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun | 1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | |
| Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan | 1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | |
| Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS | 1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | |
| Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | 1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | |
| Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama | 1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | |
| Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun | 1.01.02.2.02.0001 - Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) | |
| Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun | 1.01.02.2.02.0003 - Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | |
| Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun | 1.01.02.2.02.0004 - Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah | |
| Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun | 1.01.02.2.02.0005 - Pembangunan Perpustakaan Sekolah | |
| Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun | 1.01.02.2.02.0006 - Pembangunan Laboratorium | |
| Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun | 1.01.02.2.02.0012 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | |

| | | |
|---|---|---|
| Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 1.01.02.2.02.0014 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | |
| Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 1.01.02.2.02.0016 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah | |
| Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 1.01.02.2.02.0017 - Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah | |
| Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 1.01.02.2.02.0018 - Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium | |
| Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat | 1.01.02.2.02.0019 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula | |
| Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 1.01.02.2.02.0024 - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | |
| Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia | 1.01.02.2.02.0025 - Pengadaan Mebel Sekolah | |
| Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik | 1.01.02.2.02.0032 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama | |
| Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | 1.01.02.2.02.0038 - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | |
| Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | 1.01.02.2.02.0039 - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah | |

| | | |
|---|---|---|
| | Menengah Pertama | |
| Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | 1.01.02.2.02.0040 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | |
| Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan | 1.01.02.2.02.0041 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | |
| Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS | 1.01.02.2.02.0042 - Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama | |
| Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama | 1.01.02.2.02.0043 - Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama | |
| Jumlah Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi | 1.01.02.2.02.0047 - Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Menengah Pertama | |
| Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan | 1.01.02.2.02.0048 - Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan | |
| Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan | 1.01.02.2.02.0049 - Pengembangan konten digital untuk pendidikan | |
| Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang | 1.01.02.2.02.0050 - Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang | |

| | | |
|---|---|---|
| dilaksanakan | Pendidikan | |
| Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | 1.01.02.2.02.0051 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | |
| Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan | 1.01.02.2.02.0052 - Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan | |
| Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi | 1.01.02.2.02.0054 - Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | |
| Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | 1.01.02.2.02.0055 - Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | |
| Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar | 1.01.02.2.02.0058 - Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik | |
| Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah | 1.01.02.2.02.0059 - Pembangunan Ruang Kelas Baru | |
| Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan | 1.01.02.2.02.0060 - Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan | |
| Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik | 1.01.02.2.02.0061 - Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia | 1.01.02.2.02.0062 - Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik | |
| | | | | | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 1.01.02.2.02.0064 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | |
| | | | | | Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Dibangun | 1.01.02.2.02.0065 - Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus | |
| | | | | | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia | 1.01.02.2.02.0067 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik | |
| | | | | | Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia | 1.01.02.2.02.0068 - Penyediaan infrastruktur TIK | |
| | | | Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah jenjang PAUD | Terpenuhinya kebutuhan pendidikan penduduk usia Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia | 1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | |
| | | | | | Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik | 1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | 1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | |
| | | | | | Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | 1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | |
| | | | | | Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan | 1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | |

| | | |
|---|---|---|
| Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi | 1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | |
| Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan | 1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | |
| Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia | 1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | |
| Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan | 1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | |
| Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia | 1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | |
| Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen | 1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | |
| Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP | 1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | |
| Jumlah Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi | 1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | |
| Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | 1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | |
| Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD | 1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | |

| | | |
|---|---|---|
| Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia | 1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | |
| Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun | 1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | |
| Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | |
| Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan | 1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | |
| Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik | 1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | |
| Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar | 1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | |
| Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | 1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | |
| Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan | 1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | |
| Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun | 1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | |
| Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat | 1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | |
| Jumlah Ruang Kelas Baru yang | 1.01.02.2.03 - Pengelolaan | |

| | | |
|---|---|---|
| Bertambah | Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | |
| Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | |
| Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun | 1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | |
| Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | |
| Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun | 1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | |
| Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD | 1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | |
| Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun | 1.01.02.2.03.0002 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD | |
| Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia | 1.01.02.2.03.0007 - Pengadaan Mebel PAUD | |
| Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik | 1.01.02.2.03.0011 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD | |
| Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD | 1.01.02.2.03.0015 - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD | |

| | | |
|---|---|---|
| Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | 1.01.02.2.03.0016 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD | |
| Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen | 1.01.02.2.03.0017 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD | |
| Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP | 1.01.02.2.03.0018 - Pengelolaan Dana BOP PAUD | |
| Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD | 1.01.02.2.03.0019 - Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD | |
| Jumlah Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi | 1.01.02.2.03.0021 - Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | |
| Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan | 1.01.02.2.03.0022 - Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan | |
| Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan | 1.01.02.2.03.0023 - Pengembangan konten digital untuk pendidikan | |
| Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan | 1.01.02.2.03.0024 - Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan | |
| Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | 1.01.02.2.03.0025 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | |

| | | |
|---|---|---|
| Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan | 1.01.02.2.03.0026 - Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan | |
| Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun | 1.01.02.2.03.0028 - Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | |
| Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi | 1.01.02.2.03.0029 - Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | |
| Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah | 1.01.02.2.03.0030 - Pembangunan Ruang Kelas Baru | |
| Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia | 1.01.02.2.03.0031 - Penyediaan infrastruktur TIK | |
| Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun | 1.01.02.2.03.0033 - Pembangunan Perpustakaan Sekolah | |
| Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | 1.01.02.2.03.0034 - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik | |
| Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik | 1.01.02.2.03.0035 - Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik | |
| Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 1.01.02.2.03.0036 - Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah | |
| Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | 1.01.02.2.03.0037 - Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan | 1.01.02.2.03.0039 - Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan | |
| | | | | | Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun | 1.01.02.2.03.0040 - Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) | |
| | | | | | Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia | 1.01.02.2.03.0041 - Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik | |
| | | | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 1.01.02.2.03.0045 - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD | |
| | | | | | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia | 1.01.02.2.03.0046 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD | |
| | | | | | Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar | 1.01.02.2.03.0047 - Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD | |
| | | | | | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat | 1.01.02.2.03.0049 - Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | |
| | | | | | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 1.01.02.2.03.0051 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | |
| | | | Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah jenjang Kesetaraan | Terpenuhinya kebutuhan pendidikan penduduk usia Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia | 1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | |

| | | |
|---|---|---|
| Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik | 1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | |
| Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | 1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | |
| Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | 1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | |
| Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan | 1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | |
| Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi | 1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | |
| Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan | 1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | |
| Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan | 1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | |
| Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia | 1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | |
| Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | 1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | |

| | | |
|---|---|---|
| Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | 1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | |
| Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia | 1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | |
| Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan | 1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | |
| Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik | 1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | |
| Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | 1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | |
| Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan | 1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | |
| Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun | 1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | |
| Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah | 1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | |
| Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | |
| Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | |

| | | |
|---|---|---|
| Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal yang Telah Dibangun | 1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | |
| Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | |
| Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar | 1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | |
| Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun | 1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | |
| Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen | 1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | |
| Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP | 1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | |
| Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan | 1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | |
| Pendidik Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang mendapat sertifikat kompetensi | 1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | |
| Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik | 1.01.02.2.04.0010 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan | |
| Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | 1.01.02.2.04.0014 - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | 1.01.02.2.04.0015 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | |
| | | | | | Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen | 1.01.02.2.04.0016 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan | |
| | | | | | Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP | 1.01.02.2.04.0017 - Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan | |
| | | | | | Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan | 1.01.02.2.04.0018 - Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan | 1.01.02.2.04.0024 - Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan | |
| | | | | | Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan | 1.01.02.2.04.0025 - Pengembangan konten digital untuk pendidikan | |
| | | | | | Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan | 1.01.02.2.04.0026 - Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | 1.01.02.2.04.0027 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | |

| | | |
|---|---|---|
| Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan | 1.01.02.2.04.0028 - Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan | |
| Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi | 1.01.02.2.04.0030 - Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | |
| Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | 1.01.02.2.04.0031 - Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | |
| Pendidik Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang mendapat sertifikat kompetensi | 1.01.02.2.04.0032 - Fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi pendidik Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | |
| Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia | 1.01.02.2.04.0033 - Penyediaan infrastruktur TIK | |
| Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | 1.01.02.2.04.0035 - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik | |
| Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia | 1.01.02.2.04.0036 - Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik | |
| Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik | 1.01.02.2.04.0037 - Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik | |
| Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun | 1.01.02.2.04.0038 - Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | |
| Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah | 1.01.02.2.04.0039 - Pembangunan Ruang Kelas Baru | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 1.01.02.2.04.0041 - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | |
| | | | | | Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan | 1.01.02.2.04.0042 - Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan | |
| | | | | | Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 1.01.02.2.04.0043 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium | |
| | | | | | Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun | 1.01.02.2.04.0044 - Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) | |
| | | | | | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar | 1.01.02.2.04.0046 - Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik | |
| | | | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal yang Telah Dibangun | 1.01.02.2.04.0052 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal | |
| | | | | | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia | 1.01.02.2.04.0055 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan | |
| | | | | | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 1.01.02.2.04.0061 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | |
| | | | Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan | | Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal | 1.01.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Kualitas kurikulum muatan lokal Pendidikan Dasar meningkat | Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia | 1.01.03.2.01 - Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar | |
| | | | | | Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun | 1.01.03.2.01 - Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar | |
| | | | | | Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar yang tersusun | 1.01.03.2.01 - Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar | |
| | | | | | Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya | 1.01.03.2.01 - Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar | |
| | | | | | Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun | 1.01.03.2.01 - Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar | |
| | | | | | Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun | 1.01.03.2.01.0002 - Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar | |
| | | | | | Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia | 1.01.03.2.01.0003 - Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar | |
| | | | | | Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya | 1.01.03.2.01.0004 - Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar | |
| | | | | | Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar yang tersusun | 1.01.03.2.01.0006 - Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun | 1.01.03.2.01.0007 - Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar | |
| | | | | Kualitas kurikulum muatan lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal meningkat | Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersedia | 1.01.03.2.02 - Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal | |
| | | | | | Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang tersusun | 1.01.03.2.02 - Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal | |
| | | | | | Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun | 1.01.03.2.02 - Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal | |
| | | | | | Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun | 1.01.03.2.02.0002 - Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal | |
| | | | | | Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersedia | 1.01.03.2.02.0003 - Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal | |
| | | | | | Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang tersusun | 1.01.03.2.02.0005 - Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan | | Indeks Pemerataan Guru | 1.01.04 - PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | |
| | | | | Mutu dan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan merata | Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | 1.01.04.2.01 - Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | |
| | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | 1.01.04.2.01 - Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | 1.01.04.2.01.0001 - Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | |
| | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | 1.01.04.2.01.0002 - Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Meningkatnya kualitas dan distribusi institusi pendidikan | | Persentase usulan izin satuan pendidikan yang diterbitkan/diperbaharui | 1.01.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN | |
| | | | | Kualitas dan distribusi institusi Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh Masyarakat meningkat | Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | 1.01.05.2.01 - Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | 1.01.05.2.01.0002 - Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | |
| | | | | Kualitas dan distribusi institusi PAUD dan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan oleh Masyarakat meningkat | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | 1.01.05.2.02 - Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | 1.01.05.2.02.0002 - Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | |
| | | | Terlestarikannya bahasa dan sastra daerah | | Persentase pengembangan Bahasa dan Sastra Daerah | 1.01.06 - PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA | |
| | | | | Bahasa dan Sastra yang penuturannya dalam Daerah Kabupaten Gunungkidul terlestarikan | Jumlah buku berbahasa daerah yang disusun, diterbitkan, dan didistribusikan | 1.01.06.2.01 - Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Jumlah buku berbahasa daerah yang disusun, diterbitkan, dan didistribusikan | 1.01.06.2.01.0008 - Penyusunan, Penerbitan, dan Pendistribusian buku-buku berbahasa daerah | |
| | | | Meningkatnya pendidikan muatan lokal | | Persentase Implementasi Pendidikan Berbasis Budaya dengan Kategori Mandiri Budaya | 2.22.08 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN | |
| | | | | | Persentase implementasi pendidikan berbasis budaya dengan kategori sangat baik | 2.22.08 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN | |
| | | | | Terciptanya peserta didik dengan sikap santun, peduli lingkungan, dan mampu hidup harmonis di tengah keberagaman budaya | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Muatan Lokal | 2.22.08.5.08 - Pendidikan Berbasis Budaya | |
| | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Muatan Lokal | 2.22.08.5.08.0001 - Pembinaan Muatan Lokal | |
| | | | Peningkatan kualitas layanan publik | | Persentase Capaian Implementasi Inovasi Layanan Publik | 4.01.04 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN | |
| | | | | Inovasi Layanan Publik (Pengembangan Budaya Kerja SIGAP (Senyum, Informatif, Gesit, Akuntabel, Profesional) | Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota | 4.01.04.5.02 - Peningkatan Budaya Pemerintahan | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota | 4.01.04.5.02.0001 - Implementasi Budaya Pemerintahan<br><br>Kabupaten/Kota | |
| **1.01.2.19.0.00.01.0001 - Sanggar Kegiatan Belajar** | | | | | | | |
| - Terwujudnya Derajat Taraf Pendidikan Masyarakat Secara Inklusif dan Merata Meningkat | Meningkatnya Derajad Pendidikan Penduduk | Aksesibilitas dan kualitas pendidikan meningkat | Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pendidikan nonformal | | Kepuasan peserta terhadap layanan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) | 1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | |
| | | | | Dokumen Administrasi Umum | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 1.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 1.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 1.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi<br><br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | |
| | | | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | |
| | | | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 1.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | |
| | | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 1.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | |
| | | | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 1.01.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu | |
| | | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | |
| | | | | Dokumen Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 1.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |
| | | | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 1.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 1.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |
| | | | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 1.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel | |
| | | | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 1.01.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | |
| | | | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 1.01.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | |
| | | | | Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 1.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
| | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 1.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | |
| | | | | Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
| | | | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 1.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
| | | | | | Jumlah Mebel yang Dipelihara | 1.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 1.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
| | | | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
| | | | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 1.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | |
| | | | | | Jumlah Mebel yang Dipelihara | 1.01.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel | |
| | | | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 1.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | |
| | | | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | |
| | | | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | |
| | | | Peningkatan penguasaan keterampilan vokasional | | Perkembangan Soft Skill | 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Persentase Ketercapaian Kompetensi | 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | |
| | | | | Terpenuhinya kebutuhan pendidikan penduduk usia Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar | 1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | |
| | | | | | Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar | 1.01.02.2.03.0047 - Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD | |
| | | | | Terpenuhinya kebutuhan pendidikan penduduk usia Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar | 1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | |
| | | | | | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar | 1.01.02.2.04.0046 - Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

# TABEL 4.2
# PROGRAM PERANGKAT DAERAH
# PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | | | | | 700.885.162.746,00 | | 729.691.542.800,00 | | 737.821.810.200,00 | | 758.883.409.800,00 | | 762.072.437.300,00 | |
| 1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | 580.222.709.296,00 | | 582.259.490.000,00 | | 582.009.390.000,00 | | 581.590.100.000,00 | | 582.617.490.000,00 | |
| Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah | Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah (Nilai) | 83.51 | 84.01 | 84.51 | 579.934.845.796,00 | 85.00 | 581.978.990.000,00 | 85.50 | 581.734.890.000,00 | 86.00 | 581.315.600.000,00 | 86.50 | 582.341.990.000,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan |
| Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pendidikan nonformal | Kepuasan peserta terhadap layanan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) (Indeks) | 83.51 | 84.01 | 84.51 | 287.863.500,00 | 85.00 | 280.500.000,00 | 85.50 | 274.500.000,00 | 86.00 | 274.500.000,00 | 86.50 | 275.500.000,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan |
| 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | | | | | 116.324.464.550,00 | | 139.910.431.900,00 | | 149.651.167.900,00 | | 170.522.057.500,00 | | 172.831.695.000,00 | |
| Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah jenjang Kesetaraan | Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 18 Kesetaraan (%) | 26.25 | 27.05 | 27.85 | 6.882.384.000,00 | 28.65 | 7.045.100.000,00 | 29.45 | 7.616.690.000,00 | 30.25 | 9.663.250.000,00 | 31.05 | 8.446.180.000,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan |
| Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah jenjang PAUD | Angka Partisipasi Sekolah (APS) 5 - 6 PAUD (%) | 89.98 | 91.52 | 93.06 | 23.217.634.600,00 | 94.60 | 24.210.926.000,00 | 96.14 | 22.435.491.000,00 | 97.68 | 27.772.701.000,00 | 100 | 31.342.371.000,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan |
| | Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B (%) | 88.13 | 89.31 | 93.32 | | 98.66 | | 100 | | 100 | | 100 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan |
| | Proporsi Guru PAUD Formal dengan Kualifikasi S1/D IV (%) | 93.76 | 95.71 | 96.21 | | 96.71 | | 97.21 | | 97.71 | | 98.21 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan |
| Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah jenjang SD | Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 12 SD (%) | 94.84 | 95.34 | 96.09 | 50.117.972.800,00 | 97.34 | 64.537.694.000,00 | 98.84 | 63.148.860.000,00 | 100 | 71.382.031.000,00 | 100 | 70.485.312.000,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | Pendidikan |
| | Skor Kemampuan Literasi SD (Nilai) | 66.82 | 69.32 | 71.82 | | 74.32 | | 76.82 | | 79.32 | | 81.82 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan |
| | Skor Kemampuan Numerasi SD (Nilai) | 55.71 | 58.61 | 61.51 | | 64.41 | | 67.31 | | 70.21 | | 73.11 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan |
| | Iklim Keamanan SD (Nilai) | 76.64 | 77.54 | 78.44 | | 79.34 | | 80.24 | | 81.14 | | 82.04 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan |
| | Iklim Kebinekaan SD (Nilai) | 74.26 | 75.26 | 76.26 | | 77.26 | | 78.26 | | 79.26 | | 80.26 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan |
| | Iklim Inklusivitas SD (Nilai) | 58.44 | 60.94 | 63.44 | | 65.94 | | 68.44 | | 70.94 | | 73.44 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan |
| Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah jenjang SMP | Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13 - 15 SMP (%) | 99.14 | 99.29 | 99.54 | 35.840.372.650,00 | 100 | 43.820.480.000,00 | 100 | 56.141.469.000,00 | 100 | 61.378.771.000,00 | 100 | 62.231.007.000,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan |
| | Skor Kemampuan Literasi SMP (Nilai) | 79.48 | 80.58 | 81.68 | | 82.78 | | 83.88 | | 84.98 | | 86.08 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan |
| | Skor Kemampuan Numerasi SMP (Nilai) | 67.91 | 69.41 | 70.91 | | 72.41 | | 73.91 | | 75.41 | | 76.91 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan |
| | Iklim Keamanan SMP (Nilai) | 72.65 | 74.15 | 75.65 | | 77.15 | | 78.65 | | 80.15 | | 81.65 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan |
| | Iklim Kebinekaan SMP (Nilai) | 72.30 | 73.30 | 74.30 | | 75.30 | | 76.30 | | 77.30 | | 78.30 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan |
| | Iklim Inklusivitas SMP (Nilai) | 58.56 | 60.96 | 63.36 | | 65.76 | | 68.16 | | 70.56 | | 72.96 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan |
| Peningkatan penguasaan keterampilan vokasional | Perkembangan Soft Skill (%) | 80.00 | 83.00 | 86.31 | 266.100.500,00 | 89.31 | 296.231.900,00 | 93.32 | 308.657.900,00 | 98.66 | 325.304.500,00 | 100 | 326.825.000,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Persentase Ketercapaian Kompetensi (%) | 90.89 | 92.43 | 93.97 | | 95.51 | | 97.05 | | 98.59 | | 100 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan |
| 1.01.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM | | | | | 65.065.000,00 | | 919.393.500,00 | | 919.393.500,00 | | 1.559.393.500,00 | | 919.393.500,00 | |
| Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan | Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal (Persentase) | 100 | 100 | 100 | 65.065.000,00 | 100 | 919.393.500,00 | 100 | 919.393.500,00 | 100 | 1.559.393.500,00 | 100 | 919.393.500,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan |
| 1.01.04 - PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | | | | | 4.269.591.400,00 | | 6.342.227.400,00 | | 4.981.858.800,00 | | 4.651.858.800,00 | | 5.443.858.800,00 | |
| Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan | Indeks Pemerataan Guru (Indeks) | 26.90 | 27.35 | 27.80 | 4.269.591.400,00 | 28.22 | 6.342.227.400,00 | 28.63 | 4.981.858.800,00 | 29.05 | 4.651.858.800,00 | 29.46 | 5.443.858.800,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan |
| 1.01.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN | | | | | 3.332.500,00 | | 10.000.000,00 | | 10.000.000,00 | | 10.000.000,00 | | 10.000.000,00 | |
| Meningkatnya kualitas dan distribusi institusi pendidikan | Persentase usulan izin satuan pendidikan yang diterbitkan/diperbaharui (%) | 100 | 100 | 100 | 3.332.500,00 | 100 | 10.000.000,00 | 100 | 10.000.000,00 | 100 | 10.000.000,00 | 100 | 10.000.000,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan |
| 1.01.06 - PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA | | | | | - | | 250.000.000,00 | | 250.000.000,00 | | 550.000.000,00 | | 250.000.000,00 | |
| Terlestarikannya bahasa dan sastra daerah | Persentase pengembangan Bahasa dan Sastra Daerah (%) | - | - | - | - | 1 | 250.000.000,00 | 1,5 | 250.000.000,00 | 2 | 550.000.000,00 | 2,5 | 250.000.000,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan |
| 2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN | | | | | 100.000.000,00 | | 325.000.000,00 | | 325.000.000,00 | | 325.000.000,00 | | 325.000.000,00 | |
| 2.22.08 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN | | | | | 100.000.000,00 | | 325.000.000,00 | | 325.000.000,00 | | 325.000.000,00 | | 325.000.000,00 | |
| Meningkatnya pendidikan muatan lokal | Persentase Implementasi Pendidikan Berbasis Budaya dengan Kategori Mandiri Budaya (%) | - | - | 0.5 | 100.000.000,00 | 1 | 325.000.000,00 | 1.5 | 325.000.000,00 | 2 | 325.000.000,00 | 2.5 | 325.000.000,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan |
| | Persentase implementasi pendidikan berbasis budaya dengan kategori sangat baik (%) | - | - | 0.5 | | 1 | | 1.5 | | 2 | | 2.5 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan |
| 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH | | | | | - | | 75.000.000,00 | | 75.000.000,00 | | 75.000.000,00 | | 75.000.000,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.01.04 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN | | | | | - | | 75.000.000,00 | | 75.000.000,00 | | 75.000.000,00 | | 75.000.000,00 | |
| Peningkatan kualitas layanan publik | Persentase Capaian Implementasi Inovasi Layanan Publik (%) | - | - | - | - | 97 | 75.000.000,00 | 98 | 75.000.000,00 | 99 | 75.000.000,00 | 100 | 75.000.000,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah |
| TOTAL KESELURUHAN | | | | | 700.985.162.746,00 | | 730.091.542.800,00 | | 738.221.810.200,00 | | 759.283.409.800,00 | | 762.472.437.300,00 | |

# TABEL 4.3
# RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN
# PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | | | | 700.885.162.746,00 | | 729.691.542.800,00 | | 737.821.810.200,00 | | 758.883.409.800,00 | | 762.072.437.300,00 | | |
| 1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | 580.222.709.296,00 | | 582.259.490.000,00 | | 582.009.390.000,00 | | 581.590.100.000,00 | | 582.617.490.000,00 | | |
| Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah | Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah | 83.51 | 84.51 | 579.934.845.796,00 | 85.00 | 581.978.990.000,00 | 85.50 | 581.734.890.000,00 | 86.00 | 581.315.600.000,00 | 86.50 | 582.341.990.000,00 | 1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan | |
| 1.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 293.514.000,00 | | 804.000.000,00 | | 1.004.000.000,00 | | 704.000.000,00 | | 804.000.000,00 | | |
| Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 3 | 9 | 293.514.000,00 | 9 | 804.000.000,00 | 9 | 1.004.000.000,00 | 9 | 704.000.000,00 | 9 | 804.000.000,00 | | |
| | Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 0 | 0 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | |
| | Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan | 0 | 0 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah | 0 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | |
| | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 2 | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | |
| | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 3 | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | |
| | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 2 | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | |
| | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | |
| | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | |
| | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 6 | 6 | | 6 | | 6 | | 6 | | 6 | | |
| 1.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 32.155.000,00 | | 40.000.000,00 | | 40.000.000,00 | | 40.000.000,00 | | 40.000.000,00 | |
| Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 3 | 3 | 32.155.000,00 | 3 | 40.000.000,00 | 3 | 40.000.000,00 | 3 | 40.000.000,00 | 3 | 40.000.000,00 | |
| 1.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | 10.600.000,00 | | 11.000.000,00 | | 11.000.000,00 | | 11.000.000,00 | | 11.000.000,00 | |
| Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 | 1 | 10.600.000,00 | 1 | 11.000.000,00 | 1 | 11.000.000,00 | 1 | 11.000.000,00 | 1 | 11.000.000,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | 10.600.000,00 | | 11.000.000,00 | | 11.000.000,00 | | 11.000.000,00 | | 11.000.000,00 | | |
| Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 | 1 | 10.600.000,00 | 1 | 11.000.000,00 | 1 | 11.000.000,00 | 1 | 11.000.000,00 | 1 | 11.000.000,00 | | |
| 1.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | 10.600.000,00 | | 11.000.000,00 | | 11.000.000,00 | | 11.000.000,00 | | 11.000.000,00 | | |
| Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 2 | 2 | 10.600.000,00 | 2 | 11.000.000,00 | 2 | 11.000.000,00 | 2 | 11.000.000,00 | 2 | 11.000.000,00 | | |
| 1.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | 10.600.000,00 | | 11.000.000,00 | | 11.000.000,00 | | 11.000.000,00 | | 11.000.000,00 | | |
| Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 2 | 2 | 10.600.000,00 | 2 | 11.000.000,00 | 2 | 11.000.000,00 | 2 | 11.000.000,00 | 2 | 11.000.000,00 | | |
| 1.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | 64.635.000,00 | | 100.000.000,00 | | 100.000.000,00 | | 100.000.000,00 | | 100.000.000,00 | | |
| Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 6 | 6 | 64.635.000,00 | 6 | 100.000.000,00 | 6 | 100.000.000,00 | 6 | 100.000.000,00 | 6 | 100.000.000,00 | | |
| 1.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 74.324.000,00 | | 90.000.000,00 | | 390.000.000,00 | | 90.000.000,00 | | 90.000.000,00 | | |
| Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 3 | 9 | 74.324.000,00 | 9 | 90.000.000,00 | 9 | 390.000.000,00 | 9 | 90.000.000,00 | 9 | 90.000.000,00 | | |
| 1.01.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah | | | | 80.000.000,00 | | 350.000.000,00 | | 350.000.000,00 | | 350.000.000,00 | | 350.000.000,00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah | Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah | 0 | 1 | 80.000.000,00 | 1 | 350.000.000,00 | 1 | 350.000.000,00 | 1 | 350.000.000,00 | 1 | 350.000.000,00 | | |
| 1.01.01.2.01.0010 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | - | | 125.000.000,00 | | 25.000.000,00 | | 25.000.000,00 | | 125.000.000,00 | | |
| Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 0 | 0 | - | 1 | 125.000.000,00 | 1 | 25.000.000,00 | 1 | 25.000.000,00 | 1 | 125.000.000,00 | | |
| 1.01.01.2.01.0013 - Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan | | | | - | | 55.000.000,00 | | 55.000.000,00 | | 55.000.000,00 | | 55.000.000,00 | | |
| Tercapainya Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan | Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan | 0 | 0 | - | 1 | 55.000.000,00 | 1 | 55.000.000,00 | 1 | 55.000.000,00 | 1 | 55.000.000,00 | | |
| 1.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | 575.970.371.116,00 | | 576.198.500.000,00 | | 576.197.500.000,00 | | 576.198.500.000,00 | | 576.198.500.000,00 | | |
| Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 4 | 4 | 575.970.371.116,00 | 4 | 576.198.500.000,00 | 4 | 576.197.500.000,00 | 4 | 576.198.500.000,00 | 4 | 576.198.500.000,00 | | |
| | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | 12 | 24 | | 24 | | 24 | | 24 | | 24 | | | |
| | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 4 | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | 3 | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | |
| | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 78.748 | 74.795 | | 78.748 | | 78.748 | | 78.748 | | 78.748 | | |
| | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 13 | 13 | | 13 | | 13 | | 13 | | 13 | | |
| | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12 | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | |
| 1.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 575.800.466.116,00 | | 576.000.000.000,00 | | 576.000.000.000,00 | | 576.000.000.000,00 | | 576.000.000.000,00 | |
| Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 78.748 | 74.795 | 575.800.466.116,00 | 78.748 | 576.000.000.000,00 | 78.748 | 576.000.000.000,00 | 78.748 | 576.000.000.000,00 | 78.748 | 576.000.000.000,00 | |
| 1.01.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 1.560.000,00 | | 2.000.000,00 | | 2.000.000,00 | | 2.000.000,00 | | 2.000.000,00 | |
| Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 4 | 12 | 1.560.000,00 | 12 | 2.000.000,00 | 12 | 2.000.000,00 | 12 | 2.000.000,00 | 12 | 2.000.000,00 | |
| 1.01.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | 4.500.000,00 | | 5.000.000,00 | | 4.000.000,00 | | 5.000.000,00 | | 5.000.000,00 | |
| Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12 | 12 | 4.500.000,00 | 12 | 5.000.000,00 | 12 | 4.000.000,00 | 12 | 5.000.000,00 | 12 | 5.000.000,00 | |
| 1.01.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | | | | 8.000.000,00 | | 10.000.000,00 | | 10.000.000,00 | | 10.000.000,00 | | 10.000.000,00 | |
| Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | 12 | 24 | 8.000.000,00 | 24 | 10.000.000,00 | 24 | 10.000.000,00 | 24 | 10.000.000,00 | 24 | 10.000.000,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | 25.700.000,00 | | 26.000.000,00 | | 26.000.000,00 | | 26.000.000,00 | | 26.000.000,00 | | |
| Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 4 | 4 | 25.700.000,00 | 4 | 26.000.000,00 | 4 | 26.000.000,00 | 4 | 26.000.000,00 | 4 | 26.000.000,00 | | |
| 1.01.01.2.02.0006 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | | | | 300.000,00 | | 500.000,00 | | 500.000,00 | | 500.000,00 | | 500.000,00 | | |
| Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | 3 | 2 | 300.000,00 | 2 | 500.000,00 | 2 | 500.000,00 | 2 | 500.000,00 | 2 | 500.000,00 | | |
| 1.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | 129.845.000,00 | | 155.000.000,00 | | 155.000.000,00 | | 155.000.000,00 | | 155.000.000,00 | | |
| Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 13 | 13 | 129.845.000,00 | 13 | 155.000.000,00 | 13 | 155.000.000,00 | 13 | 155.000.000,00 | 13 | 155.000.000,00 | | |
| 1.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | 289.485.000,00 | | 742.700.000,00 | | 741.700.000,00 | | 742.700.000,00 | | 742.700.000,00 | | |
| Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | 1 | 1 | 289.485.000,00 | 1 | 742.700.000,00 | 1 | 741.700.000,00 | 1 | 742.700.000,00 | 1 | 742.700.000,00 | | |
| | Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | 1 | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 4 | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | |
| | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | |
| | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | 0 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | |
| 1.01.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | | | | 625.000,00 | | 700.000,00 | | 700.000,00 | | 700.000,00 | | 700.000,00 | |
| Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | 0 | 1 | 625.000,00 | 1 | 700.000,00 | 1 | 700.000,00 | 1 | 700.000,00 | 1 | 700.000,00 | |
| 1.01.01.2.03.0003 - Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | | | | 9.600.000,00 | | 10.000.000,00 | | 10.000.000,00 | | 10.000.000,00 | | 10.000.000,00 | |
| Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | 1 | 2 | 9.600.000,00 | 2 | 10.000.000,00 | 2 | 10.000.000,00 | 2 | 10.000.000,00 | 2 | 10.000.000,00 | |
| 1.01.01.2.03.0004 - Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | 9.500.000,00 | | 10.000.000,00 | | 10.000.000,00 | | 10.000.000,00 | | 10.000.000,00 | |
| Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | 1 | 1 | 9.500.000,00 | 1 | 10.000.000,00 | 1 | 10.000.000,00 | 1 | 10.000.000,00 | 1 | 10.000.000,00 | |
| 1.01.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | 252.990.000,00 | | 705.000.000,00 | | 704.000.000,00 | | 705.000.000,00 | | 705.000.000,00 | |
| Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 1 | 1 | 252.990.000,00 | 1 | 705.000.000,00 | 1 | 704.000.000,00 | 1 | 705.000.000,00 | 1 | 705.000.000,00 | |
| 1.01.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | 16.770.000,00 | | 17.000.000,00 | | 17.000.000,00 | | 17.000.000,00 | | 17.000.000,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 4 | 2 | 16.770.000,00 | 2 | 17.000.000,00 | 2 | 17.000.000,00 | 2 | 17.000.000,00 | 2 | 17.000.000,00 | |
| 1.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | 269.535.600,00 | | 272.000.000,00 | | 272.000.000,00 | | 272.000.000,00 | | 272.000.000,00 | |
| Dokumen Administrasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 14 | 5 | 269.535.600,00 | 5 | 272.000.000,00 | 5 | 272.000.000,00 | 5 | 272.000.000,00 | 5 | 272.000.000,00 | |
| | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 510 | 571 | | 300 | | 300 | | 300 | | 300 | | |
| | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | |
| 1.01.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | | 111.380.600,00 | | 112.000.000,00 | | 112.000.000,00 | | 112.000.000,00 | | 112.000.000,00 | |
| Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 14 | 5 | 111.380.600,00 | 5 | 112.000.000,00 | 5 | 112.000.000,00 | 5 | 112.000.000,00 | 5 | 112.000.000,00 | |
| 1.01.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | | | | 4.120.000,00 | | 5.000.000,00 | | 5.000.000,00 | | 5.000.000,00 | | 5.000.000,00 | |
| Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | 1 | 1 | 4.120.000,00 | 1 | 5.000.000,00 | 1 | 5.000.000,00 | 1 | 5.000.000,00 | 1 | 5.000.000,00 | |
| 1.01.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | 154.035.000,00 | | 155.000.000,00 | | 155.000.000,00 | | 155.000.000,00 | | 155.000.000,00 | |
| Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 510 | 571 | 154.035.000,00 | 300 | 155.000.000,00 | 300 | 155.000.000,00 | 300 | 155.000.000,00 | 300 | 155.000.000,00 | |
| 1.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | 1.649.553.800,00 | | 2.246.400.000,00 | | 1.845.300.000,00 | | 1.846.400.000,00 | | 2.441.400.000,00 | |
| Dokumen Administrasi Umum | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 1 | 12 | 1.649.553.800,00 | 12 | 2.246.400.000,00 | 12 | 1.845.300.000,00 | 12 | 1.846.400.000,00 | 12 | 2.441.400.000,00 | |
| | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 25 | 78 | | 78 | | 78 | | 78 | | 78 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 2 | 59 | | 59 | | 59 | | 59 | | 59 | | |
| | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 2 | 2 | | 3 | | 3 | | 3 | | 4 | | |
| | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 2 | 21 | | 21 | | 21 | | 21 | | 21 | | |
| | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 42 | 441 | | 447 | | 441 | | 441 | | 447 | | |
| | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 2 | 23 | | 23 | | 23 | | 23 | | 23 | | |
| | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 0 | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | |
| 1.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi<br><br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 29.357.800,00 | | 30.000.000,00 | | 30.000.000,00 | | 30.000.000,00 | | 30.000.000,00 | |
| Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 2 | 21 | 29.357.800,00 | 21 | 30.000.000,00 | 21 | 30.000.000,00 | 21 | 30.000.000,00 | 21 | 30.000.000,00 | |
| 1.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 767.330.000,00 | | 1.200.000.000,00 | | 800.000.000,00 | | 800.000.000,00 | | 1.200.000.000,00 | |
| Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 42 | 441 | 767.330.000,00 | 447 | 1.200.000.000,00 | 441 | 800.000.000,00 | 441 | 800.000.000,00 | 447 | 1.200.000.000,00 | |
| 1.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 268.847.000,00 | | 269.000.000,00 | | 269.000.000,00 | | 269.000.000,00 | | 269.000.000,00 | |
| Tersedianya Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 2 | 23 | 268.847.000,00 | 23 | 269.000.000,00 | 23 | 269.000.000,00 | 23 | 269.000.000,00 | 23 | 269.000.000,00 | |
| 1.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 55.153.000,00 | | 60.000.000,00 | | 60.000.000,00 | | 60.000.000,00 | | 60.000.000,00 | |
| Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 2 | 59 | 55.153.000,00 | 59 | 60.000.000,00 | 59 | 60.000.000,00 | 59 | 60.000.000,00 | 59 | 60.000.000,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | 1.200.000,00 | | 1.400.000,00 | | 1.300.000,00 | | 1.400.000,00 | | 1.400.000,00 | | |
| Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 0 | 12 | 1.200.000,00 | 12 | 1.400.000,00 | 12 | 1.300.000,00 | 12 | 1.400.000,00 | 12 | 1.400.000,00 | | |
| 1.01.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 12.715.000,00 | | 13.000.000,00 | | 13.000.000,00 | | 13.000.000,00 | | 13.000.000,00 | | |
| Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 1 | 12 | 12.715.000,00 | 12 | 13.000.000,00 | 12 | 13.000.000,00 | 12 | 13.000.000,00 | 12 | 13.000.000,00 | | |
| 1.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 210.322.000,00 | | 218.000.000,00 | | 217.000.000,00 | | 218.000.000,00 | | 218.000.000,00 | | |
| Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 25 | 78 | 210.322.000,00 | 78 | 218.000.000,00 | 78 | 217.000.000,00 | 78 | 218.000.000,00 | 78 | 218.000.000,00 | | |
| 1.01.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | | 304.629.000,00 | | 455.000.000,00 | | 455.000.000,00 | | 455.000.000,00 | | 650.000.000,00 | | |
| Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 2 | 2 | 304.629.000,00 | 3 | 455.000.000,00 | 3 | 455.000.000,00 | 3 | 455.000.000,00 | 4 | 650.000.000,00 | | |
| 1.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | 115.000.000,00 | | 208.390.000,00 | | 178.390.000,00 | | 60.000.000,00 | | 358.390.000,00 | | |
| Dokumen Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 0 | 0 | 115.000.000,00 | 2 | 208.390.000,00 | 0 | 178.390.000,00 | 2 | 60.000.000,00 | 10 | 358.390.000,00 | | |
| | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 0 | 4 | | 6 | | 174 | | 0 | | 174 | | | |
| | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 0 | 0 | | 3 | | 3 | | 3 | | 15 | | | |
| 1.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel | | | | 115.000.000,00 | | 148.390.000,00 | | 148.390.000,00 | | - | | 148.390.000,00 | | |
| Tersedianya Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 0 | 4 | 115.000.000,00 | 6 | 148.390.000,00 | 174 | 148.390.000,00 | 0 | - | 174 | 148.390.000,00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.01.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | - | | 30.000.000,00 | | 30.000.000,00 | | 30.000.000,00 | | 120.000.000,00 | | |
| Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 0 | 0 | - | 3 | 30.000.000,00 | 3 | 30.000.000,00 | 3 | 30.000.000,00 | 15 | 120.000.000,00 | | |
| 1.01.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | - | | 30.000.000,00 | | - | | 30.000.000,00 | | 90.000.000,00 | | |
| Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 0 | 0 | - | 2 | 30.000.000,00 | 0 | - | 2 | 30.000.000,00 | 10 | 90.000.000,00 | | |
| 1.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 857.318.280,00 | | 864.000.000,00 | | 863.000.000,00 | | 864.000.000,00 | | 864.000.000,00 | | |
| Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 | 1 | 857.318.280,00 | 1 | 864.000.000,00 | 1 | 863.000.000,00 | 1 | 864.000.000,00 | 1 | 864.000.000,00 | | |
| | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 576 | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | | |
| | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 9 | 6 | | 6 | | 6 | | 6 | | 6 | | | |
| 1.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 460.054.280,00 | | 462.000.000,00 | | 461.000.000,00 | | 462.000.000,00 | | 462.000.000,00 | | |
| Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 576 | 12 | 460.054.280,00 | 12 | 462.000.000,00 | 12 | 461.000.000,00 | 12 | 462.000.000,00 | 12 | 462.000.000,00 | | |
| 1.01.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 322.000.000,00 | | 322.000.000,00 | | 322.000.000,00 | | 322.000.000,00 | | 322.000.000,00 | | |
| Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 | 1 | 322.000.000,00 | 1 | 322.000.000,00 | 1 | 322.000.000,00 | 1 | 322.000.000,00 | 1 | 322.000.000,00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 75.264.000,00 | | 80.000.000,00 | | 80.000.000,00 | | 80.000.000,00 | | 80.000.000,00 | | |
| Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 9 | 6 | 75.264.000,00 | 6 | 80.000.000,00 | 6 | 80.000.000,00 | 6 | 80.000.000,00 | 6 | 80.000.000,00 | | |
| 1.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 490.068.000,00 | | 643.000.000,00 | | 633.000.000,00 | | 628.000.000,00 | | 661.000.000,00 | | |
| Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 65 | 72 | 490.068.000,00 | 72 | 643.000.000,00 | 72 | 633.000.000,00 | 72 | 628.000.000,00 | 72 | 661.000.000,00 | | |
| | Jumlah Mebel yang Dipelihara | 0 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | | |
| | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 16 | 40 | | 105 | | 105 | | 105 | | 105 | | | |
| | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 30 | 56 | | 56 | | 56 | | 56 | | 56 | | | |
| | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 0 | 19 | | 6 | | 6 | | 6 | | 6 | | | |
| 1.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 172.600.000,00 | | 173.000.000,00 | | 173.000.000,00 | | 173.000.000,00 | | 173.000.000,00 | | |
| Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 65 | 72 | 172.600.000,00 | 72 | 173.000.000,00 | 72 | 173.000.000,00 | 72 | 173.000.000,00 | 72 | 173.000.000,00 | | |
| 1.01.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel | | | | 5.000.000,00 | | 5.000.000,00 | | 5.000.000,00 | | 5.000.000,00 | | 5.000.000,00 | | |
| Terlaksananya Pemeliharaan Mebel | Jumlah Mebel yang Dipelihara | 0 | 100 | 5.000.000,00 | 100 | 5.000.000,00 | 100 | 5.000.000,00 | 100 | 5.000.000,00 | 100 | 5.000.000,00 | | |
| 1.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 104.620.000,00 | | 180.000.000,00 | | 175.000.000,00 | | 165.000.000,00 | | 198.000.000,00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 16 | 40 | 104.620.000,00 | 105 | 180.000.000,00 | 105 | 175.000.000,00 | 105 | 165.000.000,00 | 105 | 198.000.000,00 | | |
| 1.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 186.848.000,00 | | 255.000.000,00 | | 250.000.000,00 | | 255.000.000,00 | | 255.000.000,00 | | |
| Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 0 | 19 | 186.848.000,00 | 6 | 255.000.000,00 | 6 | 250.000.000,00 | 6 | 255.000.000,00 | 6 | 255.000.000,00 | | |
| 1.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 21.000.000,00 | | 30.000.000,00 | | 30.000.000,00 | | 30.000.000,00 | | 30.000.000,00 | | |
| Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 30 | 56 | 21.000.000,00 | 56 | 30.000.000,00 | 56 | 30.000.000,00 | 56 | 30.000.000,00 | 56 | 30.000.000,00 | | |
| Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pendidikan nonformal | Kepuasan peserta terhadap layanan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) | 83.51 | 84.51 | 287.863.500,00 | 85.00 | 280.500.000,00 | 85.50 | 274.500.000,00 | 86.00 | 274.500.000,00 | 86.50 | 275.500.000,00 | 1.01.2.19.0.00.01.0001 - Sanggar Kegiatan Belajar | |
| 1.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | 165.613.900,00 | | 160.000.000,00 | | 160.000.000,00 | | 160.000.000,00 | | 160.000.000,00 | | |
| Dokumen Administrasi Umum | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 1 | 1 | 165.613.900,00 | 1 | 160.000.000,00 | 1 | 160.000.000,00 | 1 | 160.000.000,00 | 1 | 160.000.000,00 | | |
| | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | |
| | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 2 | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | | |
| | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 0 | 0 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | |
| | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 0 | 0 | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | | |
| | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 2 | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | |
| 1.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi<br><br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 6.775.000,00 | | 7.000.000,00 | | 7.000.000,00 | | 7.000.000,00 | | 7.000.000,00 | |
| Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 | 1 | 6.775.000,00 | 1 | 7.000.000,00 | 1 | 7.000.000,00 | 1 | 7.000.000,00 | 1 | 7.000.000,00 | |
| 1.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 88.058.000,00 | | 80.000.000,00 | | 80.000.000,00 | | 80.000.000,00 | | 80.000.000,00 | |
| Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 | 1 | 88.058.000,00 | 1 | 80.000.000,00 | 1 | 80.000.000,00 | 1 | 80.000.000,00 | 1 | 80.000.000,00 | |
| 1.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 55.380.000,00 | | 55.500.000,00 | | 55.500.000,00 | | 55.500.000,00 | | 55.500.000,00 | |
| Tersedianya Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 1 | 1 | 55.380.000,00 | 1 | 55.500.000,00 | 1 | 55.500.000,00 | 1 | 55.500.000,00 | 1 | 55.500.000,00 | |
| 1.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 9.240.900,00 | | 9.500.000,00 | | 9.500.000,00 | | 9.500.000,00 | | 9.500.000,00 | |
| Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 2 | 2 | 9.240.900,00 | 2 | 9.500.000,00 | 2 | 9.500.000,00 | 2 | 9.500.000,00 | 2 | 9.500.000,00 | |
| 1.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | - | | 1.400.000,00 | | 1.400.000,00 | | 1.400.000,00 | | 1.400.000,00 | |
| Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 0 | 0 | - | 12 | 1.400.000,00 | 12 | 1.400.000,00 | 12 | 1.400.000,00 | 12 | 1.400.000,00 | |
| 1.01.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | - | | 100.000,00 | | 100.000,00 | | 100.000,00 | | 100.000,00 | |
| Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 0 | 0 | - | 1 | 100.000,00 | 1 | 100.000,00 | 1 | 100.000,00 | 1 | 100.000,00 | |
| 1.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 6.160.000,00 | | 6.500.000,00 | | 6.500.000,00 | | 6.500.000,00 | | 6.500.000,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 2 | 2 | 6.160.000,00 | 2 | 6.500.000,00 | 2 | 6.500.000,00 | 2 | 6.500.000,00 | 2 | 6.500.000,00 | | |
| 1.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | - | | 3.000.000,00 | | 2.000.000,00 | | 2.000.000,00 | | 3.000.000,00 | | |
| Dokumen Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 0 | 0 | - | 1 | 3.000.000,00 | | 2.000.000,00 | 1 | 2.000.000,00 | 1 | 3.000.000,00 | | |
| | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 0 | 0 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | |
| | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 0 | 0 | | 1 | | 1 | | | | 1 | | | |
| 1.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel | | | | - | | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 | | - | | 1.000.000,00 | | |
| Tersedianya Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 0 | 0 | - | 1 | 1.000.000,00 | 1 | 1.000.000,00 | | - | 1 | 1.000.000,00 | | |
| 1.01.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | - | | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 | | |
| Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 0 | 0 | - | 1 | 1.000.000,00 | 1 | 1.000.000,00 | 1 | 1.000.000,00 | 1 | 1.000.000,00 | | |
| 1.01.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | - | | 1.000.000,00 | | - | | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 | | |
| Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 0 | 0 | - | 1 | 1.000.000,00 | | - | 1 | 1.000.000,00 | 1 | 1.000.000,00 | | |
| 1.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 65.685.600,00 | | 66.000.000,00 | | 66.000.000,00 | | 66.000.000,00 | | 66.000.000,00 | | |
| Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 36 | 36 | 65.685.600,00 | 36 | 66.000.000,00 | 36 | 66.000.000,00 | 36 | 66.000.000,00 | 36 | 66.000.000,00 | | |
| 1.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 65.685.600,00 | | 66.000.000,00 | | 66.000.000,00 | | 66.000.000,00 | | 66.000.000,00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 36 | 36 | 65.685.600,00 | 36 | 66.000.000,00 | 36 | 66.000.000,00 | 36 | 66.000.000,00 | 36 | 66.000.000,00 | | |
| 1.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 56.564.000,00 | | 51.500.000,00 | | 46.500.000,00 | | 46.500.000,00 | | 46.500.000,00 | | |
| Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah | Jumlah Mebel yang Dipelihara | 0 | 0 | 56.564.000,00 | 30 | 51.500.000,00 | 30 | 46.500.000,00 | 30 | 46.500.000,00 | 30 | 46.500.000,00 | | |
| | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 0 | 0 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | |
| | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 5 | 15 | | 15 | | 15 | | 15 | | 15 | | | |
| | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 16 | 50 | | 16 | | 10 | | 10 | | 10 | | | |
| | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | |
| 1.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 25.900.000,00 | | 26.000.000,00 | | 26.000.000,00 | | 26.000.000,00 | | 26.000.000,00 | | |
| Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 1 | 1 | 25.900.000,00 | 1 | 26.000.000,00 | 1 | 26.000.000,00 | 1 | 26.000.000,00 | 1 | 26.000.000,00 | | |
| 1.01.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel | | | | - | | 1.500.000,00 | | 1.500.000,00 | | 1.500.000,00 | | 1.500.000,00 | | |
| Terlaksananya Pemeliharaan Mebel | Jumlah Mebel yang Dipelihara | 0 | 0 | - | 30 | 1.500.000,00 | 30 | 1.500.000,00 | 30 | 1.500.000,00 | 30 | 1.500.000,00 | | |
| 1.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 26.164.000,00 | | 15.000.000,00 | | 10.000.000,00 | | 10.000.000,00 | | 10.000.000,00 | | |
| Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 16 | 50 | 26.164.000,00 | 16 | 15.000.000,00 | 10 | 10.000.000,00 | 10 | 10.000.000,00 | 10 | 10.000.000,00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | - | | 4.500.000,00 | | 4.500.000,00 | | 4.500.000,00 | | 4.500.000,00 | | |
| Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 0 | 0 | - | 1 | 4.500.000,00 | 1 | 4.500.000,00 | 1 | 4.500.000,00 | 1 | 4.500.000,00 | | |
| 1.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 4.500.000,00 | | 4.500.000,00 | | 4.500.000,00 | | 4.500.000,00 | | 4.500.000,00 | | |
| Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 5 | 15 | 4.500.000,00 | 15 | 4.500.000,00 | 15 | 4.500.000,00 | 15 | 4.500.000,00 | 15 | 4.500.000,00 | | |
| 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | | | | 116.324.464.550,00 | | 139.910.431.900,00 | | 149.651.167.900,00 | | 170.522.057.500,00 | | 172.831.695.000,00 | | |
| Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah jenjang Kesetaraan | Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 18 Kesetaraan | 26.25 | 27.85 | 6.882.384.000,00 | 28.65 | 7.045.100.000,00 | 29.45 | 7.616.690.000,00 | 30.25 | 9.663.250.000,00 | 31.05 | 8.446.180.000,00 | 1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan | |
| 1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | | | | 6.882.384.000,00 | | 7.045.100.000,00 | | 7.616.690.000,00 | | 9.663.250.000,00 | | 8.446.180.000,00 | | |
| Terpenuhinya kebutuhan pendidikan penduduk usia Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik | 0 | 0 | 6.882.384.000,00 | 0 | 7.045.100.000,00 | 0 | 7.616.690.000,00 | 2.646 | 9.663.250.000,00 | 0 | 8.446.180.000,00 | | |
| | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 1 | | 0 | | | |
| | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | |
| | Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | 0 | 1 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | |
| | Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi | 2 | 1 | | 1 | | 1 | | 18 | | |
| | Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan | 0 | 3 | | 3 | | 5 | | 3 | | 30 |
| | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan | 0 | 26 | | 26 | | 26 | | 26 | | 26 |
| | Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia | 0 | 0 | | 3 | | 0 | | 26 | | 26 |
| | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | 17 | 15 | | 17 | | 17 | | 17 | | 17 |
| | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | 10 | 30 | | 90 | | 90 | | 90 | | 90 |
| | Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia | 100 | 0 | | 0 | | 0 | | 135 | | 135 |
| | Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan | 0 | 0 | | 26 | | 26 | | 26 | | 26 |
| | Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik | 50 | 260 | | 260 | | 260 | | 1.500 | | 260 |
| | Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | 0 | 26 | | 200 | | 200 | | 200 | | 200 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan | 0 | 26 | | 26 | | 26 | | 26 | | 260 | | | |
| | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 1 | | 0 | | | |
| | Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 1 | | 0 | | | |
| | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 1 | | 0 | | | |
| | Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 1 | | 0 | | | |
| | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal yang Telah Dibangun | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 1 | | 0 | | | |
| | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 1 | | 0 | | | |
| | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar | 2.832 | 2.693 | | 2.832 | | 2.832 | | 2.832 | | 2.832 | | | |
| | Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 1 | | 0 | | | |
| | Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen | 25 | 26 | | 26 | | 26 | | 26 | | 26 | | | |
| | Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP | 25 | 26 | | 26 | | 26 | | 26 | | 26 | | | |
| | Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan | 60 | 26 | | 26 | | 26 | | 26 | | 26 | | | |
| | Pendidik Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang mendapat sertifikat kompetensi | 0 | 0 | | 0 | | 20 | | 20 | | 20 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.01.02.2.04.0010 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan | | | | 130.000.000,00 | | 130.000.000,00 | | 130.000.000,00 | | 750.000.000,00 | | 130.000.000,00 | | |
| Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan diterima oleh peserta didik | Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik | 50 | 260 | 130.000.000,00 | 260 | 130.000.000,00 | 260 | 130.000.000,00 | 1.500 | 750.000.000,00 | 260 | 130.000.000,00 | | |
| 1.01.02.2.04.0014 - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | | | | 1.575.000,00 | | 5.100.000,00 | | 5.100.000,00 | | 5.100.000,00 | | 5.100.000,00 | | |
| Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | 10 | 30 | 1.575.000,00 | 90 | 5.100.000,00 | 90 | 5.100.000,00 | 90 | 5.100.000,00 | 90 | 5.100.000,00 | | |
| 1.01.02.2.04.0015 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | | | | 5.037.500,00 | | 7.000.000,00 | | 7.000.000,00 | | 7.000.000,00 | | 7.000.000,00 | | |
| Pendidik dan tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | 17 | 15 | 5.037.500,00 | 17 | 7.000.000,00 | 17 | 7.000.000,00 | 17 | 7.000.000,00 | 17 | 7.000.000,00 | | |
| 1.01.02.2.04.0016 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan | | | | 16.525.000,00 | | 17.000.000,00 | | 17.000.000,00 | | 17.000.000,00 | | 17.000.000,00 | | |
| Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan | Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen | 25 | 26 | 16.525.000,00 | 26 | 17.000.000,00 | 26 | 17.000.000,00 | 26 | 17.000.000,00 | 26 | 17.000.000,00 | | |
| 1.01.02.2.04.0017 - Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan | | | | 1.907.080.000,00 | | 1.907.080.000,00 | | 1.907.080.000,00 | | 1.907.080.000,00 | | 1.907.080.000,00 | | |
| Terlaksananya Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan | Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP | 25 | 26 | 1.907.080.000,00 | 26 | 1.907.080.000,00 | 26 | 1.907.080.000,00 | 26 | 1.907.080.000,00 | 26 | 1.907.080.000,00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.01.02.2.04.0018 - Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan | | | | 7.655.000,00 | | 40.000.000,00 | | 10.000.000,00 | | 40.000.000,00 | | 10.000.000,00 | | |
| Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan | Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan | 60 | 26 | 7.655.000,00 | 26 | 40.000.000,00 | 26 | 10.000.000,00 | 26 | 40.000.000,00 | 26 | 10.000.000,00 | |
| 1.01.02.2.04.0024 - Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan | | | | 16.410.000,00 | | 20.000.000,00 | | 20.000.000,00 | | 20.000.000,00 | | 20.000.000,00 | |
| Terlaksananya Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan | 0 | 26 | 16.410.000,00 | 26 | 20.000.000,00 | 26 | 20.000.000,00 | 26 | 20.000.000,00 | 26 | 20.000.000,00 | |
| 1.01.02.2.04.0025 - Pengembangan konten digital untuk pendidikan | | | | 16.410.000,00 | | 16.410.000,00 | | 20.000.000,00 | | 16.410.000,00 | | 164.100.000,00 | |
| Terlaksananya konten digital untuk pendidikan yang dikembangkan | Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan | 0 | 3 | 16.410.000,00 | 3 | 16.410.000,00 | 5 | 20.000.000,00 | 3 | 16.410.000,00 | 30 | 164.100.000,00 | |
| 1.01.02.2.04.0026 - Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan | | | | 16.410.000,00 | | 16.410.000,00 | | 16.410.000,00 | | 16.410.000,00 | | 164.100.000,00 | |
| Terlaksananya pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan | Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan | 0 | 26 | 16.410.000,00 | 26 | 16.410.000,00 | 26 | 16.410.000,00 | 26 | 16.410.000,00 | 260 | 164.100.000,00 | |
| 1.01.02.2.04.0027 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | | | | 3.505.000,00 | | 5.000.000,00 | | 500.000.000,00 | | 5.000.000,00 | | 500.000.000,00 | |
| Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | 1 | 1 | 3.505.000,00 | 1 | 5.000.000,00 | 1 | 500.000.000,00 | 1 | 5.000.000,00 | 1 | 500.000.000,00 | |
| 1.01.02.2.04.0028 - Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan | | | | 3.505.000,00 | | 5.000.000,00 | | 5.000.000,00 | | 5.000.000,00 | | 5.000.000,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan | Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan | 1 | 1 | 3.505.000,00 | 1 | 5.000.000,00 | 1 | 5.000.000,00 | 1 | 5.000.000,00 | 1 | 5.000.000,00 | |
| 1.01.02.2.04.0030 - Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | | | | 2.350.000,00 | | 6.100.000,00 | | 6.100.000,00 | | 6.100.000,00 | | 109.800.000,00 | |
| Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi | Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi | 2 | 1 | 2.350.000,00 | 1 | 6.100.000,00 | 1 | 6.100.000,00 | 1 | 6.100.000,00 | 18 | 109.800.000,00 | |
| 1.01.02.2.04.0031 - Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | | | | 3.505.000,00 | | 5.000.000,00 | | 5.000.000,00 | | 5.000.000,00 | | 5.000.000,00 | |
| Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | 0 | 1 | 3.505.000,00 | 2 | 5.000.000,00 | 2 | 5.000.000,00 | 2 | 5.000.000,00 | 2 | 5.000.000,00 | |
| 1.01.02.2.04.0032 - Fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi pendidik Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | | | | - | | - | | 150.000.000,00 | | 150.000.000,00 | | 150.000.000,00 | |
| Pendidik Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang mendapat sertifikat kompetensi | Pendidik Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang mendapat sertifikat kompetensi | 0 | 0 | - | 0 | - | 20 | 150.000.000,00 | 20 | 150.000.000,00 | 20 | 150.000.000,00 | |
| 1.01.02.2.04.0033 - Penyediaan infrastruktur TIK | | | | - | | 45.000.000,00 | | - | | 390.000.000,00 | | 390.000.000,00 | |
| Tersedianya infrastruktur TIK | Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia | 0 | 0 | - | 3 | 45.000.000,00 | 0 | - | 26 | 390.000.000,00 | 26 | 390.000.000,00 | |
| 1.01.02.2.04.0035 - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik | | | | 16.410.000,00 | | 20.000.000,00 | | 18.000.000,00 | | 20.000.000,00 | | 20.000.000,00 | |
| Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | 0 | 26 | 16.410.000,00 | 200 | 20.000.000,00 | 200 | 18.000.000,00 | 200 | 20.000.000,00 | 200 | 20.000.000,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.01.02.2.04.0036 - Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik | | | | - | | - | | - | | 42.000.000,00 | | 42.000.000,00 | | |
| Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia | Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia | 100 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 135 | 42.000.000,00 | 135 | 42.000.000,00 | | |
| 1.01.02.2.04.0037 - Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik | | | | - | | - | | - | | 66.150.000,00 | | - | | |
| Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks | Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 2.646 | 66.150.000,00 | 0 | - | | |
| 1.01.02.2.04.0038 - Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | | - | | - | | - | | 350.000.000,00 | | - | | |
| Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terbangun | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 | 350.000.000,00 | 0 | - | | |
| 1.01.02.2.04.0039 - Pembangunan Ruang Kelas Baru | | | | - | | - | | - | | 350.000.000,00 | | - | | |
| Ruang Kelas Baru bertambah | Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 | 350.000.000,00 | 0 | - | | |
| 1.01.02.2.04.0041 - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | | - | | - | | - | | 150.000.000,00 | | - | | |
| Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 | 150.000.000,00 | 0 | - | | |
| 1.01.02.2.04.0042 - Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan | | | | - | | 10.000.000,00 | | 10.000.000,00 | | 10.000.000,00 | | 10.000.000,00 | | |
| Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan | Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan | 0 | 0 | - | 26 | 10.000.000,00 | 26 | 10.000.000,00 | 26 | 10.000.000,00 | 26 | 10.000.000,00 | | |
| 1.01.02.2.04.0043 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium | | | | - | | - | | - | | 150.000.000,00 | | - | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruang Laboratorium yang Terehabilitasi Sedang/Berat | Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 | 150.000.000,00 | 0 | - | | |
| 1.01.02.2.04.0044 - Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) | | | | - | | - | | - | | 150.000.000,00 | | - | | |
| Sekolah Baru yang Terbangun | Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 | 150.000.000,00 | 0 | - | | |
| 1.01.02.2.04.0046 - Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik | | | | 4.736.006.500,00 | | 4.790.000.000,00 | | 4.790.000.000,00 | | 4.790.000.000,00 | | 4.790.000.000,00 | | |
| Terselenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar | 2.832 | 2.693 | 4.736.006.500,00 | 2.832 | 4.790.000.000,00 | 2.832 | 4.790.000.000,00 | 2.832 | 4.790.000.000,00 | 2.832 | 4.790.000.000,00 | | |
| 1.01.02.2.04.0052 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal | | | | - | | - | | - | | 45.000.000,00 | | - | | |
| Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal yang Terbangun | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal yang Telah Dibangun | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 | 45.000.000,00 | 0 | - | | |
| 1.01.02.2.04.0055 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan | | | | - | | - | | - | | 50.000.000,00 | | - | | |
| Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Tersedia | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 | 50.000.000,00 | 0 | - | | |
| 1.01.02.2.04.0061 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | | | | - | | - | | - | | 150.000.000,00 | | - | | |
| Ruang Kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 | 150.000.000,00 | 0 | - | | |
| Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah jenjang PAUD | Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B | 88.13 | 93.32 | 23.217.634.600,00 | 98.66 | 24.210.926.000,00 | 100 | 22.435.491.000,00 | 100 | 27.772.701.000,00 | 100 | 31.342.371.000,00 | | |
| | Angka Partisipasi Sekolah (APS) 5 - 6 PAUD | 89.98 | 93.06 | | 94.60 | | 96.14 | | 97.68 | | 100 | | | |
| | Proporsi Guru PAUD Formal dengan Kualifikasi S1/D IV | 93.76 | 96.21 | | 96.71 | | 97.21 | | 97.71 | | 98.21 | | | |
| 1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | | | | 23.217.634.600,00 | | 24.210.926.000,00 | | 22.435.491.000,00 | | 27.772.701.000,00 | | 31.342.371.000,00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terpenuhinya kebutuhan pendidikan penduduk usia Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik | 0 | 0 | 23.217.634.600,00 | 0 | 24.210.926.000,00 | 0 | 22.435.491.000,00 | 11.065 | 27.772.701.000,00 | 11.065 | 31.342.371.000,00 | | |
| | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia | 8 | 8 | | 14 | | 14 | | 35 | | 150 | | | |
| | Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun | 0 | 1 | | 1 | | 0 | | 1 | | 1 | | | |
| | Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD | 1.198 | 1.186 | | 1.186 | | 1.186 | | 1.186 | | 1.186 | | | |
| | Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen | 80 | 180 | | 180 | | 180 | | 180 | | 180 | | | |
| | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun | 3 | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | | |
| | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 17 | 7 | | 4 | | 0 | | 13 | | 17 | | | |
| | Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | |
| | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat | 0 | 1 | | 1 | | 0 | | 2 | | 0 | | | |
| | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun | 2 | 0 | | 1 | | 1 | | 2 | | 2 | | | |
| | Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan | 80 | 36 | | 72 | | 72 | | 72 | | 360 | | | |
| | Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | 0 | 108 | | 600 | | 600 | | 600 | | 600 | | | |
| | Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar | 1.256 | 1.184 | | 1.184 | | 1.184 | | 1.184 | | 1.184 | | | |
| | Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik | 144 | 1.186 | | 1.186 | | 1.186 | | 1.186 | | 1.186 | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan | 762 | 120 | | 120 | | 120 | | 762 | | 762 | |
| | Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 0 | 0 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| | Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun | 0 | 0 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| | Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia | 1.217 | 1.112 | | 1.217 | | 1.217 | | 1.217 | | 1.217 | |
| | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD | 18 | 105 | | 180 | | 180 | | 180 | | 180 | |
| | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | 520 | 341 | | 368 | | 368 | | 368 | | 682 | |
| | Jumlah Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi | 0 | 0 | | 30 | | 30 | | 30 | | 30 | |
| | Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP | 1.198 | 1.186 | | 1.186 | | 1.186 | | 1.186 | | 1.186 | |
| | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 3 | 4 | | 4 | | 0 | | 3 | | 3 | |
| | Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia | 0 | 0 | | 18 | | 18 | | 18 | | 180 | |
| | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan | 0 | 36 | | 120 | | 60 | | 120 | | 360 | |
| | Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia | 7 | 8 | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | |
| | Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan | 5 | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 30 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi | 4 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 18 | | |
| | Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan | 1 | 1 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | |
| | Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | 0 | 1 | | 160 | | 120 | | 160 | | 160 | | |
| | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | 1 | 1 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | |
| 1.01.02.2.03.0002 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD | | | | 456.049.200,00 | | 456.050.000,00 | | 456.050.000,00 | | 456.050.000,00 | | 456.050.000,00 | |
| Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Terbangun | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun | 3 | 5 | 456.049.200,00 | 5 | 456.050.000,00 | 5 | 456.050.000,00 | 5 | 456.050.000,00 | 5 | 456.050.000,00 | |
| 1.01.02.2.03.0007 - Pengadaan Mebel PAUD | | | | 120.000.000,00 | | 180.000.000,00 | | 180.000.000,00 | | 180.000.000,00 | | 180.000.000,00 | |
| Mebel PAUD yang Tersedia | Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia | 7 | 8 | 120.000.000,00 | 12 | 180.000.000,00 | 12 | 180.000.000,00 | 12 | 180.000.000,00 | 12 | 180.000.000,00 | |
| 1.01.02.2.03.0011 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD | | | | 593.000.000,00 | | 593.000.000,00 | | 593.000.000,00 | | 593.000.000,00 | | 593.000.000,00 | |
| Biaya Personil Peserta Didik PAUD Diterima oleh Peserta Didik | Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik | 144 | 1.186 | 593.000.000,00 | 1.186 | 593.000.000,00 | 1.186 | 593.000.000,00 | 1.186 | 593.000.000,00 | 1.186 | 593.000.000,00 | |
| 1.01.02.2.03.0015 - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD | | | | 4.912.500,00 | | 7.200.000,00 | | 7.200.000,00 | | 7.200.000,00 | | 7.200.000,00 | |
| Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi PAUD | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD | 18 | 105 | 4.912.500,00 | 180 | 7.200.000,00 | 180 | 7.200.000,00 | 180 | 7.200.000,00 | 180 | 7.200.000,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.01.02.2.03.0016 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD | | | | 147.252.500,00 | | 150.000.000,00 | | 150.000.000,00 | | 150.000.000,00 | | 304.005.000,00 | | |
| Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | 520 | 341 | 147.252.500,00 | 368 | 150.000.000,00 | 368 | 150.000.000,00 | 368 | 150.000.000,00 | 682 | 304.005.000,00 | |
| 1.01.02.2.03.0017 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD | | | | 44.760.000,00 | | 63.914.000,00 | | 63.914.000,00 | | 63.914.000,00 | | 63.914.000,00 | |
| Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD | Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen | 80 | 180 | 44.760.000,00 | 180 | 63.914.000,00 | 180 | 63.914.000,00 | 180 | 63.914.000,00 | 180 | 63.914.000,00 | |
| 1.01.02.2.03.0018 - Pengelolaan Dana BOP PAUD | | | | 16.052.220.000,00 | | 16.052.220.000,00 | | 16.052.220.000,00 | | 16.052.220.000,00 | | 16.052.220.000,00 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Dana BOP PAUD | Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP | 1.198 | 1.186 | 16.052.220.000,00 | 1.186 | 16.052.220.000,00 | 1.186 | 16.052.220.000,00 | 1.186 | 16.052.220.000,00 | 1.186 | 16.052.220.000,00 | |
| 1.01.02.2.03.0019 - Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD | | | | 181.585.000,00 | | 250.000.000,00 | | 200.000.000,00 | | 250.000.000,00 | | 200.000.000,00 | |
| Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD | Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD | 1.198 | 1.186 | 181.585.000,00 | 1.186 | 250.000.000,00 | 1.186 | 200.000.000,00 | 1.186 | 250.000.000,00 | 1.186 | 200.000.000,00 | |
| 1.01.02.2.03.0021 - Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | | | | - | | 25.000.000,00 | | 25.000.000,00 | | 25.000.000,00 | | 25.000.000,00 | |
| Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi | Jumlah Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi | 0 | 0 | - | 30 | 25.000.000,00 | 30 | 25.000.000,00 | 30 | 25.000.000,00 | 30 | 25.000.000,00 | |
| 1.01.02.2.03.0022 - Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan | | | | 19.110.000,00 | | 30.000.000,00 | | 15.000.000,00 | | 30.000.000,00 | | 191.100.000,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terlaksananya Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan | 0 | 36 | 19.110.000,00 | 120 | 30.000.000,00 | 60 | 15.000.000,00 | 120 | 30.000.000,00 | 360 | 191.100.000,00 | | |
| 1.01.02.2.03.0023 - Pengembangan konten digital untuk pendidikan | | | | 19.110.000,00 | | 20.000.000,00 | | 20.000.000,00 | | 20.000.000,00 | | 191.100.000,00 | | |
| Terlaksananya konten digital untuk pendidikan yang dikembangkan | Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan | 5 | 3 | 19.110.000,00 | 3 | 20.000.000,00 | 3 | 20.000.000,00 | 3 | 20.000.000,00 | 30 | 191.100.000,00 | | |
| 1.01.02.2.03.0024 - Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan | | | | 19.110.000,00 | | 31.000.000,00 | | 31.000.000,00 | | 31.000.000,00 | | 191.100.000,00 | | |
| Terlaksananya pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan | Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan | 80 | 36 | 19.110.000,00 | 72 | 31.000.000,00 | 72 | 31.000.000,00 | 72 | 31.000.000,00 | 360 | 191.100.000,00 | | |
| 1.01.02.2.03.0025 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | | | | 3.930.000,00 | | 10.000.000,00 | | 10.000.000,00 | | 10.000.000,00 | | 10.000.000,00 | | |
| Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | 1 | 1 | 3.930.000,00 | 2 | 10.000.000,00 | 2 | 10.000.000,00 | 2 | 10.000.000,00 | 2 | 10.000.000,00 | | |
| 1.01.02.2.03.0026 - Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan | | | | 3.930.000,00 | | 10.000.000,00 | | 10.000.000,00 | | 10.000.000,00 | | 10.000.000,00 | | |
| Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan | Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan | 1 | 1 | 3.930.000,00 | 2 | 10.000.000,00 | 2 | 10.000.000,00 | 2 | 10.000.000,00 | 2 | 10.000.000,00 | | |
| 1.01.02.2.03.0028 - Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | | - | | 198.500.000,00 | | 198.500.000,00 | | 397.000.000,00 | | 397.000.000,00 | | |
| Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terbangun | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun | 2 | 0 | - | 1 | 198.500.000,00 | 1 | 198.500.000,00 | 2 | 397.000.000,00 | 2 | 397.000.000,00 | | |
| 1.01.02.2.03.0029 - Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | | | | 6.100.000,00 | | 6.100.000,00 | | 6.100.000,00 | | 6.100.000,00 | | 115.900.000,00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi | Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi | 4 | 1 | 6.100.000,00 | 1 | 6.100.000,00 | 1 | 6.100.000,00 | 1 | 6.100.000,00 | 18 | 115.900.000,00 | | |
| 1.01.02.2.03.0030 - Pembangunan Ruang Kelas Baru | | | | 222.890.740,00 | | 222.890.000,00 | | 222.890.000,00 | | 222.890.000,00 | | 222.890.000,00 | | |
| Ruang Kelas Baru bertambah | Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah | 1 | 1 | 222.890.740,00 | 1 | 222.890.000,00 | 1 | 222.890.000,00 | 1 | 222.890.000,00 | 1 | 222.890.000,00 | | |
| 1.01.02.2.03.0031 - Penyediaan infrastruktur TIK | | | | - | | 225.000.000,00 | | 225.000.000,00 | | 225.000.000,00 | | 2.250.000.000,00 | | |
| Tersedianya infrastruktur TIK | Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia | 0 | 0 | - | 18 | 225.000.000,00 | 18 | 225.000.000,00 | 18 | 225.000.000,00 | 180 | 2.250.000.000,00 | | |
| 1.01.02.2.03.0033 - Pembangunan Perpustakaan Sekolah | | | | - | | 315.000.000,00 | | 315.000.000,00 | | 315.000.000,00 | | 315.000.000,00 | | |
| Perpustakaan Sekolah yang terbangun | Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun | 0 | 0 | - | 1 | 315.000.000,00 | 1 | 315.000.000,00 | 1 | 315.000.000,00 | 1 | 315.000.000,00 | | |
| 1.01.02.2.03.0034 - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik | | | | 35.379.000,00 | | 50.000.000,00 | | 50.000.000,00 | | 50.000.000,00 | | 50.000.000,00 | | |
| Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | 0 | 108 | 35.379.000,00 | 600 | 50.000.000,00 | 600 | 50.000.000,00 | 600 | 50.000.000,00 | 600 | 50.000.000,00 | | |
| 1.01.02.2.03.0035 - Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik | | | | - | | - | | - | | 276.625.000,00 | | 276.625.000,00 | | |
| Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks | Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 11.065 | 276.625.000,00 | 11.065 | 276.625.000,00 | | |
| 1.01.02.2.03.0036 - Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah | | | | - | | 150.000.000,00 | | 150.000.000,00 | | 150.000.000,00 | | 150.000.000,00 | | |
| Perpustakaan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat | Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 0 | 0 | - | 1 | 150.000.000,00 | 1 | 150.000.000,00 | 1 | 150.000.000,00 | 1 | 150.000.000,00 | | |
| 1.01.02.2.03.0037 - Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | | | | 7.200.000,00 | | 30.000.000,00 | | 20.000.000,00 | | 30.000.000,00 | | 30.000.000,00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | 0 | 1 | 7.200.000,00 | 160 | 30.000.000,00 | 120 | 20.000.000,00 | 160 | 30.000.000,00 | 160 | 30.000.000,00 | |
| 1.01.02.2.03.0039 - Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan | | | | 12.937.500,00 | | 13.000.000,00 | | 13.000.000,00 | | 77.625.000,00 | | 77.625.000,00 | |
| Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan | Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan | 762 | 120 | 12.937.500,00 | 120 | 13.000.000,00 | 120 | 13.000.000,00 | 762 | 77.625.000,00 | 762 | 77.625.000,00 | |
| 1.01.02.2.03.0040 - Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) | | | | 1.214.516.900,00 | | 1.000.000.000,00 | | - | | 2.000.000.000,00 | | 2.000.000.000,00 | |
| Sekolah Baru yang Terbangun | Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun | 0 | 1 | 1.214.516.900,00 | 1 | 1.000.000.000,00 | 0 | - | 1 | 2.000.000.000,00 | 1 | 2.000.000.000,00 | |
| 1.01.02.2.03.0041 - Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik | | | | 51.708.000,00 | | 67.909.000,00 | | 67.909.000,00 | | 67.909.000,00 | | 67.909.000,00 | |
| Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia | Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia | 1.217 | 1.112 | 51.708.000,00 | 1.217 | 67.909.000,00 | 1.217 | 67.909.000,00 | 1.217 | 67.909.000,00 | 1.217 | 67.909.000,00 | |
| 1.01.02.2.03.0045 - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD | | | | 135.010.000,00 | | 148.435.000,00 | | - | | 460.220.000,00 | | 460.220.000,00 | |
| Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Terehabilitasi Sedang/Berat | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 3 | 4 | 135.010.000,00 | 4 | 148.435.000,00 | 0 | - | 3 | 460.220.000,00 | 3 | 460.220.000,00 | |
| 1.01.02.2.03.0046 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD | | | | 56.000.000,00 | | 98.000.000,00 | | 98.000.000,00 | | 280.000.000,00 | | 1.200.000.000,00 | |
| Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia | 8 | 8 | 56.000.000,00 | 14 | 98.000.000,00 | 14 | 98.000.000,00 | 35 | 280.000.000,00 | 150 | 1.200.000.000,00 | |
| 1.01.02.2.03.0047 - Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD | | | | 3.023.750.000,00 | | 3.255.708.000,00 | | 3.255.708.000,00 | | 3.255.708.000,00 | | 3.255.708.000,00 | |
| Terselenggaranya Proses Belajar PAUD | Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar | 1.256 | 1.184 | 3.023.750.000,00 | 1.184 | 3.255.708.000,00 | 1.184 | 3.255.708.000,00 | 1.184 | 3.255.708.000,00 | 1.184 | 3.255.708.000,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.01.02.2.03.0049 - Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | | 50.000.000,00 | | 132.000.000,00 | | - | | 263.760.000,00 | | - | | |
| Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terehabilitasi sedang/berat | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat | 0 | 1 | 50.000.000,00 | 1 | 132.000.000,00 | 0 | - | 2 | 263.760.000,00 | 0 | - | | |
| 1.01.02.2.03.0051 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | | | | 737.173.260,00 | | 420.000.000,00 | | - | | 1.816.480.000,00 | | 1.998.805.000,00 | | |
| Ruang Kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 17 | 7 | 737.173.260,00 | 4 | 420.000.000,00 | 0 | - | 13 | 1.816.480.000,00 | 17 | 1.998.805.000,00 | | |
| Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah jenjang SD | Skor Kemampuan Literasi SD | 66.82 | 71.82 | 50.117.972.800,00 | 74.32 | 64.537.694.000,00 | 76.82 | 63.148.860.000,00 | 79.32 | 71.382.031.000,00 | 81.82 | 70.485.312.000,00 | | |
| | Iklim Kebinekaan SD | 74.26 | 76.26 | | 77.26 | | 78.26 | | 79.26 | | 80.26 | | | |
| | Iklim Keamanan SD | 76.64 | 78.44 | | 79.34 | | 80.24 | | 81.14 | | 82.04 | | | |
| | Iklim Inklusivitas SD | 58.44 | 63.44 | | 65.94 | | 68.44 | | 70.94 | | 73.44 | | | |
| | Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 12 SD | 94.84 | 96.09 | | 97.34 | | 98.84 | | 100 | | 100 | | | |
| | Skor Kemampuan Numerasi SD | 55.71 | 61.51 | | 64.41 | | 67.31 | | 70.21 | | 73.11 | | | |
| 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | | | | 50.117.972.800,00 | | 64.537.694.000,00 | | 63.148.860.000,00 | | 71.382.031.000,00 | | 70.485.312.000,00 | | |
| Terpenuhinya kebutuhan pendidikan penduduk usia Sekolah Dasar | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun | 1 | 3 | 50.117.972.800,00 | 5 | 64.537.694.000,00 | 3 | 63.148.860.000,00 | 11 | 71.382.031.000,00 | 5 | 70.485.312.000,00 | | |
| | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia | 3 | 0 | | 10 | | 10 | | 15 | | 7 | | | |
| | Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik | 0 | 0 | | 11.160 | | 0 | | 22.320 | | 22.320 | | | |
| | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | |
| | Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | |
| | Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi | 1 | 1 | | 3 | | 3 | | 3 | | 1 |
| | Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan | 14 | 14 | | 42 | | 42 | | 42 | | 42 |
| | Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 0 | 0 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 |
| | Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia | 31 | 6 | | 25 | | 25 | | 50 | | 50 |
| | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan | 150 | 40 | | 200 | | 200 | | 200 | | 464 |
| | Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia | 0 | 0 | | 25 | | 25 | | 150 | | 150 |
| | Jumlah Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi | 0 | 0 | | 232 | | 464 | | 464 | | 464 |
| | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | 640 | 508 | | 752 | | 752 | | 752 | | 752 |
| | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar | 615 | 150 | | 737 | | 283 | | 303 | | 325 |
| | Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia | 1 | 515 | | 2.500 | | 3.500 | | 4.500 | | 5.500 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia | 0 | 0 | | 470 | | 470 | | 470 | | 470 | | |
| Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun | 1 | 1 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | |
| Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 1 | 1 | | 6 | | 6 | | 6 | | 6 | | |
| Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan | 464 | 70 | | 140 | | 140 | | 140 | | 280 | | |
| Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik | 378 | 1.600 | | 2.500 | | 3.500 | | 4.500 | | 5.500 | | |
| Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan | 240 | 80 | | 80 | | 80 | | 80 | | 464 | | |
| Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun | 1 | 1 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | |
| Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 1 | 0 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | |
| Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah | 3 | 4 | | 5 | | 3 | | 10 | | 5 | | |
| Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 25 | 4 | | 22 | | 12 | | 27 | | 22 | | |
| Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun | 5 | 0 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | |
| Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Dibangun | 0 | 0 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | |
| Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 1 | | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | |
| Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 1 | | 0 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 7 | 4 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | | |
| | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar | 466 | 464 | | 464 | | 464 | | 464 | | 464 | | | |
| | Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun | 0 | 0 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | |
| | Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah | 40 | 40 | | 466 | | 466 | | 466 | | 466 | | | |
| | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS | 464 | 464 | | 464 | | 464 | | 464 | | 464 | | | |
| | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | 1.120 | 1.076 | | 1.120 | | 1.120 | | 1.120 | | 1.120 | | | |
| | Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | 464 | 464 | | 464 | | 464 | | 464 | | 464 | | | |
| 1.01.02.2.01.0001 - Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) | | | | - | | 750.000.000,00 | | 450.000.000,00 | | - | | 450.000.000,00 | | |
| Sekolah Baru yang Terbangun | Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun | 0 | 0 | - | 1 | 750.000.000,00 | 1 | 450.000.000,00 | 1 | - | 1 | 450.000.000,00 | | |
| 1.01.02.2.01.0003 - Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | | 284.776.800,00 | | 1.423.884.000,00 | | 1.423.884.000,00 | | 1.423.884.000,00 | | 1.423.884.000,00 | | |
| Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terbangun | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun | 1 | 1 | 284.776.800,00 | 5 | 1.423.884.000,00 | 5 | 1.423.884.000,00 | 5 | 1.423.884.000,00 | 5 | 1.423.884.000,00 | | |
| 1.01.02.2.01.0005 - Pembangunan Perpustakaan Sekolah | | | | 208.417.000,00 | | 1.042.085.000,00 | | 1.042.085.000,00 | | 1.042.085.000,00 | | 1.042.085.000,00 | | |
| Ruang Perpustakaan Sekolah yang Terbangun | Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun | 1 | 1 | 208.417.000,00 | 5 | 1.042.085.000,00 | 5 | 1.042.085.000,00 | 5 | 1.042.085.000,00 | 5 | 1.042.085.000,00 | | |
| 1.01.02.2.01.0006 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | | 410.000.000,00 | | 745.880.000,00 | | 447.528.000,00 | | 1.312.753.200,00 | | 596.706.000,00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun | 1 | 3 | 410.000.000,00 | 5 | 745.880.000,00 | 3 | 447.528.000,00 | 11 | 1.312.753.200,00 | 5 | 596.706.000,00 | | |
| 1.01.02.2.01.0007 - Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah | | | | - | | - | | - | | 100.000.000,00 | | - | | |
| Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Terbangun | Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 | 100.000.000,00 | 0 | - | | |
| 1.01.02.2.01.0009 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | | - | | 239.298.000,00 | | 239.298.000,00 | | 239.298.000,00 | | 239.298.000,00 | | |
| Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terehabilitasi Sedang/Berat | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 1 | 0 | - | 2 | 239.298.000,00 | 2 | 239.298.000,00 | 2 | 239.298.000,00 | 2 | 239.298.000,00 | | |
| 1.01.02.2.01.0010 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah | | | | - | | 152.562.000,00 | | 152.562.000,00 | | 152.562.000,00 | | 152.562.000,00 | | |
| Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat | Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 1 | | - | 2 | 152.562.000,00 | 2 | 152.562.000,00 | 2 | 152.562.000,00 | 2 | 152.562.000,00 | | |
| 1.01.02.2.01.0011 - Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah | | | | 123.420.000,00 | | 740.520.000,00 | | 740.520.000,00 | | 740.520.000,00 | | 740.520.000,00 | | |
| Perpustakaan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat | Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 1 | 1 | 123.420.000,00 | 6 | 740.520.000,00 | 6 | 740.520.000,00 | 6 | 740.520.000,00 | 6 | 740.520.000,00 | | |
| 1.01.02.2.01.0014 - Pengadaan Mebel Sekolah | | | | 166.806.200,00 | | 687.500.000,00 | | 687.500.000,00 | | 1.375.000.000,00 | | 1.375.000.000,00 | | |
| Mebel Sekolah yang Tersedia | Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia | 31 | 6 | 166.806.200,00 | 25 | 687.500.000,00 | 25 | 687.500.000,00 | 50 | 1.375.000.000,00 | 50 | 1.375.000.000,00 | | |
| 1.01.02.2.01.0016 - Pengadaan Perlengkapan Sekolah | | | | - | | 235.000.000,00 | | 235.000.000,00 | | 235.000.000,00 | | 235.000.000,00 | | |
| Perlengkapan Sekolah yang Tersedia | Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia | 0 | 0 | - | 470 | 235.000.000,00 | 470 | 235.000.000,00 | 470 | 235.000.000,00 | 470 | 235.000.000,00 | | |
| 1.01.02.2.01.0025 - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | | | | 412.144.500,00 | | 415.000.000,00 | | 415.000.000,00 | | 415.000.000,00 | | 415.000.000,00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | 1.120 | 1.076 | 412.144.500,00 | 1.120 | 415.000.000,00 | 1.120 | 415.000.000,00 | 1.120 | 415.000.000,00 | 1.120 | 415.000.000,00 | |
| 1.01.02.2.01.0026 - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar | | | | 7.200.000,00 | | 15.000.000,00 | | 15.000.000,00 | | 15.000.000,00 | | 15.000.000,00 | |
| Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar | 615 | 150 | 7.200.000,00 | 737 | 15.000.000,00 | 283 | 15.000.000,00 | 303 | 15.000.000,00 | 325 | 15.000.000,00 | |
| 1.01.02.2.01.0027 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar | | | | 103.070.000,00 | | 253.820.000,00 | | 253.820.000,00 | | 253.820.000,00 | | 253.820.000,00 | |
| Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | 640 | 508 | 103.070.000,00 | 752 | 253.820.000,00 | 752 | 253.820.000,00 | 752 | 253.820.000,00 | 752 | 253.820.000,00 | |
| 1.01.02.2.01.0028 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | | | | 45.280.000,00 | | 48.238.000,00 | | 48.238.000,00 | | 48.238.000,00 | | 48.238.000,00 | |
| Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah | 40 | 40 | 45.280.000,00 | 466 | 48.238.000,00 | 466 | 48.238.000,00 | 466 | 48.238.000,00 | 466 | 48.238.000,00 | |
| 1.01.02.2.01.0029 - Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | | | | 45.149.050.000,00 | | 45.149.050.000,00 | | 45.149.050.000,00 | | 45.149.050.000,00 | | 45.149.050.000,00 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS | 464 | 464 | 45.149.050.000,00 | 464 | 45.149.050.000,00 | 464 | 45.149.050.000,00 | 464 | 45.149.050.000,00 | 464 | 45.149.050.000,00 | |
| 1.01.02.2.01.0030 - Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | | | | 135.447.000,00 | | 250.000.000,00 | | 150.000.000,00 | | 250.000.000,00 | | 150.000.000,00 | |
| Meningkatnya Kapasitas Tenaga Pengelola Dana BOS Sekolah Dasar | Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | 464 | 464 | 135.447.000,00 | 464 | 250.000.000,00 | 464 | 150.000.000,00 | 464 | 250.000.000,00 | 464 | 150.000.000,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.01.02.2.01.0031 - Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar | | | | - | | 1.519.250.000,00 | | 1.519.250.000,00 | | 1.519.250.000,00 | | 1.519.250.000,00 | | |
| Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Terbangun | Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun | 5 | 0 | - | 5 | 1.519.250.000,00 | 5 | 1.519.250.000,00 | 5 | 1.519.250.000,00 | 5 | 1.519.250.000,00 | | |
| 1.01.02.2.01.0032 - Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar | | | | - | | 750.000.000,00 | | 750.000.000,00 | | 750.000.000,00 | | 750.000.000,00 | | |
| Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Terehabilitasi Sedang/Berat | Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 0 | 0 | - | 5 | 750.000.000,00 | 5 | 750.000.000,00 | 5 | 750.000.000,00 | 5 | 750.000.000,00 | | |
| 1.01.02.2.01.0034 - Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Dasar | | | | - | | 25.000.000,00 | | 50.000.000,00 | | 50.000.000,00 | | 50.000.000,00 | | |
| Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi | Jumlah Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi | 0 | 0 | - | 232 | 25.000.000,00 | 464 | 50.000.000,00 | 464 | 50.000.000,00 | 464 | 50.000.000,00 | | |
| 1.01.02.2.01.0035 - Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan | | | | 8.700.000,00 | | 50.310.000,00 | | 50.310.000,00 | | 50.310.000,00 | | 100.310.000,00 | | |
| Terlaksananya Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan | 150 | 40 | 8.700.000,00 | 200 | 50.310.000,00 | 200 | 50.310.000,00 | 200 | 50.310.000,00 | 464 | 100.310.000,00 | | |
| 1.01.02.2.01.0036 - Pengembangan konten digital untuk pendidikan | | | | 20.959.800,00 | | 60.000.000,00 | | 60.000.000,00 | | 60.000.000,00 | | 60.000.000,00 | | |
| Terlaksananya konten digital untuk pendidikan yang dikembangkan | Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan | 14 | 14 | 20.959.800,00 | 42 | 60.000.000,00 | 42 | 60.000.000,00 | 42 | 60.000.000,00 | 42 | 60.000.000,00 | | |
| 1.01.02.2.01.0037 - Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan | | | | 52.420.000,00 | | 52.420.000,00 | | 52.420.000,00 | | 52.420.000,00 | | 252.420.000,00 | | |
| Terlaksananya pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan | Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan | 240 | 80 | 52.420.000,00 | 80 | 52.420.000,00 | 80 | 52.420.000,00 | 80 | 52.420.000,00 | 464 | 252.420.000,00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.01.02.2.01.0038 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | | | | 12.300.000,00 | | 500.000.000,00 | | 12.300.000,00 | | 12.300.000,00 | | 500.000.000,00 | | |
| Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | 1 | 1 | 12.300.000,00 | 1 | 500.000.000,00 | 1 | 12.300.000,00 | 1 | 12.300.000,00 | 1 | 500.000.000,00 | | |
| 1.01.02.2.01.0039 - Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan | | | | 13.965.000,00 | | 14.932.000,00 | | 14.932.000,00 | | 14.932.000,00 | | 14.932.000,00 | | |
| Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan | Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan | 1 | 1 | 13.965.000,00 | 1 | 14.932.000,00 | 1 | 14.932.000,00 | 1 | 14.932.000,00 | 1 | 14.932.000,00 | | |
| 1.01.02.2.01.0041 - Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | | | | 7.725.000,00 | | 16.950.000,00 | | 16.950.000,00 | | 16.950.000,00 | | 187.725.000,00 | | |
| Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi | Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi | 1 | 1 | 7.725.000,00 | 3 | 16.950.000,00 | 3 | 16.950.000,00 | 3 | 16.950.000,00 | 1 | 187.725.000,00 | | |
| 1.01.02.2.01.0042 - Penyediaan infrastruktur TIK | | | | - | | 375.000.000,00 | | 375.000.000,00 | | 2.250.000.000,00 | | 2.250.000.000,00 | | |
| Tersedianya infrastruktur TIK | Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia | 0 | 0 | - | 25 | 375.000.000,00 | 25 | 375.000.000,00 | 150 | 2.250.000.000,00 | 150 | 2.250.000.000,00 | | |
| 1.01.02.2.01.0043 - Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | | | | 17.265.000,00 | | 35.250.000,00 | | 35.250.000,00 | | 35.250.000,00 | | 35.250.000,00 | | |
| Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | 1 | 1 | 17.265.000,00 | 1 | 35.250.000,00 | 1 | 35.250.000,00 | 1 | 35.250.000,00 | 1 | 35.250.000,00 | | |
| 1.01.02.2.01.0045 - Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik | | | | - | | 279.000.000,00 | | - | | 558.000.000,00 | | 558.000.000,00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks | Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik | 0 | 0 | - | 11.160 | 279.000.000,00 | 0 | - | 22.320 | 558.000.000,00 | 22.320 | 558.000.000,00 | | |
| 1.01.02.2.01.0046 - Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik | | | | 193.500.000,00 | | 1.250.000.000,00 | | 1.750.000.000,00 | | 2.250.000.000,00 | | 2.750.000.000,00 | | |
| Tersedianya Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik | Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia | 1 | 515 | 193.500.000,00 | 2.500 | 1.250.000.000,00 | 3.500 | 1.750.000.000,00 | 4.500 | 2.250.000.000,00 | 5.500 | 2.750.000.000,00 | | |
| 1.01.02.2.01.0047 - Pembangunan Ruang Kelas Baru | | | | 958.067.000,00 | | 1.226.115.000,00 | | 735.669.000,00 | | 2.452.230.000,00 | | 1.226.115.000,00 | | |
| Ruang Kelas Baru bertambah | Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah | 3 | 4 | 958.067.000,00 | 5 | 1.226.115.000,00 | 3 | 735.669.000,00 | 10 | 2.452.230.000,00 | 5 | 1.226.115.000,00 | | |
| 1.01.02.2.01.0048 - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | | 318.400.000,00 | | 425.000.000,00 | | 425.000.000,00 | | 425.000.000,00 | | 425.000.000,00 | | |
| Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 7 | 4 | 318.400.000,00 | 5 | 425.000.000,00 | 5 | 425.000.000,00 | 5 | 425.000.000,00 | 5 | 425.000.000,00 | | |
| 1.01.02.2.01.0049 - Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan | | | | 18.465.000,00 | | 36.930.000,00 | | 36.930.000,00 | | 36.930.000,00 | | 73.860.000,00 | | |
| Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan | Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan | 464 | 70 | 18.465.000,00 | 140 | 36.930.000,00 | 140 | 36.930.000,00 | 140 | 36.930.000,00 | 280 | 73.860.000,00 | | |
| 1.01.02.2.01.0050 - Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik | | | | 215.572.500,00 | | 216.000.000,00 | | 216.000.000,00 | | 216.000.000,00 | | 216.000.000,00 | | |
| Terselenggaranya Proses Belajar Bagi Peserta Didik | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar | 466 | 464 | 215.572.500,00 | 464 | 216.000.000,00 | 464 | 216.000.000,00 | 464 | 216.000.000,00 | 464 | 216.000.000,00 | | |
| 1.01.02.2.01.0051 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | | | | 435.022.000,00 | | 2.420.000.000,00 | | 1.961.664.000,00 | | 3.048.698.800,00 | | 3.008.897.000,00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruang Kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 25 | 4 | 435.022.000,00 | 22 | 2.420.000.000,00 | 12 | 1.961.664.000,00 | 27 | 3.048.698.800,00 | 22 | 3.008.897.000,00 | |
| 1.01.02.2.01.0053 - Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus | | | | - | | 500.000.000,00 | | 500.000.000,00 | | 500.000.000,00 | | 500.000.000,00 | |
| Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Terbangun | Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Dibangun | 0 | 0 | - | 2 | 500.000.000,00 | 2 | 500.000.000,00 | 2 | 500.000.000,00 | 2 | 500.000.000,00 | |
| 1.01.02.2.01.0054 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar | | | | 800.000.000,00 | | 1.250.000.000,00 | | 1.750.000.000,00 | | 2.250.000.000,00 | | 2.750.000.000,00 | |
| Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar Diterima oleh Peserta Didik | Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik | 378 | 1.600 | 800.000.000,00 | 2.500 | 1.250.000.000,00 | 3.500 | 1.750.000.000,00 | 4.500 | 2.250.000.000,00 | 5.500 | 2.750.000.000,00 | |
| 1.01.02.2.01.0055 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik | | | | - | | 1.387.700.000,00 | | 1.387.700.000,00 | | 2.081.550.000,00 | | 971.390.000,00 | |
| Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia | 3 | 0 | - | 10 | 1.387.700.000,00 | 10 | 1.387.700.000,00 | 15 | 2.081.550.000,00 | 7 | 971.390.000,00 | |
| Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah jenjang SMP | Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13 - 15 SMP | 99.14 | 99.54 | 35.840.372.650,00 | 100 | 43.820.480.000,00 | 100 | 56.141.469.000,00 | 100 | 61.378.771.000,00 | 100 | 62.231.007.000,00 | |
| | Iklim Inklusivitas SMP | 58.56 | 63.36 | | 65.76 | | 68.16 | | 70.56 | | 72.96 | | |
| | Iklim Keamanan SMP | 72.65 | 75.65 | | 77.15 | | 78.65 | | 80.15 | | 81.65 | | |
| | Iklim Kebinekaan SMP | 72.30 | 74.30 | | 75.30 | | 76.30 | | 77.30 | | 78.30 | | |
| | Skor Kemampuan Literasi SMP | 79.48 | 81.68 | | 82.78 | | 83.88 | | 84.98 | | 86.08 | | |
| | Skor Kemampuan Numerasi SMP | 67.91 | 70.91 | | 72.41 | | 73.91 | | 75.41 | | 76.91 | | |
| 1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | | | | 35.840.372.650,00 | | 43.820.480.000,00 | | 56.141.469.000,00 | | 61.378.771.000,00 | | 62.231.007.000,00 | |
| Terpenuhinya kebutuhan pendidikan penduduk usia sekolah menengah pertama | Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama | 110 | 218 | 35.840.372.650,00 | 218 | 43.820.480.000,00 | 218 | 56.141.469.000,00 | 218 | 61.378.771.000,00 | 218 | 62.231.007.000,00 | |
| | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia | 13 | 0 | | 10 | | 10 | | 30 | | 50 | | |
| | Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 23.833 | | 23.833 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | |
| Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | 0 | 1 | | 2 | | 2 | | 2 | | |
| Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan | 1 | 1 | | 2 | | 2 | | 2 | | |
| Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi | 2 | 4 | | 4 | | 4 | | 18 | | |
| Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan | 70 | 66 | | 109 | | 109 | | 330 | | |
| Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 14 | 4 | | 4 | | 14 | | 14 | | |
| Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia | 31 | 0 | | 5 | | 31 | | 31 | | |
| Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan | 110 | 66 | | 109 | | 109 | | 330 | | |
| Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia | 0 | 0 | | 25 | | 25 | | 30 | 50 | |
| Jumlah Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi | 0 | 0 | | 109 | | 109 | | 109 | 109 | |
| Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | 433 | 361 | | 361 | | 361 | | 361 | 722 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | 50 | 150 | | 300 | | 300 | | 300 | | 300 | |
| | Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia | 1 | 317 | | 500 | | 1.200 | | 1.700 | | 2.000 | |
| | Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun | 0 | 0 | | 1 | | 5 | | 5 | | 5 | |
| | Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 11 | 2 | | 4 | | 11 | | 11 | | 11 | |
| | Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan | 110 | 49 | | 109 | | 109 | | 109 | | 409 | |
| | Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik | 276 | 1.990 | | 3.000 | | 5.500 | | 6.500 | | 7500 | |
| | Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar | 110 | 108 | | 109 | | 109 | | 109 | | 109 | |
| | Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan | 110 | 66 | | 109 | | 109 | | 109 | | 330 | |
| | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun | 0 | 0 | | 2 | | 6 | | 6 | | 6 | |
| | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 9 | 7 | | 7 | | 9 | | 9 | | 9 | |
| | Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah | 2 | 0 | | 1 | | 6 | | 10 | | 6 | |
| | Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 51 | 9 | | 12 | | 12 | | 15 | | 12 | |
| | Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun | 3 | 0 | | 2 | | 4 | | 4 | | 4 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Dibangun | 0 | 0 | | 0 | | 1 | | 6 | | 6 | | |
| | Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat | 0 | 0 | | 0 | | 2 | | 2 | | 2 | | |
| | Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun | 2 | 0 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | |
| | Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 5 | 0 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | |
| | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun | 1 | 2 | | 3 | | 3 | | 10 | | 3 | | |
| | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 11 | 3 | | 11 | | 11 | | 15 | | 11 | | |
| | Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun | 0 | 0 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | |
| | Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan | 110 | 109 | | 109 | | 109 | | 109 | | 109 | | |
| | Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS | 110 | 109 | | 109 | | 109 | | 109 | | 109 | | |
| | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | 642 | 4.857 | | 4.857 | | 4.857 | | 4.857 | | 4.857 | | |
| 1.01.02.2.02.0001 - Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) | | | | - | | 2.500.000.000,00 | | 2.000.000.000,00 | | 1.500.000.000,00 | | 1.000.000.000,00 | |
| Sekolah Baru yang Terbangun | Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun | 0 | 0 | - | 1 | 2.500.000.000,00 | 1 | 2.000.000.000,00 | 1 | 1.500.000.000,00 | 1 | 1.000.000.000,00 | |
| 1.01.02.2.02.0003 - Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | | - | | 600.000.000,00 | | 1.800.000.000,00 | | 1.800.000.000,00 | | 1.800.000.000,00 | |
| Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terbangun | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun | 0 | 0 | - | 2 | 600.000.000,00 | 6 | 1.800.000.000,00 | 6 | 1.800.000.000,00 | 6 | 1.800.000.000,00 | |
| 1.01.02.2.02.0004 - Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah | | | | - | | 180.000.000,00 | | 180.000.000,00 | | 180.000.000,00 | | 180.000.000,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terbangun | Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun | 2 | 0 | - | 1 | 180.000.000,00 | 1 | 180.000.000,00 | 1 | 180.000.000,00 | 1 | 180.000.000,00 | | |
| 1.01.02.2.02.0005 - Pembangunan Perpustakaan Sekolah | | | | - | | 416.400.000,00 | | 2.082.000.000,00 | | 2.082.000.000,00 | | 2.082.000.000,00 | | |
| Perpustakaan Sekolah yang Terbangun | Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun | 0 | 0 | - | 1 | 416.400.000,00 | 5 | 2.082.000.000,00 | 5 | 2.082.000.000,00 | 5 | 2.082.000.000,00 | | |
| 1.01.02.2.02.0006 - Pembangunan Laboratorium | | | | - | | 562.000.000,00 | | 1.124.000.000,00 | | 1.124.000.000,00 | | 1.124.000.000,00 | | |
| Ruang Laboratorium yang Terbangun | Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun | 3 | 0 | - | 2 | 562.000.000,00 | 4 | 1.124.000.000,00 | 4 | 1.124.000.000,00 | 4 | 1.124.000.000,00 | | |
| 1.01.02.2.02.0012 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | | 1.062.498.500,00 | | 311.130.000,00 | | 311.130.000,00 | | 1.037.100.000,00 | | 311.130.000,00 | | |
| Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun | 1 | 2 | 1.062.498.500,00 | 3 | 311.130.000,00 | 3 | 311.130.000,00 | 10 | 1.037.100.000,00 | 3 | 311.130.000,00 | | |
| 1.01.02.2.02.0014 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | | | | 1.088.381.000,00 | | 1.476.000.000,00 | | 1.476.000.000,00 | | 1.845.000.000,00 | | 1.476.000.000,00 | | |
| Ruang kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat | Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 51 | 9 | 1.088.381.000,00 | 12 | 1.476.000.000,00 | 12 | 1.476.000.000,00 | 15 | 1.845.000.000,00 | 12 | 1.476.000.000,00 | | |
| 1.01.02.2.02.0016 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah | | | | - | | 325.000.000,00 | | 325.000.000,00 | | 325.000.000,00 | | 325.000.000,00 | | |
| Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat | Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 5 | 0 | - | 5 | 325.000.000,00 | 5 | 325.000.000,00 | 5 | 325.000.000,00 | 5 | 325.000.000,00 | | |
| 1.01.02.2.02.0017 - Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah | | | | 352.049.000,00 | | 360.000.000,00 | | 990.000.000,00 | | 990.000.000,00 | | 990.000.000,00 | | |
| Perpustakaan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat | Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 11 | 2 | 352.049.000,00 | 4 | 360.000.000,00 | 11 | 990.000.000,00 | 11 | 990.000.000,00 | 11 | 990.000.000,00 | | |
| 1.01.02.2.02.0018 - Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium | | | | 870.905.350,00 | | 772.000.000,00 | | 2.702.000.000,00 | | 2.702.000.000,00 | | 2.702.000.000,00 | | |
| Laboratorium yang Terehabilitasi Sedang/Berat | Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 14 | 4 | 870.905.350,00 | 4 | 772.000.000,00 | 14 | 2.702.000.000,00 | 14 | 2.702.000.000,00 | 14 | 2.702.000.000,00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.01.02.2.02.0019 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula | | | | - | | - | | 550.000.000,00 | | 550.000.000,00 | | 550.000.000,00 | | |
| Ruang Serba Guna/Aula yang Terehabilitasi Sedang/Berat | Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat | 0 | 0 | - | 0 | - | 2 | 550.000.000,00 | 2 | 550.000.000,00 | 2 | 550.000.000,00 | | |
| 1.01.02.2.02.0024 - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | | 240.100.000,00 | | 902.000.000,00 | | 902.000.000,00 | | 1.230.000.000,00 | | 902.000.000,00 | | |
| Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 11 | 3 | 240.100.000,00 | 11 | 902.000.000,00 | 11 | 902.000.000,00 | 15 | 1.230.000.000,00 | 11 | 902.000.000,00 | | |
| 1.01.02.2.02.0025 - Pengadaan Mebel Sekolah | | | | - | | 428.500.000,00 | | 2.656.700.000,00 | | 2.656.700.000,00 | | 2.656.700.000,00 | | |
| Mebel Sekolah yang Tersedia | Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia | 31 | 0 | - | 5 | 428.500.000,00 | 31 | 2.656.700.000,00 | 31 | 2.656.700.000,00 | 31 | 2.656.700.000,00 | | |
| 1.01.02.2.02.0032 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama | | | | 1.000.225.000,00 | | 1.500.000.000,00 | | 2.750.000.000,00 | | 3.250.000.000,00 | | 3.750.000.000,00 | | |
| Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Diterima oleh Peserta Didik | Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik | 276 | 1.990 | 1.000.225.000,00 | 3.000 | 1.500.000.000,00 | 5.500 | 2.750.000.000,00 | 6.500 | 3.250.000.000,00 | 7500 | 3.750.000.000,00 | | |
| 1.01.02.2.02.0038 - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | | | | 501.270.500,00 | | 500.000.000,00 | | 500.000.000,00 | | 500.000.000,00 | | 500.000.000,00 | | |
| Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | 642 | 4.857 | 501.270.500,00 | 4.857 | 500.000.000,00 | 4.857 | 500.000.000,00 | 4.857 | 500.000.000,00 | 4.857 | 500.000.000,00 | | |
| 1.01.02.2.02.0039 - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | | | | 7.200.000,00 | | 14.400.000,00 | | 14.400.000,00 | | 14.400.000,00 | | 14.400.000,00 | | |
| Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | 50 | 150 | 7.200.000,00 | 300 | 14.400.000,00 | 300 | 14.400.000,00 | 300 | 14.400.000,00 | 300 | 14.400.000,00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.01.02.2.02.0040 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | | | | 113.474.000,00 | | 180.474.000,00 | | 180.474.000,00 | | 180.474.000,00 | | 361.000.000,00 | | |
| Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | 433 | 361 | 113.474.000,00 | 361 | 180.474.000,00 | 361 | 180.474.000,00 | 361 | 180.474.000,00 | 722 | 361.000.000,00 | |
| 1.01.02.2.02.0041 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | | | | 64.556.600,00 | | 76.000.000,00 | | 75.500.000,00 | | 76.000.000,00 | | 76.000.000,00 | |
| Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan | 110 | 109 | 64.556.600,00 | 109 | 76.000.000,00 | 109 | 75.500.000,00 | 109 | 76.000.000,00 | 109 | 76.000.000,00 | |
| 1.01.02.2.02.0042 - Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama | | | | 28.674.320.000,00 | | 28.674.320.000,00 | | 28.674.320.000,00 | | 28.674.320.000,00 | | 28.674.320.000,00 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama | Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS | 110 | 109 | 28.674.320.000,00 | 109 | 28.674.320.000,00 | 109 | 28.674.320.000,00 | 109 | 28.674.320.000,00 | 109 | 28.674.320.000,00 | |
| 1.01.02.2.02.0043 - Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama | | | | 83.837.000,00 | | 221.000.000,00 | | 121.000.000,00 | | 221.000.000,00 | | 121.000.000,00 | |
| Dana BOS Sekolah Menengah Pertama yang Terkelola dengan Baik | Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama | 110 | 218 | 83.837.000,00 | 218 | 221.000.000,00 | 218 | 121.000.000,00 | 218 | 221.000.000,00 | 218 | 121.000.000,00 | |
| 1.01.02.2.02.0047 - Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Menengah Pertama | | | | - | | 25.000.000,00 | | 25.000.000,00 | | 25.000.000,00 | | 25.000.000,00 | |
| Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi | Jumlah Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi | 0 | 0 | - | 109 | 25.000.000,00 | 109 | 25.000.000,00 | 109 | 25.000.000,00 | 109 | 25.000.000,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.01.02.2.02.0048 - Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan | | | | 14.100.000,00 | | 18.000.000,00 | | 18.000.000,00 | | 18.000.000,00 | | 70.500.000,00 | | |
| Terlaksananya Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan | 110 | 66 | 14.100.000,00 | 109 | 18.000.000,00 | 109 | 18.000.000,00 | 109 | 18.000.000,00 | 330 | 70.500.000,00 | | |
| 1.01.02.2.02.0049 - Pengembangan konten digital untuk pendidikan | | | | 13.500.000,00 | | 30.000.000,00 | | 30.000.000,00 | | 30.000.000,00 | | 67.500.000,00 | | |
| Terlaksananya konten digital untuk pendidikan yang dikembangkan | Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan | 70 | 66 | 13.500.000,00 | 109 | 30.000.000,00 | 109 | 30.000.000,00 | 109 | 30.000.000,00 | 330 | 67.500.000,00 | | |
| 1.01.02.2.02.0050 - Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan | | | | 14.649.900,00 | | 20.000.000,00 | | 20.000.000,00 | | 20.000.000,00 | | 67.500.000,00 | | |
| Terlaksananya pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan | Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan | 110 | 66 | 14.649.900,00 | 109 | 20.000.000,00 | 109 | 20.000.000,00 | 109 | 20.000.000,00 | 330 | 67.500.000,00 | | |
| 1.01.02.2.02.0051 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | | | | 4.500.000,00 | | 4.500.000,00 | | 496.493.000,00 | | 4.500.000,00 | | 500.000.000,00 | | |
| Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | 1 | 1 | 4.500.000,00 | 1 | 4.500.000,00 | 1 | 496.493.000,00 | 1 | 4.500.000,00 | 1 | 500.000.000,00 | | |
| 1.01.02.2.02.0052 - Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan | | | | 18.299.800,00 | | 25.000.000,00 | | 25.000.000,00 | | 25.000.000,00 | | 25.000.000,00 | | |
| Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan | Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan | 1 | 1 | 18.299.800,00 | 2 | 25.000.000,00 | 2 | 25.000.000,00 | 2 | 25.000.000,00 | 2 | 25.000.000,00 | | |
| 1.01.02.2.02.0054 - Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | | | | 7.368.500,00 | | 13.000.000,00 | | 13.000.000,00 | | 13.000.000,00 | | 180.000.000,00 | | |
| Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi | Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi | 2 | 4 | 7.368.500,00 | 4 | 13.000.000,00 | 4 | 13.000.000,00 | 4 | 13.000.000,00 | 18 | 180.000.000,00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.01.02.2.02.0055 - Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | | | | 15.000.000,00 | | 25.000.000,00 | | 25.000.000,00 | | 25.000.000,00 | | 25.000.000,00 | | |
| Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | 0 | 1 | 15.000.000,00 | 2 | 25.000.000,00 | 2 | 25.000.000,00 | 2 | 25.000.000,00 | 2 | 25.000.000,00 | | |
| 1.01.02.2.02.0058 - Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik | | | | 347.754.800,00 | | 350.000.000,00 | | 350.000.000,00 | | 350.000.000,00 | | 350.000.000,00 | | |
| Terselenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik | Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar | 110 | 108 | 347.754.800,00 | 109 | 350.000.000,00 | 109 | 350.000.000,00 | 109 | 350.000.000,00 | 109 | 350.000.000,00 | | |
| 1.01.02.2.02.0059 - Pembangunan Ruang Kelas Baru | | | | - | | 210.000.000,00 | | 1.260.000.000,00 | | 2.100.000.000,00 | | 1.260.000.000,00 | | |
| Ruang Kelas Baru Bertambah | Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah | 2 | 0 | - | 1 | 210.000.000,00 | 6 | 1.260.000.000,00 | 10 | 2.100.000.000,00 | 6 | 1.260.000.000,00 | | |
| 1.01.02.2.02.0060 - Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan | | | | 12.000.000,00 | | 30.320.000,00 | | 30.320.000,00 | | 30.320.000,00 | | 120.000.000,00 | | |
| Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan | Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan | 110 | 49 | 12.000.000,00 | 109 | 30.320.000,00 | 109 | 30.320.000,00 | 109 | 30.320.000,00 | 409 | 120.000.000,00 | | |
| 1.01.02.2.02.0061 - Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik | | | | - | | - | | - | | 595.825.000,00 | | 595.825.000,00 | | |
| Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks | Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 23.833 | 595.825.000,00 | 23.833 | 595.825.000,00 | | |
| 1.01.02.2.02.0062 - Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik | | | | 190.000.000,00 | | 625.000.000,00 | | 1.500.000.000,00 | | 2.125.000.000,00 | | 2.500.000.000,00 | | |
| Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia | Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia | 1 | 317 | 190.000.000,00 | 500 | 625.000.000,00 | 1.200 | 1.500.000.000,00 | 1.700 | 2.125.000.000,00 | 2.000 | 2.500.000.000,00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.01.02.2.02.0064 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | | 1.144.382.700,00 | | 1.185.436.000,00 | | 1.524.132.000,00 | | 1.524.132.000,00 | | 1.524.132.000,00 | | |
| Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terehabilitasi Sedang/Berat | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 9 | 7 | 1.144.382.700,00 | 7 | 1.185.436.000,00 | 9 | 1.524.132.000,00 | 9 | 1.524.132.000,00 | 9 | 1.524.132.000,00 | | |
| 1.01.02.2.02.0065 - Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus | | | | - | | - | | 150.000.000,00 | | 900.000.000,00 | | 900.000.000,00 | | |
| Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Terbangun | Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Dibangun | 0 | 0 | - | 0 | - | 1 | 150.000.000,00 | 6 | 900.000.000,00 | 6 | 900.000.000,00 | | |
| 1.01.02.2.02.0067 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik | | | | - | | 635.000.000,00 | | 635.000.000,00 | | 1.905.000.000,00 | | 3.175.000.000,00 | | |
| Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia | 13 | 0 | - | 10 | 635.000.000,00 | 10 | 635.000.000,00 | 30 | 1.905.000.000,00 | 50 | 3.175.000.000,00 | | |
| 1.01.02.2.02.0068 - Penyediaan infrastruktur TIK | | | | - | | 625.000.000,00 | | 625.000.000,00 | | 750.000.000,00 | | 1.250.000.000,00 | | |
| Tersedianya infrastruktur TIK | Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia | 0 | 0 | - | 25 | 625.000.000,00 | 25 | 625.000.000,00 | 30 | 750.000.000,00 | 50 | 1.250.000.000,00 | | |
| Peningkatan penguasaan keterampilan vokasional | Persentase Ketercapaian Kompetensi | 90.89 | 93.97 | 266.100.500,00 | 95.51 | 296.231.900,00 | 97.05 | 308.657.900,00 | 98.59 | 325.304.500,00 | 100 | 326.825.000,00 | 1.01.2.19.0.00.01.0001 - Sanggar Kegiatan Belajar | |
| | Perkembangan Soft Skill | 80.00 | 86.31 | | 89.31 | | 93.32 | | 98.66 | | 100 | | | |
| 1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | | | | 27.300.000,00 | | 56.231.900,00 | | 68.657.900,00 | | 85.304.500,00 | | 86.825.000,00 | | |
| Terpenuhinya kebutuhan pendidikan penduduk usia Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar | 34 | 34 | 27.300.000,00 | 34 | 56.231.900,00 | 34 | 68.657.900,00 | 34 | 85.304.500,00 | 34 | 86.825.000,00 | | |
| 1.01.02.2.03.0047 - Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD | | | | 27.300.000,00 | | 56.231.900,00 | | 68.657.900,00 | | 85.304.500,00 | | 86.825.000,00 | | |
| Terselenggaranya Proses Belajar PAUD | Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar | 34 | 34 | 27.300.000,00 | 34 | 56.231.900,00 | 34 | 68.657.900,00 | 34 | 85.304.500,00 | 34 | 86.825.000,00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | | | | 238.800.500,00 | | 240.000.000,00 | | 240.000.000,00 | | 240.000.000,00 | | 240.000.000,00 | | |
| Terpenuhinya kebutuhan pendidikan penduduk usia Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar | 1 | 1 | 238.800.500,00 | 1 | 240.000.000,00 | 1 | 240.000.000,00 | 1 | 240.000.000,00 | 1 | 240.000.000,00 | | |
| 1.01.02.2.04.0046 - Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik | | | | 238.800.500,00 | | 240.000.000,00 | | 240.000.000,00 | | 240.000.000,00 | | 240.000.000,00 | | |
| Terselenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar | 1 | 1 | 238.800.500,00 | 1 | 240.000.000,00 | 1 | 240.000.000,00 | 1 | 240.000.000,00 | 1 | 240.000.000,00 | | |
| 1.01.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM | | | | 65.065.000,00 | | 919.393.500,00 | | 919.393.500,00 | | 1.559.393.500,00 | | 919.393.500,00 | | |
| Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan | Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal | 100 | 100 | 65.065.000,00 | 100 | 919.393.500,00 | 100 | 919.393.500,00 | 100 | 1.559.393.500,00 | 100 | 919.393.500,00 | 1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan | |
| 1.01.03.2.01 - Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar | | | | 57.630.000,00 | | 192.800.000,00 | | 192.800.000,00 | | 692.800.000,00 | | 192.800.000,00 | | |
| Kualitas kurikulum muatan lokal Pendidikan Dasar meningkat | Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun | 0 | 1 | 57.630.000,00 | 2 | 192.800.000,00 | 2 | 192.800.000,00 | 2 | 692.800.000,00 | 2 | 192.800.000,00 | | |
| | Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya | 0 | 70 | | 200 | | 200 | | 560 | | 200 | | | |
| | Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar yang tersusun | 0 | 2 | | 1 | | 1 | | 5 | | 1 | | | |
| | Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun | 0 | 1 | | 1 | | 1 | | 5 | | 1 | | | |
| | Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia | 0 | 0 | | 464 | | 464 | | 900 | | 464 | | | |
| 1.01.03.2.01.0002 - Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar | | | | 14.400.000,00 | | 25.000.000,00 | | 25.000.000,00 | | 125.000.000,00 | | 25.000.000,00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar Tersusun | Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun | 0 | 1 | 14.400.000,00 | 2 | 25.000.000,00 | 2 | 25.000.000,00 | 2 | 125.000.000,00 | 2 | 25.000.000,00 | | |
| 1.01.03.2.01.0003 - Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar | | | | - | | 92.800.000,00 | | 92.800.000,00 | | 192.800.000,00 | | 92.800.000,00 | | |
| Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar Tersedia | Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia | 0 | 0 | - | 464 | 92.800.000,00 | 464 | 92.800.000,00 | 900 | 192.800.000,00 | 464 | 92.800.000,00 | | |
| 1.01.03.2.01.0004 - Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar | | | | 14.130.000,00 | | 25.000.000,00 | | 25.000.000,00 | | 125.000.000,00 | | 25.000.000,00 | | |
| Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar Meningkat Kompetensinya | Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya | 0 | 70 | 14.130.000,00 | 200 | 25.000.000,00 | 200 | 25.000.000,00 | 560 | 125.000.000,00 | 200 | 25.000.000,00 | | |
| 1.01.03.2.01.0006 - Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar | | | | 14.130.000,00 | | 25.000.000,00 | | 25.000.000,00 | | 125.000.000,00 | | 25.000.000,00 | | |
| Tersusunnya model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar | Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar yang tersusun | 0 | 2 | 14.130.000,00 | 1 | 25.000.000,00 | 1 | 25.000.000,00 | 5 | 125.000.000,00 | 1 | 25.000.000,00 | | |
| 1.01.03.2.01.0007 - Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar | | | | 14.970.000,00 | | 25.000.000,00 | | 25.000.000,00 | | 125.000.000,00 | | 25.000.000,00 | | |
| Tersusunnya Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar | Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun | 0 | 1 | 14.970.000,00 | 1 | 25.000.000,00 | 1 | 25.000.000,00 | 5 | 125.000.000,00 | 1 | 25.000.000,00 | | |
| 1.01.03.2.02 - Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal | | | | 7.435.000,00 | | 726.593.500,00 | | 726.593.500,00 | | 866.593.500,00 | | 726.593.500,00 | | |
| Kualitas kurikulum muatan lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal meningkat | Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang tersusun | 1 | 1 | 7.435.000,00 | 1 | 726.593.500,00 | 1 | 726.593.500,00 | 1 | 866.593.500,00 | 1 | 726.593.500,00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun | 0 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | |
| | Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersedia | 0 | 0 | | 27.500 | | 27.500 | | 27.500 | | 27.500 | | |
| 1.01.03.2.02.0002 - Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal | | | | 3.930.000,00 | | 10.000.000,00 | | 10.000.000,00 | | 50.000.000,00 | | 10.000.000,00 | |
| Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Tersusun | Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun | 0 | 1 | 3.930.000,00 | 1 | 10.000.000,00 | 1 | 10.000.000,00 | 1 | 50.000.000,00 | 1 | 10.000.000,00 | |
| 1.01.03.2.02.0003 - Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal | | | | - | | 687.500.000,00 | | 687.500.000,00 | | 687.500.000,00 | | 687.500.000,00 | |
| Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Tersedia | Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersedia | 0 | 0 | - | 27.500 | 687.500.000,00 | 27.500 | 687.500.000,00 | 27.500 | 687.500.000,00 | 27.500 | 687.500.000,00 | |
| 1.01.03.2.02.0005 - Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal | | | | 3.505.000,00 | | 29.093.500,00 | | 29.093.500,00 | | 129.093.500,00 | | 29.093.500,00 | |
| Tersusunnya model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal | Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang tersusun | 1 | 1 | 3.505.000,00 | 1 | 29.093.500,00 | 1 | 29.093.500,00 | 1 | 129.093.500,00 | 1 | 29.093.500,00 | |
| 1.01.04 - PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | | | | 4.269.591.400,00 | | 6.342.227.400,00 | | 4.981.858.800,00 | | 4.651.858.800,00 | | 5.443.858.800,00 | |
| Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan | Indeks Pemerataan Guru | 26.90 | 27.80 | 4.269.591.400,00 | 28.22 | 6.342.227.400,00 | 28.63 | 4.981.858.800,00 | 29.05 | 4.651.858.800,00 | 29.46 | 5.443.858.800,00 | 1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.01.04.2.01 - Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | | | | 4.269.591.400,00 | | 6.342.227.400,00 | | 4.981.858.800,00 | | 4.651.858.800,00 | | 5.443.858.800,00 | | |
| Mutu dan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan merata | Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | 2 | 4 | 4.269.591.400,00 | 4 | 6.342.227.400,00 | 4 | 4.981.858.800,00 | 4 | 4.651.858.800,00 | 4 | 5.443.858.800,00 | | |
| | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | 4 | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | | |
| 1.01.04.2.01.0001 - Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | | | | 277.631.400,00 | | 1.888.368.600,00 | | 528.000.000,00 | | 198.000.000,00 | | 990.000.000,00 | | |
| Tersedianya Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | 2 | 4 | 277.631.400,00 | 4 | 1.888.368.600,00 | 4 | 528.000.000,00 | 4 | 198.000.000,00 | 4 | 990.000.000,00 | | |
| 1.01.04.2.01.0002 - Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | | | | 3.991.960.000,00 | | 4.453.858.800,00 | | 4.453.858.800,00 | | 4.453.858.800,00 | | 4.453.858.800,00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terlaksananya Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | 4 | 4 | 3.991.960.000,00 | 4 | 4.453.858.800,00 | 4 | 4.453.858.800,00 | 4 | 4.453.858.800,00 | 4 | 4.453.858.800,00 | | |
| 1.01.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN | | | | 3.332.500,00 | | 10.000.000,00 | | 10.000.000,00 | | 10.000.000,00 | | 10.000.000,00 | | |
| Meningkatnya kualitas dan distribusi institusi pendidikan | Persentase usulan izin satuan pendidikan yang diterbitkan/diperbaharui | 100 | 100 | 3.332.500,00 | 100 | 10.000.000,00 | 100 | 10.000.000,00 | 100 | 10.000.000,00 | 100 | 10.000.000,00 | 1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan | |
| 1.01.05.2.01 - Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | | | | - | | 5.000.000,00 | | 5.000.000,00 | | 5.000.000,00 | | 5.000.000,00 | | |
| Kualitas dan distribusi institusi Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh Masyarakat meningkat | Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | 0 | 0 | - | 1 | 5.000.000,00 | 1 | 5.000.000,00 | 1 | 5.000.000,00 | 1 | 5.000.000,00 | | |
| 1.01.05.2.01.0002 - Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | | | | - | | 5.000.000,00 | | 5.000.000,00 | | 5.000.000,00 | | 5.000.000,00 | | |
| Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | 0 | 0 | - | 1 | 5.000.000,00 | 1 | 5.000.000,00 | 1 | 5.000.000,00 | 1 | 5.000.000,00 | | |
| 1.01.05.2.02 - Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | | | | 3.332.500,00 | | 5.000.000,00 | | 5.000.000,00 | | 5.000.000,00 | | 5.000.000,00 | | |
| Kualitas dan distribusi institusi PAUD dan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan oleh Masyarakat meningkat | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | 1 | 1 | 3.332.500,00 | 1 | 5.000.000,00 | 1 | 5.000.000,00 | 1 | 5.000.000,00 | 1 | 5.000.000,00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.01.05.2.02.0002 - Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | | | | 3.332.500,00 | | 5.000.000,00 | | 5.000.000,00 | | 5.000.000,00 | | 5.000.000,00 | | |
| Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | 1 | 1 | 3.332.500,00 | 1 | 5.000.000,00 | 1 | 5.000.000,00 | 1 | 5.000.000,00 | 1 | 5.000.000,00 | | |
| 1.01.06 - PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA | | | | - | | 250.000.000,00 | | 250.000.000,00 | | 550.000.000,00 | | 250.000.000,00 | | |
| Terlestarikannya bahasa dan sastra daerah | Persentase pengembangan Bahasa dan Sastra Daerah | - | - | - | 1 | 250.000.000,00 | 1,5 | 250.000.000,00 | 2 | 550.000.000,00 | 2,5 | 250.000.000,00 | 1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan | |
| 1.01.06.2.01 - Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | - | | 250.000.000,00 | | 250.000.000,00 | | 550.000.000,00 | | 250.000.000,00 | | |
| Bahasa dan Sastra yang penuturannya dalam Daerah Kabupaten Gunungkidul terlestarikan | Jumlah buku berbahasa daerah yang disusun, diterbitkan, dan didistribusikan | 0 | 0 | - | 18 | 250.000.000,00 | 18 | 250.000.000,00 | 36 | 550.000.000,00 | 18 | 250.000.000,00 | | |
| 1.01.06.2.01.0008 - Penyusunan, Penerbitan, dan Pendistribusian buku-buku berbahasa daerah | | | | - | | 250.000.000,00 | | 250.000.000,00 | | 550.000.000,00 | | 250.000.000,00 | | |
| Terlaksananya Penyusunan, Penerbitan, dan Pendistribusian buku-buku berbahasa daerah | Jumlah buku berbahasa daerah yang disusun, diterbitkan, dan didistribusikan | 0 | 0 | - | 18 | 250.000.000,00 | 18 | 250.000.000,00 | 36 | 550.000.000,00 | 18 | 250.000.000,00 | | |
| 2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN | | | | 100.000.000,00 | | 325.000.000,00 | | 325.000.000,00 | | 325.000.000,00 | | 325.000.000,00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.22.08 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN | | | | 100.000.000,00 | | 325.000.000,00 | | 325.000.000,00 | | 325.000.000,00 | | 325.000.000,00 | | |
| Meningkatnya pendidikan muatan lokal | Persentase implementasi pendidikan berbasis budaya dengan kategori sangat baik | - | 0.5 | 100.000.000,00 | 1 | 325.000.000,00 | 1.5 | 325.000.000,00 | 2 | 325.000.000,00 | 2.5 | 325.000.000,00 | 1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan | |
| | Persentase Implementasi Pendidikan Berbasis Budaya dengan Kategori Mandiri Budaya | - | 0.5 | | 1 | | 1.5 | | 2 | | 2.5 | | | |
| 2.22.08.5.08 - Pendidikan Berbasis Budaya | | | | 100.000.000,00 | | 325.000.000,00 | | 325.000.000,00 | | 325.000.000,00 | | 325.000.000,00 | | |
| Terciptanya peserta didik dengan sikap santun, peduli lingkungan, dan mampu hidup harmonis di tengah keberagaman budaya | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Muatan Lokal | 3 | 3 | 100.000.000,00 | 3 | 325.000.000,00 | 3 | 325.000.000,00 | 3 | 325.000.000,00 | 3 | 325.000.000,00 | | |
| 2.22.08.5.08.0001 - Pembinaan Muatan Lokal | | | | 100.000.000,00 | | 325.000.000,00 | | 325.000.000,00 | | 325.000.000,00 | | 325.000.000,00 | | |
| Terlaksananya Pembinaan Muatan Lokal | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Muatan Lokal | 3 | 3 | 100.000.000,00 | 3 | 325.000.000,00 | 3 | 325.000.000,00 | 3 | 325.000.000,00 | 3 | 325.000.000,00 | | |
| 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH | | | | 0,00 | | 75.000.000,00 | | 75.000.000,00 | | 75.000.000,00 | | 75.000.000,00 | | |
| 4.01.04 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN | | | | - | | 75.000.000,00 | | 75.000.000,00 | | 75.000.000,00 | | 75.000.000,00 | | |
| Peningkatan kualitas layanan publik | Persentase Capaian Implementasi Inovasi Layanan Publik | - | - | - | 97 | 75.000.000,00 | 98 | 75.000.000,00 | 99 | 75.000.000,00 | 100 | 75.000.000,00 | 1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan | |
| 4.01.04.5.02 - Peningkatan Budaya Pemerintahan | | | | - | | 75.000.000,00 | | 75.000.000,00 | | 75.000.000,00 | | 75.000.000,00 | | |
| Inovasi Layanan Publik (Pengembangan Budaya Kerja SIGAP (Senyum, Informatif, Gesit, Akuntabel, Profesional) | Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota | 0 | 0 | - | 5 | 75.000.000,00 | 5 | 75.000.000,00 | 5 | 75.000.000,00 | 5 | 75.000.000,00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.01.04.5.02.0001 - Implementasi Budaya Pemerintahan<br><br>Kabupaten/Kota | | | | - | | 75.000.000,00 | | 75.000.000,00 | | 75.000.000,00 | | 75.000.000,00 | | |
| Terlaksananya Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota | 0 | 0 | - | 5 | 75.000.000,00 | 5 | 75.000.000,00 | 5 | 75.000.000,00 | 5 | 75.000.000,00 | | |
| **TOTAL KESELURUHAN** | | | | 700.985.162.746,00 | | 730.091.542.800,00 | | 738.221.810.200,00 | | 759.283.409.800,00 | | 762.472.437.300,00 | | |

**TABEL 4.4**

**DAFTAR SUBKEGIATAN PRIORITAS DALAM MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH RENSTRA**

**PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

| NO | PROGRAM PRIORITAS | OUTCOME | KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* |
| **1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan** | | | | |
| 1. | 1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah | 1.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | |
| | | | 1.01.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah | |
| | | | 1.01.01.2.01.0013 - Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan | |
| | | | 1.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | |
| | | | 1.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 1.01.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | |
| | | | 1.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
| | | | 1.01.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | |
| 2. | 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah jenjang SD | 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | |
| | | | 1.01.02.2.01.0001 - Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) | |
| | | | 1.01.02.2.01.0003 - Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | |
| | | | 1.01.02.2.01.0005 - Pembangunan Perpustakaan Sekolah | |
| | | | 1.01.02.2.01.0006 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 1.01.02.2.01.0007 - Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah | |
| | | | 1.01.02.2.01.0009 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | |
| | | | 1.01.02.2.01.0010 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah | |
| | | | 1.01.02.2.01.0011 - Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah | |
| | | | 1.01.02.2.01.0014 - Pengadaan Mebel Sekolah | |
| | | | 1.01.02.2.01.0016 - Pengadaan Perlengkapan Sekolah | |
| | | | 1.01.02.2.01.0025 - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | |
| | | | 1.01.02.2.01.0026 - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 1.01.02.2.01.0027 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar | |
| | | | 1.01.02.2.01.0028 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | |
| | | | 1.01.02.2.01.0029 - Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | |
| | | | 1.01.02.2.01.0030 - Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | |
| | | | 1.01.02.2.01.0031 - Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar | |
| | | | 1.01.02.2.01.0032 - Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar | |
| | | | 1.01.02.2.01.0034 - Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Dasar | |
| | | | 1.01.02.2.01.0035 - Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 1.01.02.2.01.0036 - Pengembangan konten digital untuk pendidikan | |
| | | | 1.01.02.2.01.0037 - Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan | |
| | | | 1.01.02.2.01.0038 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | |
| | | | 1.01.02.2.01.0039 - Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan | |
| | | | 1.01.02.2.01.0041 - Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | |
| | | | 1.01.02.2.01.0042 - Penyediaan infrastruktur TIK | |
| | | | 1.01.02.2.01.0043 - Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 1.01.02.2.01.0045 - Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik | |
| | | | 1.01.02.2.01.0046 - Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik | |
| | | | 1.01.02.2.01.0047 - Pembangunan Ruang Kelas Baru | |
| | | | 1.01.02.2.01.0048 - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | |
| | | | 1.01.02.2.01.0049 - Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan | |
| | | | 1.01.02.2.01.0050 - Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik | |
| | | | 1.01.02.2.01.0051 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 1.01.02.2.01.0053 - Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus | |
| | | | 1.01.02.2.01.0054 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar | |
| | | | 1.01.02.2.01.0055 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik | |
| | | Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah jenjang SMP | 1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | |
| | | | 1.01.02.2.02.0001 - Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) | |
| | | | 1.01.02.2.02.0003 - Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | |
| | | | 1.01.02.2.02.0004 - Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah | |
| | | | 1.01.02.2.02.0005 - Pembangunan Perpustakaan Sekolah | |
| | | | 1.01.02.2.02.0006 - Pembangunan Laboratorium | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 1.01.02.2.02.0012 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | |
| | | | 1.01.02.2.02.0014 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | |
| | | | 1.01.02.2.02.0016 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah | |
| | | | 1.01.02.2.02.0017 - Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah | |
| | | | 1.01.02.2.02.0018 - Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium | |
| | | | 1.01.02.2.02.0019 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula | |
| | | | 1.01.02.2.02.0024 - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | |
| | | | 1.01.02.2.02.0025 - Pengadaan Mebel Sekolah | |
| | | | 1.01.02.2.02.0032 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 1.01.02.2.02.0038 - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | |
| | | | 1.01.02.2.02.0039 - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | |
| | | | 1.01.02.2.02.0040 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | |
| | | | 1.01.02.2.02.0041 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | |
| | | | 1.01.02.2.02.0042 - Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama | |
| | | | 1.01.02.2.02.0043 - Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 1.01.02.2.02.0047 - Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Menengah Pertama | |
| | | | 1.01.02.2.02.0048 - Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan | |
| | | | 1.01.02.2.02.0049 - Pengembangan konten digital untuk pendidikan | |
| | | | 1.01.02.2.02.0050 - Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan | |
| | | | 1.01.02.2.02.0051 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | |
| | | | 1.01.02.2.02.0052 - Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan | |
| | | | 1.01.02.2.02.0054 - Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 1.01.02.2.02.0055 - Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | |
| | | | 1.01.02.2.02.0058 - Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik | |
| | | | 1.01.02.2.02.0059 - Pembangunan Ruang Kelas Baru | |
| | | | 1.01.02.2.02.0060 - Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan | |
| | | | 1.01.02.2.02.0061 - Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik | |
| | | | 1.01.02.2.02.0062 - Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik | |
| | | | 1.01.02.2.02.0064 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 1.01.02.2.02.0065 - Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus | |
| | | | 1.01.02.2.02.0067 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik | |
| | | | 1.01.02.2.02.0068 - Penyediaan infrastruktur TIK | |
| | | Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah jenjang PAUD | 1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | |
| | | | 1.01.02.2.03.0002 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD | |
| | | | 1.01.02.2.03.0007 - Pengadaan Mebel PAUD | |
| | | | 1.01.02.2.03.0011 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD | |
| | | | 1.01.02.2.03.0015 - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD | |
| | | | 1.01.02.2.03.0016 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 1.01.02.2.03.0017 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD | |
| | | | 1.01.02.2.03.0018 - Pengelolaan Dana BOP PAUD | |
| | | | 1.01.02.2.03.0019 - Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD | |
| | | | 1.01.02.2.03.0021 - Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | |
| | | | 1.01.02.2.03.0022 - Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan | |
| | | | 1.01.02.2.03.0023 - Pengembangan konten digital untuk pendidikan | |
| | | | 1.01.02.2.03.0024 - Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan | |
| | | | 1.01.02.2.03.0025 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 1.01.02.2.03.0026 - Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan | |
| | | | 1.01.02.2.03.0028 - Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | |
| | | | 1.01.02.2.03.0029 - Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | |
| | | | 1.01.02.2.03.0030 - Pembangunan Ruang Kelas Baru | |
| | | | 1.01.02.2.03.0031 - Penyediaan infrastruktur TIK | |
| | | | 1.01.02.2.03.0033 - Pembangunan Perpustakaan Sekolah | |
| | | | 1.01.02.2.03.0034 - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik | |
| | | | 1.01.02.2.03.0035 - Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik | |
| | | | 1.01.02.2.03.0036 - Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 1.01.02.2.03.0037 - Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | |
| | | | 1.01.02.2.03.0039 - Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan | |
| | | | 1.01.02.2.03.0040 - Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) | |
| | | | 1.01.02.2.03.0041 - Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik | |
| | | | 1.01.02.2.03.0045 - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD | |
| | | | 1.01.02.2.03.0046 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD | |
| | | | 1.01.02.2.03.0047 - Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 1.01.02.2.03.0049 - Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | |
| | | | 1.01.02.2.03.0051 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | |
| | | Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah jenjang Kesetaraan | 1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | |
| | | | 1.01.02.2.04.0010 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan | |
| | | | 1.01.02.2.04.0014 - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | |
| | | | 1.01.02.2.04.0015 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | |
| | | | 1.01.02.2.04.0016 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 1.01.02.2.04.0017 - Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan | |
| | | | 1.01.02.2.04.0018 - Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan | |
| | | | 1.01.02.2.04.0024 - Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan | |
| | | | 1.01.02.2.04.0025 - Pengembangan konten digital untuk pendidikan | |
| | | | 1.01.02.2.04.0026 - Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan | |
| | | | 1.01.02.2.04.0027 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | |
| | | | 1.01.02.2.04.0028 - Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 1.01.02.2.04.0030 - Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | |
| | | | 1.01.02.2.04.0031 - Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | |
| | | | 1.01.02.2.04.0032 - Fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi pendidik Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | |
| | | | 1.01.02.2.04.0033 - Penyediaan infrastruktur TIK | |
| | | | 1.01.02.2.04.0035 - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik | |
| | | | 1.01.02.2.04.0036 - Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik | |
| | | | 1.01.02.2.04.0037 - Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 1.01.02.2.04.0038 - Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | |
| | | | 1.01.02.2.04.0039 - Pembangunan Ruang Kelas Baru | |
| | | | 1.01.02.2.04.0041 - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | |
| | | | 1.01.02.2.04.0042 - Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan | |
| | | | 1.01.02.2.04.0043 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium | |
| | | | 1.01.02.2.04.0044 - Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) | |
| | | | 1.01.02.2.04.0046 - Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 1.01.02.2.04.0052 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal | |
| | | | 1.01.02.2.04.0055 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan | |
| | | | 1.01.02.2.04.0061 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | |
| 3. | 1.01.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM | Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan | 1.01.03.2.01 - Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar | |
| | | | 1.01.03.2.01.0002 - Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar | |
| | | | 1.01.03.2.01.0003 - Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar | |
| | | | 1.01.03.2.01.0004 - Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 1.01.03.2.01.0006 - Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar | |
| | | | 1.01.03.2.02 - Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal | |
| | | | 1.01.03.2.02.0002 - Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal | |
| | | | 1.01.03.2.02.0003 - Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal | |
| | | | 1.01.03.2.02.0005 - Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4. | 1.01.04 - PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan | 1.01.04.2.01 - Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | |
| | | | 1.01.04.2.01.0001 - Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | |
| | | | 1.01.04.2.01.0002 - Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | |
| 5. | 1.01.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN | Meningkatnya kualitas dan distribusi institusi pendidikan | 1.01.05.2.01 - Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 1.01.05.2.01.0002 - Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | |
| | | | 1.01.05.2.02 - Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | |
| | | | 1.01.05.2.02.0002 - Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | |
| 6. | 1.01.06 - PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA | Terlestarikannya bahasa dan sastra daerah | 1.01.06.2.01 - Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota | |
| | | | 1.01.06.2.01.0008 - Penyusunan, Penerbitan, dan Pendistribusian buku-buku berbahasa daerah | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 7. | 2.22.08 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN | Meningkatnya pendidikan muatan lokal | 2.22.08.5.08 - Pendidikan Berbasis Budaya | |
| | | | 2.22.08.5.08.0001 - Pembinaan Muatan Lokal | |

## 4.2. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja PD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai PD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian misi pertama yaitu Meningkatkan pembangunan manusia yang produktif, berkualitas dan berkepribadian untuk siap kerja dan siap merintis usaha sendiri. Untuk mewujudkan misi tersebut, ditetapkan lndikator kinerja PD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel 4.5 dan 4.6 dengan format sebagai berikut:

**TABEL 4.5**
**INDIKATOR KINERJA UTAMA**
**RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD**
**PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

| NO | INDIKATOR | SATUAN | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* |
| 1. | 1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan | | | | | | | | | |
| 2. | Rata-Rata Lama Sekolah | Tahun | 7,35 | 7,37 | 7,39 | 7,41 | 7,43 | 7,45 | 7,47 | |
| 3. | Harapan Lama Sekolah | Tahun | 13,4 | 13,42 | 13,44 | 13,46 | 13,48 | 13,5 | 13,52 | |
| 4. | Indeks SPM Bidang Pendidikan | Indeks | 80,93 | 86,03 | 87,01 | 88,02 | 89,01 | 90,03 | 91,06 | |

**TABEL 4.6**

**INDIKATOR KINERJA KUNCI**

**RANCANGAN AKHIR RENSTRA**

**PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

| NO | INDIKATOR | STATUS | SATUAN | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* |
| 1. | 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | | | | | | | | | | |
| 2. | Angka Partisipasi Sekolah (APS) 5 - 6 PAUD | komulatif | % | 89.98 | 91.52 | 93.06 | 94.60 | 96.14 | 97.68 | 100 | |
| 3. | Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 18 Kesetaraan | komulatif | % | 26.25 | 27.05 | 27.85 | 28.65 | 29.45 | 30.25 | 31.05 | |
| 4. | Persentase Implementasi Pendidikan Berbasis Budaya dengan Kategori Mandiri Budaya | komulatif | % | - | - | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | |
| 5. | Indeks Pemerataan Guru | komulatif | Indeks | 26.90 | 27.35 | 27.80 | 28.22 | 28.63 | 29.05 | 29.46 | |
| 6. | Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13 - 15 SMP | komulatif | % | 99.14 | 99.29 | 99.54 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 7. | Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B | komulatif | % | 88.13 | 89.31 | 93.32 | 98.66 | 100 | 100 | 100 | |
| 8. | Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 12 SD | komulatif | % | 94.84 | 95.34 | 96.09 | 97.34 | 98.84 | 100 | 100 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. | Persentase implementasi pendidikan berbasis budaya dengan kategori sangat baik | komulatif | % | - | - | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | |
| 10. | Skor Kemampuan Literasi SMP | komulatif | Nilai | 79.48 | 80.58 | 81.68 | 82.78 | 83.88 | 84.98 | 86.08 | |
| 11. | Proporsi Guru PAUD Formal dengan Kualifikasi S1/D IV | komulatif | % | 93.76 | 95.71 | 96.21 | 96.71 | 97.21 | 97.71 | 98.21 | |
| 12. | Skor Kemampuan Numerasi SMP | komulatif | Nilai | 67.91 | 69.41 | 70.91 | 72.41 | 73.91 | 75.41 | 76.91 | |
| 13. | Iklim Keamanan SMP | komulatif | Nilai | 72.65 | 74.15 | 75.65 | 77.15 | 78.65 | 80.15 | 81.65 | |
| 14. | Iklim Kebinekaan SMP | komulatif | Nilai | 72.30 | 73.30 | 74.30 | 75.30 | 76.30 | 77.30 | 78.30 | |
| 15. | Skor Kemampuan Literasi SD | komulatif | Nilai | 66.82 | 69.32 | 71.82 | 74.32 | 76.82 | 79.32 | 81.82 | |
| 16. | Iklim Inklusivitas SMP | komulatif | Nilai | 58.56 | 60.96 | 63.36 | 65.76 | 68.16 | 70.56 | 72.96 | |
| 17. | Skor Kemampuan Numerasi SD | komulatif | Nilai | 55.71 | 58.61 | 61.51 | 64.41 | 67.31 | 70.21 | 73.11 | |
| 18. | Iklim Keamanan SD | komulatif | Nilai | 76.64 | 77.54 | 78.44 | 79.34 | 80.24 | 81.14 | 82.04 | |
| 19. | Iklim Kebinekaan SD | komulatif | Nilai | 74.26 | 75.26 | 76.26 | 77.26 | 78.26 | 79.26 | 80.26 | |
| 20. | Iklim Inklusivitas SD | komulatif | Nilai | 58.44 | 60.94 | 63.44 | 65.94 | 68.44 | 70.94 | 73.44 | |
| 21. | Persentase usulan izin satuan pendidikan yang diterbitkan/diperbaharui | positif | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 22. | Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal | positif | Persentase | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 23. | Persentase | positif | % | - | - | - | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | pengembangan Bahasa dan Sastra Daerah | | | | | | | | | | |

## BAB V
## PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul tahun 2025–2029 ini sebagai penjabaran dari RPJMD Pemerintah Kabupaten Gunungkidul kedalam strategi, kebijakan umum, program prioritas dan arah kebijakan keuangan Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul.

Sebagai dokumen perencanaan lima tahunan, Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungklidul adalah bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD) Kabupaten Gunungkidul tahun 2025-2029 sebagaimana telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 tahun 2025.

Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul tahun 2025 – 2029 ditambahkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang lebih terukur dan bersifat *Outcome*.

Oleh karena itu untuk menjamin keberhasilannya harus ada komitmen kerjasama dari para pihak *( stakeholders* ) yang berkompeten di seluruh Kabupaten Gunungkidul. Selanjutnya Renstra ini akan dipakai sebagai pedoman perencanaan dan kegiatan seluruh jajaran Dinas Pendidikan dan *stakeholders* yang lain selama lima tahun, mulai dari tahun 2025 sampai dengan 2029.

Untuk mengetahui kinerja dari pelaksanaan program dan kegiatan tersebut, maka pada setiap tahun akan dilakukan evaluasi dengan cara membandingkan tugas, indikator kinerja dengan realisasi program maupun kegiatan di setiap tahun.

Dalam Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul tahun 2025 – 2029 masih terdapat beberapa hal yang perlu dikoreksi. Revisi akan dilakukan setiap tahun dengan memperhatikan prioritas program dan kebijakan di bidang pendidikan dan ketersediaan anggaran yang sesuai pada setiap tahun.

Demikian renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul tahun 2025-2029 disusun, semoga bermanfaat bagi seluruh *stakeholders* yang berkompeten di bidang pendidikan di Kabupaten Gunungkidul.

KEPALA,

PEMERINTAH KABUPATEN DINAS PENDIDIKAN GUNUNGKIDUL

NUNUK SETYOWATI

---

BUPATI GUNUNGKIDUL,

BUPATI GUNUNGKIDUL

ENDAH SUBEKTI KUNTARININGSIH

METADATA INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PENDIDIKAN

| NO | INDIKATOR | SATUAN | DEFINISI | RUMUS PERHITUNGAN | INTERPRETASI | SUMBER DATA | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| (01) | (02) | (03) | | | | | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) |
| **1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan** | | | | | | | | | | | | | | |
| **II** | **ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Literasi Membaca | % | Jumlah satuan pendidikan di kabupaten yang memiliki capaian<br>asesmen tingkat nasional mencapai standar kompetensi minimum dibagi jumlah satuan pendidikan di kabupaten.<br>Asesmen Nasional adalah ukuran hasil asesmen peserta didik<br>secara nasional untuk aspek literasi membaca<br>yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). | $\frac{\sum_{i=1}^{n} satdik\ min.SKM}{n}$<br>Keterangan:<br>. = Satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca<br>= Jumlah satuan pendidikan<br>*n* | Misal: Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca tahun 2022 sebesar 29,16%. Artinya, ada 29,16% satuan pendidikan di Indonesia atau sebanyak 83.808 satuan pendidikan yang telah mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca (paling sedikit 75% peserta didik pada satuan pendidikan tersebut memiliki level hasil belajar minimal "cakap"). | Asesmen Nasional (Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah) | 81,64 | 81.59-82.21 | 81.64-82.15 | 81.70-82.21 | 81.76-82.26 | 81.82-82.32 | 81.88-82.38 | |
| 2 | Rata-Rata Lama Sekolah | Tahun | Rerata waktu (dalam satuan tahun) yang ditempuh oleh penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menyelesaikan semua jenjang pendidikan formal yang pernah dijalani. Rata-rata Lama Sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas (RLS 25+) dihitung dengan cara mengkonversikan ijazah terakhir dan tingkat pendidikan yang sedang dijalani ke dalam satuan tahun dengan tidak memperhitungkan adanya kejadian pengulangan kelas. Ijazah yang dimiliki akan dikonversi ke dalam lama waktu bersekolah (satuan tahun) berdasarkan ketentuan berikut:<br>a. Tidak punya ijazah = 0 tahun;<br>b. SD = 6 tahun;<br>c. SMP = 9 tahun;<br>d. SMA = 12 tahun;<br>e. D1/D2 = 14 tahun;<br>f. D3 = 15 tahun;<br>g. D4 = 16 tahun;<br>h. S1 = 17 tahun;<br>i. S2 = 19 tahun;<br>j. S3 = 22 tahun.<br>Konversi ijazah ke menjadi lamanya waktu bersekolah memenuhi perhitungan berikut ini:<br>a. Tidak pernah sekolah = 0 tahun;<br>2. Masih sekolah di SD sampai dengan S1= konversi ijazah terakhir + kelas terakhir – 1;<br>3. Masih sekolah di S2/S3 = konversi ijazah terakhir + 1;<br>4. Tidak bersekolah lagi dan tamat kelas terakhir = | $RLS = \frac{1}{n} \times \sum_{i=1}^{n} x_i$<br>Keterangan :<br>RLS = Rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun keatas<br>Xi = Lama sekolah penduduk ke-i yang berusia 25 tahun<br>N = Jumlah penduduk usia 25 tahun ke atas | Misal: RLS 25+ Indonesia tahun 2022 = 9,08 tahun, artinya secara rata-rata, penduduk Indonesia yang berusia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama 9,08 tahun atau telah menamatkan kelas IX. | Susenas, Badan Pusat Statistik | 7.35 | 7.37 | 7.39 | 7.41 | 7.43 | 7.45 | 7.47 | |
| 3 | Rata-rata kemampuan Numerasi SMP | Nilai | Nilai rerata siswa berdasarkan kemampuan dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan. | Rerata skor numerasi siswa dari seluruh skor siswa di satuan pendidikan kabupaten<br>>Kategori Baik: Lebih dari 70% murid mencapai kompetensi minimum numerasi<br>>Kategori Sedang: 40% 70% murid mencapai kompetensi minimum numerasi.I<br>>Kategori Kurang: Kurang dari 40% murid mencapai kompetensi minimum numerasi | Level dasar mampu menyelesaikan masalah sederhana dengan informasi langsung dan eksplisit. Cocok untuk tugas sehari-hari yang tidak terlalu kompleks. Level menengah mampu mengelola masalah dengan beberapa langkah dan menggunakan representasi data yang kompleks seperti grafik multivariate. Level mahir Mampu memodelkan situasi kompleks, berpikir kritis, dan | Asesmen Nasional (Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah) | 67,9 | 67.84-68.46 | 67.9-68.40 | 67.95-68.46 | 68.02-68.52 | 68.07-68.58 | 68.13-68.64 | |
| 4 | Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Numerasi | % | Jumlah satuan pendidikan di kabupaten yang memiliki capaian<br>asesmen tingkat nasional mencapai standar kompetensi minimum dibagi jumlah satuan pendidikan di kabupaten.<br>Asesmen Nasional adalah ukuran hasil asesmen peserta didik<br>secara nasional untuk aspek numerasi<br>yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) | $\frac{\sum_{i=1}^{n} satdik\ min.SKM}{n}$<br>Keterangan:<br>. = Satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk numerasi<br>= Jumlah satuan pendidikan | Misal: Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar<br>kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk<br>numerasi membaca tahun 2022 sebesar 29,16%. Artinya, ada<br>29,16% satuan pendidikan di Indonesia atau sebanyak 83.808<br>satuan pendidikan yang telah mencapai standar | Asesmen Nasional (Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah) | 74,65 | 74.59-75.21 | 74.65-75.15 | 74.71-75.21 | 74.77-75.27 | 74.82-75.33 | 74.88-75.39 | |
| 5 | Harapan Lama Sekolah | Tahun | Lamanya waktu bersekolah yang diharapkan dapat dirasakan oleh anak-anak usia tertentu pada jenjang pendidikan usia tersebut di masa mendatang. | $Harpan\ Lama\ Sekolah = FK \sum_{i=7}^{n} \frac{E_i^t}{P_i^t}$<br>Keterangan:<br>FK = Faktor koreksi pesantren<br>E_i^t = Jumlah penduduk usia i yang berkolah pada tahun t<br>P_i^t = Jumlah penduduk usia i pada tahun t<br>i = Usia (7, 8, ..., n) | Angka HLS menunjukkan peluang anak usia 7 tahun ke atas untuk menempuh pendidikan formal pada waktu tertentu.<br>Misal: HLS Indonesia pada tahun 2022 sebesar 13,10 tahun. Artinya, secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2022 memiliki peluang untuk bersekolah selama 13,10 tahun atau setara dengan Diploma I. | Susenas, Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunungkidul | 13.4 | 13.42 | 13.44 | 13.48 | 13.48 | 13.5 | 13.52 | |
| 6 | Indeks Pendidikan | Indeks | Indeks Pendidikan adalah pencerminan hasil pembangunan bidang pendidikan. Indikator pembentuk indeks Pendidikan adalah Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata lama Sekolah | $Indeks_{pendidikan} = \frac{Indeks_{HLS} + Indeks_{RLS}}{2}$<br>Keterangan:<br>Indeks HLS = Indeks Harapan Lama Sekolah<br>Indeks RLS = Indeks Rata-rata lama sekolah | Nilai Indeks Pendidikan yang tinggi menunjukkan bahwa suatu wilayah memiliki kualitas pendidikan yang baik dan akses pendidikan yang luas bagi penduduknya .<br>Sebaliknya, nilai Indeks Pendidikan yang rendah menunjukkan bahwa masih ada tantangan dalam hal kualitas dan akses pendidikan di wilayah tersebut | Susenas, Badan Pusat Statistik | 0.617 | 0.627 | 0.633 | 0.638 | 0.643 | 0.649 | 0.654 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Rata-rata Kemampuan Literasi SD | Nilai | Nilai rerata siswa berdasarkan kemampuan dalam memahami, menggunakan, merefleksi, dan mengevaluasi beragam jenis teks (teks informasional dan teks fiksi). | Rerata skor literasi siswa dari seluruh skor siswa di satuan pendidikan kabupaten<br>>Kategori Baik: Lebih dari 70% murid mencapai kompetensi minimum literasi<br>>Kategori Sedang: 40% 70% murid mencapai kompetensi minimum literasi<br>>Kategori Kurang: Kurang dari 40% murid mencapai kompetensi minimum literasi | Skor literasi yang tinggi menunjukkan kemampuan siswa dalam memahami dan menggunakan informasi secara efektif untuk pengambilan keputusan dan pemecahan masalah. Literasi yang baik mendukung keberhasilan akademik dan kesiapan menghadapi tantangan globalisasi dan era digital. Konteks Kehidupan Nyata. Literasi bukan hanya soal membaca teks, tapi juga kemampuan | Asesmen Nasional (Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah) | 66,81 | 66.75-67.37 | 66.81-67.31 | 66.87-67.37 | 66.93-67.43 | 66.98-67.49 | 67.04-67.55 | |
| 8 | Rata-rata kemampuan Numerasi SD | Nilai | Nilai rerata siswa berdasarkan kemampuan dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan. | Rerata skor numerasi siswa dari seluruh skor siswa di satuan pendidikan kabupaten<br>>Kategori Baik: Lebih dari 70% murid mencapai kompetensi minimum numerasi<br>>Kategori Sedang: 40% 70% murid mencapai kompetensi minimum numerasi.<br>>Kategori Kurang: Kurang dari 40% murid mencapai kompetensi minimum numerasi | Level dasar mampu menyelesaikan masalah sederhana dengan informasi langsung dan eksplisit. Cocok untuk tugas sehari-hari yang tidak terlalu kompleks. Level menengah mampu mengelola masalah dengan beberapa langkah dan menggunakan representasi data yang kompleks seperti grafik multivariate. Level mahir Mampu memodelkan situasi kompleks, berpikir kritis, dan | Asesmen Nasional (Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah) | 55,71 | 55.65-56.27 | 55.71-56.21 | 55.77-56.27 | 55.83-565.33 | 55.88-56.39 | 55.94-56.45 | |
| 9 | Rata-rata Kemampuan Literasi SMP | Nilai | Nilai rerata siswa berdasarkan kemampuan dalam memahami, menggunakan, merefleksi, dan mengevaluasi beragam jenis teks (teks informasional dan teks fiksi). | Rerata skor literasi siswa dari seluruh skor siswa di satuan pendidikan kabupaten<br>>Kategori Baik: Lebih dari 70% murid mencapai kompetensi minimum literasi<br>>Kategori Sedang: 40% 70% murid mencapai kompetensi minimum literasi<br>>Kategori Kurang: Kurang dari 40% murid mencapai kompetensi minimum literasi | Skor literasi yang tinggi menunjukkan kemampuan siswa dalam memahami dan menggunakan informasi secara efektif untuk pengambilan keputusan dan pemecahan masalah. Literasi yang baik mendukung keberhasilan akademik dan kesiapan menghadapi tantangan globalisasi dan era digital. Konteks Kehidupan Nyata. Literasi bukan hanya soal membaca teks, tapi juga kemampuan | Asesmen Nasional (Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah) | 79,48 | 79.42-80.04 | 79.48-79.98 | 79.54-80.04 | 79.60-80.10 | 79.65-80.16 | 79.71-80.22 | |
| **III** | **INDIKATOR KINERJA KUNCI** | | | | | | | | | | | | |
| **AA** | **1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Indeks Pemerataan Guru | Indeks | Indeks Pemerataan Guru adalah instrumen pengukuran yang digunakan untuk menilai tingkat kesetaraan dalam distribusi guru | Jumlah sekolah jenjang pendidikan Negeri yang telah terpenuhi PTKnya dibagi jumlah sekolah keseluruhan jenjang pendidikan Negeri dikali 100 (seratus) persen | Semakin jauh nilai indeks dari angka 100, semakin besar ketimpangan yang terjadi. | Profil Pendidikan | 26.90 | 27.35 | 27.80 | 28.22 | 28.63 | 29.05 | 29.46 | |
| 2 | Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 18 Kesetaraan | % | Partisipasi anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang mengenyam pendidikan pada pendidikan kesetaraan | Jumlah Siswa Kesetaraan usia 7 (tujuh) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dibagi Jumlah Penduduk yang tidak bersekolah usia 7 (tujuh) sampai dengan 18 Tahun dikali 100 (seratus) persen | Nilai APS yang tinggi menunjukkan akses pendidikan yang luas dan inklusif bagi anak usia sekolah, sementara nilai yang rendah mengindikasikan adanya hambatan struktural maupun sosio-ekonomi yang perlu ditangani | Data Pokok Pendidikan (Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah) dan Survei Sosial Ekonomi | 26.25 | 27.05 | 27.85 | 28.65 | 29.45 | 30.25 | 31.05 | |
| 3 | Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13 - 15 SMP | % | Partisipasi anak usia 13-15 tahun yang mengenyam pendidikan pada seluruh jenjang pendidikan | Jumlah Siswa usia 13 (tiga belas) sampai dengan 15 (lima belas) tahun dibagi Jumlah Penduduk usia 13 (tiga belas) sampai dengan 15 (lima belas) tahun pada kab/kota yang bersangkutan dikali 100 (seratus) persen | Nilai APS yang tinggi menunjukkan akses pendidikan yang luas dan inklusif bagi anak usia sekolah, sementara nilai yang rendah mengindikasikan adanya hambatan struktural | Survei Sosial Ekonomi Nasional (Badan Pusat Statistik) | 99.14 | 99.29 | 99.54 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 4 | Persentase Implementasi Pendidikan Berbasis Budaya dengan Kategori Mandiri Budaya | % | Pendidikan berbasis budaya adalah proses pembelajaran yang mengintegrasikan nilai-nilai, kearifan lokal, dan tradisi budaya dalam kurikulum dan praktik pendidikan sehari-hari. Pendekatan ini menekankan pentingnya melestarikan dan menghidupkan kembali budaya lokal melalui sistem pendidikan formal. Mandiri Budaya menunjukkan tingkat kemandirian lembaga pendidikan dalam mengembangkan dan menerapkan nilai-nilai budaya lokal secara aktif dan berkelanjutan tanpa ketergantungan eksternal. Lembaga pendidikan dengan | Jumlah indikator terpenuhi dibagi total indikator penilaian dikali 100 (seratur) persen | Persentase implementasi yang tinggi menunjukkan keberhasilan pelestarian budaya sekaligus penguatan karakter peserta didik sesuai dengan nilai-nilai luhur budaya Indonesia | Profil Pendidikan dan Dinas Kebudayaan | - | - | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | |
| 5 | Angka Partisipasi Sekolah (APS) 5 - 6 PAUD | % | Partisipasi anak usia 5-6 tahun yang mengenyam pendidikan pada seluruh jenjang pendidikan | Jumlah Peserta Didik usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun dibagi Jumlah Penduduk usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun pada kab/kota yang bersangkutan dikali 100 (seratus) | Nilai APS yang tinggi menunjukkan akses pendidikan yang luas dan inklusif bagi anak usia sekolah, sementara nilai yang rendah | Survei Sosial Ekonomi Nasional (Badan Pusat Statistik) | 89.98 | 91.52 | 93.06 | 94.60 | 96.14 | 97.68 | 100 | |
| 6 | Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B | % | Persentase satuan PAUD yang sudah memperoleh akreditasi minimal B dari keseluruhan jumlah satuan PAUD yang beroperasi di suatu wilayah administratif tertentu (kabupaten/kota, provinsi, atau nasional). | Jumlah Satuan PAUD yang terakreditasi minimal B dibagi Jumlah Satuan PAUD yang sudah diakreditasi di Kota/Kabupaten dikali 100 (seratus) persen | Proporsi tinggi menunjukkan bahwa sebagian besar PAUD di wilayah tersebut telah memenuhi standar nasional pendidikan dan memberikan layanan berkualitas. | Data Hasil Akreditasi dari BAN PDM (Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar, dan | 88.13 | 89.31 | 93.32 | 98.66 | 100 | 100 | 100 | |
| 7 | Persentase implementasi pendidikan berbasis budaya dengan kategori sangat baik | % | Pendidikan berbasis budaya adalah proses pembelajaran yang mengintegrasikan nilai-nilai, kearifan lokal, dan tradisi budaya dalam kurikulum dan praktik pendidikan sehari-hari. Pendekatan ini menekankan pentingnya melestarikan dan menghidupkan kembali budaya lokal melalui sistem pendidikan formal. Mandiri Budaya menunjukkan tingkat kemandirian lembaga pendidikan dalam mengembangkan dan menerapkan nilai-nilai budaya lokal secara aktif dan berkelanjutan tanpa ketergantungan eksternal. Lembaga pendidikan dengan | Jumlah indikator terpenuhi dibagi total indikator penilaian dikali 100 (seratur) persen | Implementasi pendidikan berbasis budaya dengan kategori sangat baik memiliki karakteristik dan dampak yang mendalam yaitu Nilai-nilai budaya telah terinternalisasi secara optimal dalam proses pembelajaran dan perilaku siswa sehari-hari. Siswa tidak hanya memahami tetapi juga menerapkan nilai-nilai budaya dan Peningkatan karakter, rasa tanggung jawab, dan kebanggaan terhadap identitas budaya lokal. Siswa menunjukkan sikap hormat terhadap tradisi dan nilai-nilai luhur | Profil Pendidikan dan Dinas Kebudayaan | - | - | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | |
| 8 | Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 12 SD | % | Partisipasi anak usia 7-12 tahun yang mengenyam pendidikan pada seluruh jenjang pendidikan | Jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 12 (dua belas) tahun yang sedang belajar di satuan pendidikan dibagi dengan jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 12 (dua belas) tahun pada kab/kota yang bersangkutan dikali 100 (seratus) persen | Nilai APS yang tinggi menunjukkan akses pendidikan yang luas dan inklusif bagi anak usia sekolah, sementara nilai yang rendah mengindikasikan adanya hambatan struktural | Survei Sosial Ekonomi Nasional (Badan Pusat Statistik) | 94.84 | 95.34 | 96.09 | 97.34 | 98.84 | 100 | 100 | |
| 9 | Skor Kemampuan Literasi SMP | Nilai | Nilai rerata peserta didik berdasarkan kemampuan dalam memahami, menggunakan, merefleksi, dan mengevaluasi beragam jenis teks (teks informasional dan teks fiksi). | Jumlah skor literasi siswa dibagi jumlah siswa | Skor literasi yang tinggi menunjukkan kemampuan siswa dalam memahami dan menggunakan informasi secara efektif untuk pengambilan keputusan dan pemecahan masalah. Literasi yang baik mendukung keberhasilan akademik dan kesiapan menghadapi tantangan globalisasi dan era digital. Konteks Kehidupan Nyata. Literasi bukan hanya soal | Asesmen Nasional (Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah) | 79.48 | 80.58 | 81.68 | 82.78 | 83.88 | 84.98 | 86.08 | |
| 10 | Proporsi Guru PAUD Formal dengan Kualifikasi S1/D IV | % | Pendidik PAUD pada satuan pendidikan formal yang telah memiliki kualifikasi minimum S1/D-IV sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Guru dan Dosen. | Jumlah guru PAUD formal berijazah S1/D4 dibagi Jumlah guru PAUD formal di kota/kabupaten di kali 100 (seratus) persen | Proporsi tinggi ( lebih dari 70%) menunjukkan kualitas tenaga pendidik yang baik, berpotensi meningkatkan mutu pembelajaran dan perkembangan anak secara optimal. Proporsi sedang ( antara 40 sampai dengan 70%) memerlukan upaya berkesinambungan untuk meningkatkan kualifikasi guru melalui program beasiswa atau pendidikan lanjutan. Proporsi rendah (kurang dari 40%) | Data Pokok Pendidikan (Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah) | 93.76 | 95.71 | 96.21 | 96.71 | 97.21 | 97.71 | 98.21 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Skor Kemampuan Numerasi SMP | Nilai | Nilai rerata peserta didik berdasarkan kemampuan dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan. | Jumlah skor numerasi siswa dibagi jumlah siswa | Level dasar mampu menyelesaikan masalah sederhana dengan informasi langsung dan eksplisit. Cocok untuk tugas sehari-hari yang tidak terlalu kompleks. Level menengah mampu mengelola masalah dengan beberapa langkah dan menggunakan representasi data yang kompleks. | Asesmen Nasional (Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah) | 67.91 | 69.41 | 70.91 | 72.41 | 73.91 | 75.41 | 76.91 | |
| 12 | Iklim Keamanan SMP | Nilai | Tingkat rasa aman dan kenyamanan peserta didik dari hal rasa aman di satuan pendidikan, perundungan, hukuman fisik, pelecehan seksual, dan aktivitas narkoba di lingkungan satuan pendidikan | Nilai rerata iklim keamanan terkait kesejahteraan psikologis, dan rasa aman terhadap perundungan, hukuman fisik, kekerasan seksual, rokok, minuman keras, dan narkoba berdasarkan survei lingkungan belajar | Lingkungan yang aman secara fisik dan emosional dengan sistem disiplin yang adil, akan berdampak positif pada peningkatan prestasi akademik, kehadiran siswa lebih tinggi, penurunan kasus bullying, hubungan interpersonal yang lebih baik | Asesmen Nasional (Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah) | 72.65 | 74.15 | 75.65 | 77.15 | 78.65 | 80.15 | 81.65 | |
| 13 | Iklim Kebinekaan SMP | Nilai | Kondisi satuan pendidikan yang menunjukkan adanya sikap dan perilaku kepala satuan pendidikan dan guru dalam menerapkan toleransi agama dan budaya serta komitmen kebangsaan. | Nilai rerata iklim kebhinekaan berdasarkan survei lingkungan belajar | Skor tinggi (90 s.d 100) menunjukkan iklim kebinekaan yang sangat positif di mana siswa dari berbagai latar belakang merasa dihargai dan diterima, praktik inklusi berjalan dengan baik, konflik terkait perbedaan sangat minim, dan adanya kebijakan dan program yang mendukung kebinekaan. Skor sedang (70 sampai dengan 89) mengindikasikan iklim kebinekaan yang cukup baik namun masih memerlukan perbaikan di beberapa aspek tertentu. Skor rendah (kurang dari 70) | Asesmen Nasional (Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah) | 72.30 | 73.30 | 74.30 | 75.30 | 76.30 | 77.30 | 78.30 | |
| 14 | Iklim Inklusivitas SMP | Nilai | Iklim inklusivitas menyangkut bagaimana lingkungan satuan pendidikan menyikapi keragaman seperti perbedaan individu, identitas, maupun latar belakang | Nilai rerata iklim inklusivitas meliputi layanan disabilitas, CBI, sikap terhadap disabilitas, dan fasilitas satuan pendidikan disabilitas berdasarkan survei lingkungan belajar | Lingkungan fisik dan sosial yang kondusif berperan besar dalam mendukung proses pembelajaran yang inklusif dan berkualitas di sekolah | Asesmen Nasional (Kementerian Pendidikan Dasar dan | 58.56 | 60.96 | 63.36 | 65.76 | 68.16 | 70.56 | 72.96 | |
| 15 | Skor Kemampuan Literasi SD | Nilai | Nilai rerata peserta didik berdasarkan kemampuan dalam memahami, menggunakan, merefleksi, dan mengevaluasi beragam jenis teks (teks informasional dan teks fiksi). | Jumlah skor literasi siswa dibagi jumlah siswa | Skor literasi yang tinggi menunjukkan kemampuan siswa dalam memahami dan menggunakan informasi secara efektif untuk pengambilan keputusan dan pemecahan masalah. Literasi yang baik mendukung keberhasilan akademik dan kesiapan menghadapi tantangan globalisasi dan era digital. Konteks Kehidupan Nyata. Literasi bukan hanya soal | Asesmen Nasional (Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah) | 66.82 | 69.32 | 71.82 | 74.32 | 76.82 | 79.32 | 81.82 | |
| 16 | Skor Kemampuan Numerasi SD | Nilai | Nilai rerata peserta didik berdasarkan kemampuan dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan. | Jumlah skor numerasi siswa dibagi jumlah siswa | Level dasar mampu menyelesaikan masalah sederhana dengan informasi langsung dan eksplisit. Cocok untuk tugas sehari-hari yang tidak terlalu kompleks. Level menengah mampu mengelola masalah dengan beberapa langkah dan menggunakan representasi data yang kompleks. | Asesmen Nasional (Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah) | 55.71 | 58.61 | 61.51 | 64.41 | 67.31 | 70.21 | 73.11 | |
| 17 | Iklim Keamanan SD | Nilai | Tingkat rasa aman dan kenyamanan peserta didik dari hal rasa aman di satuan pendidikan, perundungan, hukuman fisik, pelecehan seksual, dan aktivitas narkoba di lingkungan satuan pendidikan | Nilai rerata iklim keamanan terkait kesejahteraan psikologis, dan rasa aman terhadap perundungan, hukuman fisik, kekerasan seksual, rokok, minuman keras, dan narkoba berdasarkan survei lingkungan belajar | Lingkungan yang aman secara fisik dan emosional dengan sistem disiplin yang adil, akan berdampak positif pada peningkatan prestasi akademik, kehadiran siswa lebih tinggi, penurunan kasus bullying, hubungan interpersonal yang lebih baik | Asesmen Nasional (Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah) | 76.64 | 77.54 | 78.44 | 79.34 | 80.24 | 81.14 | 82.04 | |
| 18 | Iklim Kebinekaan SD | Nilai | Kondisi satuan pendidikan yang menunjukkan adanya sikap dan perilaku kepala satuan pendidikan dan guru dalam menerapkan toleransi agama dan budaya serta komitmen kebangsaan. | Nilai rerata iklim kebhinekaan berdasarkan survei lingkungan belajar | Skor tinggi (90 s.d 100) menunjukkan iklim kebinekaan yang sangat positif di mana siswa dari berbagai latar belakang merasa dihargai dan diterima, praktik inklusi berjalan dengan baik, konflik terkait perbedaan sangat minim, dan adanya kebijakan dan program yang mendukung kebinekaan. Skor sedang (70 sampai dengan 89) mengindikasikan iklim kebinekaan yang cukup baik namun masih memerlukan perbaikan di beberapa aspek tertentu. Skor rendah (kurang dari 70) | Asesmen Nasional (Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah) | 74.26 | 75.26 | 76.26 | 77.26 | 78.26 | 79.26 | 80.26 | |
| 19 | Iklim Inklusivitas SD | Nilai | Iklim inklusivitas menyangkut bagaimana lingkungan satuan pendidikan menyikapi keragaman seperti perbedaan individu, identitas, maupun latar belakang | Nilai rerata iklim inklusivitas meliputi layanan disabilitas, CBI, sikap terhadap disabilitas, dan fasilitas satuan pendidikan disabilitas berdasarkan survei lingkungan belajar | Lingkungan fisik dan sosial yang kondusif berperan besar dalam mendukung proses pembelajaran yang inklusif dan berkualitas di sekolah | Asesmen Nasional (Kementerian Pendidikan Dasar dan | 58.44 | 60.94 | 63.44 | 65.94 | 68.44 | 70.94 | 73.44 | |
| 20 | Persentase pengembangan Bahasa dan Sastra Daerah | % | Bahasa daerah merupakan kekayaan budaya bangsa Indonesia yang berfungsi sebagai alat komunikasi intraetnik dan pendukung bahasa nasional. Menurut Asrif (2018), bahasa daerah menjadi fondasi penting dalam mempertahankan identitas budaya masyarakat lokal. Sastra daerah adalah karya kreatif yang mencerminkan nilai-nilai, filosofi, dan kearifan lokal masyarakat. Bentuknya beragam mulai dari cerita rakyat, pantun, syair, hingga naskah-naskah kuno yang menjadi media pelestarian nilai tradisional. Pengembangan bahasa dan sastra daerah mencakup seluruh upaya pembinaan, pelestarian, dan revitalisasi agar tetap hidup dan berkembang di tengah arus modernisasi dan globalisasi | Jumlah kegiatan pengembangan dibagi jumlah kegiatan bahasa dan sastra di kali 100 (seratus) persen | Persentase tinggi menunjukkan komitmen kuat dalam pelestarian budaya lokal. Contohnya program pengajaran bahasa daerah di sekolah, publikasi karya sastra daerah, dan penggunaan bahasa daerah dalam media massa dan digital. Persentase rendah mengindikasikan risiko erosi bahasa dan budaya lokal akibat dominasi bahasa nasional dan globalisasi. Diperlukan intervensi segera untuk mencegah kepunahan bahasa daerah. | Profil pendidikan dan Perpustakaan daerah | - | - | - | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | |
| 21 | Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal | Persentase | Kurikulum muatan lokal adalah kurikulum yang mengintegrasikan nilai, tradisi, budaya, dan kearifan lokal ke dalam proses pembelajaran di satuan pendidikan untuk menjaga keberagaman budaya Indonesia. Muatan lokal dapat terintegrasi dalam mata pelajaran yang sudah ada atau berupa kegiatan tersendiri yang khusus | Jumlah satuan pendidikan yang telah menerapkan muatan lokal wajib dan pilihan dibagi total satuan pendidikan dikali 100 persen | Persentase tinggi menunjukkan keberhasilan integrasi kearifan lokal dalam pendidikan, memperkuat identitas budaya dan karakter peserta didik. Persentase rendah mengindikasikan perlunya peningkatan pelatihan guru, penyediaan bahan ajar, dan dukungan kebijakan | Profil pendidikan | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 22 | Persentase usulan izin satuan pendidikan yang diterbitkan/diperbaharui | % | Persentase usulan izin satuan pendidikan yang diterbitkan/diperbaharui adalah metrik yang menunjukkan proporsi usulan izin satuan pendidikan yang berhasil mendapatkan persetujuan dari total keseluruhan usulan yang diajukan dalam periode tertentu. Metrik ini dirancang untuk mengukur efektivitas dan efisiensi proses perizinan pendidikan serta mengevaluasi tingkat kepatuhan satuan pendidikan terhadap standar dan persyaratan regulasi yang berlaku. Perhitungan mencakup semua jenis izin pendidikan, termasuk pendirian lembaga baru, perpanjangan izin operasional, perubahan status, perluasan layanan | Jumlah usulan izin yang diterbitkan atau diperbaharui dibagi total usulan izin yang diajukan dikali 100 (seratur) persen | Persentase tinggi (lebih dari 80%) menunjukkan proses perizinan yang efisien dan tingkat kepatuhan yang baik dari satuan pendidikan. Ini berarti sebagian besar lembaga telah memenuhi standar dan persyaratan yang ditetapkan oleh regulasi. Persentase menengah (50 s.d 80%) mengindikasikan adanya ruang untuk perbaikan, baik dalam proses administrasi maupun dalam pemenuhan persyaratan oleh satuan pendidikan. Perlu dilakukan evaluasi untuk mengidentifikasi hambatan yang ada. Persentase rendah ( kurang dari 50%) menandakan adanya masalah serius dalam | Profil pendidikan | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |

METADATA PROGRAM
DINAS PENDIDIKAN

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | DEFINISI | RUMUS PERHITUNGAN | INTERPRETASI | SUMBER DATA | BASELINE 2024 | TARGET | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| *(01)* | *(02)* | | | | | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(07)* | *(09)* | *(11)* | *(13)* | *(15)* |
| Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah | Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah (Nilai) | Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah Rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. | Penilaian dilakukan pada komponen dan sub komponen evaluasi AKIP, setiap sub-komponen dinilai berdasarkan kriteria pemenuhan dokumen, kualitas dan pemanfaatan. Setiap sub-komponen akan dinilai dengan pilihan jawaban AA/A/BB/B/CC/C/D/E | AA (Nilai >90-100) : Sangat Memuaskan<br>A (Nilai >80-90) : Memuaskan<br>BB (Nilai >70-80) : Sangat Baik<br>B (Nilai >60-70) : Baik<br>CC (Nilai 50-60) : Cukup (Memadai)<br>C (Nilai >30-50) : Kurang<br>D (Nilai >0-30) : Sangat Kurang | Dinas Pendidikan | 83.51 | 84.01 | 84.51 | 85.00 | 85.50 | 86.00 | 86.50 | 1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan |
| Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah jenjang Kesetaraan | Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 18 Kesetaraan (%) | Partisipasi anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang mengenyam pendidikan pada pendidikan kesetaraan | Jumlah Siswa Kesetaraan usia 7 (tujuh) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dibagi Jumlah Penduduk yang tidak bersekolah usia 7 (tujuh) sampai dengan 18 Tahun dikali 100 (seratus) persen | Nilai APS yang tinggi menunjukkan akses pendidikan yang luas dan inklusif bagi anak usia sekolah, sementara nilai yang rendah mengindikasikan adanya hambatan struktural maupun sosio-ekonomi yang perlu ditangani | Data Pokok Pendidikan (Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah) dan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Badan Pusat Statistik) | 26.25 | 27.05 | 27.85 | 28.65 | 29.45 | 30.25 | 31.05 | 1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan |
| Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah jenjang PAUD | Angka Partisipasi Sekolah (APS) 5 - 6 PAUD (%) | Partisipasi anak usia 5-6 tahun yang mengenyam pendidikan pada seluruh jenjang pendidikan | Jumlah Peserta Didik usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun dibagi Jumlah Penduduk usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun pada kab/kota yang bersangkutan dikali 100 (seratus) persen | Nilai APS yang tinggi menunjukkan akses pendidikan yang luas dan inklusif bagi anak usia sekolah, sementara nilai yang rendah mengindikasikan adanya hambatan struktural maupun sosio-ekonomi yang perlu ditangani | Survei Sosial Ekonomi Nasional (Badan Pusat Statistik) | 89.98 | 91.52 | 93.06 | 94.60 | 96.14 | 97.68 | 100 | 1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan |
| | Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B (%) | Persentase satuan PAUD yang sudah memperoleh akreditasi minimal B dari keseluruhan jumlah satuan PAUD yang beroperasi di suatu wilayah administratif tertentu (kabupaten/kota, provinsi, atau nasional). | Jumlah Satuan PAUD yang terakreditasi minimal B dibagi Jumlah Satuan PAUD yang sudah diakreditasi di Kota/Kabupaten dikali 100 (seratus) persen | Proporsi tinggi menunjukkan bahwa sebagian besar PAUD di wilayah tersebut telah memenuhi standar nasional pendidikan dan memberikan layanan berkualitas. | Data Hasil Akreditasi dari BAN PDM (Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar, dan Menengah) | 88.13 | 89.31 | 93.32 | 98.66 | 100 | 100 | 100 | 1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan |
| | Proporsi Guru PAUD Formal dengan Kualifikasi S1/D IV (%) | Pendidik PAUD pada satuan pendidikan formal yang telah memiliki kualifikasi minimum S1/D-IV sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Guru dan Dosen. | Jumlah guru PAUD formal berijazah S1/D4 dibagi Jumlah guru PAUD formal di kota/kabupaten di kali 100 (seratus) persen | Proporsi tinggi ( lebih dari 70%) menunjukkan kualitas tenaga pendidik yang baik, berpotensi meningkatkan mutu pembelajaran dan perkembangan anak secara optimal. Proporsi sedang ( antara 40 sampai dengan 70%) memerlukan upaya berkesinambungan untuk meningkatkan kualifikasi guru melalui program beasiswa atau pendidikan lanjutan. Proporsi rendah (kurang dari 40%) mengindikasikan urgensi program peningkatan kualifikasi, rekrutmen guru baru, dan kebijakan khusus pengembangan SDM guru PAUD. | Data Pokok Pendidikan (Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah) | 93.76 | 95.71 | 96.21 | 96.71 | 97.21 | 97.71 | 98.21 | 1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah jenjang SD | Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 12 SD (%) | Partisipasi anak usia 7-12 tahun yang mengenyam pendidikan pada seluruh jenjang pendidikan | Jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 12 (dua belas) tahun yang sedang belajar di satuan pendidikan dibagi dengan jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 12 (dua belas) tahun pada kab/kota yang bersangkutan dikali 100 (seratus) persen | Nilai APS yang tinggi menunjukkan akses pendidikan yang luas dan inklusif bagi anak usia sekolah, sementara nilai yang rendah mengindikasikan adanya hambatan struktural maupun sosio-ekonomi yang perlu ditangani | Survei Sosial Ekonomi Nasional (Badan Pusat Statistik) | 94.84 | 95.34 | 96.09 | 97.34 | 98.84 | 100 | 100 | 1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan |
| | Skor Kemampuan Literasi SD (Nilai) | Nilai rerata peserta didik berdasarkan kemampuan dalam memahami, menggunakan, merefleksi, dan mengevaluasi beragam jenis teks (teks informasional dan teks fiksi). | Jumlah skor literasi siswa dibagi jumlah siswa | Skor literasi yang tinggi menunjukkan kemampuan siswa dalam memahami dan menggunakan informasi secara efektif untuk pengambilan keputusan dan pemecahan masalah. Literasi yang baik mendukung keberhasilan akademik dan kesiapan menghadapi tantangan globalisasi dan era digital. Konteks Kehidupan Nyata. Literasi bukan hanya soal membaca teks, tapi juga kemampuan menghubungkan informasi matematika dengan konteks kehidupan nyata untuk membuat keputusan yang tepat. | Asesmen Nasional (Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah) | 66.82 | 69.32 | 71.82 | 74.32 | 76.82 | 79.32 | 81.82 | 1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan |
| | Skor Kemampuan Numerasi SD (Nilai) | Nilai rerata peserta didik berdasarkan kemampuan dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan. | Jumlah skor numerasi siswa dibagi jumlah siswa | Level dasar mampu menyelesaikan masalah sederhana dengan informasi langsung dan eksplisit. Cocok untuk tugas sehari-hari yang tidak terlalu kompleks. Level menengah mampu mengelola masalah dengan beberapa langkah dan menggunakan representasi data yang kompleks seperti grafik multivariate. Level mahir Mampu memodelkan situasi kompleks, berpikir kritis, dan mengembangkan strategi baru untuk masalah non-rutin. | Asesmen Nasional (Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah) | 55.71 | 58.61 | 61.51 | 64.41 | 67.31 | 70.21 | 73.11 | 1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan |
| | Iklim Keamanan SD (Nilai) | Tingkat rasa aman dan kenyamanan peserta didik dari hal rasa aman di satuan pendidikan, perundungan, hukuman fisik, pelecehan seksual, dan aktivitas narkoba di lingkungan satuan pendidikan | Nilai rerata iklim keamanan terkait kesejahteraan psikologis, dan rasa aman terhadap perundungan, hukuman fisik, kekerasan seksual, rokok, minuman keras, dan narkoba berdasarkan survei lingkungan belajar | Lingkungan yang aman secara fisik dan emosional dengan sistem disiplin yang adil, akan berdampak positif pada peningkatan prestasi akademik, kehadiran siswa lebih tinggi, penurunan kasus bullying, hubungan interpersonal yang lebih baik sehingga dapat menciptakan komunitas pendidikan yang produktif dengan tingkat stres rendah dan motivasi tinggi. | Asesmen Nasional (Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah) | 76.64 | 77.54 | 78.44 | 79.34 | 80.24 | 81.14 | 82.04 | 1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Iklim Kebinekaan SD (Nilai) | Kondisi satuan pendidikan yang menunjukkan adanya sikap dan perilaku kepala satuan pendidikan dan guru dalam menerapkan toleransi agama dan budaya serta komitmen kebangsaan. | Nilai rerata iklim kebhinekaan berdasarkan survei lingkungan belajar | Skor tinggi (90 s.d 100) menunjukkan iklim kebinekaan yang sangat positif di mana siswa dari berbagai latar belakang merasa dihargai dan diterima, praktik inklusi berjalan dengan baik, konflik terkait perbedaan sangat minim, dan adanya kebijakan dan program yang mendukung kebinekaan. Skor sedang (70 sampai dengan 89) mengindikasikan iklim kebinekaan yang cukup baik namun masih memerlukan perbaikan di beberapa aspek tertentu. Skor rendah (kurang dari 70) menandakan adanya masalah signifikan seperti Diskriminasi dan prasangka yang terasa, Bullying berbasis identitas atau perbedaan, Kurangnya penghargaan terhadap keberagaman, Tidak adanya kebijakan inklusi yang memadai. | Asesmen Nasional (Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah) | 74.26 | 75.26 | 76.26 | 77.26 | 78.26 | 79.26 | 80.26 | 1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan |
| | Iklim Inklusivitas SD (Nilai) | Iklim inklusivitas menyangkut bagaimana lingkungan satuan pendidikan menyikapi keragaman seperti perbedaan individu, identitas, maupun latar belakang sosial-budaya | Nilai rerata iklim inklusivitas meliputi layanan disabilitas, CBI, sikap terhadap disabilitas, dan fasilitas satuan pendidikan disabilitas berdasarkan survei lingkungan belajar | Lingkungan fisik dan sosial yang kondusif berperan besar dalam mendukung proses pembelajaran yang inklusif dan berkualitas di sekolah | Asesmen Nasional (Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah) | 58.44 | 60.94 | 63.44 | 65.94 | 68.44 | 70.94 | 73.44 | 1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan |
| Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah jenjang SMP | Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13 - 15 SMP (%) | Partisipasi anak usia 13-15 tahun yang mengenyam pendidikan pada seluruh jenjang pendidikan | Jumlah Siswa usia 13 (tiga belas) sampai dengan 15 (lima belas) tahun dibagi Jumlah Penduduk usia 13 (tiga belas) sampai dengan 15 (lima belas) tahun pada kab/kota yang bersangkutan dikali 100 (seratus) persen | Nilai APS yang tinggi menunjukkan akses pendidikan yang luas dan inklusif bagi anak usia sekolah, sementara nilai yang rendah mengindikasikan adanya hambatan struktural maupun sosio-ekonomi yang perlu ditangani | Survei Sosial Ekonomi Nasional (Badan Pusat Statistik) | 99.14 | 99.29 | 99.54 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan |
| | Skor Kemampuan Literasi SMP (Nilai) | Nilai rerata peserta didik berdasarkan kemampuan dalam memahami, menggunakan, merefleksi, dan mengevaluasi beragam jenis teks (teks informasional dan teks fiksi). | Jumlah skor literasi siswa dibagi jumlah siswa | Skor literasi yang tinggi menunjukkan kemampuan siswa dalam memahami dan menggunakan informasi secara efektif untuk pengambilan keputusan dan pemecahan masalah. Literasi yang baik mendukung keberhasilan akademik dan kesiapan menghadapi tantangan globalisasi dan era digital. Konteks Kehidupan Nyata. Literasi bukan hanya soal membaca teks, tapi juga kemampuan menghubungkan informasi matematika dengan konteks kehidupan nyata untuk membuat keputusan yang tepat. | Asesmen Nasional (Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah) | 79.48 | 80.58 | 81.68 | 82.78 | 83.88 | 84.98 | 86.08 | 1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skor Kemampuan Numerasi SMP (Nilai) | Nilai rerata peserta didik berdasarkan kemampuan dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan. | Jumlah skor numerasi siswa dibagi jumlah siswa | Level dasar mampu menyelesaikan masalah sederhana dengan informasi langsung dan eksplisit. Cocok untuk tugas sehari-hari yang tidak terlalu kompleks. Level menengah mampu mengelola masalah dengan beberapa langkah dan menggunakan representasi data yang kompleks seperti grafik multivariate. Level mahir Mampu memodelkan situasi kompleks, berpikir kritis, dan mengembangkan strategi baru untuk masalah non-rutin. | Asesmen Nasional (Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah) | 67.91 | 69.41 | 70.91 | 72.41 | 73.91 | 75.41 | 76.91 | 1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan |
| Iklim Keamanan SMP (Nilai) | Tingkat rasa aman dan kenyamanan peserta didik dari hal rasa aman di satuan pendidikan, perundungan, hukuman fisik, pelecehan seksual, dan aktivitas narkoba di lingkungan satuan pendidikan | Nilai rerata iklim keamanan terkait kesejahteraan psikologis, dan rasa aman terhadap perundungan, hukuman fisik, kekerasan seksual, rokok, minuman keras, dan narkoba berdasarkan survei lingkungan belajar | Lingkungan yang aman secara fisik dan emosional dengan sistem disiplin yang adil, akan berdampak positif pada peningkatan prestasi akademik, kehadiran siswa lebih tinggi, penurunan kasus bullying, hubungan interpersonal yang lebih baik sehingga dapat menciptakan komunitas pendidikan yang produktif dengan tingkat stres rendah dan motivasi tinggi. | Asesmen Nasional (Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah) | 72.65 | 74.15 | 75.65 | 77.15 | 78.65 | 80.15 | 81.65 | 1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan |
| Iklim Kebinekaan SMP (Nilai) | Kondisi satuan pendidikan yang menunjukkan adanya sikap dan perilaku kepala satuan pendidikan dan guru dalam menerapkan toleransi agama dan budaya serta komitmen kebangsaan. | Nilai rerata iklim kebhinekaan berdasarkan survei lingkungan belajar | Skor tinggi (90 s.d 100) menunjukkan iklim kebinekaan yang sangat positif di mana siswa dari berbagai latar belakang merasa dihargai dan diterima, praktik inklusi berjalan dengan baik, konflik terkait perbedaan sangat minim, dan adanya kebijakan dan program yang mendukung kebinekaan. Skor sedang (70 sampai dengan 89) mengindikasikan iklim kebinekaan yang cukup baik namun masih memerlukan perbaikan di beberapa aspek tertentu. Skor rendah (kurang dari 70) menandakan adanya masalah signifikan seperti Diskriminasi dan prasangka yang terasa, Bullying berbasis identitas atau perbedaan, Kurangnya penghargaan terhadap keberagaman, Tidak adanya kebijakan inklusi yang memadai. | Asesmen Nasional (Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah) | 72.30 | 73.30 | 74.30 | 75.30 | 76.30 | 77.30 | 78.30 | 1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan |
| Iklim Inklusivitas SMP (Nilai) | Iklim inklusivitas menyangkut bagaimana lingkungan satuan pendidikan menyikapi keragaman seperti perbedaan individu, identitas, maupun latar belakang sosial-budaya | Nilai rerata iklim inklusivitas meliputi layanan disabilitas, CBI, sikap terhadap disabilitas, dan fasilitas satuan pendidikan disabilitas berdasarkan survei lingkungan belajar | Lingkungan fisik dan sosial yang kondusif berperan besar dalam mendukung proses pembelajaran yang inklusif dan berkualitas di sekolah | Asesmen Nasional (Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah) | 58.56 | 60.96 | 63.36 | 65.76 | 68.16 | 70.56 | 72.96 | 1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan | Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal (Persentase) | Kurikulum muatan lokal adalah kurikulum yang mengintegrasikan nilai, tradisi, budaya, dan kearifan lokal ke dalam proses pembelajaran di satuan pendidikan untuk menjaga keberagaman budaya Indonesia. Muatan lokal dapat terintegrasi dalam mata pelajaran yang sudah ada atau berupa kegiatan tersendiri yang khusus mengajarkan nilai-nilai dan keterampilan lokal | Jumlah satuan pendidikan yang telah menerapkan muatan lokal wajib dan pilihan dibagi total satuan pendidikan dikali 100 persen | Persentase tinggi menunjukkan keberhasilan integrasi kearifan lokal dalam pendidikan, memperkuat identitas budaya dan karakter peserta didik. Persentase rendah mengindikasikan perlunya peningkatan pelatihan guru, penyediaan bahan ajar, dan dukungan kebijakan | Profil pendidikan | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan |
| Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan | Indeks Pemerataan Guru (Indeks) | Indeks Pemerataan Guru adalah instrumen pengukuran yang digunakan untuk menilai tingkat kesetaraan dalam distribusi guru | Jumlah sekolah jenjang pendidikan Negeri yang telah terpenuhi PTKnya dibagi jumlah sekolah keseluruhan jenjang pendidikan Negeri dikali 100 (seratus) persen | Semakin jauh nilai indeks dari angka 100, semakin besar ketimpangan yang terjadi. | Profil Pendidikan | 26.90 | 27.35 | 27.80 | 28.22 | 28.63 | 29.05 | 29.46 | 1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan |
| Meningkatnya kualitas dan distribusi institusi pendidikan | Persentase usulan izin satuan pendidikan yang diterbitkan/diperbaharui (%) | Persentase usulan izin satuan pendidikan yang diterbitkan/diperbaharui adalah metrik yang menunjukkan proporsi usulan izin satuan pendidikan yang berhasil mendapatkan persetujuan dari total keseluruhan usulan yang diajukan dalam periode tertentu. Metrik ini dirancang untuk mengukur efektivitas dan efisiensi proses perizinan pendidikan serta mengevaluasi tingkat kepatuhan satuan pendidikan terhadap standar dan persyaratan regulasi yang berlaku. Perhitungan mencakup semua jenis izin pendidikan, termasuk pendirian lembaga baru, perpanjangan izin operasional, perubahan status, perluasan layanan pendidikan, dan bentuk perizinan lainnya yang diatur dalam perundang-undangan pendidikan Indonesia. | Jumlah usulan izin yang diterbitkan atau diperbaharui dibagi total usulan izin yang diajukan dikali 100 (seratur) persen | Persentase tinggi (lebih dari 80%) menunjukkan proses perizinan yang efisien dan tingkat kepatuhan yang baik dari satuan pendidikan. Ini berarti sebagian besar lembaga telah memenuhi standar dan persyaratan yang ditetapkan oleh regulasi. Persentase menengah (50 s.d 80%) mengindikasikan adanya ruang untuk perbaikan, baik dalam proses administrasi maupun dalam pemenuhan persyaratan oleh satuan pendidikan. Perlu dilakukan evaluasi untuk mengidentifikasi hambatan yang ada. Persentase rendah ( kurang dari 50%) menandakan adanya masalah serius dalam sistem perizinan atau ketidakpatuhan yang signifikan. Diperlukan intervensi segera untuk menganalisis akar masalah dan melakukan perbaikan menyeluruh. | Profil pendidikan | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan |
| Terlestarikannya bahasa dan sastra daerah | Persentase pengembangan Bahasa dan Sastra Daerah (%) | Bahasa daerah merupakan kekayaan budaya bangsa Indonesia yang berfungsi sebagai alat komunikasi intraetnik dan pendukung bahasa nasional. Menurut Asrif (2018), bahasa daerah menjadi fondasi penting dalam mempertahankan identitas budaya masyarakat lokal. Sastra daerah adalah karya kreatif yang mencerminkan nilai-nilai, filosofi, dan kearifan lokal masyarakat. Bentuknya beragam mulai dari cerita rakyat, pantun, syair, hingga naskah-naskah kuno yang menjadi media pelestarian nilai tradisional. Pengembangan bahasa dan sastra daerah mencakup seluruh upaya pembinaan, pelestarian, dan revitalisasi agar tetap hidup dan berkembang di tengah arus modernisasi dan globalisasi. Ini meliputi dokumentasi, penelitian, pengajaran, dan promosi dalam | Jumlah kegiatan pengembangan dibagi jumlah kegiatan bahasa dan sastra di kali 100 (seratus) persen | Persentase tinggi menunjukkan komitmen kuat dalam pelestarian budaya lokal. Contohnya program pengajaran bahasa daerah di sekolah, publikasi karya sastra daerah, dan penggunaan bahasa daerah dalam media massa dan digital. Persentase rendah mengindikasikan risiko erosi bahasa dan budaya lokal akibat dominasi bahasa nasional dan globalisasi. Diperlukan intervensi segera untuk mencegah kepunahan bahasa daerah. | Profil pendidikan dan Perpustakaan daerah | - | - | - | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meningkatnya pendidikan muatan lokal | Persentase Implementasi Pendidikan Berbasis Budaya dengan Kategori Mandiri Budaya (%) | Pendidikan berbasis budaya adalah proses pembelajaran yang mengintegrasikan nilai-nilai, kearifan lokal, dan tradisi budaya dalam kurikulum dan praktik pendidikan sehari-hari. Pendekatan ini menekankan pentingnya melestarikan dan menghidupkan kembali budaya lokal melalui sistem pendidikan formal. Mandiri Budaya menunjukkan tingkat kemandirian lembaga pendidikan dalam mengembangkan dan menerapkan nilai-nilai budaya lokal secara aktif dan berkelanjutan tanpa ketergantungan eksternal. Lembaga pendidikan dengan kategori ini mampu menciptakan ekosistem pembelajaran berbasis budaya yang berkelanjutan | Jumlah indikator terpenuhi dibagi total indikator penilaian dikali 100 (seratur) persen | Persentase implementasi yang tinggi menunjukkan keberhasilan pelestarian budaya sekaligus penguatan karakter peserta didik sesuai dengan nilai-nilai luhur budaya Indonesia | Profil Pendidikan dan Dinas Kebudayaan | - | - | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan |
| | Persentase implementasi pendidikan berbasis budaya dengan kategori sangat baik (%) | Pendidikan berbasis budaya adalah proses pembelajaran yang mengintegrasikan nilai-nilai, kearifan lokal, dan tradisi budaya dalam kurikulum dan praktik pendidikan sehari-hari. Pendekatan ini menekankan pentingnya melestarikan dan menghidupkan kembali budaya lokal melalui sistem pendidikan formal. Mandiri Budaya menunjukkan tingkat kemandirian lembaga pendidikan dalam mengembangkan dan menerapkan nilai-nilai budaya lokal secara aktif dan berkelanjutan tanpa ketergantungan eksternal. Lembaga pendidikan dengan kategori ini mampu menciptakan ekosistem pembelajaran berbasis budaya yang berkelanjutan. | Jumlah indikator terpenuhi dibagi total indikator penilaian dikali 100 (seratur) persen | Implementasi pendidikan berbasis budaya dengan kategori sangat baik memiliki karakteristik dan dampak yang mendalam yaitu Nilai-nilai budaya telah terinternalisasi secara optimal dalam proses pembelajaran dan perilaku siswa sehari-hari. Siswa tidak hanya memahami tetapi juga menerapkan nilai-nilai budaya dan Peningkatan karakter, rasa tanggung jawab, dan kebanggaan terhadap identitas budaya lokal. Siswa menunjukkan sikap hormat terhadap tradisi dan nilai-nilai leluhur. | Profil Pendidikan dan Dinas Kebudayaan | - | - | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan |
| Peningkatan kualitas layanan publik | Persentase Capaian Implementasi Inovasi Layanan Publik (%) | SIGAP (Senyum, Informatif, Gesit, Akuntabel, Profesional) merupakan pedoman perilaku yang menjadi fondasi pelayanan publik di lingkungan Dinas Pendidikan. Budaya kerja ini dirancang untuk memastikan setiap staf memberikan layanan berkualitas, berintegritas, dan berfokus pada kepuasan masyarakat. Melalui implementasi nilai-nilai SIGAP, Dinas Pendidikan berkomitmen untuk menjadi institusi pelayanan publik yang dapat diandalkan dan dipercaya oleh seluruh pemangku kepentingan di sektor pendidikan. | Jumlah nilai indikator dibagi 5 (lima) dikali 100 (seratus) persen | Skor 85-100% Layanan Prima, menunjukkan standar layanan sangat baik dengan tingkat kepuasan masyarakat yang tinggi. Layanan telah memenuhi atau melampaui ekspektasi pengguna dalam semua aspek SIGAP. Skor 70-84% Layanan Baik, layanan sudah memadai namun masih memerlukan peningkatan pada beberapa aspek tertentu. Terdapat 1-2 dimensi SIGAP yang perlu perbaikan khusus. Skor <70% Perlu Perbaikan Signifikan, menandakan adanya masalah serius dalam kualitas layanan yang memerlukan intervensi menyeluruh dan segera. Program perbaikan dan pelatihan intensif diperlukan. | Survei Kepuasan Masyarakat Dinas Pendidikan | - | - | - | 97 | 98 | 99 | 100 | 1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan |